

LAPORAN PEREKONOMIAN Provinsi Jawa Timur

FEBRUARI 2026



LAPORAN PEREKONOMIAN Provinsi Jawa Timur

FEBRUARI 2026

Salinan Publikasi ini dapat diperoleh dengan menghubungi :

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur
Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi

Jl. Pahlawan No.105 Surabaya Jawa Timur 60175

Telp. : 031-3520011

Faksimili : 031-3520025

E-mail : KPwJatim-KPKP@bi.go.id

Publikasi ini dapat diakses secara online pada :

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Timur-Februari-2026.aspx>



VISI Bank Indonesia

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju



MISI Bank Indonesia

1. Mencapai stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang Rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerjasama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Kata Pengantar

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Februari 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Perekonomian yang diterbitkan triwulanan ini disusun sebagai upaya memenuhi kebutuhan informasi bagi mitra utama dan masyarakat di Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai pemenuhan akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia. Laporan ini mencakup mengenai perkembangan ekonomi makroregional, keuangan pemerintah, inflasi daerah, pembiayaan daerah dan pengembangan akses keuangan serta UMKM, penyelenggaraan sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat, serta prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi Jawa Timur.

Perekonomian Jawa Timur pada triwulan IV 2025 tumbuh lebih tinggi dan melanjutkan momentum peningkatan. Pada triwulan laporan, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,85% (yoy), setelah pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,22% (yoy). Perbaikan perekonomian Jawa Timur didorong oleh akselerasi konsumsi rumah tangga dan *net* ekspor, serta membaiknya konsumsi pemerintah. Kenaikan konsumsi rumah tangga seiring aktivitas masyarakat selama momen HBKN Natal dan Tahun Baru (Nataru), tecermin dari peningkatan transaksi perdagangan *e-commerce*. Sementara, kenaikan *net* ekspor didorong oleh peningkatan ekspor dalam negeri melalui upaya penguatan perdagangan antardaerah. Selain itu, peningkatan ekspor turut disokong oleh pertumbuhan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur dan ekspor luar negeri (LN) komoditas utama. Lebih lanjut, perbaikan kinerja konsumsi pemerintah ditopang oleh belanja pegawai, dan belanja bantuan sosial (Bansos). Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja perekonomian yang solid terutama didukung oleh peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, serta Akomodasi Makanan dan Minuman. Dengan perkembangan tersebut, perekonomian Jawa Timur secara keseluruhan tahun 2025 tumbuh lebih tinggi dari tahun 2024 yang ditunjang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan *net* ekspor.

Inflasi Provinsi Jawa Timur pada akhir triwulan IV 2025 tercatat sebesar 2,93% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan III 2025 sebesar 2,53% (yoy). Tekanan inflasi tersebut utamanya sejalan dengan kenaikan harga komoditas hortikultura akibat terbatasnya pasokan dari wilayah sentra produksi serta berlanjutnya kenaikan harga emas perhiasan domestik. Level inflasi pada triwulan laporan masih berada dalam rentang sasaran target $2,5\% \pm 1\%$. Kondisi ini tidak lepas

dari upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID se-Jawa Timur melalui sinergi implementasi strategi 4K TPIP yang terdiri dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Ketahanan sektor korporasi dan rumah tangga Jawa Timur pada triwulan IV 2025 terpantau tetap solid. Hal ini tecermin dari penyaluran kredit perbankan yang melanjutkan pertumbuhan positif, dengan kualitas kredit yang terjaga. Lebih lanjut, risiko kredit terpantau masih terjaga dalam batas aman, tecermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 3,23%, menurun dari triwulan sebelumnya yang tercatat 3,37%. Dari sisi permodalan, tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terpantau meningkat ke level 31,38%, menunjukkan bahwa perbankan di Jawa Timur memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi potensi risiko ke depan di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Pada tahun 2026, perekonomian Jawa Timur diperkirakan tetap kuat dengan level pertumbuhan pada kisaran 4,9-5,7% (yoy). Faktor pendukung pertumbuhan adalah investasi, serta permintaan domestik dan eksternal yang tetap meningkat sejalan dengan prospek perekonomian mitra dagang utama Jawa Timur. Sementara itu, inflasi Jawa Timur diperkirakan juga tetap terjaga dalam kisaran sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$, didukung oleh upaya pengendalian inflasi TPID Provinsi Jawa Timur.

Dalam penyusunan laporan ini, Bank Indonesia memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, antara lain Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Timur, perbankan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, asosiasi pelaku usaha di wilayah Jawa Timur, serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Kediri, dan Jember. Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama dan koordinasi dalam mendukung Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semua dalam memberikan kontribusi terbaik bagi Provinsi Jawa Timur, serta bangsa dan negara.

Surabaya, Februari 2026

**Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Jawa Timur**
ttd.

Ibrahim
Direktur Eksekutif

Daftar Isi

Visi dan Misi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Grafik

Daftar Tabel

Ringkasan Eksekutif

Tabel Indikator Makro

01

Perkembangan Ekonomi Makro Regional

1.1.	Kondisi Umum Perekonomian Jawa Timur	2
1.2.	PDRB Sisi Pengeluaran	4
1.2.1.	Konsumsi	4
1.2.2.	Investasi	7
1.2.3.	Ekspor – Impor	9
1.3.	PDRB Sisi Lapangan Usaha	12
1.3.1.	Industri Pengolahan	12
1.3.2.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13
1.3.3.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14
1.3.4.	Konstruksi	16
1.3.5.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17
Boks 1:	Mempercepat Konektivitas sebagai Katalisator Ekonomi: Pengembangan Jaringan Jalan di Wilayah Jawa Timur	19
Boks 2:	Studi Perkembangan, Pola Spasial, dan Determinan Investasi di Provinsi Jawa Timur	23

02

Keuangan Pemerintah

2.1.	Gambaran Umum	30
2.2.	APBN di Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	31
2.2.1.	Pagu Belanja APBN di Provinsi Jawa Timur	32
2.2.2.	Realisasi Belanja APBN di Provinsi Jawa Timur	33
2.3.	APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	35
2.3.1.	Pendapatan Daerah APBD Provinsi Jawa Timur	35
2.3.2.	Belanja Daerah APBD Provinsi Jawa Timur	38

2.4.	APBD 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur	40
2.4.1.	Pendapatan Daerah APBD Kabupaten/Kota	40
2.4.2.	Belanja Daerah APBD 38 Kabupaten/Kota	42

03

Perkembangan Inflasi

3.1.	Kondisi Umum	48
3.2.	Kinerja Inflasi Jawa Timur	48
3.2.1.	Perkembangan Inflasi Triwulan IV 2025	48
3.2.2.	Analisis Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa	49
3.3.	Analisis Inflasi Spasial Jawa Timur	54
3.4.	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	55
3.5.	Tracking Inflasi Triwulan I 2026	57
Boks 3:	Studi Konseptual Integrasi Dinamika Harga, Struktur Permintaan, dan Keseimbangan Pasokan Pangan Jawa Timur	59
Boks 4:	Perkembangan Harga Komoditas Pangan Strategis Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idulfitri 1447 Hijriah	63
Boks 5:	Model Bisnis Korporasi Petani Beras: Strategi Penguatan Kesejahteraan Petani, Ketahanan Pangan, dan Stabilitas Harga di Jawa Timur	66

04

Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

4.1.	Kondisi Umum	74
4.2.	Pembiayaan Daerah di Jawa Timur	74
4.2.1.	Dana Pihak Ketiga	75
4.2.2.	Penyaluran Kredit	76
4.2.3.	Loan To Deposit Ratio (LDR)	77
4.3.	Perkembangan Kinerja Korporasi	77
4.3.1.	Kinerja Umum Korporasi	77
4.3.2.	Eksposur Perbankan Pada Sektor Korporasi	78
4.4.	Perkembangan Kinerja Rumah Tangga	79
4.4.1.	Kinerja Umum Rumah Tangga	79
4.4.2.	Eksposur Perbankan Pada Rumah Tangga	79
4.5.	Perkembangan Akses Keuangan dan UMKM	82
4.5.1.	Eksposur Perbankan Pada UMKM	82
4.5.2.	Perkembangan Program Akses Keuangan dan UMKM	85

05

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

5.1.	Kondisi Umum	92
5.2.	Perkembangan Sistem Pembayaran di Jawa Timur	92
5.2.1.	Aliran Uang Masuk/Keluar (Cash Inflow/Outflow)	92
5.2.2.	Sistem Pembayaran	94
5.3.	Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran	99
5.3.1.	Penanganan Uang Palsu	99
5.3.2.	Penyediaan Uang Rupiah	100
5.3.3.	Pengembangan Layanan Keuangan Nontunai	101

06

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

6.1.	Gambaran Umum	108
6.2.	Ketenagakerjaan	108
6.2.1.	Perkembangan Ketenagakerjaan Jawa Timur	108
6.3.	Kesejahteraan	112
6.4.	Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan	114
6.4.1.	Kesejahteraan Petani	114
6.4.2.	Kesejahteraan Nelayan	116
6.4.3.	Kesejahteraan Peternak	116

07

Prospek Perekonomian Daerah

7.1.	Prospek Ekonomi Jawa Timur Tahun 2026	120
7.1.1.	Sisi Pengeluaran	120
7.1.2.	Sisi Lapangan Usaha	121
7.2.	Prospek Inflasi Jawa Timur Tahun 2026	123
Boks 6:	Dinamika Komoditas Tembakau sebagai Penggerak Perekonomian Jawa Timur	128
Boks 7:	Penguatan Konektivitas Pariwisata Menambah Daya Ungkit Ekonomi Jawa Timur	131

Daftar Grafik

01

Perkembangan Ekonomi Makro Regional

Grafik 1.1	Perekonomian Jawa Timur, Wilayah Jawa, Nasional	2
Grafik 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Jawa	2
Grafik 1.3	Pertumbuhan Konsumsi Swasta, Rumah Tangga dan LNPRT	5
Grafik 1.4	Keyakinan Konsumen dan Kondisi Ekonomi Saat Ini	5
Grafik 1.5	Konsumsi Ritel Jawa Timur	5
Grafik 1.6	Perkembangan Kinerja LU Perdagangan dan LU Akomodasi Makanan dan Minuman	5
Grafik 1.7	Pertumbuhan Transaksi APMK	5
Grafik 1.8	Transaksi QRIS, Uang Elektronik, BI-FAST	6
Grafik 1.9	Perkembangan Nominal Transaksi E-Commerce Lokasi Pembeli Jawa Timur	6
Grafik 1.10	Pertumbuhan DPK Perbankan Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Komponen, Triwulan III 2025 – Triwulan IV 2025	6
Grafik 1.11	Pertumbuhan DPK Perbankan Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Nilai, Triwulan III 2025 – Triwulan IV 2025	6
Grafik 1.12	Perkembangan Realisasi Belanja Pegawai APBN di Jawa Timur	7
Grafik 1.13	Perkembangan Realisasi Belanja Barang Jasa APBD Se – Jawa Timur	7
Grafik 1.14	Perkembangan Realisasi Belanja Pegawai APBN di Jawa Timur	7
Grafik 1.15	Pertumbuhan Investasi Jawa Timur	8
Grafik 1.16	Kondisi Investasi Dunia Usaha Jawa Timur	8
Grafik 1.17	Pertumbuhan Konsumsi Semen dan Impor Barang Pendukung Konstruksi Jawa Timur	8
Grafik 1.18	Pertumbuhan Komponen Impor Barang Modal Jawa Timur	8
Grafik 1.19	Pertumbuhan Kredit Investasi Jawa Timur	8
Grafik 1.20	Neraca Perdagangan Jawa Timur	9
Grafik 1.21	Pertumbuhan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Melalui Pelabuhan Tanjung Perak	10
Grafik 1.22	Realisasi Misi Dagang	10
Grafik 1.23	Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Jawa Timur Melalui Bandara Juanda	10
Grafik 1.24	Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Negara Tujuan Utama	10

Grafik 1.25	Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Komoditas Utama	10
Grafik 1.26	Pertumbuhan Bongkar Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Melalui Pelabuhan Tanjung Perak	11
Grafik 1.27	Pertumbuhan Impor LN Jawa Timur	11
Grafik 1.28	Kondisi Penjualan Domestik dan Ekspor LU Industri Pengolahan Jawa Timur	12
Grafik 1.29	Perkembangan Ekspor Komoditas Industri Pengolahan (Makanan, Kimia, Logam, Kertas)	12
Grafik 1.30	Perkembangan Konsumsi Listrik Industri	12
Grafik 1.31	Perkembangan Impor Provinsi Mitra Dagang Jawa Timur	12
Grafik 1.32	Perkembangan Transaksi Melalui Real Time Gross Settlement (RTGS)	13
Grafik 1.33	Perkembangan Penjualan LU Perdagangan	13
Grafik 1.34	Perkembangan Nominal Transaksi E-Commerce Lokasi Pembeli Jawa Timur	14
Grafik 1.35	Perkembangan Nominal Transaksi E-Commerce Lokasi Penjual Jawa Timur	14
Grafik 1.36	Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Mitra Dagang Jawa Timur	14
Grafik 1.37	Perkembangan Penjualan Kendaraan	14
Grafik 1.38	Perkembangan Kondisi Usaha LU Pertanian	15
Grafik 1.39	Pertumbuhan Produksi Padi Jawa Timur	15
Grafik 1.40	Indeks El Nino dan La Nina	15
Grafik 1.41	Pertumbuhan Produksi Bawang Merah dan Cabai Besar Jawa Timur	15
Grafik 1.42	Realisasi Kegiatan Usaha LU Konstruksi	16
Grafik 1.43	Perkembangan Konsumsi Semen	17
Grafik 1.44	Perkembangan Penjualan Eceran Berdasarkan Komponen	17
Grafik 1.45	Perkembangan Survei Harga Properti Residensial Pasar Primer	17
Grafik 1.46	Perkembangan Kredit Investasi LU Konstruksi	17
Grafik 1.47	Pertumbuhan Penjualan Komponen Makanan Minuman dan Budaya Rekreasi	17
Grafik 1.48	Perkembangan SPPG yang Telah Beroperasi	18
Grafik 1.49	Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	18
Grafik 1.50	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara Tujuan Wisata (Kota Batu, Banyuwangi)	18

02

Keuangan Pemerintah

Grafik 2.1	Postur Anggaran Belanja K/L Tahun 2021-2025	32
Grafik 2.2	Postur Anggaran Belanja TKD Tahun 2023-2025	32
Grafik 2.3	Alokasi DBH Jawa Timur Tahun 2024-2025	33

Grafik 2.4	Postur Anggaran Belanja APBN Berdasarkan Fungsi 2023-2025	33
Grafik 2.5	Pertumbuhan Realisasi Belanja K/L Triwulan III dan IV 2025 (Triwulanan)	33
Grafik 2.6	Pertumbuhan Realisasi Belanja K/L tahun 2024-2025 (Tahunan)	34
Grafik 2.7	Rincian Belanja Barang Tahun 2024-2025	34
Grafik 2.8	Rincian Belanja Modal Tahun 2024-2025	34
Grafik 2.9	Pertumbuhan Realisasi Belanja TKD triwulan III dan IV 2025 (Triwulanan)	34
Grafik 2.10	Pertumbuhan Realisasi Belanja TKD tahun 2024-2025 (Tahunan)	34
Grafik 2.11	Realisasi Belanja APBN Tahun 2024-2025 Berdasarkan Fungsi	35
Grafik 2.12	Komposisi Realisasi Belanja APBN Tahun 2025	35
Grafik 2.13	Rincian Penerimaan Pajak 2024-2025	36
Grafik 2.14	Perkembangan DOF Provinsi Jawa Timur	36
Grafik 2.15	Realisasi Pendapatan Daerah 2021-2025	37
Grafik 2.16	Realisasi PAD 2021-2025	37
Grafik 2.17	Realisasi Pajak Daerah 2024-2025	37
Grafik 2.18	Realisasi Retribusi Daerah 2024-2025	37
Grafik 2.19	Anggaran Belanja APBD Provinsi Jawa Timur 2021-2025	38
Grafik 2.20	Postur Anggaran Belanja APBD Provinsi Jawa Timur 2020-2025	38
Grafik 2.21	Pertumbuhan Realisasi Belanja Triwulan III & IV 2025 (Triwulanan)	39
Grafik 2.22	Anggaran Belanja Modal APBD Provinsi Jawa Timur 2020-2025	39
Grafik 2.23	Rincian Belanja Barang 2024-2025	39
Grafik 2.24	Rincian Belanja Modal 2024-2025	39
Grafik 2.25	DOF Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2024-2025 (berdasarkan anggaran)	40
Grafik 2.26	Realisasi PAD 2023-2025	41
Grafik 2.27	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah 2024-2025 (triwulanan)	41
Grafik 2.28	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2025	41
Grafik 2.29	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2025	42
Grafik 2.30	Pertumbuhan Anggaran Belanja Daerah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2024-2025	42
Grafik 2.31	Pertumbuhan realisasi Belanja triwulan III & IV 2025 (triwulanan)	43
Grafik 2.32	Anggaran Belanja Modal APBD Provinsi Jawa Timur 2024-2025	44
Grafik 2.33	Persentase Realisasi Belanja Daerah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2025	44
Grafik 2.34	Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2025	44

03

Perkembangan Inflasi

Grafik 3.1	Perkembangan Inflasi Jawa Timur dan Nasional (yoy)	48
Grafik 3.2	Inflasi Provinsi di Jawa Triwulan IV 2025 (yoy)	48
Grafik 3.3	Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	50
Grafik 3.4	Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	50
Grafik 3.5	Perkembangan Produksi dan Harga Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, serta HPP Jagung	51
Grafik 3.6	Perkembangan Produksi dan Harga Bawang Merah di Jawa Timur	51
Grafik 3.7	Perkembangan Produksi dan Harga Cabai Rawit di Jawa Timur	51
Grafik 3.8	Perkembangan Produksi dan Harga Cabai Merah di Jawa Timur	51
Grafik 3.9	Perkembangan Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	52
Grafik 3.10	Perkembangan Rerata Harga Emas Global dan Emas Perhiasan Domestik	52
Grafik 3.11	Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	52
Grafik 3.12	Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi	53
Grafik 3.13	Perkembangan Jumlah Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang Domestik di Bandara Juanda, Surabaya	53
Grafik 3.14	Perkembangan Harga Avtur di Bandara Juanda Surabaya	53
Grafik 3.15	Perkembangan Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	54
Grafik 3.16	Capaian Inflasi 11 Kab/Kota IHK di Jawa Timur (%yoy)	54

04

Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Grafik 4.1	Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan di Jawa Timur	74
Grafik 4.2	Perkembangan Pangsa Kepemilikan Aset Perbankan	74
Grafik 4.3	Perkembangan Pertumbuhan DPK Bank Umum	75
Grafik 4.4	Perkembangan Rasio CASA Bank Umum	75
Grafik 4.5	Perkembangan Pertumbuhan Penyaluran Kredit Bank Umum Berdasarkan Lokasi Proyek	76
Grafik 4.6	Perkembangan NPL Berdasarkan LU Utama	76

Grafik 4.7	Perkembangan BI <i>Rate</i> dan Suku Bunga Bank Tertimbang	77	Grafik 5.4	Total Transaksi Sistem Pembayaran di Jawa Timur	94
Grafik 4.8	Perkembangan Rasio NPL Bank Umum	77	Grafik 5.5	Komposisi Sistem Pembayaran Jawa Timur Triwulan IV 2025	94
Grafik 4.9	Perkembangan <i>Loan at Risk</i> (LAR) Bank Umum	77	Grafik 5.6	Transaksi Sistem Pembayaran Jawa Timur Melalui Tarik/Setor Tunai	95
Grafik 4.10	Perkembangan <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) Bank Umum	77	Grafik 5.7	Pertumbuhan Transaksi Sistem Pembayaran Tunai Melalui APMK dan UE	95
Grafik 4.11	Perkembangan Pertumbuhan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis	78	Grafik 5.8	Nominal Transaksi Sistem Pembayaran Nontunai di Jawa Timur Untuk Pembelian dan Pembayaran	95
Grafik 4.12	Perkembangan Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Utama Jawa Timur	78	Grafik 5.9	Pertumbuhan Volume Transaksi Sistem Pembayaran Nontunai melalui APMK, UE, dan QRIS	95
Grafik 4.13	Perkembangan Rasio NPL Kredit Korporasi	78	Grafik 5.10	Nominal Transaksi Sistem Pembayaran melalui Transfer	96
Grafik 4.14	Pertumbuhan DPK Korporasi	79	Grafik 5.11	Pertumbuhan Volume Transaksi Transfer melalui APMK, UE, SKNBI, RTGS, dan BI-FAST	96
Grafik 4.15	Perkembangan Suku Bunga Tertimbang DPK Korporasi	79	Grafik 5.12	Perkembangan Nominal Transaksi RTGS di Jawa Timur	96
Grafik 4.16	Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga	80	Grafik 5.13	Perkembangan Rata-rata Transaksi RTGS Jawa Timur	96
Grafik 4.17	Pangsa Kredit RT Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kredit	80	Grafik 5.14	Komposisi Kinerja RTGS Jawa Timur	96
Grafik 4.18	Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga KPR, KPA dan KKB	81	Grafik 5.15	Pertumbuhan Transaksi BI-RTGS Per Wilayah Kantor Bank Indonesia	96
Grafik 4.19	Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga KKB	81	Grafik 5.16	Perkembangan Kliring Jawa Timur	97
Grafik 4.20	Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga Kredit Multiguna	82	Grafik 5.17	Transaksi Kliring Spasial Jawa Timur	97
Grafik 4.21	Perkembangan Pertumbuhan DPK RT	82	Grafik 5.18	Perkembangan Nominal Transaksi BI-Fast di Jawa Timur	97
Grafik 4.22	Perkembangan Suku Bunga Tertimbang DPK RT	82	Grafik 5.19	Perkembangan Volume Transaksi BI-Fast di Jawa Timur	97
Grafik 4.23	<i>Share</i> Kredit UMKM Terhadap Total Kredit di Jawa Timur	83	Grafik 5.20	Perkembangan Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	98
Grafik 4.24	Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM Perbankan di Jawa Timur	83	Grafik 5.21	Perkembangan Jumlah Instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	98
Grafik 4.25	Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Sektoral	84	Grafik 5.22	Penggunaan Kartu ATM/Debit	98
Grafik 4.26	Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM Sektoral	84	Grafik 5.23	Penggunaan Kartu Kredit	98
Grafik 4.27	Perkembangan NPL dan Suku Bunga Tertimbang Kredit UMKM	84	Grafik 5.24	Pangsa Nominal Transaksi Kartu Debit	98
Grafik 4.28	Proporsi Penyaluran Kredit UMKM Terbesar di Kabupaten/Kota di Jawa Timur	84	Grafik 5.25	Pangsa Nominal Transaksi Kartu Kredit	98
Grafik 4.29	Pertumbuhan Penyaluran Kredit UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Jawa Timur	84	Grafik 5.26	Perkembangan Transaksi Uang Elektronik	99
			Grafik 5.27	Perkembangan Volume Uang Elektronik	99
			Grafik 5.28	Perkembangan UKA di Jawa Timur	99
			Grafik 5.29	Komposisi Penjualan & Pembelian UKA Berdasarkan Mata Uang Triwulan Pelaporan	99
			Grafik 5.30	Nominal Pemenuhan ULE Berdasarkan Jenis	100
			Grafik 5.31	Pemenuhan ULE Secara Spasial	100
			Grafik 5.32	Nominal Transaksi Penukaran	100
			Grafik 5.33	Aktivitas Kas Keliling Jawa Timur	100
			Grafik 5.34	Nominal Transaksi Kas Titipan	100
			Grafik 5.35	Perkembangan Nominal Transaksi QRIS	101

05

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Grafik 5.1	Perkembangan <i>Inflow-Outflow</i> Uang Kartal	93
Grafik 5.2	Perkembangan <i>Inflow-Outflow</i> Uang Kartal Secara Spasial	93
Grafik 5.3	Perkembangan Rasio UTLE terhadap <i>Inflow</i> Jawa Timur	93

Grafik 5.36	Perkembangan Volume Transaksi QRIS	101
Grafik 5.37	Perkembangan <i>Merchant</i> QRIS per Skala Usaha	101
Grafik 5.38	<i>Merchant</i> QRIS Spasial di Jawa Timur	101
Grafik 5.39	Perkembangan Pengguna QRIS	101
Grafik 5.40	Pengguna QRIS Spasial Jawa Timur	102
Grafik 5.41	Penerima Program Sembako di Jawa Timur	103
Grafik 5.42	Penyaluran Program Sembako di Jawa Timur	103
Grafik 5.43	Perkembangan Penyaluran Program Sembako Spasial Jawa Timur	103
Grafik 5.44	Jumlah Penerima PKH di Jawa Timur	103
Grafik 5.45	Penyaluran Program PKH di Jawa Timur	103
Grafik 5.46	Penyaluran Program PKH Spasial di Jawa Timur	104
Grafik 5.47	Perkembangan rata-rata Indeks ETPD 39 OPD se-Jawa Timur	104
Grafik 5.48	Indeks ETPD spasial Jawa Timur Beserta Aspek Penilaiannya	105

06

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Grafik 6.1	Jumlah Tenaga Kerja LU Utama	109
Grafik 6.2	Pangsa Tenaga Kerja Sektoral	109
Grafik 6.3	Penyerapan Tenaga Kerja Formal-Informal	109
Grafik 6.4	Komposisi Tenaga Kerja Formal-Informal	109
Grafik 6.5	Penyerapan Tenaga Kerja Formal-Informal secara sektor (berdasarkan Persentase)	110
Grafik 6.6	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	111
Grafik 6.7	Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	111
Grafik 6.8	Komposisi TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan	111
Grafik 6.9	Kondisi Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha	112
Grafik 6.10	Jumlah Penduduk Pra-Sejahtera Provinsi di Wilayah Jawa	113
Grafik 6.11	Persentase Penduduk Pra-Sejahtera Provinsi di Wilayah Jawa	113
Grafik 6.12	Jumlah Penduduk Pra-Sejahtera Desa dan Kota	113
Grafik 6.13	Persentase Penduduk Pra-Sejahtera Desa dan Kota	113
Grafik 6.14	Garis Kemiskinan Makanan dan Non-makanan	114
Grafik 6.15	Garis Kemiskinan Makanan dan Non-makanan Desa dan Kota	114
Grafik 6.16	Perbandingan Nilai Tukar Petani Provinsi di Jawa	115
Grafik 6.17	NTP Jawa Timur, Indeks yang Diterima (IT) dan Indeks Harga yang Dibayar (IB)	115

Grafik 6.18	NTP Sub Sektor Pertanian Jawa Timur	115
Grafik 6.19	Inflasi Pedesaan Jawa Timur	115
Grafik 6.20	Perbandingan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi di Jawa	116
Grafik 6.21	NTN, IT dan IB Nelayan Jawa Timur	116
Grafik 6.22	Perbandingan Nilai Tukar Peternak (NTPt) Provinsi di Jawa	117
Grafik 6.23	NT Peternak, IT dan IB Peternak Jawa Timur	117

07

Prospek Perekonomian Daerah

Grafik 7.1	Prediksi El Nino/La Nina 2025-2026 dengan Model ENSO	122
Grafik 7.2	Prediksi El Nino/La Nina 2025-2026 dengan Model IOD	122
Grafik 7.3	Harga Gas Alam Dunia	124
Grafik 7.4	Harga Jagung Dunia	124
Grafik 7.5	Harga Gandum Dunia	124
Grafik 7.6	Harga Kedelai Dunia	124
Grafik 7.7	Harga Minyak Kelapa Sawit Dunia	124
Grafik 7.8	Harga Minyak Dunia	124
Grafik 7.9	Harga Batu Bara Dunia	125
Grafik 7.10	Harga Pupuk Dunia	126
Grafik 7.11	Harga Emas Dunia	126

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Pertumbuhan PDRB Jawa Timur – Sisi Pengeluaran	3
Tabel 1.2	Pertumbuhan PDRB Jawa Timur – Sisi Lapangan Usaha	3
Tabel 2.1	Realisasi Pendapatan APBD di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan 2025	30
Tabel 2.2	Realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan 2025	31
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan 2025	32
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan 2025	36
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur 2024 dan 2025	38
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD 38 Kab/kota Tahun 2024 dan 2025	40
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2024-2025	43
Tabel 3.1	Komoditas Penyumbang Utama Inflasi Jawa Timur Triwulan IV 2025 (yoy)	49
Tabel 3.2	Komoditas Penyumbang Utama Deflasi Jawa Timur Triwulan IV 2025 (yoy)	49
Tabel 3.3	Inflasi Spasial per Kelompok Barang dan Jasa pada Triwulan IV 2025 (%yoy)	54
Tabel 4.1	Pertumbuhan DPK Perbankan Jawa Timur berdasarkan Kelompok Nilai	75
Tabel 5.1	Perkembangan Sistem Pembayaran Triwulan III dan IV 2025	92
Tabel 6.1	Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Timur (juta orang)	109
Tabel 6.2	Perbandingan Kinerja Penyerapan Tenaga Kerja dan Nilai Tambah Lapangan Usaha	112
Tabel 6.3	Rasio Gini Jawa Timur	114
Tabel 6.4	NTP Sub Sektor Pertanian Jawa Timur	115
Tabel 7.1	Prospek Perekonomian Dunia	120
Tabel 7.2	Faktor Pendorong dan Penahan Inflasi Jawa Timur 2026	127



Ringkasan Eksekutif

Asesmen Pertumbuhan Ekonomi Daerah



Kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan IV 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, kinerja ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,85% (yoy), setelah pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,22% (yoy). Lebih tingginya perekonomian Jawa Timur didorong oleh akselerasi konsumsi rumah tangga dan ekspor, serta membaiknya konsumsi pemerintah. Kenaikan konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan disokong oleh pertumbuhan pada komponen makanan minuman, dan barang budaya serta rekreasi seiring dengan hari besar keagamaan nasional (HBKN) Natal dan Tahun baru (Nataru) pada periode laporan. Selain itu, peningkatan transaksi nontunai dan perdagangan melalui *platform e-commerce* juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, kenaikan belanja Pemerintah didorong oleh realisasi belanja pegawai APBN di Jawa Timur, belanja barang jasa APBD se – Jawa Timur, dan belanja bansos. Lebih lanjut, akselerasi perdagangan antardaerah serta peningkatan ekspor luar negeri (LN) beberapa komoditas utama merefleksikan perbaikan kinerja ekspor triwulan IV 2025, di tengah perlambatan impor. Peningkatan konsumsi rumah tangga, net ekspor, dan konsumsi pemerintah didukung oleh peningkatan kinerja lapangan usaha (LU) Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian dan Akomodasi Makan Minum.

Pertumbuhan lebih tinggi tertahan terutama disebabkan oleh kinerja investasi yang melandai. Perlambatan investasi utamanya pada komponen bangunan seiring sejumlah proyek strategis yang telah memasuki tahap finalisasi. Dari sisi LU, perlambatan juga tecermin pada kinerja LU Konstruksi, yang turut menunjukkan moderasi sejalan dengan melambatnya aktivitas investasi pada periode tersebut.

Kinerja perekonomian Jawa Timur yang membaik pada triwulan IV tahun 2025 mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur keseluruhan tahun 2025 lebih tinggi. Ekonomi Jawa Timur pada tahun 2025 tumbuh 5,33% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 sebesar 4,93% (yoy). Akselerasi ekonomi Jawa Timur ditunjang oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, investasi, dan net ekspor. Dari sisi penawaran, percepatan kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2025 terutama ditopang oleh kinerja LU Industri Pengolahan, LU Pertanian, dan LU Penyediaan Akomodasi Makan Minum sejalan dengan akselerasi konsumsi rumah tangga dan net ekspor. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2025 yang lebih tinggi tertahan oleh perlambatan konsumsi pemerintah seiring pembatasan belanja daerah. Hal ini berimplikasi terhadap perlambatan beberapa LU utama khususnya LU Perdagangan dan LU Konstruksi.

Ekonomi Jawa Timur pada triwulan IV 2025 tumbuh 5,85% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2025 (5,22%, yoy).

Dari sisi pengeluaran, peningkatan kinerja perekonomian Jawa Timur ditopang oleh akselerasi konsumsi rumah tangga dan ekspor, serta membaiknya konsumsi pemerintah.

Dari sisi lapangan usaha, akselerasi perekonomian didukung oleh peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian dan Akomodasi Makan Minum

Asesmen Keuangan Pemerintah Daerah



Pendapatan APBD Jawa Timur secara agregat tahun 2025 mengalami kontraksi akibat penurunan Pendapatan Transfer yang dampaknya signifikan karena mendominasi 63,33% struktur pendapatan daerah. Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh melalui implementasi skema opsen pajak dan penguatan digitalisasi fiskal (ETPD), peningkatan ini cenderung bersifat reposisi anggaran ke tingkat kabupaten/kota yang belum menjamin pemerataan kapasitas fiskal antarwilayah. Di tengah tantangan kepatuhan wajib pajak dan dinamika daya beli, optimalisasi basis penerimaan baru melalui kinerja BUMD/BLUD dan potensi pajak kendaraan listrik menjadi strategi untuk memitigasi ketergantungan pada pajak kendaraan konvensional serta menjaga resiliensi fiskal daerah secara berkelanjutan.

Penerimaan Pendapatan APBD Jawa Timur tahun 2025 terkontraksi karena penurunan Pendapatan Transfer, meski tertahan peningkatan penerimaan PAD.

Realisasi belanja Pemerintah di Jawa Timur tahun 2025 ditopang oleh pertumbuhan positif Belanja Pegawai. Belanja Pegawai mendominasi struktur belanja sebesar 48,40% yang digunakan untuk pembayaran THR, gaji ke-13, serta penambahan personel Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga. Namun, secara agregat belanja mengalami kontraksi akibat penurunan Belanja Barang (36,97%) dan Belanja Modal (14,00%) sebagai dampak *base effect* pasca-Pemilu 2024 serta kebijakan efisiensi anggaran. Meskipun terjadi penurunan nominal pada level APBN dan APBD kabupaten/kota, kualitas belanja tetap terjaga melalui penguatan jaring pengaman sosial dan capaian program strategis nasional seperti Program Kesehatan Gratis (PKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menempati posisi tiga besar nasional. Akselerasi penyerapan anggaran yang terkonsentrasi pada semester II, didukung oleh relaksasi fiskal dan kebijakan pembukaan blokir anggaran, memastikan belanja Pemerintah tetap menjadi penopang solid bagi pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan efisiensi fiskal.

Realisasi Belanja APBD Jawa Timur tahun 2025 terkontraksi karena perlambatan Belanja Barang dan Belanja Modal, namun tertahan oleh peningkatan Belanja Pegawai

Asesmen Inflasi Daerah



Inflasi Provinsi Jawa Timur pada akhir triwulan IV 2025 tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan III 2025, namun masih terjaga dalam rentang sasaran nasional $2,5 \pm 1,0\%$ (yoy). Inflasi pada triwulan laporan sebesar 2,93% (yoy) atau meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat 2,53% (yoy). Tekanan inflasi dipengaruhi oleh (i) kenaikan harga komoditas hortikultura akibat terbatasnya pasokan dari wilayah sentra produksi pangan strategis, (ii) kenaikan permintaan bahan pokok strategis di tengah masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, (iii) dinamika curah hujan yang tinggi pada periode November dan Desember mengganggu hasil panen (iv) Harga Emas pada akhir triwulan IV tercatat mencapai level tertinggi sepanjang tahun 2025 seiring dengan tingginya ketidakpastian perekonomian global dan motif berjaga-jaga sebagian masyarakat. Berdasarkan kelompok pengeluaran, meningkatnya tekanan inflasi Jawa Timur pada periode laporan didorong oleh (i) kelompok makanan, minuman, dan tembakau; (ii) kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; (iii) kelompok transportasi; serta (iv) kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Adapun, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan menjadi kelompok penahan inflasi pada triwulan IV 2025. Selain itu, stimulus ekonomi Pemerintah melalui program diskon tiket transportasi pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2026 juga dapat menekan lonjakan tarif angkutan udara pada triwulan IV 2025.

Inflasi Provinsi Jawa Timur pada triwulan IV 2025 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, namun tetap dalam rentang sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$.

Inflasi Provinsi Jawa Timur pada triwulan I 2026 diperkirakan lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan IV 2025 serta akan tetap dalam rentang sasaran target inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Prakiraan meningkatnya inflasi pada triwulan I 2026 didorong oleh momen Ramadan, Imlek, dan Hari Besar Keagamaan Nasional Idulfitri 1447 Hijriah. Peningkatan permintaan terhadap bahan pokok strategis akan meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat dalam menyambut Idulfitri, namun di sisi lain risiko gagal panen yang diakibatkan oleh curah hujan akan berdampak pada tekanan harga yang lebih tinggi. Lebih lanjut, penyesuaian tarif diskon listrik juga akan berdampak terhadap tingkat inflasi sepanjang triwulan I, khususnya pada kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga. Harga emas dunia diperkirakan masih dalam tren peningkatan seiring eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mempengaruhi sentimen investor. Namun, stimulus ekonomi yang diterapkan oleh Pemerintah berupa tarif diskon moda transportasi serta PPN DTP, diperkirakan dapat menjaga inflasi kelompok transportasi tetap stabil.

Pada triwulan I 2026, inflasi Provinsi Jawa Timur diperkirakan akan lebih tinggi, namun tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$.

Di sisi lain, **TPID Jawa Timur terus mengimplementasikan strategi 4K TPIP secara konsisten.** Dari aspek keterjangkauan harga, upaya dilakukan melalui optimalisasi Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) di Jawa Timur, penyelenggaraan pasar murah, serta penyaluran beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai komoditas utama yang dibutuhkan masyarakat agar tetap dapat diakses dengan harga terjangkau. Dari sisi ketersediaan pasokan, penguatan dilakukan melalui pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah, program peningkatan produktivitas pertanian baik *on-farm* maupun *off-farm*, penguatan kelembagaan melalui korporasi petani, serta dukungan sarana dan prasarana ketahanan pangan oleh Bank Indonesia Jawa Timur. Selanjutnya, kelancaran distribusi dijaga melalui kerja sama intra dan antarprovinsi serta pemanfaatan truk EPIK Mobile untuk mendistribusikan beras Jatim Cettar ke Toko EPIK Surabaya dan beberapa kota lain di Jawa Timur. Sementara itu, aspek komunikasi efektif antar pemangku kepentingan di Jawa Timur diwujudkan melalui penyelenggaraan *High Level Meeting* (HLM) dan digitalisasi monitoring harga sebagai langkah menjaga stabilitas harga di daerah.

Pembiayaan Daerah dan Pengembangan UMKM



Kinerja intermediasi perbankan pada triwulan IV 2025 tetap solid, ditopang oleh pertumbuhan kredit yang berlanjut dengan risiko kredit yang terkendali. Penghimpunan DPK tetap mencatatkan pertumbuhan, meskipun dengan laju yang lebih moderat dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan kecenderungan korporasi menahan likuiditas untuk memperkuat *buffer* likuiditas akibat ketidakpastian global yang berlanjut, di tengah kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Di sisi lain, DPK Rumah Tangga tetap tumbuh positif, terutama ditopang oleh peningkatan komponen tabungan. Penyaluran kredit tetap mencatatkan pertumbuhan positif seiring terjaganya likuiditas perbankan kendati dalam tren melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, baik pada segmen korporasi maupun rumah tangga. Pertumbuhan penyaluran kredit korporasi terkontraksi seiring masih berlangsungnya preferensi internal *financing* bagi korporasi di tengah melambatnya kinerja kredit industri pengolahan dan perdagangan, kendati suku bunga kredit yang terus menunjukkan penurunan secara gradual. Sementara itu, pada momentum HBKN libur Natal-Tahun Baru penyaluran kredit rumah tangga tetap tumbuh positif meskipun melambat. Hal ini seiring adanya preferensi masyarakat menggunakan dana pribadi untuk konsumsi jangka pendek dan menurunnya

Kinerja intermediasi perbankan terpantau tetap positif, tecermin dari kinerja penyaluran kredit dan DPK yang tumbuh positif.

minat pada barang tahan lama, tecermin dari penurunan KPR, KPA, dan KKB, di tengah suku bunga stabil meskipun BI *Rate* berada dalam tren penurunan. Lebih lanjut, tingkat intermediasi perbankan pada triwulan laporan terpantau optimal, tecermin dari rasio LDR bank umum sebesar 91,08% yang sejalan dengan acuan rentang intermediasi optimal 84%-94% dalam ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial Bank Indonesia.

Ketahanan perbankan di Jawa Timur tetap terjaga, tecermin dari menurunnya risiko kredit dan likuiditas yang masih berada dalam batas aman. Secara agregat, risiko kredit di Jawa Timur pada triwulan laporan masih terjaga dalam batas aman yang tecermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 3,23%, turun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,37%. Sementara itu, dari sisi permodalan, CAR terpantau meningkat ke level 31,38% pada triwulan IV 2025, jauh di atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan minimum sebesar 8%, menunjukkan bahwa bank memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi potensi risiko ke depan di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Ketahanan korporasi dan RT di Jawa Timur masih terjaga, tecermin dari risiko kredit yang masih dalam batas aman, serta CAR yang terpantau stabil dan di atas ketentuan minimum.

Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran



Kinerja sistem pembayaran di Jawa Timur pada triwulan IV 2025 meningkat signifikan, didorong oleh lonjakan aktivitas konsumsi, industri, dan perdagangan selama periode Natal dan Tahun Baru. Kebutuhan uang tunai tercatat *net-outflow*, khususnya di pusat ekonomi seperti Surabaya dan Malang. Transaksi transfer dana besar melalui RTGS, SKNBI, BI-FAST, APMK, serta UE meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, aktivitas pembayaran dan belanja menggunakan QRIS dan APMK juga meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas konsumsi rumah tangga. Transaksi perdagangan valuta asing di Jawa Timur juga tercatat meningkat, didorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara selama libur akhir tahun dan banyaknya masyarakat Jawa Timur yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Lebih lanjut, rata-rata nilai per transaksi pada mayoritas instrumen pembayaran nontunai meningkat pada triwulan IV 2025, menjadi indikasi bahwa sistem pembayaran di Jawa Timur tetap stabil dan terpelihara.

Pada triwulan IV 2025, aktivitas sistem pembayaran tumbuh positif seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat di akhir tahun

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus didukung melalui akselerasi digitalisasi pembayaran, penguatan kampanye Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah, serta pemenuhan ULE hingga ke wilayah terpencil. Transformasi digital diakselerasi melalui perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta inovasi layanan nontunai yang lebih efisien di seluruh wilayah. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia konsisten meningkatkan literasi masyarakat melalui kampanye nasional CBP Rupiah dan memperkuat integritas mata uang dengan langkah preventif, preemtif, serta represif dalam menekan peredaran uang palsu melalui kolaborasi lintas instansi. Guna menjaga kedaulatan rupiah di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T), program Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) terus dijalankan untuk menjamin ketersediaan ULE. Melalui berbagai inisiatif strategis ini, Bank Indonesia berkomitmen mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, inklusif, dan aman, guna mendukung stabilitas sektor keuangan serta pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berkelanjutan.

Instrumen RTGS, APMK, UE, QRIS, dan BI-FAST tercatat tumbuh positif dibandingkan periode sebelumnya, sementara Transaksi menggunakan SKNBI masih melanjutkan tren kontraksi.

Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat



Ketenagakerjaan Jawa Timur pada November 2025 secara struktural mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2025. Peningkatan kondisi ketenagakerjaan tersebut tecermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) disertai peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Perbaikan tersebut secara umum ditopang oleh peningkatan tenaga kerja bekerja sejalan dengan peningkatan jumlah tenaga kerja formal maupun informal, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja pada LU Pertanian, Perdagangan, Industri Pengolahan, dan Akomodasi Makan Minum seiring tumbuhnya aktivitas ekonomi pada sektor tersebut. Jumlah tenaga kerja berpendidikan rendah hingga menengah meningkat, namun sebagian disertai kenaikan TPT, menunjukkan daya serap yang belum optimal. Sebaliknya, tenaga kerja berpendidikan tinggi menurun seiring turunnya tingkat penganggurannya, antara lain karena bukan periode kelulusan dan relatif lebih baiknya penyerapan tenaga kerja terdidik.

Kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2025 terpantau meningkat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tecermin dari penurunan jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur pada September 2025 dibandingkan Maret 2025 dan September 2024 yang diiringi dengan penurunan tingkat kesenjangan ekonomi. Perbaikan tingkat kesejahteraan didukung oleh pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hingga triwulan III 2025 yang tumbuh positif, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 dibandingkan Agustus 2024, konsumsi rumah tangga yang tumbuh meningkat pada triwulan III 2025, Inflasi IHK Jawa Timur yang terjaga di sasaran inflasi nasional $2,5\% \pm 1\%$, serta peningkatan NTP pada triwulan III 2025. Lebih lanjut, perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur turut didukung oleh adanya program peningkatan kesejahteraan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kesejahteraan masyarakat pedesaan mengalami perbaikan seiring dengan kenaikan harga komoditas hortikultura, hasil ternak, dan perikanan. NTP meningkat dari 115,05 pada triwulan III 2025 menjadi 118,96 pada triwulan IV 2025. Hal tersebut ditopang oleh peningkatan harga sayuran, seperti selada dan tomat, cabai rawit, dan bawang merah seiring penurunan volume produksi. Lebih lanjut, peningkatan permintaan komoditas hasil ternak, seperti daging dan telur, serta komoditas perikanan sejalan dengan peningkatan produksi dan peningkatan permintaan pada momen Nataru dan untuk memenuhi kebutuhan program MBG memicu peningkatan NTP pada triwulan laporan.

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada November 2025 menunjukkan peningkatan seiring peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus 2025.

Kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2025 terpantau meningkat dibandingkan Maret 2025 dan September 2024.

Kesejahteraan pedesaan yang direpresentasikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan pada triwulan IV 2025, terutama pada petani tanaman hortikultura, peternakan, dan perikanan

Prospek Ekonomi dan Inflasi Tahun 2026



Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2026 diperkirakan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2025 ditopang oleh permintaan domestik dan eksternal, dengan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2026 diperkirakan berada di kisaran 4,9%-5,7% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2025. Dari sisi permintaan, solidnya kinerja ekonomi Jawa Timur diperkirakan didukung oleh prakiraan perbaikan konsumsi swasta, investasi, serta ekspor. Dari sisi penawaran, sejalan dengan prospek perbaikan konsumsi swasta dan investasi, kinerja LU Perdagangan dan LU Industri Pengolahan di Jawa Timur pada tahun 2026 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi eksternal, prospek perekonomian global masih kondusif khususnya prospek peningkatan permintaan beberapa mitra dagang utama Jawa Timur

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2026 diperkirakan membaik, ditopang oleh permintaan domestik dan eksternal.



tersebut diperkirakan mengakselerasi kinerja ekspor LN dan investasi nonbangunan pada tahun 2026. Lebih lanjut, kinerja LU Konstruksi pada tahun 2026 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 sejalan dengan berlanjutnya realisasi proyek infrastruktur Pemerintah dan swasta, akselerasi pembangunan kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta dampak lanjutan berbagai kebijakan dan program strategis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2025 yang mulai sepenuhnya terealisasi pada 2026.

Inflasi Jawa Timur pada 2026 diperkirakan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional yaitu sebesar $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Inflasi yang terkendali ditopang oleh tetap tingginya ketersediaan pasokan di Jawa Timur, khususnya bahan pokok strategis seperti beras, bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit seiring dengan prakiraan cuaca yang mendukung proses produksi. Selanjutnya, dukungan program strategis Pemerintah yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan nasional dalam bentuk kebijakan dan/atau stimulus juga akan mendorong terjaganya inflasi daerah. Komunikasi efektif melalui penguatan serta akselerasi kebijakan dan program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPIP dan TPID akan tetap berlanjut untuk mendukung sasaran inflasi berada dalam rentang $2,5\% \pm 1\%$ (yoy).

Inflasi Jawa Timur pada tahun 2026 diperkirakan berada di kisaran sasaran inflasi $2,5\% \pm 1\%$ (yoy).

Tabel

Indikator Ekonomi

A. PDRB

Indikator	2024		2025				
	IV	Total	I	II	III	IV	Total
PDRB Lapangan Usaha - Harga Konstan (Rp Miliar)							
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37.713	177.809	43.077	50.210	53.395	39.980	186.663
Pertambangan dan Penggalian	18.700	72.583	18.361	18.395	18.516	18.400	73.673
Industri Pengolahan	149.790	588.599	151.985	155.026	157.596	159.197	623.803
Pengadaan Listrik dan Gas	1.708	6.718	1.796	1.656	1.806	1.802	7.061
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	473	1.895	473	483	496	510	1.962
Konstruksi	48.347	181.960	44.341	46.336	48.590	51.038	190.305
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	94.448	368.876	93.716	94.350	96.339	99.175	383.581
Transportasi dan Pergudangan	17.095	66.045	17.219	17.867	17.723	18.081	70.889
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28.142	108.833	28.990	29.510	28.440	30.663	117.603
Informasi dan Komunikasi	34.474	135.159	35.697	36.022	36.261	37.394	145.374
Jasa Keuangan dan Asuransi	11.455	46.473	12.166	11.825	11.542	11.980	47.512
Real Estate	8.424	33.414	8.441	8.669	8.703	8.725	34.538
Jasa Perusahaan	3.955	15.316	3.975	4.216	4.224	4.317	16.731
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.817	37.781	9.676	9.696	9.319	9.882	38.573
Jasa Pendidikan	12.858	51.180	13.395	13.514	13.613	13.790	54.313
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.719	14.409	3.723	3.781	3.828	4.010	15.342
Jasa lainnya	7.518	28.760	7.159	7.896	7.724	8.259	31.037
PDRB Pengeluaran - Harga Konstan (Rp Miliar)							
Konsumsi RT	294.183	1.157.247	296.459	304.886	304.512	309.324	1.215.180
Konsumsi LNPRT	5.886	22.349	5.829	5.835	5.801	6.188	23.653
Konsumsi Pemerintah	21.637	77.102	16.480	19.185	19.898	22.098	77.662
Pembentukan Modal Tetap Bruto	135.010	513.996	126.366	132.645	139.440	144.006	542.457
Ekspor Barang dan Jasa	276.862	1.093.503	283.711	287.493	299.560	295.282	1.166.045
Impor Barang dan Jasa	246.821	940.847	237.305	244.548	254.464	262.194	998.510
Net Ekspor	30.041	152.656	46.406	42.945	45.096	33.088	167.534

Sumber: BPS Jawa Timur

Indikator	2024		2025				
	IV	Total	I	II	III	IV	Total
PDRB Lapangan Usaha - (%; yoy)							
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,93	0,08	10,30	0,60	4,43	6,01	4,98
Pertambangan dan Penggalian	4,70	(0,65)	4,37	2,09	1,33	(1,61)	1,50
Industri Pengolahan	5,05	5,40	4,11	7,36	6,18	6,28	5,98
Pengadaan Listrik dan Gas	1,83	6,93	10,40	1,95	2,71	5,53	5,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,36	2,24	(1,05)	0,99	6,47	7,92	3,55
Konstruksi	5,97	6,92	1,11	5,56	5,94	5,57	4,59
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,35	4,55	3,57	3,93	3,41	5,01	3,99
Transportasi dan Pergudangan	7,05	9,50	7,22	9,32	7,11	5,77	7,33
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,27	6,98	7,32	8,38	7,52	8,96	8,06
Informasi dan Komunikasi	5,85	6,43	7,11	6,48	8,16	8,47	7,56
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,96	3,89	4,49	1,55	(1,62)	4,59	2,24
<i>Real Estate</i>	2,85	2,91	2,14	4,03	3,69	3,58	3,36
Jasa Perusahaan	8,10	7,88	8,49	9,37	9,89	9,16	9,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,39	7,78	9,87	(2,11)	0,73	0,66	2,10
Jasa Pendidikan	4,35	4,81	6,31	5,18	5,75	7,25	6,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,79	5,53	9,61	4,60	4,08	7,82	6,48
Jasa lainnya	9,87	8,56	5,55	6,62	9,50	9,86	7,92
PDRB Pengeluaran - (%; yoy)							
Konsumsi RT	4,91	4,99	5,12	4,85	4,91	5,15	5,01
Konsumsi LNPRT	9,53	12,49	6,53	6,42	5,31	5,13	5,83
Konsumsi Pemerintah	2,47	5,24	1,92	(0,55)	(0,53)	2,13	0,73
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,05	5,49	2,20	6,13	6,96	6,66	5,54
Ekspor Barang dan Jasa	7,44	9,08	6,30	7,05	6,54	6,65	6,63
Impor Barang dan Jasa	7,79	10,30	4,90	6,84	6,51	6,23	6,13
Net Ekspor	4,65	2,13	14,08	8,27	6,68	10,14	9,75
Pertumbuhan PDRB (%; yoy)	5,03	4,93	5,00	5,23	5,22	5,85	5,33

Sumber: BPS Jawa Timur (diolah)

B. INFLASI

Indikator	2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK)								
JAWA TIMUR	106,61	106,37	106,21	107,11	107,43	108,52	108,90	110,25
- Kota Surabaya	106,48	106,41	106,32	107,11	107,15	108,47	109,17	110,81
- Kota Malang	106,50	106,11	105,99	106,94	107,02	108,35	109,16	110,06
- Kota Kediri	106,17	105,67	105,37	106,27	106,13	107,66	108,37	110,99
- Kab. Jember	106,37	106,35	106,19	107,09	107,58	108,16	108,78	111,56
- Kab. Sumenep	109,15	108,48	108,58	109,71	110,60	111,21	112,75	108,32
- Kota Probolinggo	106,64	106,39	106,41	107,18	107,91	108,74	109,64	113,82
- Kota Madiun	106,12	105,28	105,03	106,00	106,33	107,28	107,90	109,41
- Kab. Banyuwangi	106,61	106,61	106,46	107,32	108,63	109,42	109,89	109,95
- Kab. Bojonegoro	108,44	107,48	106,98	108,34	108,58	109,88	110,25	110,43
- Kab. Gresik	105,51	105,22	104,87	105,74	106,36	106,74	107,00	108,91
- Kab. Tulungagung	107,31	106,58	106,44	107,54	108,27	109,52	109,73	110,28
LAJU INFLASI TAHUNAN (% yoy)								
JAWA TIMUR	3,04	2,21	1,73	1,51	0,77	2,02	2,53	2,93
- Kota Surabaya	2,99	2,35	1,64	1,38	0,63	1,94	2,68	3,45
- Kota Malang	2,90	2,02	1,62	1,36	0,49	2,11	2,99	2,92
- Kota Kediri	2,88	1,72	0,88	1,19	-0,04	1,88	2,85	4,44
- Kab. Jember	2,53	1,99	1,55	1,74	1,14	1,70	2,43	4,17
- Kab. Sumenep	4,68	3,24	2,45	1,97	1,33	2,52	3,84	-1,26
- Kota Probolinggo	3,54	2,29	1,96	1,90	1,13	2,21	3,04	6,19
- Kota Madiun	3,05	1,85	1,22	1,31	0,20	1,90	2,73	3,22
- Kab. Banyuwangi	2,67	2,38	2,07	1,73	1,89	2,64	3,22	2,45
- Kab. Bojonegoro	4,68	1,89	1,88	1,14	0,13	2,23	3,05	1,93
- Kab. Gresik	2,81	2,13	2,15	1,85	0,81	1,44	2,03	3,00
- Kab. Tulungagung	2,98	2,05	1,81	1,75	0,89	2,76	3,09	2,55
LAJU INFLASI TAHUNAN (% ytd)								
JAWA TIMUR	0,64	0,81	0,66	1,51	0,30	1,32	1,67	2,93
- Kota Surabaya	0,60	0,72	0,63	1,38	0,04	1,27	1,93	3,45
- Kota Malang	0,66	0,57	0,45	1,36	0,07	1,32	2,08	2,92
- Kota Kediri	0,61	0,62	0,33	1,19	0,13	1,44	1,98	4,44
- Kab. Jember	0,63	1,04	0,88	1,74	0,46	1,00	1,57	4,17
- Kab. Sumenep	0,77	0,83	0,92	1,97	0,81	1,37	2,77	(1,26)
- Kota Probolinggo	0,77	1,15	1,17	1,90	0,68	1,68	2,30	6,19
- Kota Madiun	0,66	0,62	0,38	1,31	0,31	1,21	1,79	3,22
- Kab. Banyuwangi	0,56	1,06	0,92	1,73	1,22	1,95	2,39	2,45
- Kab. Bojonegoro	0,70	0,34	-0,13	1,14	1,32	1,42	1,76	1,93
- Kab. Gresik	0,81	1,35	1,01	1,85	0,59	0,94	1,19	3,00
- Kab. Tulungagung	0,76	0,84	0,71	1,75	0,68	1,84	2,04	2,55

Sumber: BPS Jawa Timur

C. SISTEM PEMBAYARAN

Indikator	2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kinerja (Rp Triliun)								
<i>Inflow</i>	27,79	29,03	16,44	13,39	22,96	29,28	12,41	13,39
<i>Outflow</i>	21,42	21,72	17,13	23,49	25,89	12,88	17,48	23,49
SKNBI	51,82	48,02	53,70	56,51	48,15	43,54	49,46	56,51
RTGS	341,89	377,05	421,14	461,09	362,66	349,64	417,09	461,09
BI-FAST	363,99	408,20	475,51	499,81	494,09	493,89	543,79	499,81
APMK	260,43	259,16	252,84	250,53	269,89	262,69	263,22	250,53
UE	15,52	15,79	15,98	16,31	17,20	16,50	17,51	16,31
QRIS	7,96	12,27	18,65	22,55	26,05	31,65	36,39	22,55
KUPVA	2,19	2,20	2,75	2,88	2,38	2,42	2,68	2,88
<i>E-Commerce</i>	16,93	16,09	18,05	20,06	21,09	18,09	19,38	20,06
Pertumbuhan (% , yoy)								
<i>Inflow</i>	12,20	13,73	-19,62	-7,09	-17,39	0,86	-24,46	-7,09
<i>Outflow</i>	32,49	-19,70	10,48	-7,00	20,88	-40,69	2,07	-7,00
SKNBI	-8,75	-2,22	-3,57	-4,56	-7,10	-9,32	-7,9	-4,56
RTGS	-12,85	4,78	7,50	20,48	6,07	-7,27	-0,96	20,48
BI-FAST	68,06	57,91	46,28	39,38	35,74	20,99	14,36	39,38
APMK	6,62	0,86	0,38	-1,56	3,50	1,35	3,95	-1,56
UE	13,71	9,05	10,75	10,74	9,78	4,28	8,78	10,74
QRIS	114,61	154,82	191,63	167,75	227,18	157,91	95,2	167,75
KUPVA	2,08	-0,60	24,99	14,40	8,84	10,42	-2,3	14,40
<i>E-Commerce</i>	27,47	16,91	16,20	16,87	24,57	12,45	7,4	16,87
Rata-rata Nilai Transaksi (Rp Juta/Transaksi)								
SKNBI	66,48	64,46	65,25	64,43	67,53	65,88	64,78	64,43
RTGS	3140,16	3611,84	3555,28	3635,03	3072,56	3592,81	3730	3635,03
BI-FAST	2,74	2,73	2,73	2,64	2,63	2,65	2,62	2,64
UE	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
QRIS	0,11	0,10	0,11	0,10	0,10	0,04	0,09	0,10
<i>E-Commerce</i>	0,12	0,12	0,11	0,12	0,11	0,10	0,081	0,12

Sumber: Bank Indonesia

D. PERBANKAN
D.1. Bank Umum

Indikator	2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kinerja (Rp Miliar)								
Total Aset	888.676	906.795	916.627	913.504	908.005	929.540	947.709	943.893
- Bank Umum Milik Negara (BUMN)	360.825	367.721	368.431	374.129	368.104	378.975	377.534	366.396
- Bank Pemerintah Daerah (BPD)	114.893	116.516	122.117	114.630	113.734	114.534	123.003	440.627
- Bank Umum Swasta Nasional	396.433	405.914	410.680	408.563	409.680	418.618	429.750	16.914
- Bank Asing	16.525	16.644	15.399	16.182	16.487	17.412	17.422	119.955
Dana Pihak Ketiga	752.817	766.653	768.466	771.716	776.089	794.997	805.556	799.487
- Giro	154.690	159.855	155.993	157.670	149.868	164.071	170.507	175.808
- Tabungan	323.936	328.496	333.414	339.928	342.540	346.507	346.686	356.837
- Deposito	274.191	278.302	279.059	274.118	283.681	284.418	288.363	266.841
Kredit Lokasi Bank (LB)	556.494	565.108	583.884	596.322	590.841	597.727	602.656	606.530
- Kredit Modal Kerja	292.418	296.386	308.541	314.299	306.737	310.901	312.735	306.032
- Kredit Investasi	95.275	96.654	98.318	100.604	100.376	100.446	101.229	108.469
- Kredit Konsumsi	168.801	172.069	177.025	181.419	183.728	186.379	188.692	192.030
Kredit Lokasi Proyek (LP)	685.935	700.934	707.023	719.729	721.045	729.408	729.585	728.197
- Kredit Modal Kerja	346.398	353.630	356.163	365.597	362.681	363.002	358.975	351.169
- Kredit Investasi	140.172	143.798	141.683	141.504	140.824	145.605	146.985	150.129
- Kredit Konsumsi	199.365	203.505	209.176	214.627	217.540	220.801	223.625	226.899
Kredit LB ke Sektor Ekonomi Utama	298.546	303.270	316.126	322.660	314.453	318.203	318.692	318.472
- Kredit Sektor Industri Pengolahan	112.093	114.384	122.440	127.391	120.805	121.414	121.615	120.288
- Kredit Sektor Perdagangan	147.114	148.927	153.527	154.735	152.345	154.614	154.590	155.201
- Kredit Sektor Pertanian	39.339	39.959	40.159	40.534	41.303	42.175	42.487	42.983
Pertumbuhan (% yoy)								
Total Aset	6,13	5,81	3,66	3,82	2,18	2,51	3,39	3,33
- Bank Umum Milik Negara (BUMN)	8,89	7,47	3,76	5,00	2,02	3,06	2,47	(2,07)
- Bank Pemerintah Daerah (BPD)	0,03	-4,34	-3,30	-3,46	-1,01	-1,70	0,73	284,39
- Bank Umum Swasta Nasional	6,42	7,94	6,55	5,32	3,34	3,13	4,64	(95,86)
- Bank Asing	-11,16	-1,68	-11,85	-4,21	-0,23	4,62	13,13	641,29
Dana Pihak Ketiga	7,59	7,68	6,18	4,84	3,09	3,70	4,83	3,60
- Giro	14,47	13,48	10,43	6,62	-3,12	2,64	9,30	11,50
- Tabungan	5,75	4,49	7,01	5,68	5,74	5,48	3,98	4,97
- Deposito	6,15	8,78	3,02	2,84	3,46	2,20	3,33	-2,65
Kredit Lokasi Bank (LB)	6,42	5,35	7,84	8,13	6,17	5,77	3,21	1,71
- Kredit Modal Kerja	3,77	2,17	6,49	-65,74	4,90	4,90	1,36	-2,63
- Kredit Investasi	11,19	8,84	8,82	96,13	5,35	3,92	2,96	7,82
- Kredit Konsumsi	8,60	9,24	9,71	9,75	8,84	8,32	6,59	5,85
Kredit Lokasi Proyek (LP)	7,99	6,07	4,92	5,27	5,12	4,06	3,19	1,18
- Kredit Modal Kerja	5,25	2,19	1,01	3,88	4,70	2,65	0,79	-3,95
- Kredit Investasi	12,09	9,96	6,75	3,48	0,47	1,26	3,74	6,10
- Kredit Konsumsi	10,14	10,62	10,94	10,06	9,12	8,50	6,91	5,72

Sumber : Laporan Bank (diolah)

Indikator	2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kredit LB ke Sektor Ekonomi Utama	4,26	3,55	8,36	8,74	5,33	4,92	0,81	-1,30
- Kredit Sektor Industri Pengolahan	0,62	-1,02	8,99	13,67	7,77	6,15	-0,67	-5,58
- Kredit Sektor Perdagangan	6,01	6,62	7,89	5,71	3,56	3,82	0,69	0,30
- Kredit Sektor Pertanian	8,76	6,19	8,21	5,87	4,99	5,55	5,80	6,04
Rasio Keuangan (%)								
NPL Lokasi Bank	3,05	2,98	2,78	2,61	3,01	3,28	3,25	3,08
- NPL Kredit Modal Kerja	3,88	3,70	3,30	2,97	3,54	3,87	3,77	3,63
- NPL Kredit Investasi	2,35	2,61	2,68	2,76	2,88	3,08	3,12	2,82
- NPL Kredit Konsumsi	1,99	1,95	1,93	1,89	2,20	2,38	2,45	2,35
NPL Lokasi Proyek	3,11	3,05	2,79	2,70	3,02	3,26	3,37	3,23
LDR Lokasi Bank	73,92	73,71	75,98	77,12	76,29	75,36	74,79	75,81
LDR Lokasi Proyek	91,12	91,43	92,00	93,26	92,91	91,75	90,57	91,08

Sumber : Laporan Bank (diolah)

D.2. Bank Umum Syariah

Indikator	2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kinerja (Rp Miliar)								
Total Aset	55.609	55.619	59.752	64.304	61.373	62.476	65.283	67.432
Dana Pihak Ketiga	50.239	50.222	52.907	57.133	55.284	55.200	57.103	58.762
- Giro	6.444	6.933	7.019	7.754	7.178	7.114	7.723	8.701
- Tabungan	24.336	24.678	26.118	27.334	26.894	27.843	29.150	30.869
- Deposito	19.459	18.612	19.770	22.046	21.212	20.243	20.229	19.192
Pembiayaan Lokasi Bank (LB)	38.792	39.980	41.451	42.321	42.193	44.066	45.258	46.238
- Modal Kerja	9.833	10.217	10.765	10.654	10.193	10.630	10.906	10.757
- Investasi	7.746	7.935	8.200	8.498	8.839	8.840	8.895	8.759
- Konsumsi	21.213	21.829	22.487	23.169	23.880	24.596	25.458	26.722
Pembiayaan Lokasi Proyek (LP)	53.742	54.098	55.989	55.311	55.659	56.595	56.967	56.088
- Modal Kerja	18.537	18.071	19.099	17.497	17.066	17.240	16.803	15.242
- Investasi	12.517	12.674	12.776	12.996	13.100	13.230	13.226	12.599
- Konsumsi	22.688	23.354	24.114	24.818	25.493	26.125	26.938	28.247
Pembiayaan LB ke Sektor Ekonomi Utama	10.308	10.690	11.219	11.156	11.002	11.639	11.772	11.399
- Pembiayaan Sektor Industri Pengolahan	4.151	4.687	5.208	4.976	4.950	5.415	5.682	5.207
- Pembiayaan Sektor Perdagangan	5.221	5.117	5.115	5.279	5.162	5.334	5.225	5.335
- Pembiayaan Sektor Pertanian	936	886	896	901	891	890	865	857
Pertumbuhan (% , YOY)								
Total Aset	14,31	11,59	11,02	17,73	10,37	12,33	9,26	4,86
Dana Pihak Ketiga	15,14	13,41	10,86	17,01	10,04	9,91	7,93	2,85
- Giro	42,38	47,39	29,24	33,30	11,39	2,61	10,03	12,22
- Tabungan	10,26	12,66	13,69	11,43	10,51	12,83	11,61	12,93
- Deposito	14,22	5,30	2,33	19,30	9,01	8,76	2,32	-12,95
Pembiayaan Lokasi Bank (LB)	12,26	11,59	12,94	12,18	8,77	10,22	9,19	9,26
- Modal Kerja	3,92	5,31	11,21	11,09	3,66	4,04	1,31	0,96
- Investasi	26,55	17,64	17,66	12,84	14,11	11,40	8,47	3,07
- Konsumsi	11,82	12,63	12,13	12,43	12,57	12,68	13,21	15,34
Pembiayaan Lokasi Proyek (LP)	55,53	12,06	13,17	7,17	3,57	4,62	1,75	1,40
- Modal Kerja	95,91	11,69	15,81	0,79	-7,94	-4,60	-12,02	-12,89
- Investasi	104,49	10,66	9,97	6,03	4,66	4,39	3,52	-3,05
- Konsumsi	19,59	13,13	12,88	12,85	12,36	11,87	11,71	13,82
Pembiayaan Lokasi Proyek (LP)	7,44	7,61	14,19	14,27	6,73	8,88	4,93	2,18
- Pembiayaan Sektor Industri Pengolahan	14,32	24,79	42,72	37,92	19,25	15,54	9,10	4,64
- Pembiayaan Sektor Perdagangan	2,43	-1,39	-1,03	1,15	-1,13	4,23	2,15	1,06
- Pembiayaan Sektor Pertanian	8,08	-10,41	-11,11	-3,74	-4,81	0,43	-3,49	-4,88

Sumber : Laporan Bank (diolah)

Indikator	2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Rasio Keuangan (%)								
NPL Lokasi Bank	2,78	2,88	2,92	2,82	3,02	2,80	2,76	2,60
- Modal Kerja	5,03	5,01	4,99	5,01	5,82	5,61	5,49	5,12
- Investasi	1,40	1,75	2,46	2,15	2,01	1,81	1,98	2,08
- Konsumsi	2,23	2,14	2,10	2,06	2,11	1,94	1,87	1,75
NPL Lokasi Proyek	2,44	2,54	2,63	2,69	2,79	2,69	2,70	2,63
LDR Lokasi Bank	77,21	79,61	74,04	76,51	76,08	79,69	78,90	78,69
LDR Lokasi Proyek	106,97	107,72	105,82	96,81	100,68	102,53	99,76	95,45

Sumber : Laporan Bank (diolah)



Perkembangan Ekonomi Makro Regional



1.1. Kondisi Umum Perekonomian Jawa Timur

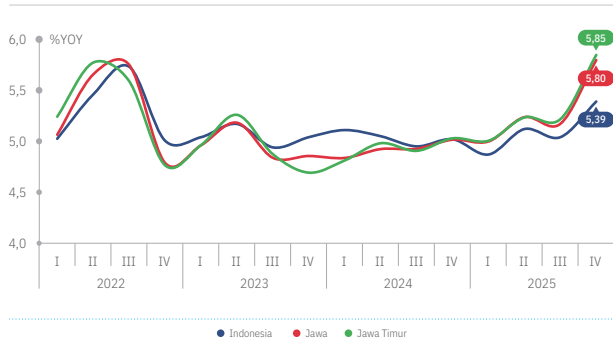
Perekonomian Jawa Timur pada triwulan IV 2025 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, akselerasi pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga (RT) dan net ekspor, serta perbaikan konsumsi pemerintah. Dari sisi lapangan usaha (LU) Utama, peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, LU Pertanian, dan LU Akomodasi dan Makan Minum menopang pertumbuhan ekonomi yang meningkat, di tengah perlambatan pertumbuhan LU Konstruksi.

Kinerja Perekonomian Triwulan IV 2025

Perekonomian global masih dalam tren melambat dan diliputi dengan ketidakpastian yang tetap tinggi, sejalan dengan dampak lanjutan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan kerentanan rantai pasok global. Kondisi tersebut tercermin pada *Global Economic Policy Uncertainty (GEPU) Index* pada triwulan IV 2025 yang secara rata-rata tercatat sebesar 389,43, lebih tinggi dibandingkan rata-rata triwulan IV tahun 2021-2024, yakni sebesar 248,08, serta meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 357,48¹. Pertumbuhan ekonomi AS melambat pada tahun 2025 didorong oleh meningkatnya tekanan eksternal pascapenerapan tarif resiprokal yang menekan kinerja impor. Perlambatan tersebut turut dipengaruhi oleh penurunan daya saing sektor industri, yang berdampak pada terbatasnya realisasi investasi, serta menyempitnya ruang fiskal di tengah tingginya defisit fiskal dan rasio utang Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok juga dalam tren melambat sebagai dampak pelemahan konsumsi domestik dan melambatnya pertumbuhan ekspor, kecuali komoditas teknologi informasi. Sementara itu, proses pemulihan ekonomi Uni Eropa masih berlanjut, ditopang oleh penguatan konsumsi domestik seiring dengan pelonggaran kebijakan moneter dan implementasi stimulus fiskal.

Perkembangan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi global 2025 yang sebesar 3,3% (yoy), dan diprakirakan melambat pada 2026 yaitu sebesar 3,2% (yoy). Di pasar keuangan global, probabilitas penurunan *Fed Funds Rate* (FFR) menurun, disertai dengan *yield* UST yang masih berada pada level tinggi, sejalan dengan defisit fiskal yang masih besar.

Grafik 1.1. Perekonomian Jawa Timur, Jawa, Nasional



Sumber : BPS (diolah)

1. *Economic Policy Uncertainty*

Sementara itu, indeks mata uang dolar AS (DXY) cenderung menguat sehingga menahan aliran modal ke *Emerging Market* (EM). Kondisi tersebut menuntut peningkatan kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak rambatan ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global yang masih tinggi tersebut terhadap perekonomian domestik.

Di tengah dinamika ekonomi dan ketidakpastian global, kinerja perekonomian Indonesia triwulan IV 2025 meningkat.

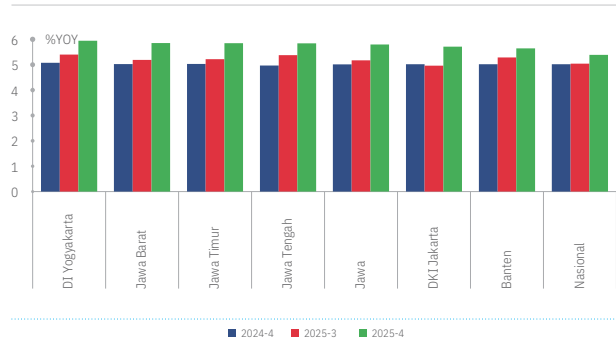
Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,39% (yoy) pada triwulan IV 2025, menguat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,04%. Lebih tingginya perekonomian Indonesia tersebut disokong oleh kenaikan konsumsi rumah tangga, belanja Pemerintah, dan permintaan eksternal.

Sejalan dengan nasional, perekonomian Jawa Timur pada triwulan IV 2025 juga tumbuh meningkat.

Pada triwulan laporan, kinerja ekonomi Jawa Timur tercatat tumbuh 5,85% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh 5,22% (yoy) (Grafik 1.1). Kinerja ekonomi Jawa Timur terpantau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa dan nasional yang masing-masing tercatat tumbuh sebesar 5,80% (yoy) dan 5,39% (yoy) (Grafik 1.2).

Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, perbaikan konsumsi pemerintah, serta lebih tingginya ekspor barang dan jasa menopang perekonomian Jawa Timur tetap berdaya tahan. Lebih tingginya konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan utamanya ditopang oleh peningkatan konsumsi ritel subkomponen makanan minuman dan barang budaya rekreasi seiring meningkatnya aktivitas selama momentum Nataru. Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga turut tercermin dari peningkatan pertumbuhan transaksi melalui kartu, transaksi nontunai, serta transaksi *e-commerce*. Sementara itu, perbaikan konsumsi pemerintah didukung oleh peningkatan pada komponen belanja pegawai APBN di Jawa Timur, belanja barang dan jasa APBD se-Jawa Timur, serta belanja bantuan sosial Pemerintah. Selanjutnya, pertumbuhan ekspor terpantau meningkat terutama ekspor dalam negeri (DN). Perbaikan ekspor dalam negeri tersebut tercermin dari muat barang

Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Jawa



Sumber : BPS (diolah)

Tabel 1.1. Pertumbuhan PDRB Jawa Timur – Sisi Pengeluaran

Komponen	2024					2025				
	I	II	III	IV	Tahunan	I	II	III	IV	Tahunan
Konsumsi Rumah Tangga	5,20	4,80	5,08	4,91	4,99	5,12	4,85	4,91	5,15	5,01
Konsumsi LNPRT	18,06	12,01	10,95	9,53	12,49	6,53	6,42	5,31	5,13	5,83
Konsumsi Pemerintah	10,23	5,67	4,07	2,47	5,24	1,92	-0,55	-0,53	2,13	0,73
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,42	5,06	5,40	6,05	5,49	2,20	6,13	7,09	6,66	5,54
Ekspor Barang Dan Jasa	8,25	10,13	10,78	7,58	9,17	6,08	7,73	7,19	6,65	6,63
Impor Barang Dan Jasa	10,46	11,01	12,46	7,95	10,42	4,63	7,63	7,35	6,23	6,13
PDRB Provinsi Menurut Penggunaan	4,81	4,98	4,91	5,03	4,93	5,00	5,23	5,22	5,85	5,33

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 1.2. Pertumbuhan PDRB Jawa Timur – Sisi Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2024					2025				
	I	II	III	IV	Tahunan	I	II	III	IV	Tahunan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-7,59	4,28	1,90	0,93	0,08	10,30	0,60	4,43	6,01	4,98
Pertambangan dan Penggalian	-2,89	-3,28	-0,97	4,70	-0,65	4,37	2,09	1,33	-1,61	1,50
Industri Pengolahan	6,10	4,55	5,89	5,05	5,40	4,11	7,36	6,18	6,28	5,98
Pengadaan Listrik dan Gas	10,17	11,74	5,00	1,83	6,93	10,40	1,95	2,71	5,53	5,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,60	3,36	0,69	0,36	2,24	-1,05	0,99	6,47	7,92	3,55
Konstruksi	8,16	7,15	6,52	5,97	6,92	1,11	5,56	5,94	5,57	4,59
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,49	3,97	4,36	5,35	4,55	3,57	3,93	3,41	5,01	3,99
Transportasi dan Pergudangan	14,89	8,37	8,25	7,05	9,50	7,22	9,32	7,11	5,77	7,33
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,75	8,60	5,56	4,27	6,98	7,32	8,38	7,52	8,96	8,06
Informasi dan Komunikasi	7,72	6,22	5,97	5,85	6,43	7,11	6,48	8,16	8,47	7,56
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,68	4,48	1,67	1,96	3,89	4,49	1,55	-1,62	4,59	2,24
Real Estate	3,14	2,78	2,87	2,85	2,91	2,14	4,03	3,69	3,58	3,36
Jasa Perusahaan	7,27	8,64	7,50	8,10	7,88	8,49	9,37	9,89	9,16	9,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,26	7,00	9,43	11,39	7,78	9,87	-2,11	0,73	0,66	2,10
Jasa Pendidikan	4,15	6,30	4,46	4,35	4,81	6,31	5,18	5,75	7,25	6,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,14	4,93	7,18	8,79	5,53	9,61	4,60	4,08	7,82	6,48
Jasa lainnya	8,92	9,69	5,73	9,87	8,56	5,55	6,62	9,50	9,86	7,92
Produk Domestik Regional Bruto	4,81	4,98	4,91	5,03	4,93	5,00	5,23	5,22	5,85	5,33

Sumber : BPS (diolah)

angkutan laut dalam negeri yang tumbuh lebih tinggi. Selain itu, peningkatan ekspor turut disokong oleh pertumbuhan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur dan ekspor luar negeri (LN) komoditas ikan dan hasil laut, produk kimia, kertas, serta tembaga. Perbaikan ekspor DN dan LN tersebut turut didukung oleh misi dagang Pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik ke dalam maupun ke luar negeri.

Dari sisi lapangan usaha (LU), akselerasi kinerja perekonomian terutama didukung oleh peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian dan Akmamin. Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan ekspor barang jasa berimplikasi pada pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Akomodasi Makan Minum. Menguatnya kinerja LU Industri Pengolahan ditunjang oleh pertumbuhan subLU industri

makanan dan minuman, industri kertas, industri kimia, serta industri logam dasar. Lebih tingginya pertumbuhan subLU tersebut turut terkonfirmasi dari kenaikan pertumbuhan ekspor komoditas ikan dan hasil laut, produk kimia, kertas, serta tembaga. Selain itu, percepatan LU Industri Pengolahan turut tecermin dari transaksi *Real Time Gross Settlement* (RTGS) yang tumbuh lebih tinggi pada triwulan laporan. Lebih lanjut, kinerja LU Pertanian tercatat tumbuh lebih tinggi seiring peningkatan pertumbuhan produksi padi, cabai merah, daging ayam ras, serta ikan tangkap laut seiring dengan normalisasi siklus panen komoditas pertanian pada triwulan laporan.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tetap kuat juga ditopang oleh laju investasi meskipun melambat. Moderasi laju investasi dipengaruhi oleh deselerasi investasi bangunan seiring sejumlah proyek strategis yang telah memasuki tahap

finalisasi. Namun demikian, kinerja investasi tetap kuat didorong oleh komponen investasi nonbangunan yang meningkat. Dari sisi LU utama, perlambatan kinerja terjadi pada LU Konstruksi seiring dengan perlambatan pada investasi bangunan dan kontraksi penjualan sektor properti. Meskipun melambat, kinerja LU Konstruksi masih tetap kuat yang ditopang oleh beberapa proyek strategis Jawa Timur yang masih dalam tahap pembangunan seperti Bendungan Bagong, Tol Probolinggo – Banyuwangi (Probawang) yang telah memasuki tahap 3, pembangunan Jalur Lintas Selatan, serta pembangunan Bendungan Pelimpah Sungai Tanggul.

Kinerja Perekonomian Tahun 2025

Kinerja perekonomian Jawa Timur keseluruhan tahun 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekonomi Jawa Timur pada tahun 2025 tumbuh 5,33% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 sebesar 4,93% (yoy). Akselerasi ekonomi Jawa Timur ditunjang oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, investasi, dan net ekspor. Konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi terutama didukung oleh peningkatan konsumsi ritel, transaksi nontunai, dan transaksi pembelian *e-commerce* kategori produk makanan minuman, otomotif dan aksesoris, serta barang rumah tangga dan perkantoran. Sementara itu, peningkatan pertumbuhan investasi pada tahun 2025 disokong oleh peningkatan investasi nonbangunan yang tecermin pada peningkatan impor barang modal dan kredit investasi, serta penguatan investasi bangunan seiring dengan pengembangan kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Jawa Timur. Selanjutnya, lebih tingginya pertumbuhan net ekspor tahun 2025 terjadi seiring perlambatan impor yang lebih dalam, peningkatan ekspor komoditas emas perhiasan, lemak minyak, produk kimia, ikan dan hasil laut, serta kuatnya perdagangan antarwilayah dan pelaksanaan misi dagang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari sisi penawaran, percepatan kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2025 terutama ditopang oleh kinerja LU Industri Pengolahan, LU Pertanian, dan LU Penyediaan Akomodasi Makan Minum seiring dengan akselerasi konsumsi rumah tangga dan net ekspor. Di sisi lain, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh perlambatan konsumsi pemerintah seiring pembatasan belanja daerah, terutama di awal tahun sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja Pemerintah. Hal ini berimplikasi terhadap perlambatan beberapa LU utama khususnya LU Perdagangan dan LU Konstruksi.

1.2. PDRB Sisi Pengeluaran

Perekonomian Jawa Timur pada triwulan IV 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh meningkatnya aktivitas konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, serta ekspor barang dan jasa. Lebih tingginya konsumsi rumah tangga disokong oleh pertumbuhan pada komponen makanan minuman, dan barang budaya serta rekreasi seiring dengan hari besar keagamaan nasional (HBKN) dan Natal-Tahun Baru (Nataru) pada periode laporan.

Di sisi lain, belanja Pemerintah pada periode laporan membaik seiring dengan realisasi belanja pegawai dan belanja bansos. Akselerasi perdagangan antardaerah serta peningkatan ekspor LN beberapa komoditas utama, turut merefleksikan kinerja ekspor pada triwulan IV 2025 yang meningkat, di tengah perlambatan impor. Secara keseluruhan tahun 2025, ekonomi Jawa Timur mencatatkan pertumbuhan yang lebih kuat seiring dengan peningkatan konsumsi rumah tangga, belanja Pemerintah, dan investasi.

1.2.1. Konsumsi

Kinerja konsumsi pada triwulan IV 2025 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Momentum ini terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang menguat seiring tingginya aktivitas masyarakat selama momen HBKN Nataru. Peningkatan tersebut tecermin dari naiknya konsumsi ritel, khususnya komponen makanan minuman dan barang budaya rekreasi. Selain itu, volume transaksi pembayaran juga mengalami lonjakan baik transaksi kartu, transaksi nontunai, serta transaksi perdagangan *e-commerce*. Dari sisi fiskal, konsumsi pemerintah juga mencatatkan perbaikan pada triwulan laporan. Sementara itu, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR) tetap kuat meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tetap kuatnya konsumsi LNPR tecermin pada aktivitas partai politik, organisasi kemasyarakatan seiring tingginya aktivitas keagamaan menjelang Hari Raya Natal selama triwulan laporan.

1.2.1.1. Konsumsi Swasta (Rumah Tangga & LNPR)²

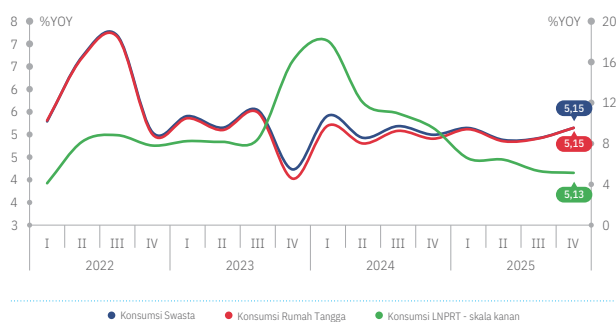
Kinerja Konsumsi Swasta Triwulan IV 2025

Konsumsi swasta pada triwulan IV 2025 meningkat dibandingkan triwulan III 2025. Pada triwulan IV 2025, konsumsi swasta tumbuh 5,15% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,92% (yoy). Peningkatan pertumbuhan konsumsi swasta Jawa Timur dipacu oleh konsumsi rumah tangga. Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,15% (yoy), meningkat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,91% (yoy). Sementara itu, kinerja konsumsi LNPR tumbuh sebesar 5,13% (yoy) pada triwulan IV 2025, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya tumbuh 5,31% (yoy) (Grafik 1.3).

Kenaikan kinerja konsumsi rumah tangga Jawa Timur dipicu oleh aktivitas saat momen Nataru seiring peningkatan tingkat keyakinan konsumen. Keyakinan konsumen Jawa Timur tercatat lebih tinggi tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang meningkat dari 121,96 pada triwulan III 2025 menjadi 129,85 pada triwulan laporan. Peningkatan keyakinan konsumen salah satunya disokong oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini – Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia di Jawa Timur yang juga meningkat, yakni dari 110,56 pada triwulan III 2025 menjadi 118,03 pada triwulan IV 2025 (Grafik 1.4).

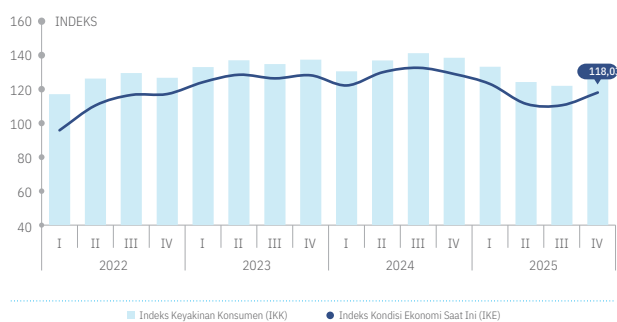
2. Konsumsi swasta merupakan penjumlahan dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPR.

Grafik 1.3. Pertumbuhan Konsumsi Swasta, Rumah Tangga dan LNPR



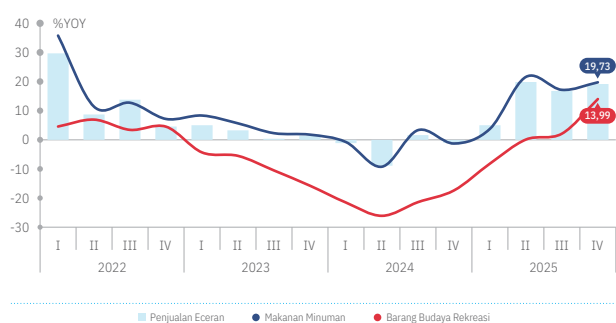
Sumber : BPS

Grafik 1.4. Keyakinan Konsumen dan Kondisi Ekonomi Saat Ini



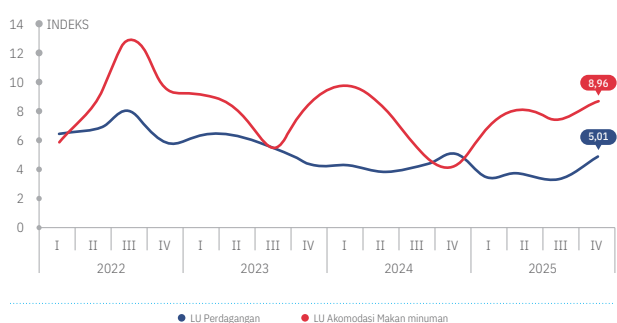
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 1.5. Konsumsi Ritel Jawa Timur



Sumber: SPE Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.6. Perkembangan Kinerja LU Perdagangan dan LU Akomodasi Makanan dan Minuman



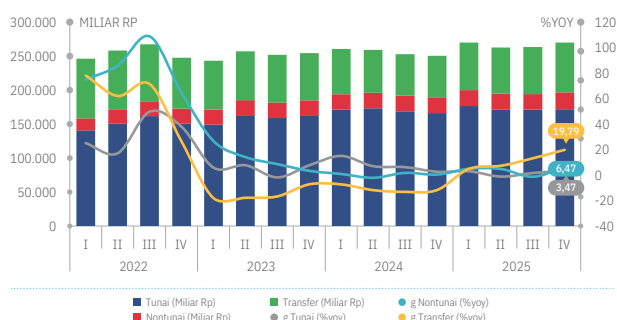
Sumber: BPS

Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga Jawa Timur pada triwulan laporan terjadi di sektor ritel, terutama komponen makanan minuman dan barang budaya rekreasi yang dipicu oleh aktivitas HBKN Nataru. Konsumsi ritel Jawa Timur yang solid direpresentasikan oleh Indeks Penjualan Riil (IPR) Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia di Jawa Timur. IPR mengalami peningkatan pada triwulan IV 2025, dari tumbuh 16,75% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi tumbuh lebih tinggi sebesar 19,14% (yoy). Peningkatan konsumsi ritel terutama bersumber dari komponen makanan minuman dan barang budaya rekreasi tecermin dari Indeks Riil Penjualan Eceran Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia di Jawa Timur yang masing – masing tercatat dari 17,15% dan 2,10% (yoy) pada triwulan III 2025, meningkat menjadi 19,73% dan 13,99% (yoy) pada periode laporan (Grafik 1.5). Lonjakan konsumsi ritel komponen makanan minuman dan barang budaya rekreasi menunjukkan tingginya konsumsi masyarakat terhadap aktivitas hiburan dan perayaan akhir tahun pada momen Nataru. Hal ini juga terkonfirmasi dari peningkatan LU Perdagangan dan LU Akomodasi Makanan dan Minuman terutama yang meningkat pada triwulan laporan (Grafik 1.6).

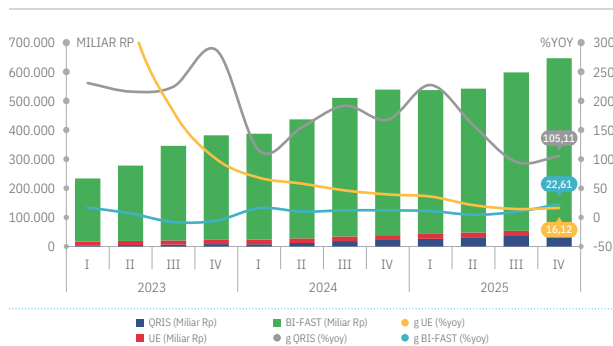
Penguatan kinerja konsumsi pada triwulan IV 2025 juga tecermin pada peningkatan transaksi pembayaran menggunakan kartu, transaksi nontunai, dan transaksi *e-commerce*. Transaksi pembayaran menggunakan kartu (APMK) Jawa Timur meningkat pada triwulan IV 2025, baik transaksi tunai, nontunai, maupun transfer. Transaksi tunai,

nontunai, dan transfer menggunakan kartu pada triwulan IV 2025 masing – masing tumbuh sebesar 3,47%; 6,47%; dan 19,79% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,58%; -1,35%; dan 13,14% (yoy) (Grafik 1.7). Transaksi nontunai, seperti transaksi QRIS, uang elektronik (UE), dan BI-FAST juga mengalami peningkatan pada triwulan IV 2025, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada transaksi QRIS, yaitu tumbuh sebesar 105,11% (yoy) (Grafik 1.8). Lebih lanjut, percepatan konsumsi rumah tangga turut terkonfirmasi dari peningkatan transaksi pembelian melalui *e-commerce*, terutama pada kategori produk makanan minuman, *fashion*, otomotif dan aksesoris, serta barang rumah tangga dan perkantoran (Grafik 1.9). Kenaikan ini mencerminkan intensitas belanja masyarakat yang lebih tinggi, baik melalui instrumen kartu maupun *platform* digital.

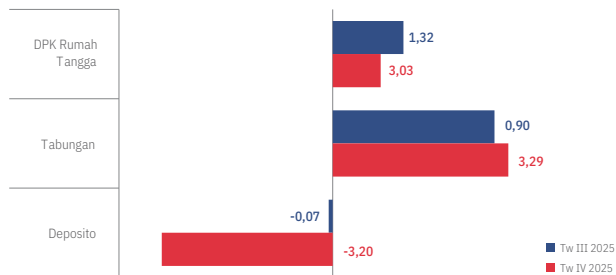
Grafik 1.7. Pertumbuhan Transaksi APMK



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.8. Transaksi QRIS, Uang Elektronik, BI-FAST

Sumber: Bank Indonesia

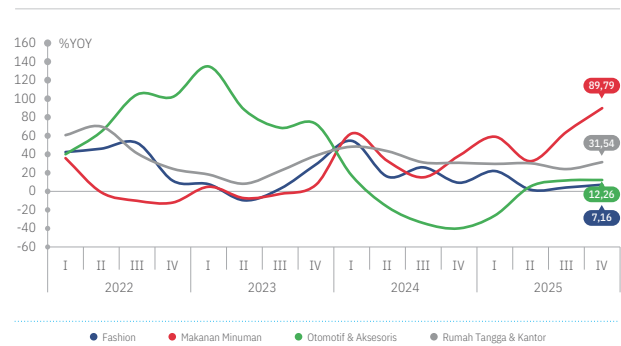
Grafik 1.10. Pertumbuhan DPK Perbankan Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Komponen, Triwulan III 2025 – Triwulan IV 2025

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

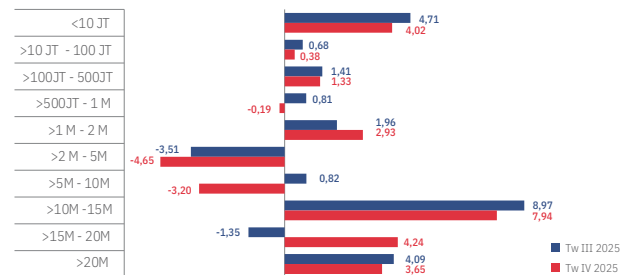
Di tengah peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga pada triwulan IV 2025 melambat, terutama disumbang komponen **deposito**. DPK sektor rumah tangga di perbankan Jawa Timur pada triwulan IV 2025 tumbuh terbatas sebesar 0,90% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh 1,32% (yoy). Perlambatan pertumbuhan DPK rumah tangga terutama disebabkan oleh terkontraksinya komponen deposito. Sementara, DPK komponen tabungan pada triwulan IV 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 1.10). Ditinjau dari nilainya, perlambatan DPK rumah tangga pada triwulan laporan hampir terjadi pada semua kelompok nilai, kecuali pada kelompok nilai Rp 1-2 miliar dan Rp 15-20 miliar (Grafik 1.11). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa di tengah peningkatan konsumsi, masyarakat cenderung mengalihkan simpanan ke instrumen tabungan yang lebih likuid. Selain itu, perilaku konsumsi masyarakat tetap rasional, tecermin dari upaya menjaga stabilitas keuangan melalui penempatan dana pada instrumen tabungan.

Kinerja Konsumsi Swasta Tahun 2025

Kinerja konsumsi swasta sepanjang tahun 2025 tetap tumbuh kuat. Konsumsi swasta Jawa Timur pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,01% (yoy), kendati termoderasi dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 5,13% (yoy). Moderasi konsumsi swasta terutama dipengaruhi oleh perlambatan kinerja

Grafik 1.9. Perkembangan Nominal Transaksi E-Commerce Lokasi Pembeli Jawa Timur

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.11. Pertumbuhan DPK Perbankan Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Nilai, Triwulan III 2025 – Triwulan IV 2025

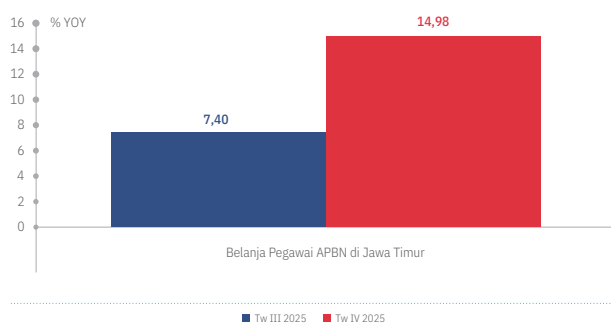
Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

konsumsi LNPRT sejalan dengan normalisasi aktivitas pasca momentum Pemilu 2024, baik Pilpres maupun Pilkada. Meski demikian, konsumsi swasta tetap terjaga disumbang oleh penguatan konsumsi rumah tangga. Lebih tingginya konsumsi rumah tangga disokong oleh peningkatan konsumsi ritel, tecermin dari Indeks Penjualan Riil Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia di Jawa Timur yang tumbuh lebih tinggi dari -2,49% (yoy) pada tahun 2024 menjadi 15,15% (yoy) pada tahun 2025. Selain itu, akselerasi transaksi nontunai serta meningkatnya pembelian melalui *e-commerce* turut memperkuat konsumsi rumah tangga, khususnya pada kategori makanan dan minuman, otomotif dan aksesoris, serta perlengkapan rumah tangga dan perkantoran.

1.2.1.2. Konsumsi Pemerintah

Kinerja Konsumsi Pemerintah Triwulan IV 2025

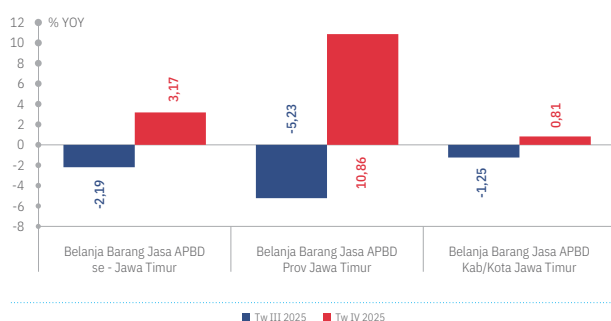
Konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2025 mencatatkan pertumbuhan positif. Pada triwulan IV 2025, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 2,13% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 0,53% (yoy). Peningkatan kinerja terutama didorong oleh meningkatnya realisasi belanja pegawai yang bersumber dari APBN di Jawa Timur, diikuti oleh belanja barang jasa dalam APBD se – Jawa Timur, serta penyaluran bantuan sosial (bansos) Pemerintah pada triwulan laporan.

Grafik 1.12. Perkembangan Realisasi Belanja Pegawai APBN di Jawa Timur

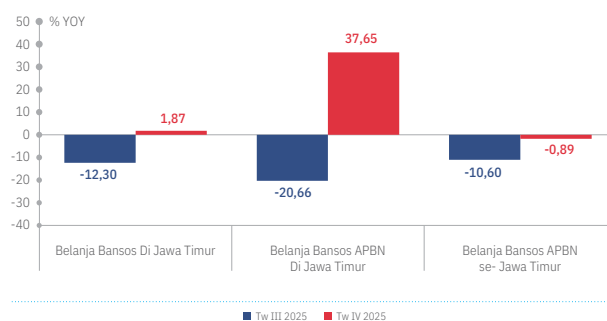
Sumber: Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

Belanja pegawai APBN di Jawa Timur dan belanja barang jasa APBD se-Jawa Timur meningkat pada triwulan IV 2025. Belanja pegawai kementerian/lembaga (K/L) APBN di Jawa Timur tercatat tumbuh 14,98% (yoy) pada triwulan IV 2025, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,40% (yoy) (Grafik 1.12). Peningkatan realisasi belanja pegawai Pemerintah di Jawa Timur terutama didukung oleh kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara itu, realisasi belanja barang jasa APBD se-Jawa Timur (Provinsi dan 38 Kabupaten/Kota) tercatat tumbuh sebesar 3,17% (yoy) pada triwulan laporan, meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang berkontraksi sebesar 2,19% (yoy). Peningkatan belanja barang jasa APBD terjadi di APBD Provinsi maupun 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur (Grafik 1.13). Perbaikan ini terutama terkait dengan pelunasan pengadaan barang dan jasa di akhir tahun, yang mencerminkan akselerasi belanja Pemerintah Daerah untuk menuntaskan program dan kewajibannya.

Lebih lanjut, realisasi belanja bantuan sosial APBN di Jawa Timur dan APBD se-Jawa Timur turut menyumbang pertumbuhan konsumsi pemerintah yang lebih tinggi pada triwulan IV 2025. Realisasi Belanja Bansos APBN di Jawa Timur dan APBD se-Jawa Timur pada triwulan laporan masing – masing tercatat sebesar 37,65% dan -0,89% (yoy). Pencapaian tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing – masing tercatat -20,66% dan -10,60% (yoy) (Grafik 1.14). Peningkatan realisasi belanja bansos Pemerintah

Grafik 1.13. Perkembangan Realisasi Belanja Barang Jasa APBD Se – Jawa Timur

Sumber: BPKAD, DJPb Provinsi Jawa Timur

Grafik 1.14. Perkembangan Realisasi Belanja Pegawai APBN di Jawa Timur

Sumber: BPKAD, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

di Jawa Timur terjadi pada belanja bansos APBN di Jawa Timur, terutama bantuan pada sektor pendidikan dasar dan menengah sebesar Rp41,85 juta dan bantuan pendidikan tinggi sebesar Rp138,54 miliar.

Kinerja Konsumsi Pemerintah Tahun 2025

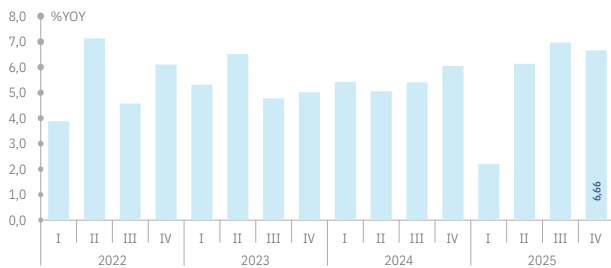
Konsumsi pemerintah pada tahun 2025 tumbuh terbatas dan lebih landai dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025, konsumsi pemerintah tumbuh 0,73% (yoy), lebih landai dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 5,24% (yoy). Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh perlambatan realisasi belanja barang dan jasa Pemerintah Jawa Timur. Perlambatan belanja tersebut terjadi seiring normalisasi pascapelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada 2024, serta adanya pembatasan belanja daerah khususnya di awal tahun, sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah.

1.2.2. Investasi

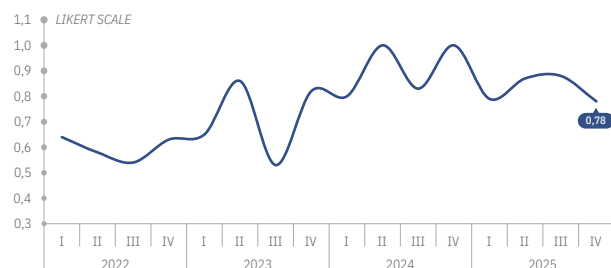
Investasi pada triwulan IV 2025 tumbuh positif, seiring peningkatan investasi nonbangunan tecermin dari impor barang modal dan kredit investasi yang tumbuh lebih tinggi. Perlambatan pertumbuhan terjadi di komponen investasi bangunan yang sejalan dengan konsumsi semen dan impor barang pendukung konstruksi yang tumbuh lebih landai pada triwulan laporan. Lebih lanjut, deselerasi investasi bangunan tecermin dari melambatnya kinerja LU Konstruksi seiring sejumlah proyek strategis yang telah memasuki tahap finalisasi.

Kinerja Investasi Triwulan IV 2025

Kinerja investasi Jawa Timur pada triwulan IV 2025 tetap tumbuh kuat. Investasi Jawa Timur pada triwulan IV 2025 tumbuh 6,66% (yoy), tetap tumbuh kuat meskipun lebih landai dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 6,96% (yoy) (Grafik 1.15). Perlambatan investasi pada triwulan laporan terjadi pada investasi bangunan. Melambatnya pertumbuhan investasi di Jawa Timur sejalan dengan kondisi investasi dari *Liaison* Bank Indonesia yang melambat pada triwulan laporan. Kondisi investasi dunia usaha dari *Liaison* Bank Indonesia di Jawa Timur pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 0,78, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 0,88 (Grafik 1.16).

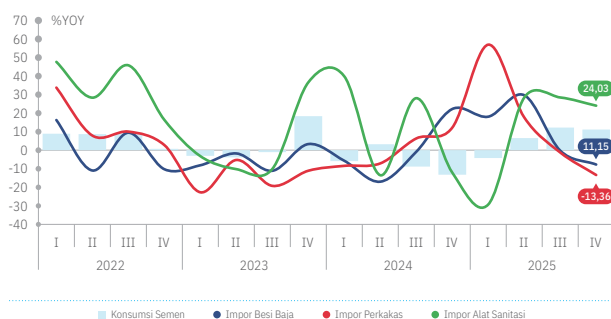
Grafik 1.15. Pertumbuhan Investasi Jawa Timur

Sumber: BPS (diolah)

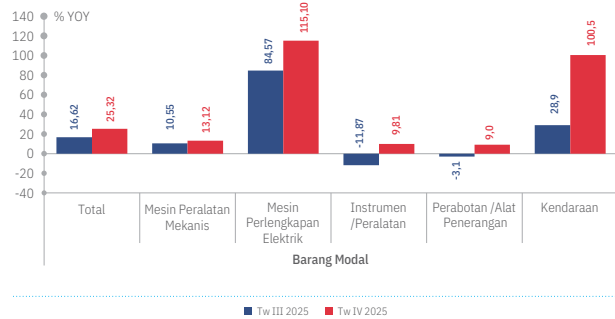
Grafik 1.16. Kondisi Investasi Dunia Usaha Jawa Timur

Sumber: Liaison Bank Indonesia (diolah)

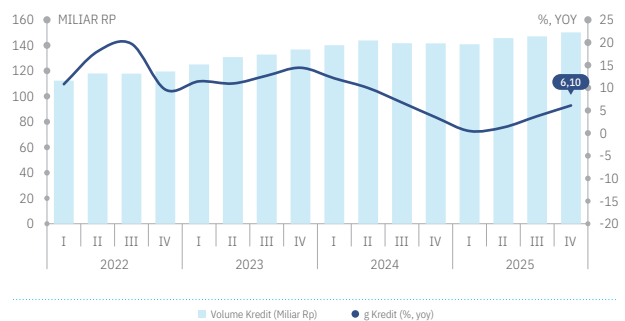
Perlambatan investasi bangunan tecermin dari lebih rendahnya pertumbuhan konsumsi semen dan impor barang pendukung konstruksi. Konsumsi semen di Jawa Timur pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 11,15% (yoy), lebih landai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,24% (yoy). Aktivitas pembangunan yang lebih moderat turut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan impor barang pendukung konstruksi, seperti besi baja, perkakas, dan alat sanitasi. Impor besi baja, perkakas, dan alat sanitasi pada triwulan IV 2025 masing – masing tercatat sebesar -7,73%; -13,46%; dan 24,03% (yoy), lebih landai dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing – masing tercatat -0,20%; -1,20%; dan 28,46% (yoy) (Grafik 1.17). Lebih lanjut, perlambatan investasi bangunan yang lebih dalam tertahan oleh berlanjutnya

Grafik 1.17. Pertumbuhan Konsumsi Semen dan Impor Barang Pendukung Konstruksi Jawa Timur

Sumber: Asosiasi Semen, Laporan Bea Cukai (diolah)

Grafik 1.18. Pertumbuhan Komponen Impor Barang Modal Jawa Timur

Sumber: Laporan Bea Cukai (diolah)

Grafik 1.19. Pertumbuhan Kredit Investasi Jawa Timur

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

pembangunan beberapa proyek strategis Jawa Timur, meliputi Progres proyek Tol Probawangi Paket III, Jalur Lintas Selatan (JLS) Banyuwangi, proyek LPG *Refrigerated* Tuban, Tol Kediri–Tulungagung, serta akses Bandara Dhoho Kediri menjadi katalis penting dalam menjaga momentum pertumbuhan investasi pada triwulan IV 2025 (**lihat Boks 1: Mempercepat Konektivitas sebagai Katalisator Ekonomi: Pengembangan Jaringan Jalan di Wilayah Jawa Timur**).

Perlambatan kinerja investasi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan investasi nonbangunan yang tecermin dari peningkatan impor barang modal dan kredit investasi. Peningkatan impor barang modal turut mendukung kinerja investasi yang tetap tumbuh tinggi di triwulan laporan, terutama pada impor komoditas mesin peralatan mekanis, mesin perlengkapan elektrik, instrumen, perabot dan alat penerangan, serta kendaraan dan bagiannya (Grafik 1.18). Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit investasi di Jawa Timur pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 6,10% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,74% (yoy) (Grafik 1.19). Kenaikan kinerja penyaluran kredit investasi terutama terjadi pada sektor industri pengolahan, perdagangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum.

Kinerja Investasi Tahun 2025

Investasi di Jawa Timur untuk keseluruhan tahun 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Kinerja investasi Jawa Timur pada tahun 2025 tumbuh 5,54% (yoy),

lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 5,49% (yoy). Penguatan investasi tahun 2025 terutama terjadi pada investasi nonbangunan melalui peningkatan impor barang modal, seperti mesin, peralatan, dan kendaraan, dibarengi akselerasi kredit investasi yang mencerminkan investasi dunia usaha dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas. Percepatan investasi nonbangunan turut disumbang oleh pengembangan KI dan KEK yang sedang berlangsung (**lihat Boks 2: Studi Perkembangan, Pola Spasial, dan Determinan Investasi di Provinsi Jawa Timur**). Sementara itu, peningkatan investasi yang lebih tinggi tertahan oleh investasi bangunan yang relatif moderat, sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja modal Pemerintah di awal tahun 2025. Namun demikian, perlambatan investasi bangunan yang lebih dalam tertahan oleh berlanjutnya proyek strategis seperti jalan tol Probawangi Paket III, JLS Banyuwangi, proyek LPG refrigerated Tuban, jalan tol Kediri – Tulungagung, akses bandara Dhoho Kediri, serta proyek strategis swasta di tahun 2025.

1.2.3. Ekspor – Impor

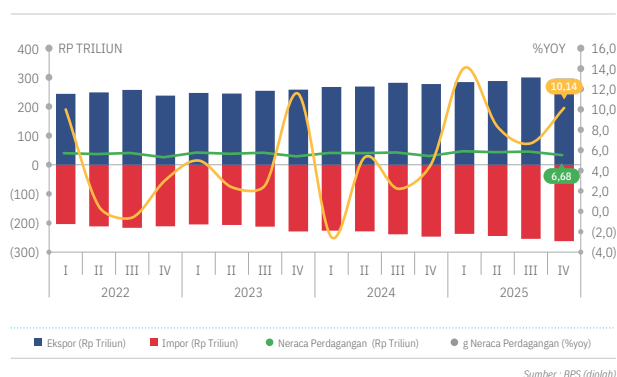
Net ekspor Jawa Timur pada triwulan IV 2025 mencatatkan surplus dan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, seiring peningkatan pertumbuhan ekspor di tengah laju impor yang tertahan. Kinerja ekspor barang dan jasa menunjukkan penguatan yang cukup solid. Peningkatan muat barang angkutan laut dalam negeri mengindikasikan naiknya aktivitas perdagangan antarwilayah, sementara jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh lebih tinggi turut mendorong ekspor jasa. Di sisi eksternal, ekspor LN berbagai komoditas utama turut mengakselerasi ekspor, didukung penguatan misi dagang. Sementara itu, lebih rendahnya kinerja impor utamanya terjadi pada impor DN yang tecermin dari perlambatan bongkar barang angkutan laut dalam negeri dan impor konsentrat tembaga yang terhenti di tengah peningkatan pertumbuhan impor LN.

Kinerja Ekspor Impor Triwulan IV 2025

Neraca perdagangan Jawa Timur pada triwulan IV 2025 mencatatkan surplus dan tumbuh lebih tinggi. Pada triwulan IV 2025, neraca perdagangan Jawa Timur mencatatkan net ekspor sebesar Rp33,09 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar Rp45,09 triliun (ADHK 2010). Meski demikian secara pertumbuhan, pencapaian tersebut mencatatkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025, yakni dari 6,68% (yoy) menjadi 10,14% (yoy). Kenaikan pertumbuhan tahunan (yoy) net ekspor seiring akselerasi pertumbuhan ekspor di tengah pertumbuhan impor yang melambat (Grafik 1.20).

Kinerja ekspor barang dan jasa tumbuh meningkat pada triwulan IV 2025. Pertumbuhan ekspor Jawa Timur triwulan laporan tercatat sebesar 6,65% (yoy), lebih tinggi dari capaian pertumbuhan pada triwulan III 2025 sebesar 6,54% (yoy) (Tabel 1.1). Peningkatan kinerja ekspor terutama tercermin dari kenaikan pertumbuhan muat barang angkutan laut (Pelabuhan

Grafik 1.20. Neraca Perdagangan Jawa Timur



Tanjung Perak) dalam negeri, bertambahnya kunjungan wisatawan mancanegara, peningkatan ekspor LN beberapa komoditas utama, seperti ikan dan hasil laut, produk kimia, kertas, serta tembaga, dengan didukung oleh intensifikasi misi dagang.

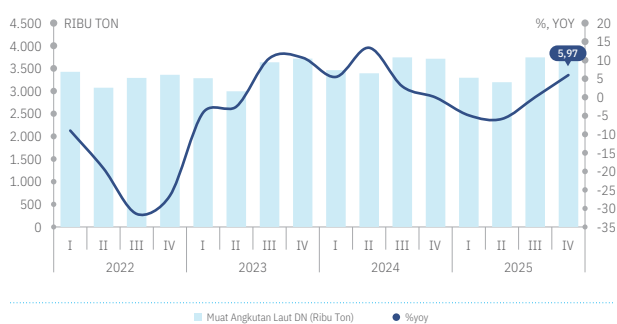
Sementara itu, kinerja impor terpantau mengalami perlambatan, dari 6,51% (yoy) pada triwulan III 2025, menjadi 6,23% (yoy) pada triwulan laporan. Perlambatan terutama terjadi pada komponen impor dalam negeri (DN). Hal tersebut tecermin dari melambatnya aktivitas bongkar barang angkutan laut domestik, yang mengindikasikan penurunan intensitas arus barang antarwilayah. Selain itu, impor konsentrat tembaga tercatat terhenti akibat gangguan produksi yang dipicu oleh longsor tambang di wilayah Papua.

Kinerja Ekspor Triwulan IV 2025

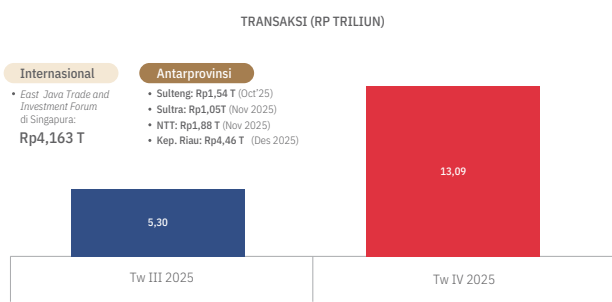
Kinerja ekspor Jawa Timur pada triwulan IV 2025 meningkat dibandingkan triwulan III 2025. Ekspor pada triwulan IV 2025 mencapai Rp295,28 triliun (ADHK 2010), atau tumbuh sebesar 6,65% (yoy). Pencapaian tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 6,54% (yoy).³ Peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa Jawa Timur pada triwulan IV 2025 terutama terjadi pada komponen ekspor DN. Pertumbuhan ekspor DN tecermin dari aktivitas muat barang angkutan laut melalui Pelabuhan Tanjung Perak pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 5,97% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh terbatas sebesar 0,03% (yoy) (Grafik 1.21). Akselerasi ekspor LN dan DN turut didorong oleh penguatan aktivitas perdagangan melalui pelaksanaan misi dagang, baik di tingkat internasional maupun antarprovinsi. Kegiatan tersebut antara lain *East Java Trade and Investment Forum* di Singapura, serta misi dagang ke sejumlah provinsi, seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Riau dengan total transaksi mencapai Rp13,09 triliun (Grafik 1.22).

Kenaikan pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara turut menyokong akselerasi kinerja ekspor Jawa Timur, khususnya ekspor jasa. Peningkatan kinerja ekspor jasa di Jawa Timur terkonfirmasi dari kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur melalui Bandara Juanda yang tumbuh lebih tinggi.

3. Pangsa ADHK ekspor Jawa Timur pada triwulan IV 2025 sebesar 57,09% terhadap total PDRB Jawa Timur.

Grafik 1.21. Pertumbuhan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Melalui Pelabuhan Tanjung Perak

Sumber: BPS (diolah)

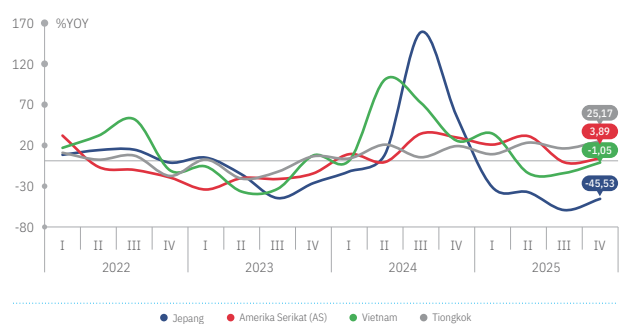
Grafik 1.22. Realisasi Misi Dagang

Sumber: BPS, Disperindag Prov. Jatim (diolah)

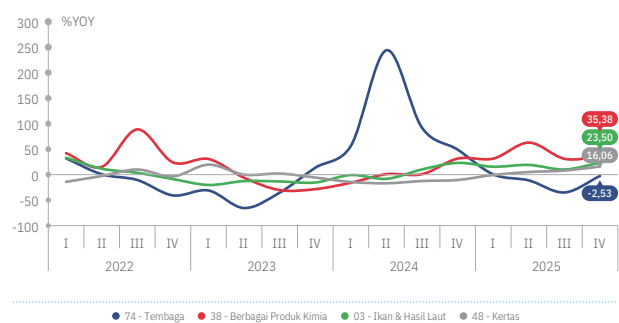
Kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 76.182 kunjungan atau tumbuh 11,59% (yoy). Capaian tersebut tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sedikit berkontraksi sebesar 0,23% (yoy) (Grafik 1.23). Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara berkontribusi pada peningkatan ekspor karena belanja wisatawan asing di dalam negeri dicatat sebagai ekspor jasa. Ketika wisatawan mancanegara membelanjakan uangnya untuk akomodasi di Jawa Timur, terjadi aliran devisa dari luar negeri ke dalam negeri, hal ini akan meningkatkan nilai ekspor jasa dan mendorong penerimaan devisa. Hal ini terkonfirmasi dengan LU Akomodasi Makanan dan Minuman yang meningkat pada triwulan laporan.

Grafik 1.23. Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Jawa Timur Melalui Bandara Juanda

Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.24. Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Negara Tujuan Utama

Sumber: Laporan Bea Cukai (diolah)

Grafik 1.25. Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Komoditas Utama

Sumber: Laporan Bea Cukai (diolah)

Secara total, ekspor barang LN Jawa Timur mengalami perlambatan, meski terdapat beberapa komoditas dan negara tujuan ekspor LN yang tumbuh meningkat. Berdasarkan data laporan Bea Cukai, ekspor LN pada triwulan IV 2025 tumbuh 5,41% (yoy), melambat dibandingkan capaian triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 25,63% (yoy). Meski demikian, terdapat sejumlah komoditas dan negara tujuan ekspor nonmigas yang tumbuh meningkat pada triwulan IV 2025. Berdasarkan negara tujuan, kinerja ekspor LN terjadi pada negara mitra dagang utama Jawa Timur, seperti Tiongkok, AS, Tiongkok, Jepang, dan Vietnam menunjukkan penguatan (Grafik 1.24). Sementara berdasarkan komoditas, kinerja ekspor LN Jawa Timur tetap kuat yang utamanya ditopang oleh penjualan ekspor komoditas ikan dan hasil laut, produk kimia, kertas, serta tembaga yang meningkat (Grafik 1.25). Ekspor komoditas ikan dan hasil laut pada triwulan IV 2025 tercatat menunjukkan peningkatan, terutama dalam bentuk ikan dan udang beku serta produk olahan udang, dengan tujuan pasar AS, Tiongkok, Jepang, dan Malaysia. Ekspor komoditas produk kimia juga tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama pada komoditas alkohol dan turunannya, dengan tujuan ekspor ke AS dan Malaysia. Kinerja ekspor komoditas kertas juga tumbuh lebih tinggi pada triwulan IV 2025 terutama pada komoditas kertas papan, karton, dan kertas tisu, yang dikirim ke AS, Tiongkok, dan Malaysia. Sementara itu, perbaikan ekspor LN komoditas tembaga pada triwulan IV 2025 seiring penjualan katoda tembaga hasil produksi pada periode Juli – Oktober 2025, sebelum terjadinya insiden longsor tambang tembaga di Papua Tengah.

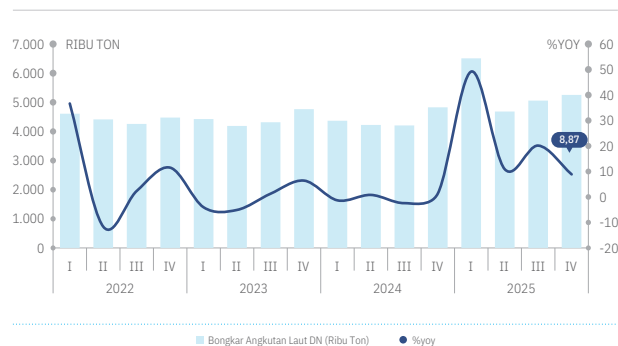
Kinerja Ekspor Tahun 2025

Kinerja ekspor Jawa Timur sepanjang tahun 2025 tetap tumbuh tinggi, meskipun lebih landai dibandingkan tahun 2024. Ekspor Jawa Timur pada tahun 2025 tumbuh sebesar 6,63% (yoy), tetap tumbuh tinggi, kendati lebih landai dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 9,08% (yoy). Perlambatan kinerja ekspor terjadi karena kinerja muat barang angkutan laut dalam negeri dan angkutan udara yang tumbuh lebih landai, prospek perekonomian global yang lebih rendah, serta ketidakpastian global yang masih berlanjut, termasuk kebijakan tarif resiprokal Trump dan konflik geopolitik di Timur Tengah. Meski demikian, ekspor Jawa Timur tetap menunjukkan pertumbuhan yang solid seiring penguatan pada beberapa komoditas unggulan. Peningkatan ekspor komoditas logam mulia dan perhiasan (emas perhiasan), lemak minyak, produk kimia, serta ikan dan hasil laut menjadi penopang utama. Lebih lanjut, intensifikasi promosi perdagangan melalui pelaksanaan misi dagang sebanyak 12 kali pada sepanjang tahun 2025 turut memperluas akses pasar dan menjaga momentum perdagangan antardaerah dan luar negeri.

Kinerja Impor Triwulan IV 2025

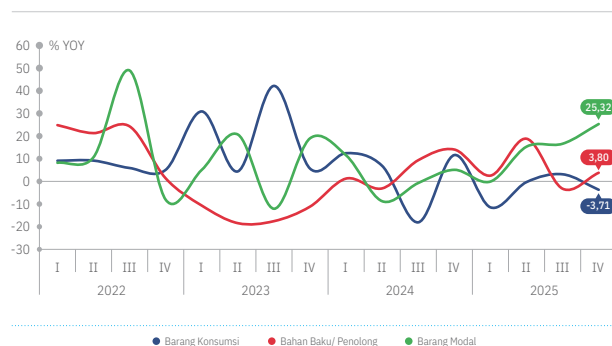
Impor Jawa Timur pada triwulan IV 2025 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Impor pada PDRB Jawa Timur tercatat sebesar Rp262,19 triliun (ADHK 2010) atau tumbuh 6,23% (yoy), lebih moderat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,51% (yoy) (Tabel 1.1). Perlambatan impor pada triwulan IV 2025 terutama dipicu oleh penurunan impor DN. Perlambatan kinerja impor DN terindikasi dari kinerja bongkar barang angkutan laut dalam negeri melalui Pelabuhan Tanjung Perak pada triwulan laporan. Aktivitas bongkar barang di Pelabuhan Tanjung Perak pada triwulan IV 2025 terpantau tumbuh sebesar 8,87% (yoy), tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 20,16% (yoy) (Grafik 1.26). Perlambatan impor DN juga dipengaruhi oleh terhentinya impor konsentrat tembaga akibat insiden longsor tambang tembaga di Papua Tengah, sehingga cukup berdampak pada perlambatan kinerja impor Jawa Timur triwulan laporan.

Grafik 1.26. Pertumbuhan Bongkar Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Melalui Pelabuhan Tanjung Perak



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.27. Pertumbuhan Impor LN Jawa Timur



Sumber: Laporan Bea Cukai (diolah)

Perlambatan kinerja impor Jawa Timur yang lebih dalam tertahan oleh impor LN yang tumbuh meningkat pada triwulan laporan. Berdasarkan data laporan Bea Cukai, impor LN pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 4,56% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,41% (yoy). Secara umum, peningkatan impor LN pada triwulan IV 2025 didorong oleh impor bahan baku/penolong dan impor barang modal. Impor bahan baku/penolong dan impor barang modal Jawa Timur pada triwulan laporan masing – masing tumbuh sebesar 3,80% dan 25,12% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -3,24% dan 16,62% (yoy) (Grafik 1.27). Komoditas utama yang menjadi motor pertumbuhan impor LN di triwulan IV 2025, antara lain komoditas mesin peralatan mekanis, logam mulia dan perhiasan, buah-buahan, mesin perlengkapan elektrik, serta plastik. Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan impor bahan baku/penolong dan impor barang modal sejalan dengan akselerasi LU Industri Pengolahan pada triwulan laporan.

Kinerja Impor Tahun 2025

Impor LN Jawa Timur pada tahun 2025 mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2024. Impor Jawa Timur pada tahun 2025 tumbuh sebesar 6,13% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh tinggi sebesar 10,30% (yoy). Lebih rendahnya kinerja impor disebabkan oleh kebutuhan barang impor bahan baku pendukung kegiatan ekspor yang lebih rendah, ketidakpastian global yang masih berlanjut akibat kebijakan tarif resiprokal Trump dan konflik geopolitik Timur Tengah, serta kebutuhan impor barang konsumsi yang diperkirakan lebih rendah seiring dengan kecenderungan konsumsi domestik Jawa Timur yang dipenuhi oleh produk dalam negeri dan produk substitusi. Lebih lanjut, penurunan impor Jawa Timur tahun 2025 juga dipengaruhi oleh berkontraksinya impor LN komoditas sereal, sisa industri makanan, plastik, bahan kimia, tembakau, dan gula. Penurunan impor secara keseluruhan juga dipengaruhi oleh penurunan aktivitas impor antarwilayah. Kondisi ini terjadi seiring dengan turunnya volume impor konsentrat tembaga dari Papua yang digunakan sebagai salah satu bahan baku utama dalam industri

logam dasar. Berkurangnya pasokan dan kebutuhan atas komoditas tersebut dipicu oleh insiden longsor tambang di Papua, yang menghambat proses produksi dan distribusi konsentrat tembaga.

1.3. PDRB Sisi Lapangan Usaha

Kinerja ekonomi Jawa Timur triwulan IV 2025 yang meningkat didorong oleh peningkatan kinerja LU utama, yakni LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, LU Pertanian dan LU Akomodasi Makan dan Minum. Kendati demikian, ekonomi Jawa Timur tertahan untuk tumbuh lebih tinggi akibat perlambatan kinerja LU Konstruksi.

1.3.1. Industri Pengolahan

Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2025 tumbuh menguat dibandingkan triwulan III 2025, sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan net ekspor pada triwulan laporan.

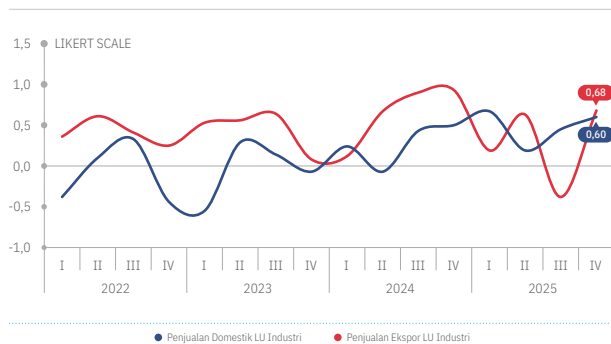
Kinerja LU Industri Pengolahan Triwulan IV 2025

Pada triwulan IV 2025, kinerja LU Industri Pengolahan menunjukkan penguatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 6,28% (yoy), meningkat dibandingkan capaian pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,18% (yoy) (Tabel 1.2). Penguatan kinerja LU Industri Pengolahan antara lain tecermin dari perkembangan penjualan domestik dan

ekspor LU Industri Pengolahan. Berdasarkan hasil *Liaison Bank Indonesia* di Jawa Timur, penjualan domestik dan ekspor LU Industri Pengolahan sebesar LS 0,68 dan LS 0,60 pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dari LS -0,68 dan LS 0,45 pada triwulan III 2025. Penguatan penjualan terjadi seiring peningkatan konsumsi rumah tangga dan perdagangan antardaerah Jawa Timur (Grafik 1.28).

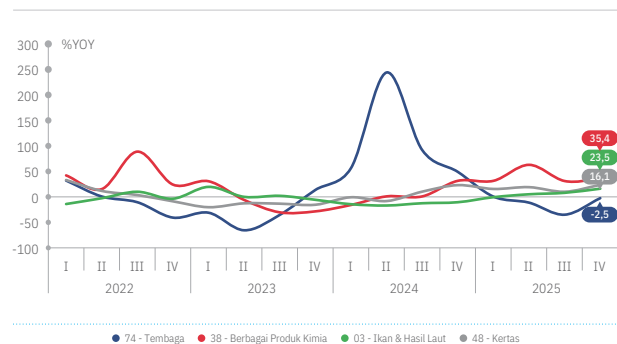
Pertumbuhan kinerja LU Industri Pengolahan di Jawa Timur pada triwulan IV 2025 didorong oleh aktivitas yang membaik pada subLU industri makanan dan minuman, industri kimia, industri kertas, serta industri logam dasar. Peningkatan kinerja subLU makanan minuman, kimia, dan kertas tecermin dari peningkatan ekspor pada komoditas ikan dan hasil laut, produk kimia, dan kertas yang masing-masing tumbuh 35,38%; 23,50%; dan 16,06% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan ekspor komoditas ikan dan hasil laut terutama pada produk ikan dan udang beku, serta produk olahan udang. Ekspor komoditas produk kimia dan kertas terjadi pada produk alkohol dan turunannya, kertas papan, karton, dan kertas tisu. Sementara, perbaikan kinerja subLU industri logam dasar terkonfirmasi dari perbaikan ekspor komoditas tembaga dari sebelumnya terkontraksi sebesar 34,98% (yoy), membaik menjadi terkontraksi sebesar 2,53% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 1.29). Akselerasi Industri Pengolahan di Jawa Timur juga tergambar dalam konsumsi listrik di sektor Industri yang tumbuh sebesar 4,78% (yoy), meningkat dari capaian triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,24% (yoy) (Grafik 1.30).

Grafik 1.28. Kondisi Penjualan Domestik dan Ekspor LU Industri Pengolahan Jawa Timur



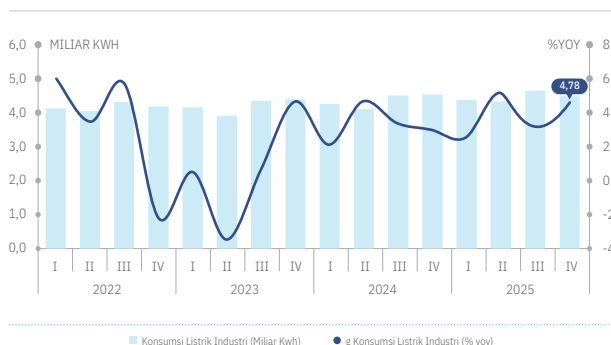
Sumber: Liaison Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.29. Perkembangan Ekspor Komoditas Industri Pengolahan (Makanan, Kimia, Logam, Kertas)



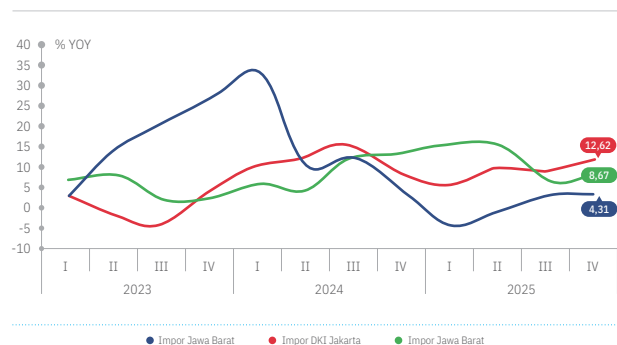
Sumber: Laporan Bea Cukai (diolah)

Grafik 1.30. Perkembangan Konsumsi Listrik Industri

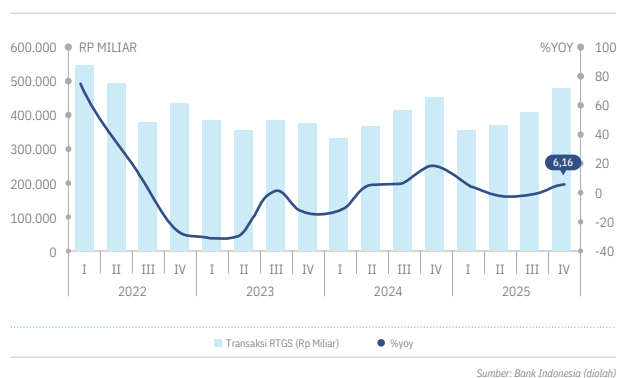


Sumber: PLN (diolah)

Grafik 1.31. Perkembangan Impor Provinsi Mitra Dagang Jawa Timur



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.32. Perkembangan Transaksi Melalui Real Time Gross Settlement (RTGS)

Pertumbuhan kinerja LU Industri Pengolahan di Jawa Timur sejalan dengan membaiknya indikator perdagangan antardaerah, serta tecermin pada peningkatan transaksi nominal besar melalui RTGS. Hal ini tecermin dari pertumbuhan muat angkutan laut dalam negeri di Jawa Timur yang mencapai 5,97% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 0,03% (yoy) (Grafik 1.21). Selanjutnya, penguatan aktivitas penjualan antarwilayah tersebut juga didukung oleh peningkatan impor di provinsi-provinsi mitra dagang utama Jawa Timur, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta, yang juga mencatatkan akselerasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga (Grafik 1.31). Lebih lanjut, pertumbuhan LU Industri Pengolahan turut tecermin dari peningkatan transaksi nominal besar melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS). Transaksi RTGS di Jawa Timur pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 6,18% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,96% (yoy) (Grafik 1.32).

Kinerja LU Industri Pengolahan Tahun 2025

Secara keseluruhan tahun 2025, LU Industri Pengolahan di Jawa Timur mencatatkan kenaikan dibandingkan tahun 2024. LU Industri Pengolahan pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,98% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,40% (yoy). Hal tersebut didorong oleh kuatnya permintaan domestik dan eksternal Jawa Timur pada tahun 2025. Lebih tingginya konsumsi rumah tangga dan investasi dibandingkan tahun sebelumnya menopang permintaan domestik sehingga mendukung kinerja LU Industri Pengolahan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi mitra dagang dan akselerasi ekspor komoditas utama Jawa Timur juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor eksternal yang menggerakkan akselerasi LU Industri Pengolahan.

1.3.2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Peningkatan kinerja penjualan eceran, khususnya pada komponen makanan dan minuman serta rekreasi, menjadi salah satu faktor utama yang mendukung pertumbuhan LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (LU Perdagangan) di Jawa Timur pada triwulan IV 2025.

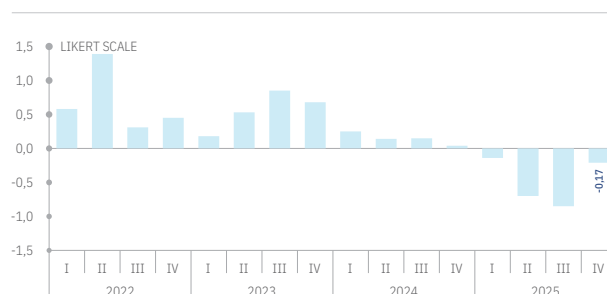
Selain itu, penguatan aktivitas perdagangan antardaerah turut memperkuat kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (LU Perdagangan) Jawa Timur.

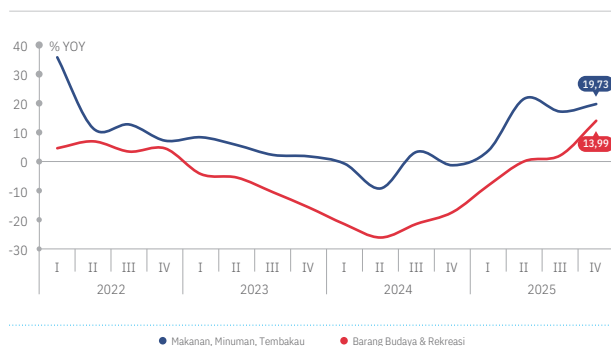
Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran Triwulan IV 2025

Pada triwulan IV 2025, kinerja LU Perdagangan terpantau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja LU Perdagangan pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh 5,01% (yoy), berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 3,41% (yoy) (Tabel 1.2). Pertumbuhan LU Perdagangan di Jawa Timur pada periode laporan terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan eceran, khususnya komponen makanan minuman dan budaya rekreasi, serta menguatnya perdagangan antarwilayah.

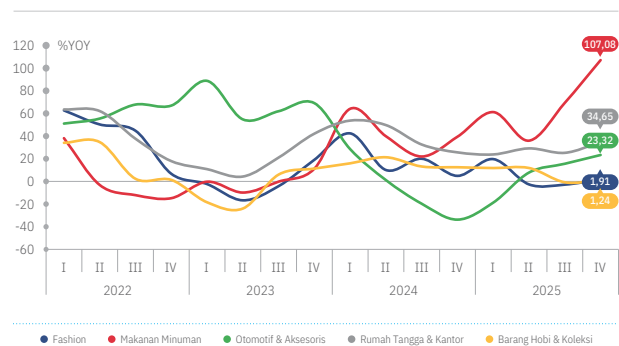
Peningkatan kinerja LU Perdagangan terkonfirmasi dari lebih tingginya konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan. Kenaikan kinerja LU Perdagangan sejalan dengan perbaikan *likert scale* hasil survei *Liaison* Bank Indonesia Jawa Timur dari LS -0,85 pada triwulan III 2025, menjadi sebesar LS -0,21 pada triwulan laporan (Grafik 1.33). Lebih lanjut, konsumsi rumah tangga turut mendorong pertumbuhan LU Perdagangan yang tecermin dari transaksi menggunakan kartu, dan transaksi nontunai melalui QRIS, uang elektronik, dan BI-FAST. Peningkatan transaksi menggunakan kartu terjadi secara *broad based*, baik transaksi tunai, nontunai, dan transfer (Grafik 1.7–1.8).

Peningkatan kinerja LU Perdagangan juga terefleksi pada peningkatan perdagangan ritel komponen makanan dan minuman, barang budaya dan rekreasi, serta transaksi pembelian *e-commerce*. Hal ini terkonfirmasi dengan Indeks Penjualan Riil (IPR) – Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia komponen makanan minuman, serta barang budaya dan rekreasi masing-masing tercatat tumbuh sebesar 19,73% dan 13,99% (yoy) pada triwulan laporan, tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 17,15% dan 2,10% (yoy) pada periode laporan (Grafik 1.34). Kemudian, lebih tingginya pertumbuhan LU Perdagangan juga

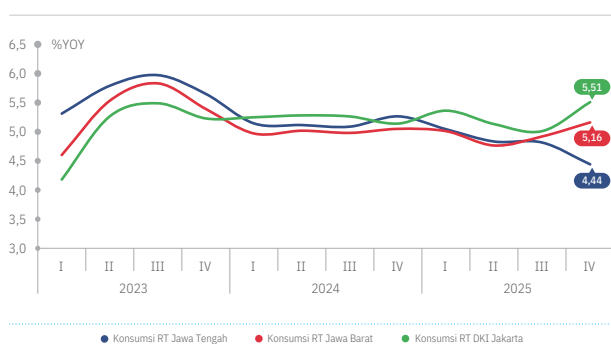
Grafik 1.33. Perkembangan Penjualan LU Perdagangan

Grafik 1.34. Perkembangan Nominal Transaksi E-Commerce Lokasi Pembeli Jawa Timur

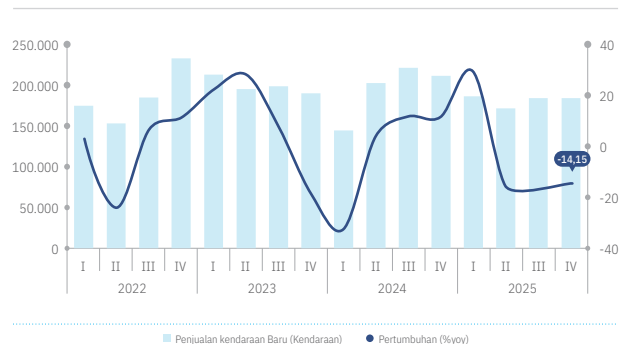
Sumber: SPE Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.35. Perkembangan Nominal Transaksi E-Commerce Lokasi Penjual Jawa Timur

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.36. Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Mitra Dagang Jawa Timur

Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.37. Perkembangan Penjualan Kendaraan

Sumber: Bapenda Jawa Timur (diolah)

tercermin oleh peningkatan nominal transaksi pembelian *e-commerce* pada kategori produk makanan minuman, *fashion*, otomotif dan aksesoris, barang rumah tangga dan perkantoran, serta barang hobi dan koleksi. Pada triwulan IV 2025, nominal transaksi *e-commerce* kategori produk makanan minuman, *fashion*, otomotif dan aksesoris, barang rumah tangga dan perkantoran, serta barang hobi dan koleksi tumbuh lebih tinggi masing – masing sebesar 107,08%; 1,91%; 23,32%; 34,65%; dan 1,24% (yoy) meningkat dari 69,37%; -2,84%; 15,58%; 25,23%; dan -0,78% (yoy) (Grafik 1.35). Hal ini mengindikasikan bahwa penjualan ritel masyarakat baik melalui kanal konvensional maupun digital menunjukkan perbaikan seiring dengan periode HBKN Natal dan Tahun Baru di akhir tahun 2025.

Membaiknya kinerja perdagangan pada triwulan IV 2025 juga turut didukung oleh peningkatan perdagangan antardaerah dan perbaikan kinerja penjualan kendaraan. Hal tersebut tergambarkan dalam akselerasi aktivitas muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak yang meningkat hingga 5,97% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 0,03% (yoy) (Grafik 1.22). Lebih lanjut, peningkatan perdagangan antardaerah juga terefleksi pada peningkatan konsumsi rumah tangga di Provinsi mitra dagang Jawa Timur yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta (Grafik 1.36). Sementara itu, perbaikan penjualan kendaraan baru di Jawa Timur pada periode laporan yang berkontraksi 14,15% (yoy) atau tercatat sebesar 187.522 unit, namun membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang menurun 16,75% (yoy) atau tercatat sebesar 183.805 unit.

Kendati masih berkontraksi, perbaikan penjualan kendaraan baru pada triwulan laporan turut menyumbang peningkatan kinerja LU Perdagangan (Grafik 1.37).

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2025

Pada tahun 2025, kinerja LU Perdagangan tetap kuat, kendati mengalami moderasi dibandingkan tahun 2024. Kinerja LU Perdagangan pada tahun 2025 tercatat tumbuh kuat sebesar 3,99% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 4,55% (yoy). Perlambatan kinerja LU Perdagangan pada tahun 2025 tercermin pada perlambatan kinerja volume muat barang angkutan laut dalam negeri dan angkutan udara, serta kontraksi penjualan kendaraan baru. Perlambatan turut dipengaruhi kebijakan efisiensi dan realokasi fiskal yang menahan belanja barang dan jasa, serta *long low season* yang lebih panjang untuk sektor pusat perbelanjaan pasca Ramadan dan HBKN Idulfitri pada awal tahun 2025. Sementara, tetap kuatnya pertumbuhan LU Perdagangan ditopang oleh kinerja penjualan ritel yang tumbuh lebih tinggi.

1.3.3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan IV 2025 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan produksi padi, cabai merah, daging ayam ras, dan ikan tangkap laut.

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Triwulan IV 2025

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menguat dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 6,01% (yoy) pada triwulan IV 2025, terakselerasi dibandingkan capaian triwulan III 2025 sebesar 4,43% (yoy) (Tabel 1.2). Peningkatan kinerja LU Pertanian terutama disumbang oleh lebih tingginya produksi komoditas padi, cabai merah, daging ayam ras, dan ikan tangkap laut. Akselerasi kinerja LU Pertanian turut terkonfirmasi dari hasil *Liaison Bank Indonesia* di Jawa Timur. *Likert scale* penjualan domestik LU Pertanian Jawa Timur mengalami peningkatan, dari LS -0,42 pada triwulan III 2025, menjadi LS 0,36 pada triwulan IV 2025 (Grafik 1.38).

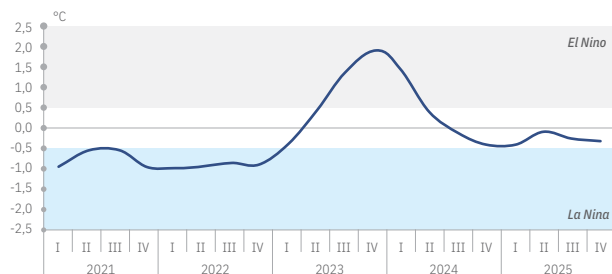
Peningkatan kinerja LU Pertanian pada triwulan IV 2025 disokong oleh produksi komoditas padi di Jawa Timur yang tumbuh lebih tinggi pada triwulan laporan. Produksi padi Jawa Timur pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 33,45% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,26% (yoy) (Grafik 1.39). Kinerja positif tersebut sejalan dengan normalisasi siklus tanam dan panen setelah mengalami kemunduran produksi pada tahun sebelumnya. Pada periode 2023–2024, produksi padi mengalami penurunan akibat kondisi iklim kering yang dipicu oleh fenomena El Niño, tecermin dari indeks El Niño yang berada di atas ambang normal (sekitar $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ *Sea Surface Temperature* (SST)). Kondisi tersebut menyebabkan pergeseran jadwal tanam dan panen sepanjang tahun 2024 (Grafik 1.40).

Grafik 1.38. Perkembangan Kondisi Usaha LU Pertanian



Sumber: Liaison Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.40. Indeks El Nino dan La Nina

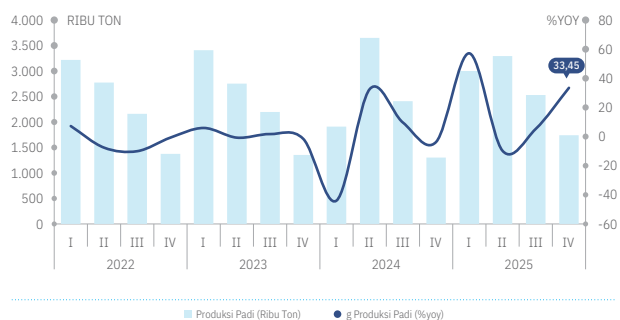


Sumber: Climate Prediction Center (diolah)

Peningkatan pertumbuhan produksi cabai merah dan produksi bawang merah yang tumbuh positif turut menunjang akselerasi kinerja LU Pertanian Jawa Timur pada periode laporan. Berdasarkan data dari BPS dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, produksi cabai besar Jawa Timur pada triwulan IV 2025 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Produksi cabai besar Jawa Timur pada triwulan laporan tercatat mencapai 28,87 ribu ton, atau tumbuh sebesar 98,87% (yoy). Kinerja produksi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 36,69% (yoy). Sementara, produksi bawang merah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 94 ribu ton atau tumbuh positif sebesar 13,83% (yoy). Pertumbuhan positif tersebut turut menyumbang peningkatan kinerja LU Pertanian pada triwulan laporan (Grafik 1.41).

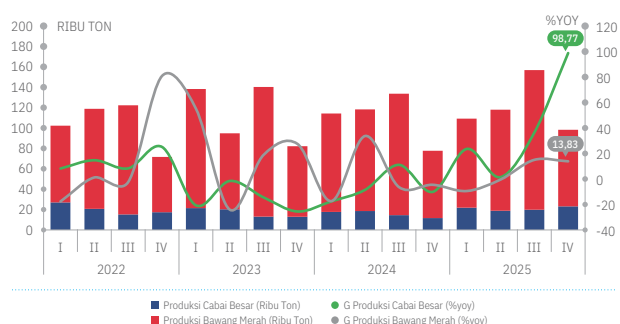
Lebih tingginya kinerja LU Pertanian Jawa Timur turut didorong peningkatan sub sektor peternakan dan perikanan utamanya komoditas daging ayam ras dan ikan hasil tangkap. Peningkatan kinerja komoditas daging ayam ras tumbuh sejalan dengan penguatan program swasembada protein nasional, termasuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, peningkatan produksi komoditas ikan hasil tangkap sejalan dengan pertumbuhan ekspor LN komoditas ikan dan hasil laut yang tumbuh 23,50% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 10,09% (yoy).

Grafik 1.39. Pertumbuhan Produksi Padi Jawa Timur



Sumber: BPS, Dinas Pertanian Jawa Timur (diolah)

Grafik 1.41. Pertumbuhan Produksi Bawang Merah dan Cabai Besar Jawa Timur



Sumber: BPS, Dinas Pertanian Jawa Timur (diolah)

Adanya berbagai program peningkatan produksi pertanian pada tahun 2025 turut menunjang akselerasi kinerja LU Pertanian pada triwulan IV 2025. Program tersebut antara lain Perluasan Areal Tanam (PAT), Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Optimalisasi Lahan (OPLAH), penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) prapanen dan pascapanen, pengembangan kawasan hortikultura, pengamanan produksi, fasilitas peningkatan nilai tambah pertanian, serta pengembangan champion hortikultura Jawa Timur. Implementasi berbagai program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan produksi dan mendukung pertumbuhan LU Pertanian di Jawa Timur.

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2025

LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk keseluruhan 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Kinerja LU Pertanian pada tahun 2025 tumbuh sebesar 4,98% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh terbatas sebesar 0,08% (yoy). Peningkatan kinerja LU Pertanian pada tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya produksi padi (GKG), tanaman hortikultura, seperti bawang merah, cabai merah, cabai rawit, hasil peternakan, dan perikanan. Peningkatan produksi pertanian tahun 2025 yang lebih optimal terutama didukung dengan kondisi cuaca yang lebih baik dibandingkan tahun 2024.

1.3.4. Konstruksi

LU Konstruksi pada triwulan IV 2025 tumbuh kuat, kendati lebih landai dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan sejumlah proyek strategis yang telah memasuki tahap finalisasi. Perkembangan tersebut tecermin pada perlambatan konsumsi semen dan impor barang pendukung konstruksi, seperti besi baja, perkakas, dan alat sanitasi di tengah terus berlanjutnya proyek strategis di Jawa Timur.

Kinerja LU Konstruksi Triwulan IV 2025

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan IV 2025 tumbuh meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Konstruksi tumbuh 5,57% (yoy) pada periode laporan, sedikit lebih rendah daripada triwulan III 2025 yang tumbuh 5,94% (yoy) (Tabel 1.2). Lebih lanjut, lebih rendahnya pertumbuhan LU Konstruksi ini terkonfirmasi dari realisasi kegiatan usaha LU Konstruksi – SKDU Bank Indonesia di Jawa Timur pada triwulan IV 2025 yang tercatat sebesar 1,07% (SBT), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 3,73% (SBT) (Grafik 1.42).

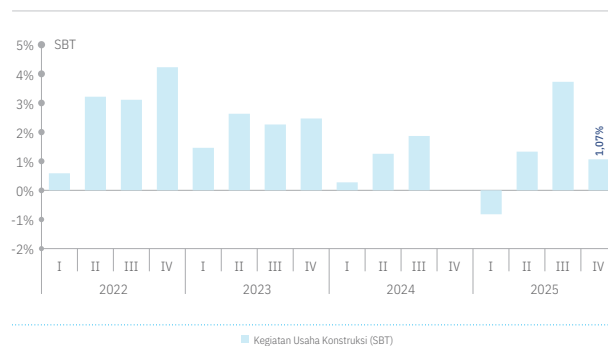
Perlambatan LU Konstruksi pada triwulan laporan tecermin dari lebih landainya pertumbuhan konsumsi semen dan impor barang pendukung konstruksi. Konsumsi semen di Jawa Timur pada triwulan IV 2025 tercatat 2.467,92 ribu ton atau tumbuh sebesar 11,15% (yoy). Pencapaian tersebut lebih rendah

dibandingkan pertumbuhan konsumsi semen pada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,24% (yoy) (Grafik 1.43). Selain itu, impor besi baja dan perkakas sebagai bahan pendukung konstruksi berkontraksi pada triwulan IV 2025, tercatat masing-masing sebesar -7,73% (yoy) dan -13,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -0,20% (yoy) dan -1,20% (yoy). Sementara itu, impor alat sanitasi sebagai pendukung konstruksi tumbuh melambat pada triwulan IV 2025 yang tercatat 24,03% (yoy), lebih rendah dari 28,46% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.44). Moderasi LU Konstruksi turut dipengaruhi sejumlah proyek strategis di Jawa Timur telah memasuki tahap finalisasi.

Penjualan properti residensial pada pasar primer turut menyebabkan perlambatan pada kinerja LU Konstruksi pada triwulan IV 2025. Berdasarkan Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Pasar Primer di Jawa Timur, kinerja penjualan properti residensial pasar primer di kota Surabaya Raya berkontraksi sebesar 39,77% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 35,50% (yoy). Penurunan utamanya terjadi pada penjualan rumah tipe kecil yang berkontraksi 54,00% (yoy). Penurunan tersebut lebih dalam dari penurunan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 11,33% (yoy). Penurunan penjualan properti residensial utamanya pada tipe kecil berimplikasi pada perlambatan aktivitas konstruksi residensial pada triwulan laporan (Grafik 1.45).

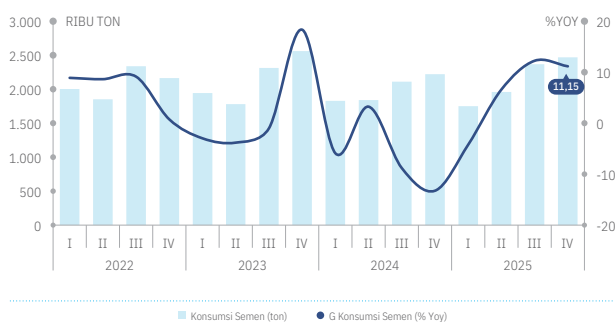
Perlambatan LU Konstruksi juga tecermin dalam realisasi kredit investasi LU Konstruksi yang tumbuh melambat yaitu sebesar 11,15% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya, yaitu 12,25% (yoy) (Grafik 1.46). Meski demikian, perlambatan yang lebih dalam tertahan seiring dengan berlanjutnya beberapa proyek strategis Jawa Timur yang masih dalam tahap pembangunan seperti Bendungan Bagong, Tol Probolinggo – Banyuwangi (Probwangi) yang telah memasuki tahap 3, pembangunan Jalur Lintas Selatan, serta pembangunan Bendungan Pelimpah Sungai Tanggul.

Grafik 1.42. Realisasi Kegiatan Usaha LU Konstruksi



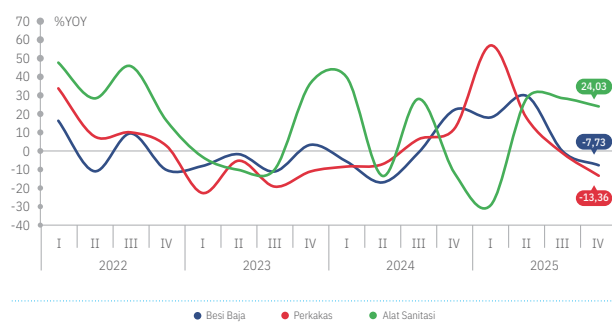
Sumber: SKDU Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.43. Perkembangan Konsumsi Semen



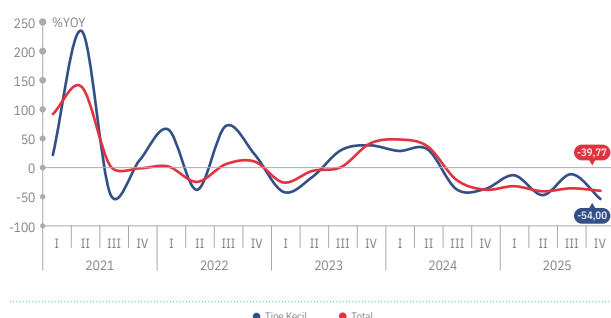
Sumber: Asosiasi Semen (diolah)

Grafik 1.44. Perkembangan Penjualan Eceran Berdasarkan Komponen



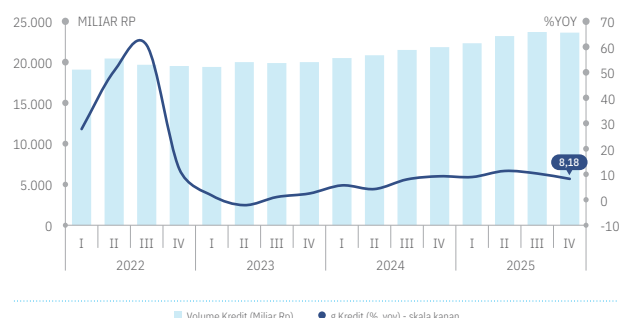
Sumber: Laporan Bea Cukai (diolah)

Grafik 1.45. Perkembangan Survei Harga Properti Residensial Pasar Primer



Sumber: SPE Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.46. Perkembangan Kredit Investasi LU Konstruksi



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

Kinerja LU Konstruksi Tahun 2025

Kinerja LU Konstruksi pada tahun 2025 tumbuh solid, meskipun termoderasi dibandingkan tahun 2024. LU Konstruksi pada tahun 2025 tumbuh 4,59% (yoy), tumbuh lebih landai dibandingkan tahun 2024 yang tercatat tumbuh 6,92% (yoy). Lebih landainya kinerja LU Konstruksi pada tahun 2025 disebabkan oleh efisiensi belanja modal Pemerintah sejak awal 2025, meskipun masih ditopang program revitalisasi sekolah di Jawa Timur. Perlambatan yang lebih dalam tertahan oleh berlanjutnya proyek strategis di Jawa Timur, pengembangan KI dan KEK yang masif, serta investasi bangunan pada sektor unggulan Jawa Timur, seperti industri makanan minuman, pengolahan tembakau, kimia/petrokimia, serta barang mineral nonlogam.

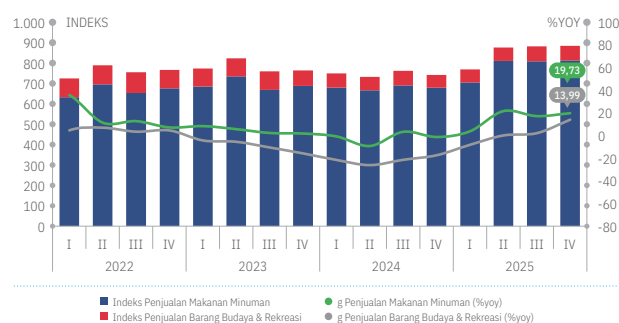
1.3.5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Jawa Timur pada triwulan IV 2025 terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Lebih tingginya pertumbuhan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan laporan terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan penjualan makanan minuman dan barang budaya rekreasi, akselerasi jasa penyediaan makanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Triwulan IV 2025

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh meningkat pada triwulan laporan. Pada triwulan IV 2025, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 8,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh 7,52% (yoy) (Tabel 1.2). Akselerasi kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dipicu oleh pertumbuhan penyedia makanan minuman, serta pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara. Berdasarkan Survei Penjualan Eceran – Bank Indonesia di Jawa Timur, permintaan penjualan makanan dan minuman serta penjualan barang budaya dan rekreasi mengalami peningkatan. Hal ini tecermin

Grafik 1.47. Pertumbuhan Penjualan Komponen Makanan Minuman dan Budaya Rekreasi



Sumber: SPE Bank Indonesia (diolah)

dari Indeks Penjualan Eceran yang masing-masing tumbuh 19,73% (yoy) dan 13,99% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 17,15% (yoy) dan 2,10% (yoy). Peningkatan penjualan eceran makanan minuman sejalan dengan peningkatan kondisi usaha jasa penyedia makanan dan minuman dipicu oleh peningkatan SPPG untuk program MBG yang hingga akhir tahun 2025 ini sudah beroperasi 18.180 unit, serta akselerasi permintaan pada periode Nataru (Grafik 1.47–1.48).

Peningkatan lebih lanjut didorong oleh akselerasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Jawa Timur dan kunjungan wisatawan nusantara ke beberapa kota wisata. Jumlah kunjungan wisman ke Jawa Timur melalui Bandara Juanda pada triwulan IV 2025 tercatat mencapai 76.182 ribu kunjungan, mengalami peningkatan sebesar 11,59% (yoy) pada triwulan laporan, tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan kontraksi sebesar 0,23% (yoy). Peningkatan kunjungan wisman ke Jawa Timur pada triwulan laporan seiring dengan periode liburan wisatawan mancanegara (Grafik 1.49). Lebih lanjut, peningkatan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga ditunjang oleh lebih tingginya pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara ke beberapa kota wisata di Jawa Timur, terutama Kota Batu dan Banyuwangi (Grafik 1.50).

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2025

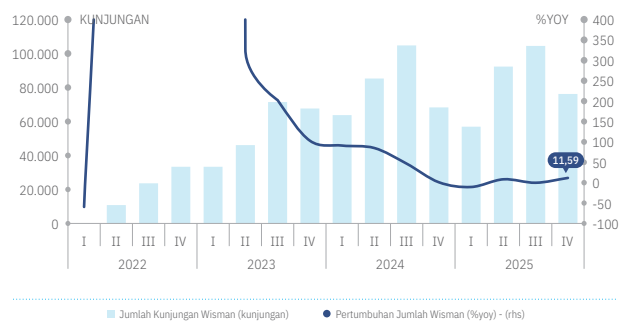
Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2024. LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 8,06% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 6,98% (yoy). Peningkatan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum disokong oleh akselerasi permintaan masyarakat untuk jasa akomodasi dan makan minum, utamanya pada triwulan I dan IV 2025, sejalan dengan momen Ramadan, HBKN Idulfitri, dan Nataru. Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2025 yang meningkat turut terkonfirmasi dari lebih tingginya penjualan makanan minuman, salah satunya jasa penyediaan makanan SPPG untuk program MBG yang mulai diimplementasikan pada tahun 2025.

Grafik 1.48. Perkembangan SPPG yang Telah Beroperasi



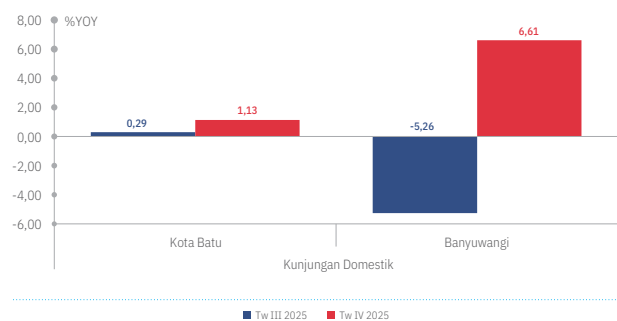
Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.49. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.50. Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara Tujuan Wisata (Kota Batu, Banyuwangi)



Sumber: BPS (diolah)

Mempercepat Konektivitas sebagai Katalisator Ekonomi: Pengembangan Jaringan Jalan di Wilayah Jawa Timur

BOKS 1

Pulau Jawa, khususnya Provinsi Jawa Timur, memiliki **peranan strategis dalam perekonomian nasional**. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2026), Pulau Jawa berkontribusi sebesar 56,93% terhadap ekonomi Indonesia pada tahun 2025. Dalam struktur ekonomi Jawa, Provinsi Jawa Timur berperan vital, dengan kontribusi sebesar 25,29% terhadap ekonomi Jawa. Kontribusi ini diperkuat dengan andil Jawa Timur sebagai pusat industri, perdagangan, pariwisata, dan gerbang logistik ke kawasan Timur Indonesia (Bappeda Jatim, 2025).

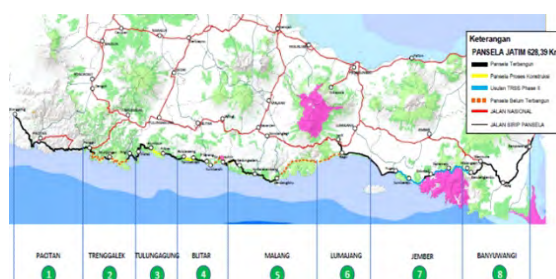
Konektivitas menjadi kunci akselerasi ekonomi di Jawa Timur. Dengan peran strategis tersebut, ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai menjadi kebutuhan esensial untuk menjamin kelancaran mobilitas penduduk, distribusi barang, serta integrasi antarwilayah. Pengembangan jaringan jalan juga berkontribusi dalam menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi perekonomian. Studi Pugara et al. (2022) pada koridor Tol Semarang–Pekalongan menunjukkan bahwa peningkatan konektivitas mampu memangkas waktu tempuh secara signifikan, yang berdampak pada penurunan konsumsi bahan bakar dan biaya perawatan kendaraan. Sejalan dengan itu, prosiding *The 12th East Java Economic Forum* (2025) oleh Istiqomah et al. menemukan bahwa pembangunan jalan tol Trans Jawa di Jawa Timur mendorong pertumbuhan ekonomi pada wilayah dengan sensitivitas tinggi terhadap mobilitas. Secara empiris, kabupaten/kota dalam radius 0–15 km dari akses tol menunjukkan peningkatan PDRB dan produktivitas.

Pengembangan jaringan jalan di Jawa Timur dilakukan oleh Pemerintah secara kontinu, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2025-2029. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum (2026), saat ini terdapat 12 ruas jalan tol beroperasi (sepanjang 492 km), 3 ruas jalan tol dalam tahap konstruksi (sepanjang 57 km), dan 3 ruas jalan tol dalam tahap perencanaan. Sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040, panjang jalan nontol (nasional) di Jawa Timur adalah 2.261,68 km sebagaimana Gambar 1. Adapun kemandirian jalan nasional di Jawa Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar 93,27%. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pekerjaan



Gambar 1. Jaringan Jalan Tol & Non Tol (Nasional) di Provinsi Jawa Timur

(Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2026)



Gambar 2. Peta Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan (Pansela)

(Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2026)

Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur (2025), panjang jalan provinsi di Jawa Timur tercatat sepanjang 1.671,32 km sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/716/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi.

Dalam rangka meningkatkan konektivitas di wilayah selatan Jawa Timur, Pemerintah mengembangkan jalur lintas Pantai Selatan (Pansela). Pengembangan dilakukan melalui pembangunan jalan yang menghubungkan 8 kabupaten di Jawa Timur, yakni: 1) Kabupaten Pacitan; 2) Kabupaten Trenggalek; 3) Kabupaten Tulungagung; 4) Kabupaten Blitar; 5) Kabupaten Malang; 6) Kabupaten Lumajang; 7) Kabupaten Jember; dan 8) Kabupaten Banyuwangi. Hingga saat ini, jalan lintas Pansela yang telah terbangun mencapai 390,84 km dari target sepanjang 628,39 km (Gambar 2). Pengembangan ini diharapkan dapat mempersempit kesenjangan konektivitas antara wilayah utara dan selatan Jawa Timur.

BOKS 1

Infrastruktur jalan turut menjadi perhatian pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019, terdapat pembentukan kawasan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur, yakni: 1) Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan); 2) Kawasan Madura dan Kepulauan sebagai Pendukung Kawasan Gerbangkertosusila; 3) Kawasan Prioritas Selingkar Wilis; 4) Kawasan Bromo-Tengger-Semeru; dan 5) Kawasan Selingkar Ijen sebagai Pendukung Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (Gambar 3). Berdasarkan Perpres tersebut, terdapat beberapa arahan program sektor jalan dan jembatan. Adapun arahan program terkait jalan dan jembatan yang telah tuntas disajikan pada Tabel 1.

Pengembangan jaringan jalan di Provinsi Jawa Timur termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, terdapat ruas jalan tol di Jawa Timur yang termasuk ke dalam PSN, yakni: 1) Jalan Tol Pandaan-Malang; 2) Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo; 3) Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi; 4) Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM); dan 5) Jalan Tol Ngawi-Kertosono-Kediri. Kehadiran ruas jalan tol ini mendorong pertumbuhan dan memperkuat aksesibilitas kawasan industri utama, misalnya KEK Gresik/JIPE, Pasuruan Industrial Estate Rembang/PIER, dan kawasan industri lainnya (khususnya di wilayah Jawa Timur bagian utara).



Gambar 2. Peta Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan (Pansela)

(Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2026)

Di sektor pariwisata, interkoneksi jaringan jalan turut menopang peningkatan kunjungan wisata. Tol Pandaan–Malang dan Pasuruan–Probolinggo, misalnya, mendukung akses wisata dari Surabaya menuju Malang Raya serta kawasan Gunung Bromo dan wisata religi di Pasuruan. Namun demikian, konektivitas menuju destinasi pantai di wilayah selatan masih terbatas akibat belum terhubung sepenuhnya dengan jaringan tol.

Tabel 1. Arahan Program Jalan & Jembatan yang Telah Tuntas di Kawasan Pengembangan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Program	Kawasan
Pembangunan <i>Flyover</i> Aloha	
Percepatan Pembangunan Jalan Lingkar Utara Lamongan	
Pembangunan <i>Drainase</i> Jalan Nasional Arteri Primer	
Pembangunan <i>Flyover</i> Terminal Teluk Lamong yang Terhubung dengan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) Surabaya	Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila
Pembangunan Jalan Lingkar Tuban	
Pembangunan Jembatan Ploso	
Pelebaran Jalan Nasional Probolinggo-Lumajang	
Pelebaran Jalan pada <i>Exit</i> Tol Seksi 5 Pandaan-Malang	
Pelebaran Ruas Turen – Batas Kab. Lumajang – Kota Lumajang	Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru
Pelebaran jalan Lawean – Sukapura	
Pelebaran Jalan Nasional BTS. Kota Situbondo – Ketapang	
Jalan Akses Tol Probawangi ke Pintu Gerbang Pelabuhan Jangkar	Kawasan Selingkar Ijen sebagai Pendukung Kawasan Bromo-Tengger-Semeru

(Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2026)

BOKS 1

Sebagai ilustrasi, perjalanan Surabaya–Malang dapat ditempuh sekitar 1 jam 30 menit melalui tol, namun untuk mencapai kawasan Malang Selatan masih memerlukan tambahan waktu sekitar 2 jam 30 menit melalui jalan non-tol.

Seiring dengan potensi beragam manfaat yang diperoleh, pengembangan jaringan jalan di Provinsi Jawa Timur masih menghadapi tantangan. Beberapa tantangan yang mengemuka, antara lain: 1) proses pembebasan lahan; 2) keterbatasan pendanaan serta skema investasi yang sensitif terhadap proyeksi lalu lintas dan kelayakan fiskal; 3) kondisi geografis (misalnya wilayah berbukit dan keberagaman kontur tanah yang menjadi kendala pada pekerjaan konstruksi). Tantangan tersebut memengaruhi percepatan proyek strategis seperti Tol Probolinggo–Banyuwangi dan ruas Bunder–Manyar. Padahal, kedua ruas tersebut memiliki peran penting dalam memangkas waktu tempuh menuju Banyuwangi sebagai simpul logistik dan destinasi wisata utama, serta mendukung akses distribusi barang menuju kawasan industri di Gresik.

Dalam rangka percepatan pengembangan jaringan jalan di Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa usulan/rekomendasi, yakni:

1. **Penguatan skema investasi dan tata kelola proyek.**
Dalam menghadapi tantangan pendanaan dan pembebasan lahan, optimalisasi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi strategi yang relevan. Skema ini dapat difokuskan pada proyek prioritas seperti Tol Probolinggo–Banyuwangi dan Tol Krian–Legundi–Bunder–Manyar (KLBM). Penguatan tata kelola proyek, kepastian regulasi, serta mitigasi risiko lalu lintas dan kelayakan finansial menjadi faktor kunci untuk meningkatkan minat investor dan menjaga keberlanjutan proyek. Sejumlah ruas tol di Jawa Timur yang telah beroperasi melalui skema KPBU disajikan pada Tabel 2.
2. **Percepatan pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan (Pansela) dan konektivitas pendukungnya.**
Percepatan penyelesaian koridor strategis Pansela perlu diiringi dengan penguatan konektivitas menuju destinasi wisata unggulan di wilayah selatan Jawa Timur. Langkah implementatif yang dapat ditempuh antara lain pengembangan jalur kolektor–arteri penghubung Pansela ke pusat wisata potensial

(khususnya Malang Selatan, Blitar Selatan, dan Tulungagung), serta percepatan pembangunan ruas tol Malang–Kepanjen dan Kertosono–Kediri–Tulungagung. Penguatan jaringan tersebut diharapkan dapat memangkas waktu tempuh, meningkatkan aksesibilitas, serta mendorong kenaikan kunjungan wisata dan aktivitas ekonomi di wilayah selatan.

3. **Integrasi pembangunan jalan dengan pengembangan kawasan dan kebijakan tata ruang.**
Pembangunan jaringan jalan perlu terintegrasi dengan pengembangan kawasan industri, pariwisata, serta kebijakan perencanaan wilayah guna meningkatkan daya saing dan katalisator investasi. Implementasi kebijakan ini dapat dilakukan melalui:
 - a. Penguatan akses tol dan jalan nasional menuju kawasan industri utama dan sentra logistik.
 - b. Penyusunan rencana jaringan *feeder road* dari jalan tol menuju destinasi wisata unggulan dan kawasan industri/sentra logistik.
 - c. Sinkronisasi program pengembangan jaringan jalan dengan kebijakan dan dokumen perencanaan yang berlaku, a.l. 1) Peraturan Presiden No 80 Tahun 2019; 2) RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025–2029; 3) Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW Provinsi Jawa Timur; 4) Rencana Detail Tata Ruang/RDTR Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur; serta 5) Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD Tahunan.

BOKS 1

Tabel 2. Proyek Jalan Tol di Jawa Timur yang Telah Beroperasi dan Terealisasi dengan Skema KPBU

Ruas Jalan Tol	Keterangan	Ruas Jalan Tol	Keterangan
Jalan Tol Pandaan – Malang (PT Jasa Marga Pandaan Malang)	- KPBU <i>Solicited</i> - Indikasi Nilai Investasi: Rp6,44 triliun - Masa Konsesi: 35 tahun	Jalan Tol Solo – Ngawi (Jawa Tengah – Jawa Timur) (PT Jasa Marga Solo Ngawi)	- KPBU <i>Solicited</i> - Indikasi Nilai Investasi: Rp11,87 triliun - Masa Konsesi: 50 tahun (2016-2056)
Jalan Tol Surabaya – Mojokerto (PT Jasa Marga Surabaya Mojokerto)	- KPBU <i>Solicited</i> - Indikasi Nilai Investasi: Rp4,98 triliun - Masa Konsesi: 42 tahun (2007-2049)	Jalan Tol Gempol – Pandaan (PT Jasa Marga Pandaan Tol)	- KPBU <i>Solicited</i> - Indikasi Nilai Investasi: Rp1,47 triliun - Masa Konsesi: 37 tahun (2012-2049)
Jalan Tol Ngawi – Kertosono (PT Jasa Marga Ngawi Kertosono)	- KPBU <i>Solicited</i> - Indikasi Nilai Investasi: Rp30,89 triliun - Masa Konsesi: 50 tahun (2016-2066)	Jalan Tol SS Waru – Bandara Juanda (PT Citra Margatama Surabaya)	- KPBU <i>Solicited</i> - Indikasi Nilai Investasi: Rp722 miliar - Masa Konsesi: 35 tahun (2005-2040)
Jalan Tol Gempol – Pasuruan (PT Jasa Marga Persero Tbk)	- KPBU <i>Solicited</i> - Indikasi Nilai Investasi: Rp4,03 triliun - Masa Konsesi: 45 tahun (2013-2058)	Jalan Tol Surabaya – Gempol (PT Jasa Marga Persero Tbk)	- KPBU <i>Solicited</i> - Indikasi Nilai Investasi: Rp1,34 triliun - Masa Konsesi: 40 tahun (2005-2044)
Jalan Tol Kertosono – Mojokerto (PT Marga Harjaya Infrastruktur)	- KPBU <i>Solicited</i> - Indikasi Nilai Investasi: Rp3,48 triliun - Masa Konsesi: 45 tahun (2010-2055)	Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo (PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol)	- KPBU <i>Solicited</i> - Indikasi Nilai Investasi: Rp6,36 triliun - Masa Konsesi: 50 tahun
Jalan Tol Surabaya – Gresik (PT Marga Bumi Matraraya)	- KPBU <i>Solicited</i> - Indikasi Nilai Investasi: Rp637 miliar - Masa Konsesi: 49 tahun (1991-2040)	Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (PT Waskita Bumi Wira)	- Baru beroperasi hingga seksi 3 (Krian-Legundi-Bunder). - Indikasi Nilai Investasi: Rp9,12 triliun

(Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2026)

Studi Perkembangan, Pola Spasial, dan Determinan Investasi di Provinsi Jawa Timur

BOKS 2

Investasi berperan strategis sebagai motor penggerak utama akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil permodelan makro Bank Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan realisasi investasi sebesar 1% dalam satu triwulan diperkirakan dapat mendorong kenaikan PDRB Jawa Timur sebesar 0,26%. Temuan tersebut menegaskan bahwa penguatan investasi merupakan prasyarat penting untuk menjaga momentum pertumbuhan yang lebih akseleratif, inklusif, dan berkelanjutan. Selain perkembangan total investasi, aspek spasial investasi juga menjadi semakin relevan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pemahaman terhadap pola spasial investasi sangat penting untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan merata antarwilayah. Secara periodik, tahun 2022–2024 menjadi periode penting yang membentuk kembali lanskap iklim investasi Jawa Timur seiring perubahan struktur permintaan, peningkatan konektivitas, dan penguatan daya tarik kawasan pertumbuhan utama.

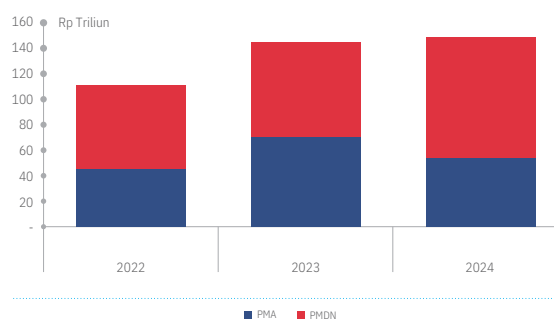
Identifikasi determinan investasi secara spasial memungkinkan perumusan strategi penguatan iklim investasi yang lebih adaptif terhadap potensi dan tantangan struktural masing-masing wilayah. Analisis dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan beberapa metode, yaitu statistika deskriptif, *regresi pooled Ordinary Least Squares* (OLS) sebagai model dasar, pengujian spasial menggunakan *Spatial Durbin Model* (SDM), serta *Geographically Weighted Regression* (GWR) untuk menangkap heterogenitas lokal antarwilayah pada tingkat kabupaten/kota. Data yang digunakan merupakan data realisasi investasi tahunan kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2022–2024, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bersumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sementara itu, prediktor yang digunakan meliputi indikator kondisi ekonomi daerah, tenaga kerja, upah, infrastruktur, dan indikator kelembagaan.

Selama periode 2022–2024, realisasi penanaman modal di Provinsi Jawa Timur ditopang oleh PMDN. Realisasi Investasi Jawa Timur selama periode 2022–2024 sebesar Rp402,76 triliun, terdiri atas 57,78% PMDN dan 42,22% PMA. Selama periode tersebut, kinerja investasi secara konsisten menunjukkan tren peningkatan, utamanya

ditopang oleh PMDN. Secara spasial, realisasi investasi masih terkonsentrasi di kawasan Gerbangkertosusila. Tiga daerah dengan realisasi investasi paling tinggi yaitu, Kab. Gresik, Kota Surabaya, dan Kab. Sidoarjo. Adapun Kab. Gresik menjadi daerah dengan realisasi PMA tertinggi, sementara Kota Surabaya menjadi daerah dengan realisasi PMDN tertinggi selama periode 2022–2024.

Keberadaan KI dan KEK menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan investasi di Jawa Timur. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa penambahan 1 (satu) KI/KEK berpotensi meningkatkan total investasi sebesar Rp3,97 triliun (Tabel 1). Selain itu, realisasi investasi Jawa Timur juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta nilai ekspor komoditas utama, khususnya ekspor komoditas kayu yang termasuk dalam lima besar komoditas ekspor utama Jawa Timur, meskipun pengaruhnya tidak sebesar keberadaan KI/KEK.

Gambar 1. Realisasi Investasi Jawa Timur 2022–2024



Sumber: BKPM (diolah, 2025)

Tabel 1. Determinan Total Investasi Jawa Timur

OLS Total Investasi PMA & PMDN (Rp Juta) 2022–2024		
Variabel	Koefisien	P-Value
PDRB Listrik & Gas (Rp Juta)	0,6095	0,3249
Jumlah Penduduk (orang)	10,284	0,0533**
IPM (indeks)	193,5	0,0210*
Ekspor Kayu (USD)	0,0620	0,0000*
Kategori Keberadaan Kawasan (<i>dummy</i>)	3.972.000	0,0012*
		$R^2 = 89,22\%$

BOKS 2

Sejalan dengan kinerja total investasi, PMA di Jawa Timur dipengaruhi terutama oleh jumlah KI/KEK dan kinerja ekspor komoditas utama, seperti lemak dan minyak, serta kimia industri. Penambahan satu KI/KEK diperkirakan dapat meningkatkan PMA sebesar Rp496,70 miliar. Secara spasial, PMA cenderung terkonsentrasi di wilayah dengan KI/KEK dan basis ekspor yang kuat, seperti Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto. Oleh karena itu dilakukan pemodelan spasial lanjutan untuk mendalami perilaku investor asing di Jawa Timur dengan mengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan keberadaan KI/KEK dan perannya sebagai daerah industri pengekspor komoditas utama.

Pada kabupaten/kota yang memiliki KI/KEK dan sentra ekspor, PMA dipengaruhi signifikan oleh faktor aksesibilitas, terutama keberadaan pelabuhan. Keberadaan pelabuhan berpotensi meningkatkan PMA sebesar Rp15,12 triliun (Tabel 2), sejalan dengan karakter PMA di Jawa Timur yang didominasi oleh industri padat modal dan berorientasi ekspor, seperti industri logam dasar, kimia, serta barang galian bukan logam (*non-metallic mineral*). Hasil analisis SDM menunjukkan bahwa keberadaan pelabuhan memberikan efek total positif melalui *direct effect*, sehingga daerah yang memiliki pelabuhan memperoleh keuntungan langsung dalam menarik PMA, namun efek *spillover* ke wilayah sekitar relatif kecil/terbatas. Hal tersebut menunjukkan bahwa investor asing lebih memprioritaskan lokasi yang terhubung langsung dengan pelabuhan dibandingkan wilayah tetangga dan menekankan sifat lokasi spesifik (*location specific advantage*) dari infrastruktur pelabuhan. Analisis GWR juga menunjukkan bahwa pengaruh keberadaan pelabuhan relatif konsisten pada wilayah dengan KI/KEK atau yang terhubung dengan aktivitas perdagangan barang, meskipun intensitasnya bervariasi antarwilayah. Pemetaan determinan PMA secara spasial disajikan pada Gambar 2.

Sementara itu, pada kabupaten/kota tanpa KI/KEK lebih dipengaruhi oleh infrastruktur utilitas dasar dan aksesibilitas transportasi, terutama keberadaan jalan tol. Keberadaan jalan tol berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PMA sebesar Rp181,9 miliar di kabupaten/kota tersebut (Tabel 2). Hasil tersebut

Tabel 2. Determinan PMA Jawa Timur

OLS PMA (Rp Juta) 2022-2024		
Variabel	Koefisien	P-Value
Ekspor Lemak & Minyak (USD)	0,0080	0,0000*
Ekspor Industri Kimia & Farmasi (USD)	0,0144	0,0000*
Jumlah KI/KEK (1 satuan)	496,7	0,0002*
Indeks Kualitas Institusi (indeks)	13,18	0,8648
$R^2=86,77\%$		

OLS PMA KI (Rp Juta) 2022-2024		
Variabel	Koefisien	P-Value
Jarak Tol (Km)	-131,11	0,0524**
Kategori Jarak Stasiun (<i>dummy</i>)	-3.964.000	0,0770**
Keberadaan Pelabuhan (<i>dummy</i>)	15.120.000	0,0319*
Produksi Beras (Ton)	18.661	0,2059
$R^2=60,96\%$		

OLS PMA Non-KI (Rp Juta) 2022-2024		
Variabel	Koefisien	P-Value
PDRB Listrik & Gas (Rp Juta)	0,0253	0,0000*
Keberadaan Tol (<i>dummy</i>)	181,9	0,0272*
$R^2=28,84\%$		

menegaskan peran penting konektivitas logistik dalam menurunkan biaya logistik, mempercepat mobilitas tenaga kerja, dan meningkatkan daya tarik wilayah bagi investor asing di wilayah yang belum memiliki basis industri kuat/non-industri. Hasil analisis SDM, menunjukkan bahwa keberadaan jalan tol akan meningkatkan PMA secara lokal dan tidak secara konsisten menimbulkan efek *spillover* ke wilayah sekitar. Sebaliknya, terdapat efek spasial tidak langsung dari PDRB listrik dan gas yang mengindikasikan adanya *spillover* positif antarwilayah, di mana peningkatan kapasitas listrik/gas di satu wilayah dapat mendorong kenaikan PMA di kabupaten/kota tetangga. Hasil GWR juga menegaskan adanya heterogenitas secara spasial dari pengaruh infrastruktur terhadap PMA. Secara umum, PDRB listrik dan keberadaan tol tetap menjadi determinan utama, tetapi intensitas pengaruhnya berbeda antarwilayah. Pola determinan utama untuk PMA Non-KI/KEK terdapat pada Gambar 3.

BOKS 2

Tabel 3. Determinan PMDN Jawa Timur

OLS PMDN (Rp Juta) 2022-2024		
Variabel	Koefisien	P-Value
PDRB Transgud (Rp Juta)	0,3392	0,0008*
Jumlah Penduduk (Orang)	0,9339	0,0091*
Keberadaan Kawasan (1 satuan)	3,208.000	0,0054*
Jarak Stasiun Barang (Km)	-6.750,3	0,0148
$R^2=86,49\%$		



Gambar 2. Peta Persebaran GWR PMA KI
(Determinan PMA secara spasial Kab/Kota yang memiliki KI/KEK)



Gambar 3. Peta Persebaran GWR PMA Non-KI
(Determinan PMA secara spasial Kab/Kota yang memiliki KI/KEK)



Gambar 4. Peta Persebaran GWR PMDN
(Determinan PMDN secara spasial Kab/Kota)

Selaras dengan analisis investasi total, variabel keberadaan KI/KEK juga menjadi determinan paling dominan terhadap peningkatan PMDN di Jawa Timur. Penambahan satu KI/KEK berpotensi meningkatkan PMDN sebesar Rp3,21 triliun (Tabel 3). Selain itu, PMDN juga dipengaruhi PDRB Transportasi dan Pergudangan (transgud), jumlah penduduk, serta jarak stasiun barang terhadap KI/KEK. Pola spasial PMDN tidak menunjukkan segmentasi antarwilayah yang kuat, sejalan dengan karakter PMDN yang relatif lebih tersebar dan dipengaruhi faktor ekonomi internal wilayah. Hasil SDM menunjukkan bahwa faktor paling kuat dalam menarik PMDN adalah keberadaan KI/KEK, dengan manfaat yang sangat terlokalisasi, tanpa *spillover* ke wilayah di sekitarnya. Hasil analisis GWR 2022–2024 menunjukkan bahwa keberadaan KI/KEK menjadi determinan yang paling stabil dengan koefisien positif dan signifikan di seluruh kabupaten/kota. Hal tersebut menandakan bahwa kapasitas industrialisasi formal memberikan sinyal kuat bagi investor dan variasi pengaruh antarwilayah sangat kuat. Pemetaan determinan utama PMDN disajikan pada Gambar 4.

Secara keseluruhan keberadaan KI/KEK, pelabuhan, serta infrastruktur jalan merupakan determinan utama yang menentukan lokasi dan skala investasi di Jawa Timur. Investasi masih terkonsentrasi di aglomerasi Gerbangkertosusila akibat keunggulan akses logistik dan infrastruktur, sementara *spillover* ke wilayah sekitar relatif terbatas. Pengembangan KI/KEK terbukti efektif dalam mendorong PMA dan PMDN, serta pelabuhan berperan krusial bagi investasi berorientasi ekspor. Di sisi lain, konektivitas jalan dan utilitas dasar lebih menentukan investasi di wilayah non-industri. Temuan tersebut menunjukkan adanya heterogenitas spasial investasi sehingga diperlukan kebijakan pengembangan yang bersifat *place-based* sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Determinan PMA maupun PMDN untuk setiap kabupaten/kota di Jawa Timur dijelaskan pada Tabel 4.

BOKS 2

Lebih lanjut, rekomendasi kebijakan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendorong peningkatan investasi sebagai berikut:

- a. **Refocusing koridor pengembangan ekonomi Jawa Timur (Place-Based Policy).** Bagian utara sebagai koridor industri padat modal, bagian tengah sebagai koridor industri padat karya, dan bagian selatan sebagai pengembangan *quality tourism* dan wisata bahari di jalur lintas Selatan.
- b. **Akselerasi pengembangan KI/KEK baru di wilayah dengan kesiapan infrastruktur dan potensi ekspor.** Prioritas: Lamongan, Tuban, Jombang, Probolinggo, Banyuwangi dengan fokus sektor pada industri logam dasar, kimia, pengolahan pangan strategis, dan logistik terpadu.
- c. **Penguatan infrastruktur logistik terintegrasi,** melalui optimalisasi pelabuhan di Gresik-Probolinggo-Banyuwangi sebagai magnet PMA, percepatan pembangunan akses tol pada koridor non-industri (prioritas Selingkar Wilis, BTS, Selingkar Ijen), revitalisasi kereta barang untuk mendukung PMDN dan terintegrasi ke KI/KEK.
- d. **Penguatan utilitas dasar, elektrifikasi, dan energi industri elektrifikasi melalui ekspansi kapasitas listrik dan gas pada wilayah non-KI/KEK,** serta penyediaan layanan energi berbasis kebutuhan sektor (klaster industri padat modal: prioritas pasokan gas dan jaringan tegangan tinggi. Klaster agroindustri: energi terbarukan dan *biomass supply chain*).
- e. **Penguatan ekosistem ekspor dan industri pengolahan** (mendorong investasi pada subsektor turunan bernilai tambah tinggi).
- f. **Reformasi kelembagaan investasi dan reformulasi kebijakan pelayanan investasi daerah.**

Tabel 4. Determinan PMA dan PMDN Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Kab/ Kota	Determinan PMA	Determinan PMDN
Gerbangkertosusila		
Kota Surabaya	Kategori Jarak Stasiun; Keberadaan Pelabuhan	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk, Jarak Stasiun Barang
Kab. Sidoarjo	Kategori Jarak Stasiun; Keberadaan Pelabuhan	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk
Kab. Gresik	Produksi Beras; Kategori Jarak Stasiun; Keberadaan Pelabuhan; Jarak Tol	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk, Jarak Stasiun Barang
Kab. Lamongan	Produksi Beras; Kategori Jarak Stasiun; Keberadaan Pelabuhan; Jarak Tol	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk, Jarak Stasiun Barang
Kab. Tuban	Produksi Beras; Kategori Jarak Stasiun; Keberadaan Pelabuhan; Jarak Tol	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk, Jarak Stasiun Barang
Kab. Mojokerto	Kategori Jarak Stasiun; Keberadaan Pelabuhan	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk
Kota Mojokerto	Faktor lain yang tidak ada dalam model	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk, Jarak Stasiun Barang
Kab. Jombang	Produksi Beras; Kategori Jarak Stasiun; Keberadaan Pelabuhan	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk, Jarak Stasiun Barang
Kab. Bojonegoro	Keberadaan Gerbang Tol	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jarak Stasiun
Kab. Bangkalan	PDRB Listrik dan Gas	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk, Jarak Stasiun Barang
Kawasan Selingkar Wilis (KSW) & Lintas Selatan		
Kab. Kediri	Faktor lain yang tidak ada dalam model	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk, Jarak Stasiun Barang
Kota Kediri	Faktor lain yang tidak ada dalam model	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk
Kab. Nganjuk	Keberadaan Gerbang Tol	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan
Kota Blitar	Faktor lain yang tidak ada dalam model	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk
Kab. Blitar	Faktor lain yang tidak ada dalam model	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk
Kab. Tulungagung	Faktor lain yang tidak ada dalam model	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan
Kab. Madiun	Keberadaan Gerbang Tol	Keberadaan Kawasan
Kab. Ngawi	Keberadaan Gerbang Tol	Keberadaan Kawasan
Kab. Magetan	Keberadaan Gerbang Tol	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan
Kab. Ponorogo	Keberadaan Gerbang Tol	Keberadaan Kawasan
Kab. Trenggalek	Keberadaan Gerbang Tol	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan
Kab. Pacitan	Keberadaan Gerbang Tol	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan
Kota Madiun	Keberadaan Gerbang Tol	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan

BOKS 2

Kab/ Kota	Determinan PMA	Determinan PMDN
Kawasan Madura dan Kepulauan		
Kab. Sampang	PDRB Listrik dan Gas	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk, Jarak Stasiun Barang
Kab. Pamekasan	PDRB Listrik & Gas; Keberadaan Tol	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk
Kab. Sumenep	PDRB Listrik & Gas; Keberadaan Tol	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk
Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS)		
Kab. Malang	Produksi Beras; Keberadaan Pelabuhan	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk
Kota Malang	Faktor lain yang tidak ada dalam model	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk
Kab. Probolinggo	Keberadaan Gerbang Tol	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk
Kab. Pasuruan	Kategori Jarak Stasiun; Keberadaan Pelabuhan	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk
Kota Pasuruan	Kategori Jarak Stasiun; Keberadaan Pelabuhan	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk, Jarak Stasiun Barang
Kab. Lumajang	Keberadaan Gerbang Tol	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk
Kota Probolinggo	PDRB Listrik & Gas; Keberadaan Tol	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk
Kota Batu	Faktor lain yang tidak ada dalam model	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan; Jumlah Penduduk
Kawasan Selingkar Ijen (KSI)		
Kab. Banyuwangi	PDRB Listrik & Gas; Keberadaan Tol	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan
Kab. Jember	PDRB Listrik & Gas; Keberadaan Tol	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan
Kab. Situbondo	PDRB Listrik & Gas; Keberadaan Tol	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan
Kab. Bondowoso	Keberadaan Gerbang Tol	PDRB Transgud; Keberadaan Kawasan



Keuangan Pemerintah



2.1. Gambaran Umum

Pendapatan Daerah

Pendapatan APBD Jawa Timur secara agregat tahun 2025 mengalami kontraksi akibat penurunan Pendapatan Transfer, meskipun masih ditopang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Struktur pendapatan APBD yang didominasi Pendapatan Transfer sebesar 63,33% menyebabkan penurunan komponen tersebut berdampak langsung pada kontraksi pendapatan secara keseluruhan (Tabel 2.1). Penurunan Pendapatan Transfer terutama bersumber dari berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,97 triliun pada tahun 2025⁴. Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama berasal dari kinerja PAD kabupaten/kota yang berkontribusi 63,01% terhadap total PAD Jawa Timur. Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan pajak daerah melalui implementasi skema opsen pajak mulai tahun 2025 serta peningkatan retribusi daerah. Namun, peningkatan tersebut lebih mencerminkan reposisi pendapatan dari provinsi ke kabupaten/kota dan belum menunjukkan pemerataan kapasitas fiskal, serta berpotensi meningkatkan ketimpangan antarwilayah akibat ketergantungan pada basis pajak kendaraan bermotor.

Transformasi digital fiskal di Jawa Timur terus diperkuat secara menyeluruh dari hulu hingga hilir melalui penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang tecermin dari capaian penghargaan TP2DD Terbaik Kawasan Jawa-Bali tahun 2025. Implementasi digitalisasi tersebut mendorong optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, antara lain melalui perluasan transaksi nontunai, pemberian relaksasi pajak secara selektif, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemetaan potensi penerimaan baru. Optimalisasi juga dilakukan pada pendapatan

nonpajak melalui penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengembangan sektor pariwisata, serta pemanfaatan aset daerah sebagai sumber retribusi guna memperluas basis penerimaan daerah. Namun demikian, peningkatan PAD masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, dinamika daya beli masyarakat khususnya terhadap kendaraan bermotor, kebijakan pembiayaan kendaraan, serta keterbatasan regulasi dalam pemanfaatan aset daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan dan perluasan basis pajak secara berkelanjutan untuk menjaga kapasitas fiskal daerah, termasuk melalui pengkajian potensi penerimaan baru seperti pengenaan pajak pada kendaraan listrik yang selama ini belum dikenakan pajak secara optimal.

Belanja Daerah

Realisasi belanja Pemerintah di Jawa Timur pada tahun 2025 tetap kuat ditopang oleh Belanja Pegawai yang tumbuh positif. Secara struktur, Belanja Pegawai menyumbang sebesar 48,40% terhadap total belanja dan mengalami peningkatan baik pada komponen APBN maupun APBD (Tabel 2.2). Peningkatan tersebut didorong oleh pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, TNI, POLRI, dan pensiunan pada triwulan I 2025, pembayaran gaji ke-13 pada triwulan II 2025, serta pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mulai aktif pada triwulan III 2025 seiring dengan penambahan jumlah ASN dan PPPK sepanjang tahun 2025. Kondisi ini menjaga daya beli aparatur serta menopang stabilitas konsumsi rumah tangga di daerah.

Tabel 2.1. Realisasi Pendapatan APBD di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan 2025

Jenis Pendapatan	Pagu		% Perubahan	Realisasi				Pertumbuhan (%yoy)
	2024	2025		2024		2025		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
Pendapatan APBD Provinsi	32.161,55	28.559,29	(11,20)	35.479,86	110,32	29.887,93	104,65	(15,76)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21.089,69	17.103,86	(18,90)	23.454,70	111,21	18.443,66	107,83	(21,36)
Pendapatan Transfer	11.008,17	11.427,43	3,81	11.956,41	108,61	11.409,85	99,85	(4,57)
Pendapatan Lainnya	63,69	28,00	(56,04)	68,75	107,95	34,42	122,92	(49,94)
Pendapatan APBD Kab/Kota	107.462,70	107.717,67	0,24	105.443,54	98,12	106.705,37	99,06	1,20
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	26.673,92	32.338,34	21,24	25.806,83	96,75	31.422,23	97,17	21,76
Pendapatan Transfer	80.436,02	75.203,26	(6,51)	79.336,85	98,63	75.097,46	99,86	(5,34)
Pendapatan Lainnya	352,76	176,07	(50,09)	299,86	85,01	185,68	105,45	(38,08)
Pendapatan Total	139.624,25	136.276,96	(2,40)	140.923,40	100,93	136.593,30	100,23	(3,07)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	47.763,61	49.442,20	3,51	49.261,53	103,14	49.865,89	100,86	1,23
Pendapatan Transfer	91.444,20	86.630,69	(5,26)	91.293,25	99,83	86.507,31	99,86	(5,24)
Pendapatan Lainnya	416,44	204,07	(51,00)	368,62	88,52	220,10	107,85	(40,29)

4. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, alokasi TKD menurun pada APBD Provinsi Jawa Timur (DAU Rp22 miliar; DAK Fisik Rp170 miliar) serta APBD 38 kabupaten/kota (DAU Rp733,5 miliar; DAK Fisik Rp1,05 triliun).

Tabel 2.2. Realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan 2025

Jenis Belanja	Pagu		% Perubahan	Realisasi				Pertumbuhan (%yoy)
	2024	2025		2024		2025		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
Belanja APBN	56.541,84	46.859,63	(17,12)	54.539,42	96,46	44.388,53	94,73	(18,61)
Belanja Pegawai	23.731,99	25.694,89	8,27	23.883,31	100,64	25.429,77	98,97	6,48
Belanja Barang	24.035,07	14.465,67	(39,81)	22.827,61	94,98	12.880,44	89,04	(43,58)
Belanja Modal	8.646,59	6.560,25	(24,13)	7.700,47	89,06	5.939,74	90,54	(22,87)
Belanja Bantuan Sosial	128,19	138,81	8,29	128,03	99,88	138,58	99,83	8,24
Belanja APBD Provinsi	22.040,64	24.065,47	9,19	20.862,84	94,66	22.284,63	92,60	6,81
Belanja Pegawai	8.874,89	9.398,42	5,90	8.331,76	93,88	8.373,14	89,09	0,50
Belanja Barang	10.518,34	11.186,41	6,35	10.072,28	95,76	10.698,92	95,64	6,22
Belanja Modal	2.478,79	3.259,60	31,50	2.307,62	93,09	3.014,30	92,47	30,62
Belanja Bantuan Sosial	168,61	221,04	31,09	151,18	89,66	198,27	89,70	31,15
Belanja APBD 38 Kab/Kota	95.157,99	96.498,00	1,41	85.031,73	89,36	84.158,90	87,21	(1,03)
Belanja Pegawai	40.752,34	43.761,51	7,38	37.535,98	92,11	39.192,35	89,56	4,41
Belanja Barang	36.424,21	36.695,62	0,75	32.491,54	89,20	32.186,83	87,71	(0,94)
Belanja Modal	17.165,05	15.296,91	(10,88)	14.277,30	83,18	12.163,85	79,52	(14,80)
Belanja Bantuan Sosial	816,39	743,97	(8,87)	726,90	89,04	615,86	82,78	(15,28)
Total Belanja	173.740,46	167.423,10	(3,64)	160.433,99	92,34	150.832,06	90,09	(5,98)
Belanja Pegawai	73.359,21	78.854,82	7,49	69.751,05	95,08	72.995,26	92,57	4,65
Belanja Barang	70.977,62	62.347,69	(12,16)	65.391,43	92,13	55.766,20	89,44	(14,72)
Belanja Modal	28.290,43	25.116,76	(11,22)	24.285,39	85,84	21.117,89	84,08	(13,04)
Belanja Bantuan Sosial	1.113,20	1.103,83	(0,84)	1.006,11	90,38	952,71	86,31	(5,31)

Meskipun demikian, belanja Pemerintah secara agregat tercatat menurun karena kontraksi pada Belanja Barang dan Belanja Modal. Belanja Barang dan Belanja Modal secara struktur menyumbang masing-masing 36,97% dan 14% terhadap Belanja Total. Penurunan Belanja Barang utamanya dipengaruhi oleh faktor *base effect* penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 serta kebijakan efisiensi anggaran, sementara penurunan Belanja Modal lebih disebabkan oleh pergeseran prioritas Pemerintah dan kebijakan efisiensi yang serupa. Kebijakan efisiensi tersebut berdampak pada penyesuaian jadwal pengadaan serta kontrak pada kedua jenis belanja, sehingga penyerapan menjadi lebih terkonsentrasi pada triwulan III dan IV. Akselerasi realisasi mulai terlihat di triwulan III seiring dengan kebijakan pembukaan blokir APBN yang meningkatkan ruang fiskal untuk program prioritas, serta adanya relaksasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan kegiatan di hotel dan restoran yang turut mendorong belanja APBD, meskipun dampaknya masih terbatas karena alokasi anggaran telah ditentukan sejak awal tahun.

Kendati mengalami penurunan secara nominal, kualitas dan efektivitas Belanja Pemerintah tetap terjaga yang diarahkan pada sektor prioritas dan pelayanan publik. Penurunan Belanja Pemerintah terutama terjadi pada Belanja APBN dan APBD 38 kabupaten/kota, sementara APBD Provinsi Jawa Timur tetap tumbuh positif pada seluruh komponen utama. Peningkatan

Belanja Bantuan Sosial di level provinsi dan pusat turut memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan. Efektivitas tersebut tecermin dari capaian program strategis nasional dan daerah, seperti Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan MBG yang menempati posisi tiga besar nasional, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) terbanyak di Indonesia. Dengan demikian, penguatan ketepatan sasaran belanja tetap memberikan dukungan solid terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tengah penurunan agregat belanja.

2.2. APBN di Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Realisasi Belanja APBN sepanjang tahun 2025 ditopang oleh realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang tumbuh positif, meski tertahan oleh realisasi Belanja K/L yang berkontraksi akibat kebijakan efisiensi. Peningkatan realisasi TKD pada tahun 2025 didorong oleh akselerasi Dana Bagi Hasil (DBH), DAU, dan DAK nonfisik yang digunakan untuk kebutuhan operasional Pemerintah. Ketiga komponen tersebut menyumbang 89,18% dari total TKD yang disalurkan ke daerah. Sementara itu, realisasi Belanja K/L ditopang oleh peningkatan Belanja Pegawai yang berkontribusi 57,29%, meski realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal mengalami moderasi, sejalan dengan *base effect* tahun sebelumnya sebagai tahun politik maupun kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku mulai awal tahun.

2.2.1. Pagu Belanja APBN di Provinsi Jawa Timur

Pagu belanja APBN untuk 46 K/L di Jawa Timur tahun 2025 menurun, sejalan dengan normalisasi anggaran pascatahun Pemilu dan Pilkada serentak, serta adanya kebijakan belanja daerah yang efektif dan efisien. Pagu APBN Jawa Timur 2025 sebesar Rp130,38 triliun, menurun 6,20% (yoy) dibanding tahun lalu yang sebesar Rp139 triliun. Penurunan pagu belanja terutama disebabkan oleh berkurangnya alokasi pada Belanja Barang dan Belanja Modal yang berkontribusi 44,87% terhadap total Belanja 46 K/L di Jawa Timur (Tabel 2.3). Penurunan Belanja Barang terutama disebabkan oleh tidak adanya

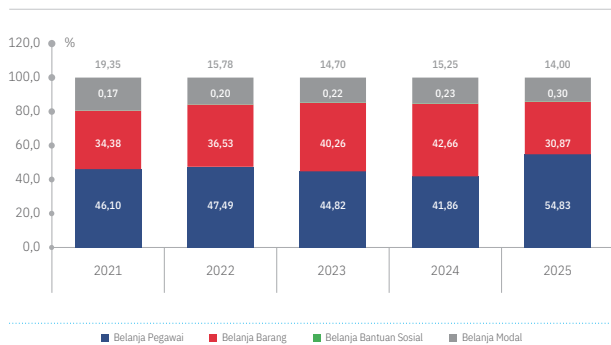
kebutuhan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak seperti pada tahun sebelumnya. Sementara itu, perubahan prioritas belanja Pemerintah tecermin dari penurunan pagu Belanja Modal, utamanya pada komponen Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Adapun Belanja Pegawai tercatat sedikit meningkat dengan peningkatan pagu 8,27% (yoy), sejalan dengan penambahan pegawai di K/L dari mulanya 42 K/L di tahun 2024 menjadi 46 K/L pada tahun 2025. Belanja Pegawai juga menjadi komponen terbesar pada Belanja K/L, dari mulanya 41,86% menjadi 54,83% pada tahun laporan (Grafik 2.1).

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan 2025

Jenis Belanja	Pagu APBN		% Perubahan	Realisasi APBN				Pertumbuhan Realisasi s.d. IV 2025 (%yoy)
	APBN 2024	APBN 2025		Realisasi s.d. IV 2024		Realisasi s.d. IV 2025		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
Berdasarkan Jenis Belanja								
Belanja K/L	56.541,84	46.859,63	(17,12)	54.539,42	96,46	44.388,53	94,73	(18,61)
Belanja Pegawai	23.731,99	25.694,89	8,27	23.883,31	100,64	25.429,77	98,97	6,48
Belanja Barang	24.035,07	14.465,67	(39,81)	22.827,61	94,98	12.880,44	89,04	(43,58)
Belanja Modal	8.646,59	6.560,25	(24,13)	7.700,47	89,06	5.939,74	90,54	(22,87)
Belanja Modal Tanah	55,05	54,75	(0,55)	50,94	92,53	51,84	94,69	1,76
Belanja Modal Peralatan & Mesin	2.039,95	2.105,01	3,19	1.950,76	95,63	2.001,81	95,10	2,62
Belanja Modal Gedung & Bangunan	1.564,51	2.042,04	30,52	1.533,23	98,00	1.871,16	91,63	22,04
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.662,02	1.402,18	(61,71)	2.921,41	79,78	1.348,51	96,17	(53,84)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	548,79	247,97	(54,81)	546,54	99,59	192,31	77,55	(64,81)
Belanja Modal Aset Lainnya	776,27	708,30	(8,76)	697,57	89,86	474,10	66,94	(32,04)
Belanja Bantuan Sosial	128,19	138,81	8,29	128,03	99,88	138,58	99,83	8,24
Transfer ke Daerah (TKD)	82.459,32	83.518,58	1,28	81.452,40	98,78	82.048,27	98,24	0,73
Dana Bagi Hasil	10.914,24	13.498,25	23,68	10.913,45	99,99	12.978,23	96,15	18,92
Dana Alokasi Umum	42.818,00	43.426,82	1,42	42.494,56	99,24	43.217,85	99,52	1,70
DAK Fisik	3.694,93	878,80	(76,22)	3.387,65	91,68	791,33	90,05	(76,64)
DAK Nonfisik	15.740,07	17.070,01	8,45	15.412,75	97,92	16.972,74	99,43	10,12
Dana Insentif Daerah	1.023,08	610,93	(40,28)	981,83	95,97	610,93	100,00	(37,78)
Dana Desa	8.269,00	8.033,76	(2,84)	8.262,16	99,92	7.477,18	93,07	(9,50)
TOTAL	139.001,16	130.378,20	(6,20)	135.991,82	97,84	126.436,80	96,98	(7,03)

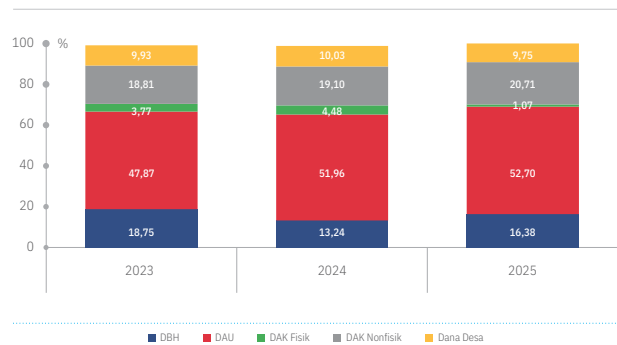
Sumber: Kementerian Keuangan – DJPb Kanwil Jawa Timur, diolah

Grafik 2.1. Postur Anggaran Belanja K/L Tahun 2021-2025



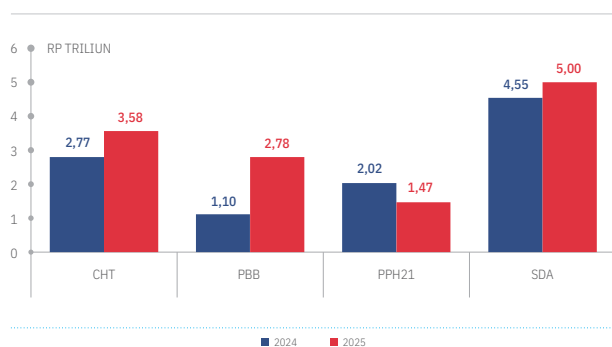
Sumber: DJPb Kanwil Jawa Timur, diolah

Grafik 2.2. Postur Anggaran Belanja TKD Tahun 2023-2025

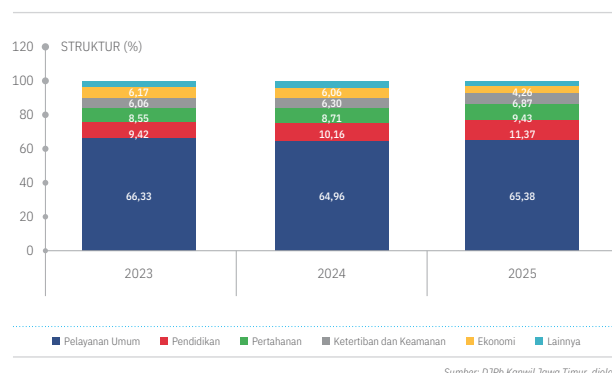


Sumber: DJPb Kanwil Jawa Timur, diolah

Grafik 2.3. Alokasi DBH Jawa Timur Tahun 2024-2025



Grafik 2.4. Postur Anggaran Belanja APBN Berdasarkan Fungsi 2023-2025



Meski demikian, alokasi TKD tahun 2025 masih tumbuh untuk mendukung pelayanan publik dan sektor prioritas di Jawa Timur. Pagu TKD yang mencapai 64,06% dari total belanja APBN di Jawa Timur tumbuh 1,28% (yoy) dibanding tahun sebelumnya, didorong peningkatan 3 komponen utama TKD, yaitu DBH, DAU, dan DAK Nonfisik.

Anggaran Belanja APBN berdasarkan fungsi tahun 2025 difokuskan untuk fungsi pelayanan umum dan pendidikan. Kontribusi fungsi pelayanan umum mencapai 65,38% dari total belanja, hampir keseluruhan atau 97,98% disalurkan dalam bentuk TKD (Grafik 2.4). Adapun belanja pada fungsi pendidikan yang menempati posisi kedua secara struktur 61,80% dialokasikan untuk Belanja Pegawai, meliputi gaji guru dan tenaga pendidik lainnya.

2.2.2. Realisasi Belanja APBN di Provinsi Jawa Timur

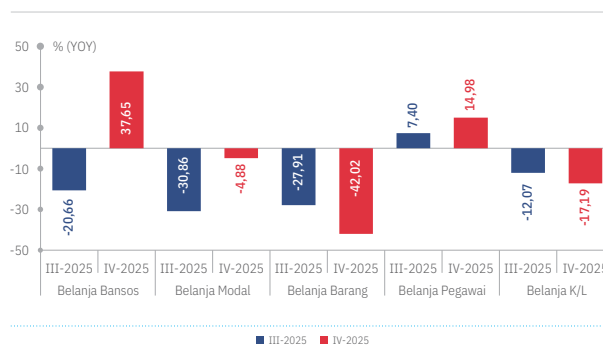
Realisasi Belanja K/L di Jawa Timur

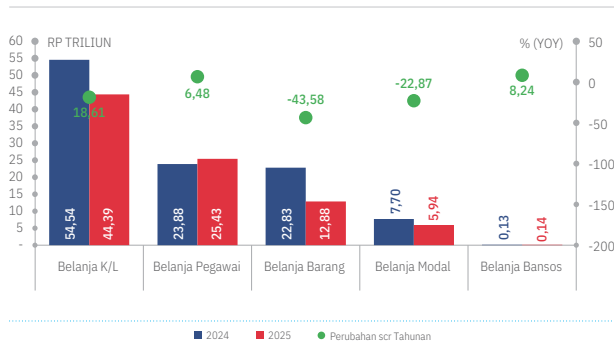
Pertumbuhan realisasi belanja K/L pada triwulan IV 2025 dan keseluruhan tahun 2025 ditopang oleh Belanja Pegawai. Pertumbuhan realisasi Belanja K/L pada triwulan laporan tercatat sebesar -17,19% (yoy), melambat dibanding pertumbuhan realisasi triwulan sebelumnya yang sebesar -12,07% (Grafik 2.5). Secara tahunan, Belanja Pegawai juga tumbuh positif 6,48% (yoy) dibanding realisasi tahun sebelumnya (Grafik 2.6). Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya kinerja belanja pegawai, terutama akibat penambahan pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan

ASN serta PPPK. Realisasi seluruh komponen gaji meningkat untuk mendukung pembayaran kepada 200.334 pegawai ASN/TNI/Polri serta 20.064 PPPK. Nilai gaji dan tunjangan naik dari Rp19,73 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp20,74 triliun pada tahun 2025. Sementara itu, realisasi honorarium, lembur, dan tunjangan lainnya juga meningkat dari Rp4,16 triliun menjadi Rp4,69 triliun. Belanja Bansos juga mencatatkan pertumbuhan yang positif baik secara triwulan maupun tahunan, sejalan dengan peningkatan pagu Bansos untuk fungsi pendidikan yang disalurkan dalam bentuk bantuan KIP-K maupun program PKH yang berdampak langsung pada masyarakat.

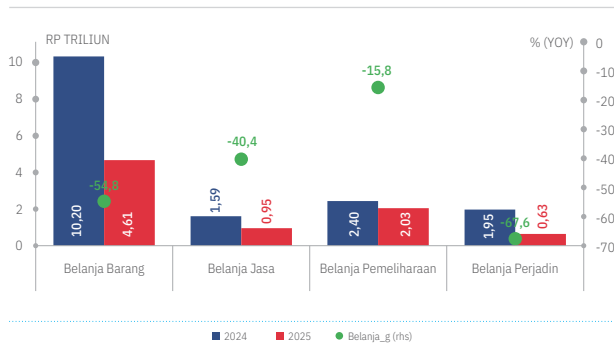
Namun demikian, realisasi Belanja K/L yang lebih tinggi terhambat oleh perlambatan Belanja Barang dan Belanja Modal. Realisasi Belanja Barang tahun 2025 menurun 43,58% (yoy) karena faktor *base effect* tahun lalu dengan agenda Pemilu dan Pilkada serentak, juga dengan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Semua komponen Belanja Barang berkontraksi, terutama pada belanja perjalanan dinas yang menurun 67,6% (yoy) dan belanja barang operasional yang menurun 54,8% (yoy). Kondisi ini sejalan dengan aturan Pemerintah di awal tahun terkait efisiensi pada Inpres No.1 2025 tentang pembatasan perjalanan dinas sebesar 50% (Grafik 2.7). Lebih lanjut, kontraksi Belanja Modal terjadi karena penurunan anggaran pada komponen Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berkontribusi 22,70% terhadap semua Belanja Modal. Adapun realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dari APBN sepanjang tahun 2025 sebesar Rp453,74 miliar, meliputi Rp353,25 miliar untuk pembangunan sektor jalan (Jalan tol Ngawi-Kertosono-Kediri, Pandaan-Malang, Pasuruan-Probolinggo, dan Probolinggo-Banyuwangi) dan Rp100,49 miliar untuk pembangunan sektor bendungan, yaitu Bendungan Bagong. Belanja Modal secara tahunan memang melambat, namun pertumbuhan realisasi pada triwulan laporan membaik didorong oleh akselerasi pelaksanaan pengadaan di akhir tahun yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap, sehingga terjadi pertumbuhan positif pada belanja modal komponen peralatan dan mesin (2,62%, yoy) serta gedung dan bangunan (22,04%, yoy) (Grafik 2.8).

Grafik 2.5. Pertumbuhan realisasi Belanja K/L triwulan III dan IV 2025 (triwulanan)

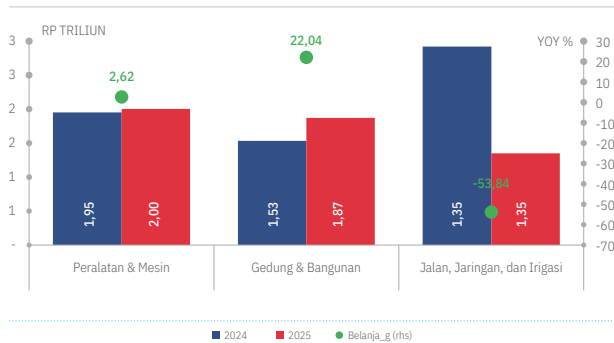


Grafik 2.6. Pertumbuhan realisasi Belanja K/L tahun 2024-2025 (tahunan)

Sumber : DJPb Karwil Jawa Timur, diolah

Grafik 2.7. Rincian Belanja Barang Tahun 2024-2025

Sumber : DJPb Karwil Jawa Timur, diolah

Grafik 2.8. Rincian Belanja Modal Tahun 2024-2025

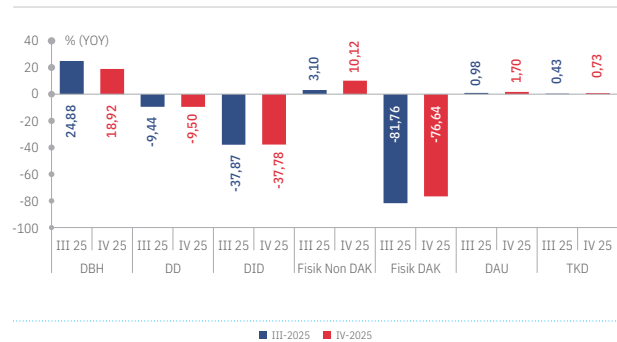
Sumber : DJPb Karwil Jawa Timur, diolah

Realisasi Belanja TKD di Jawa Timur

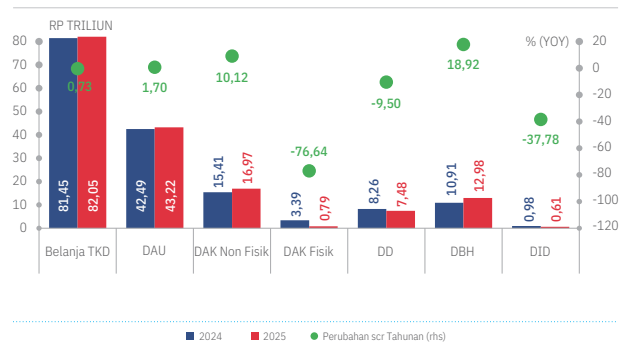
Realisasi TKD secara triwulanan dan tahunan ditopang oleh pertumbuhan DAU, DBH, dan DAK Nonfisik. Pada triwulan IV 2025, perbaikan realisasi TKD didorong oleh perbaikan kinerja DAU dan DAK Nonfisik (Grafik 2.9). Sementara itu, secara akumulatif tahun 2025 belanja TKD tumbuh 0,73% (yoy) ditopang komponen DAU, DAK Nonfisik, serta DBH (Grafik 2.10). Realisasi DAU yang menyumbang 52,67% dari TKD digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar Pemda, sementara itu, DAK Nonfisik selama periode 2025 telah digunakan untuk membiayai bidang pendidikan, meliputi pembiayaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 14,03 ribu peserta didik di Jawa Timur serta operasionalisasi 898 puskesmas. Adapun pertumbuhan realisasi DBH secara tahunan (18,92%, yoy) utamanya berasal dari pembagian DBH

Migas dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang meningkat. Penyaluran TKD yang lebih tinggi tertahan oleh perlambatan realisasi penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik.

Meskipun mengalami penurunan realisasi Dana Desa tahun 2025, seluruh KDKMP di Jawa Timur telah berhasil memperoleh status badan hukum. Realisasi Dana Desa tahun 2025 sebesar Rp7,48 triliun, menurun 9,5% (yoy) dibanding tahun sebelumnya. Penggunaan Dana Desa pada tahun laporan yaitu untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa⁵ kepada 200.712 Kelompok Penerima Manfaat (KPM), jalan serta posyandu desa, serta pembiayaan badan hukum untuk 7.721 KDKMP di seluruh Jawa Timur. Lebih lanjut, penyaluran DAK Fisik yang menurun signifikan terjadi karena penurunan pagu DAK Fisik Jawa Timur, dari rencana kegiatan sebesar Rp2,06 triliun menjadi Rp878,80 miliar. Kondisi ini mengakibatkan Pemerintah Daerah perlu merencanakan ulang kegiatan Belanja Modal. Proses pengadaan belanja modal juga tertunda akibat kendala administrasi atau birokrasi. Selain itu, meski realisasi Dana Insentif Daerah melambat sebesar 37,78% (yoy), realisasinya sudah 100% dari pagu yang digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah.

Grafik 2.9. Pertumbuhan realisasi Belanja TKD triwulan III dan IV 2025 (triwulanan)

Sumber : DJPb Karwil Jawa Timur, diolah

Grafik 2.10. Pertumbuhan realisasi Belanja TKD tahun 2024-2025 (tahunan)

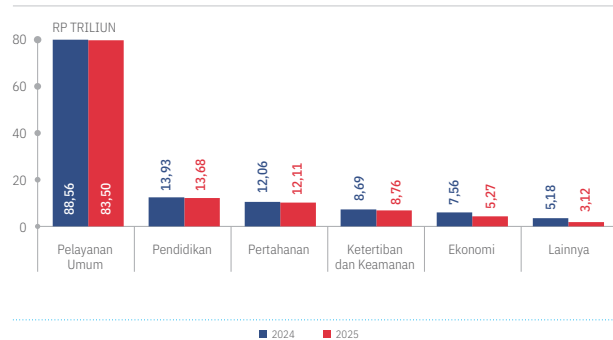
Sumber : DJPb Karwil Jawa Timur, diolah

5. BLT Desa adalah bantuan Rp300.000 per bulan kepada keluarga miskin di desa yang tidak menerima bantuan sosial seperti PKH/BPNT.

Realisasi Belanja APBN di Jawa Timur Berdasarkan Fungsi

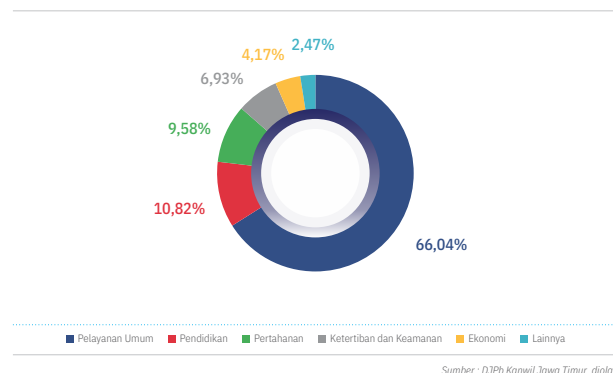
Peningkatan realisasi belanja berdasarkan fungsi terjadi pada fungsi pertahanan serta fungsi ketertiban dan keamanan didorong oleh kenaikan alokasi Belanja Pegawai. Realisasi Belanja APBN fungsi pertahanan pada tahun 2025 mencapai Rp12,11 triliun, meningkat dibandingkan Rp12,06 triliun pada tahun sebelumnya. Peningkatan serupa juga terjadi pada fungsi ketertiban dan keamanan yang naik dari Rp8,69 triliun menjadi Rp8,76 triliun (Grafik 2.11). Kenaikan tersebut sejalan dengan fokus anggaran pada Belanja Pegawai, khususnya pembayaran gaji dan tunjangan TNI dan Polri. Sebesar 70,84% realisasi belanja fungsi pertahanan dialokasikan untuk gaji dan tunjangan TNI, sejalan dengan peran Jawa Timur sebagai pangkalan militer strategis sekaligus pusat pendidikan dan pelatihan militer. Sementara itu, 54,94% realisasi belanja fungsi ketertiban dan keamanan digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Polri. Secara keseluruhan, Belanja APBN tetap difokuskan pada fungsi pelayanan umum melalui transfer ke daerah, fungsi pendidikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan guru, serta fungsi pertahanan yang didominasi belanja pegawai TNI (Grafik 2.12).

Grafik 2.11. Realisasi Belanja APBN Tahun 2024-2025 Berdasarkan Fungsi



Sumber : DJPb Kanwil Jawa Timur, diolah

Grafik 2.12. Komposisi Realisasi Belanja APBN Tahun 2025



Sumber : DJPb Kanwil Jawa Timur, diolah

2.3. APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Kinerja pendapatan Jawa Timur hingga triwulan IV 2025 berkontraksi, terutama karena penurunan PAD akibat kontraksi Pajak Daerah pascapenerapan opsen pajak.

Penurunan PAD berimplikasi pada menurunnya Derajat Otonomi Fiskal (DOF). Kontraksi PAD terutama berasal dari menurunnya penerimaan pajak, meski masih tertopang oleh peningkatan retribusi dan pengelolaan aset daerah, sementara Pendapatan Transfer turut melambat. Guna memitigasi penurunan tersebut, Pemerintah Provinsi terus mengoptimalkan berbagai potensi penerimaan untuk menjaga stabilitas kapasitas fiskal daerah.

Belanja APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 tetap terjaga solid dengan pertumbuhan pada komponen Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Realisasi belanja pada triwulan IV 2025 menunjukkan tren positif yang didorong oleh akselerasi musiman pada Belanja Barang dan Belanja Modal di seluruh komponen utamanya, kecuali belanja perjalanan dinas. Peningkatan kinerja Belanja Modal yang sejalan dengan kenaikan pagu anggaran ini menegaskan efektivitas penyerapan anggaran provinsi dalam mendukung program pembangunan daerah hingga akhir tahun.

2.3.1. Pendapatan Daerah APBD Provinsi Jawa Timur

2.3.1.1 Anggaran Pendapatan Daerah

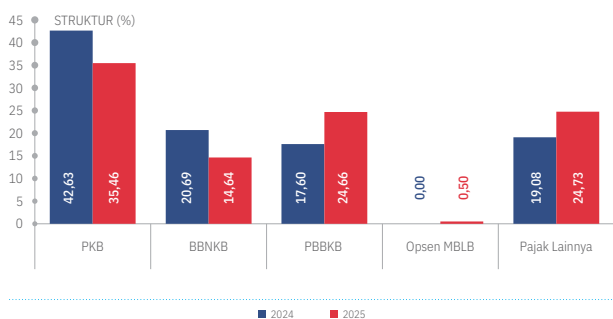
Target Pendapatan Daerah pada P-APBD Jawa Timur tahun 2025 turun sejalan dengan penurunan target PAD pada komponen penerimaan pajak. Target Pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp28,56 triliun, menurun sebesar Rp3,60 triliun atau 11,20% (yoy) dibanding tahun 2024 yang mencapai Rp32,16 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya alokasi PAD yang berkontribusi 59,89% dari total Pendapatan Daerah. Target PAD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 menurun 24,75% (yoy) atau sebesar Rp17,10 triliun dibanding tahun lalu yang sebesar Rp21,09 triliun (Tabel 2.4). Lebih lanjut, penurunan PAD dipengaruhi oleh kontraksi penerimaan Pajak Daerah akibat berlakunya opsen pada tahun 2025. Struktur penerimaan daerah tahun 2025 berbeda dibanding tahun lalu yang tanpa skema opsen, kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berkontraksi dari menyumbang lebih dari 60% penerimaan pajak pada tahun 2024, menjadi hanya menyumbang 50% dari penerimaan pajak. Sementara itu, opsen Kab/kota terhadap Provinsi yang berupa opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) hanya berkontribusi menyumbang 0,5% dari penerimaan pajak (Grafik 2.13).

Penurunan target PAD turut menurunkan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Provinsi Jawa Timur meski masih tertahan oleh peningkatan target Pendapatan Transfer. DOF Provinsi Jawa Timur tahun 2025 sebesar 59,9%, lebih rendah dibanding rata-rata tiga tahun terakhir yang mencapai 64,30% (Grafik 2.14). Meskipun demikian, penurunan target pendapatan yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan penerimaan Pendapatan Transfer yang ditargetkan sebesar Rp11,43 triliun, meningkat 3,81% (yoy) dibanding tahun lalu yang sebesar Rp11 triliun. Komponen pendapatan transfer Pemerintah Provinsi yang tumbuh adalah DAU dan DAK Non Fisik (Tabel 2.4).

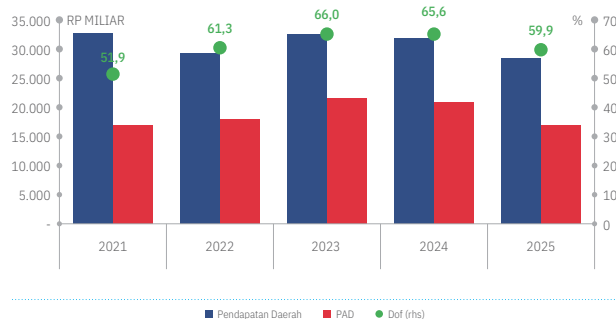
Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan 2025

Uraian	Pagu APBD Prov. Jawa Timur		% Perubahan Pagu	Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur				Pertumbuhan Realisasi s.d. IV 2025 (%yoy)
	P-APBD 2024	APBD 2025		Realisasi s.d. Tw IV 2024		Realisasi s.d. Tw IV 2025		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
Pendapatan Daerah	32.161,55	28.559,29	(11,20)	35.479,86	110,32	29.887,93	104,65	(15,76)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21.089,69	17.103,86	(18,90)	23.454,70	111,21	18.443,66	107,83	(21,36)
Pajak Daerah	17.242,26	12.975,18	(24,75)	19.102,76	110,79	13.565,33	104,55	(28,99)
Retribusi Daerah	2.731,15	2.933,26	7,40	3.088,32	113,08	3.440,15	117,28	11,39
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	473,11	488,12	3,17	471,69	99,70	488,62	100,10	3,59
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	643,17	707,30	9,97	791,93	123,13	949,57	134,25	19,91
Pendapatan Transfer	11.008,17	11.427,43	3,81	11.956,41	108,61	11.409,85	99,85	(4,57)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11.008,17	11.400,43	3,56	11.956,41	108,61	11.382,85	99,85	(4,80)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	27,00	-	-	-	27,00	-	-
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	63,69	28,00	(56,04)	68,75	107,95	34,42	122,92	(49,94)
Pendapatan Hibah	63,69	28,00	(56,04)	63,09	99,07	28,66	102,36	(54,57)
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	5,66	-	5,76	-	1,70

Sumber: BPKAD Jawa Timur, diolah

Grafik 2.13. Rincian penerimaan pajak 2024-2025

Sumber: BPKAD Jawa Timur, diolah

Grafik 2.14. Perkembangan DOF Provinsi Jawa Timur

Sumber: BPKAD Jawa Timur, diolah

2.3.1.2 Realisasi Pendapatan Daerah

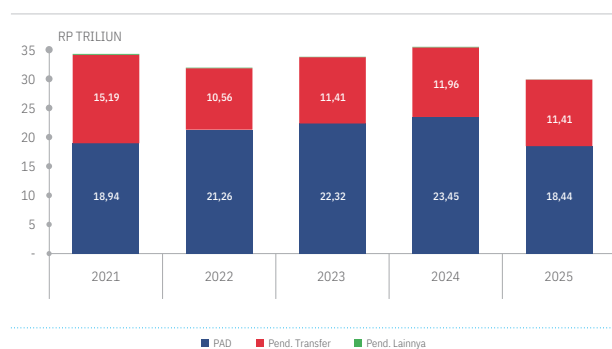
Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 terkontraksi karena penurunan realisasi pada seluruh komponen pendapatan. Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 tercatat sebesar Rp29,89 triliun, terkontraksi sebesar 15,76% (yoy) dengan capaian 104,65% dari pagu. Kontraksi penerimaan pendapatan dipengaruhi oleh penurunan realisasi PAD maupun Pendapatan Transfer masing-masing sebesar 21,36% (yoy) dan 4,57% (yoy) (Tabel 2.4). Realisasi PAD yang menyumbang 61,71% dari total pendapatan yang mencapai Rp23,45 triliun pada tahun 2024, menurun menjadi Rp18,44 triliun di tahun 2025 (Grafik 2.15).

Realisasi PAD menurun karena kontraksi dari penerimaan pajak, meskipun masih tertahan oleh peningkatan retribusi daerah. Realisasi Pajak Daerah tahun 2025 sebesar Rp13,57 triliun, terkontraksi 28,99% (yoy) dibanding tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp19,10 triliun. Meskipun

begitu, penerimaan dari retribusi mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,39% (yoy) (Grafik 2.16).

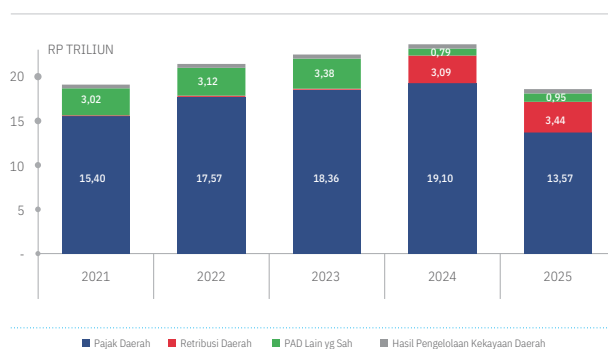
Penurunan penerimaan pajak terutama bersumber dari kontraksi komponen PKB dan BBNKB, seiring dengan implementasi kebijakan opsens pajak mulai tahun 2025. Penerapan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang langsung membagi PAD antara provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tarif opsens pajak, berdampak pada penurunan kinerja tiga sumber utama pajak, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan kontraksi masing-masing -40,99% (yoy), -53,64% (yoy), dan -0,82% (yoy) (Grafik 2.17). Lebih lanjut, perlambatan BBNKB dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor siklikal dan struktural. Dari sisi siklikal, melemahnya penjualan kendaraan bermotor di Jawa Timur pada tahun laporan berdampak langsung pada menurunnya basis

Grafik 2.15. Realisasi Pendapatan Daerah 2021-2025



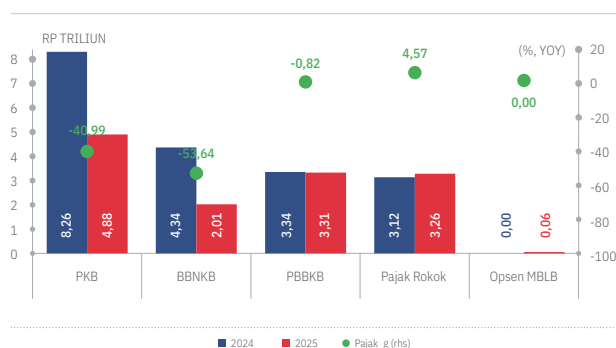
Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.16. Realisasi PAD 2021-2025



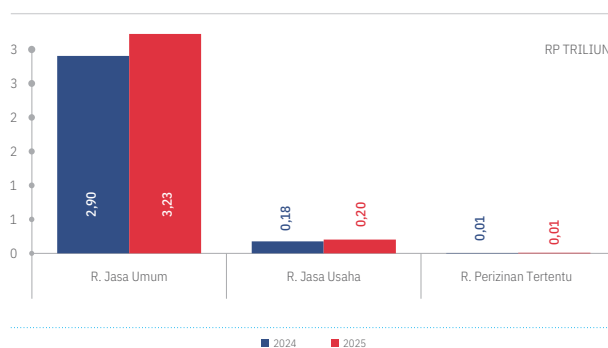
Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.17. Realisasi Pajak Daerah 2024-2025



Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.18. Realisasi Retribusi Daerah 2024-2025



Sumber: BPKAD Jawa Timur

transaksi kendaraan baru, sehingga mengurangi penerimaan dari bea balik nama. Dari sisi struktural, implementasi UU HKPD mengubah skema pengenaan pajak atas transaksi kendaraan bermotor, termasuk penghapusan pengenaan tarif BBNKB pada transaksi jual beli kendaraan bekas, yang turut menekan realisasi penerimaan BBNKB.

Meski demikian, peningkatan penerimaan retribusi daerah terutama ditopang oleh kenaikan retribusi jasa umum, yang berasal dari layanan kesehatan di RSUD. Penerimaan retribusi daerah tahun 2025 mengalami pertumbuhan pada semua komponen, yaitu pada retribusi jasa umum, jasa usaha, maupun perizinan tertentu. Namun, peningkatan paling signifikan terjadi pada layanan kesehatan dengan kontribusi 93,87% dari total penerimaan retribusi dengan pertumbuhan 11,21% (yoy) (Grafik 2.18).

Di sisi lain, penerimaan transfer dari pusat terkontraksi seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran. Komponen penerimaan transfer dari Pemerintah Pusat yang mengalami perlambatan yaitu komponen DBH, DAU, dan DAK Fisik dengan perlambatan masing-masing -5,27% (yoy), -3,27% (yoy), dan -76% (yoy). Sementara itu, komponen pendapatan transfer yang masih tumbuh adalah DAK Nonfisik dan insentif daerah untuk membiayai operasionalisasi bidang pendidikan.

Pemerintah Provinsi terus mengupayakan peningkatan PAD dari berbagai potensi penerimaan. Sebagai upaya optimalisasi PAD, Pemerintah Provinsi telah mengupayakan berbagai strategi

untuk intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui, peningkatan kepatuhan dengan sosialisasi, penagihan aktif wajib pajak, kegiatan operasi gabungan dengan mitra PKB, serta terus berinovasi dalam meningkatkan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, dalam rangka menangkap potensi penerimaan pajak yang lain, asosiasi Bapenda se – Indonesia telah mengkomunikasikan potensi penerimaan pajak dari penjualan kendaraan listrik, di mana jumlahnya di Jawa Timur kurang lebih 5.082 kendaraan listrik yang tidak dikenakan pajak. Potensi lain yang akan dikembangkan Pemprov yaitu optimalisasi aset idle yang berpotensi meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Optimalisasi aset dilakukan melalui inventarisasi, sertifikasi, serta penyelesaian sengketa jika ada aset yang bermasalah. Meskipun demikian, pengelolaan PAD Jawa Timur menghadapi beberapa tantangan meliputi kepatuhan wajib pajak, dinamika daya beli masyarakat terkait kendaraan bermotor, serta suku bunga dan regulasi pembiayaan terkait uang muka minimal. Lebih lanjut, sebagai upaya pemanfaatan aset juga terkendala pada regulasi sewa aset yang waktunya cukup singkat jika digunakan untuk para wirausaha. Ke depan, diperlukan evaluasi kebijakan serta strategi perluasan basis pajak yang tetap mendukung transisi energi, namun tidak mengurangi kemampuan fiskal daerah dalam jangka panjang.

2.3.2. Belanja Daerah APBD Provinsi Jawa Timur

2.3.2.1 Anggaran Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan pada komponen Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Anggaran Belanja P-APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 tercatat sebesar Rp33,26 triliun, berkontraksi 7,49% (yoy) dibanding tahun 2024. Meskipun demikian, kontributor utama belanja daerah yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal masih mengalami pertumbuhan positif dengan pertumbuhan pagu masing-masing 5,90% (yoy), 6,35% (yoy), dan 31,50% (yoy) (Tabel 2.5).

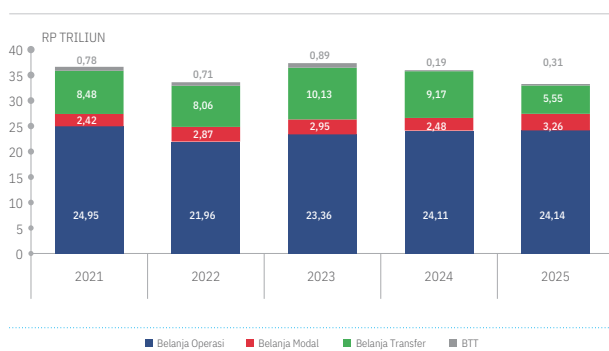
Namun demikian, anggaran Belanja Transfer mengalami penurunan seiring perubahan skema penyaluran menjadi mekanisme opsen pajak. Pada tahun 2025, anggaran Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur turun dari Rp9,17 triliun menjadi Rp5,55 triliun (Grafik 2.19). Penurunan ini disebabkan oleh faktor perubahan mekanisme bagi hasil yang sebelumnya disalurkan melalui Belanja Transfer, kini dialihkan menjadi opsen atas PKB dan BBNKB yang dicatat langsung sebagai PAD Pemerintah Kabupaten/Kota. Sejalan dengan hal tersebut, kontribusi Belanja Transfer terhadap Belanja Total juga menurun. Porsi Belanja Transfer turun menjadi 16,7% terhadap total belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, setelah dalam empat tahun terakhir konsisten berada di atas 20% (Grafik 2.20).

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur 2024 dan 2025

Uraian	Pagu APBD Prov. Jawa Timur		% Perubahan	Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur				Pertumbuhan Realisasi s.d. IV 2025 (%yoy)
	P-APBD 2024	P-APBD 2025		Realisasi s.d. IV 2024		Realisasi s.d. IV 2025		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
Belanja Daerah	35.949,33	33.256,38	(7,49)	34.561,53	96,14	31.159,62	93,70	(9,84)
Belanja Operasi	24.112,34	24.136,86	0,10	22.994,24	95,36	22.516,17	93,29	(2,08)
Belanja Pegawai	8.874,89	9.398,42	5,90	8.331,76	93,88	8.373,14	89,09	0,50
Belanja Barang Dan Jasa	10.518,34	11.186,41	6,35	10.072,28	95,76	10.698,92	95,64	6,22
Belanja Subsidi	31,04	50,04	61,21	30,01	96,68	47,28	94,48	57,54
Belanja Hibah	4.519,46	3.280,94	(27,40)	4.409,01	97,56	3.198,56	97,49	(27,45)
Belanja Bantuan Sosial	168,61	221,04	31,09	151,18	89,66	198,27	89,70	31,15
Belanja Modal	2.478,79	3.259,60	31,50	2.307,62	93,09	3.014,30	92,47	30,62
Belanja Modal Tanah	31,84	90,08	182,91	24,36	76,52	75,46	83,78	209,72
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	1.280,74	1.435,94	12,12	1.221,93	95,41	1.351,52	94,12	10,60
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	786,17	913,80	16,23	741,24	94,28	857,52	93,84	15,69
Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	279,62	669,04	139,27	220,24	78,76	579,67	86,64	163,20
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	97,99	146,48	49,48	97,71	99,71	146,32	99,90	49,75
Belanja Modal Aset Lainnya	2,44	4,26	74,54	2,14	87,67	3,81	89,34	77,86
Belanja Tak Terduga	192,81	310,97	61,29	140,54	72,89	124,32	39,98	(11,54)
Belanja Transfer	9.165,38	5.548,96	(39,46)	9.119,13	99,50	5.504,83	99,20	(39,63)
Belanja Bagi Hasil	8.235,07	5.030,31	(38,92)	8.267,24	100,39	5.006,95	99,54	(39,44)
Belanja Bantuan Keuangan	930,31	518,65	(44,25)	851,88	91,57	497,88	95,99	(41,56)

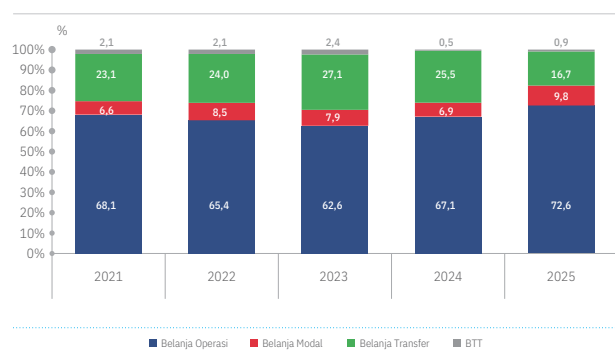
Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.19. Anggaran Belanja APBD Provinsi Jawa Timur 2021-2025



Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur

Grafik 2.20. Postur Anggaran Belanja APBD Provinsi Jawa Timur 2020-2025



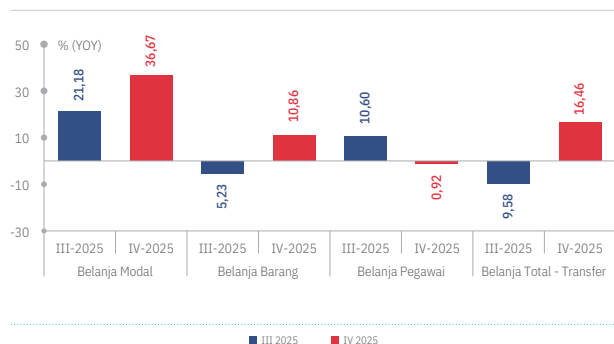
Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur

2.3.2.2 Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja APBD Provinsi Jawa Timur pada triwulan IV 2025 tumbuh positif, didorong oleh peningkatan Belanja Barang dan Belanja Modal. Realisasi belanja pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 16,46% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -9,58% (yoy). Perbaikan tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan positif Belanja Barang dan Belanja Modal (Grafik 2.21). Secara kumulatif tahunan, kinerja Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal juga mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan tertinggi pada Belanja Modal sebesar 30,62% (yoy) (Tabel 2.5).

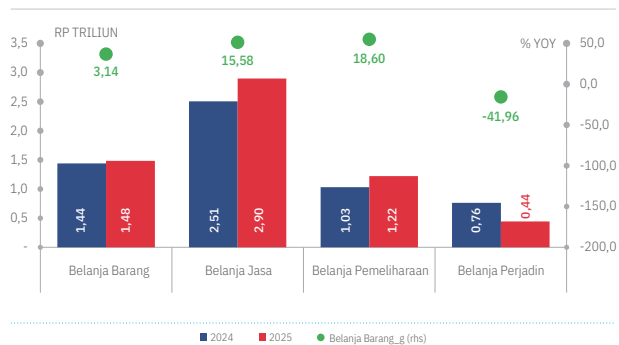
Ditinjau dari pola serapan anggaran, triwulan IV merupakan periode akselerasi realisasi belanja, sehingga pertumbuhan positif pada triwulan laporan sejalan dengan pola musiman penyerapan anggaran. Persentase realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal pada triwulan IV masing-masing mencapai 29,75%, 41,72%, dan 70,83% (Grafik 2.22). Meskipun realisasi belanja lebih terkonsentrasi di akhir tahun, Pemerintah Provinsi terus berupaya mendorong penyerapan yang lebih merata antartriwulan agar kontribusinya terhadap perekonomian semakin optimal. Pada tahun berjalan, realisasi belanja sempat tertahan akibat penyesuaian regulasi dan kebijakan efisiensi anggaran di awal tahun, namun tren pertumbuhan pada triwulan IV 2025 menunjukkan respons yang baik terhadap upaya akselerasi.

Grafik 2.21. Pertumbuhan realisasi Belanja triwulan III & IV 2025 (triwulanan)



Sumber: DJPB Kanwil Jawa Timur, diolah

Grafik 2.23. Rincian Belanja Barang 2024-2025

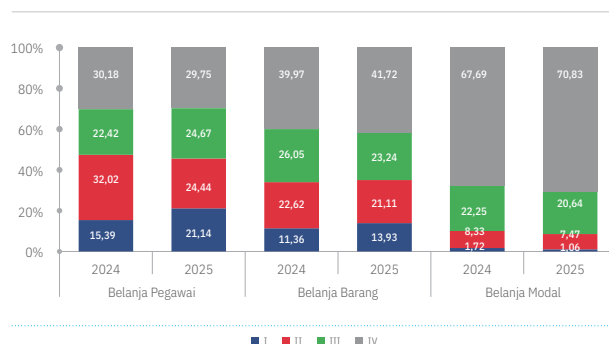


Sumber: BPKAD Jawa Timur

Berdasarkan rinciannya, realisasi Belanja Barang pada tahun 2025 tercatat meningkat ditopang oleh peningkatan mayoritas komponen kecuali komponen Belanja Perjalanan dinas. Realisasi Belanja Barang tahun 2025 tumbuh 6,22% (yoy) ditopang oleh pertumbuhan komponen Belanja Barang, Belanja Jasa, dan Belanja Pemeliharaan untuk mendukung operasionalisasi Pemerintah Provinsi. Sementara itu, komponen Belanja perjalanan dinas berkontraksi sebesar -41,96% (yoy) sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 tahun 2025⁶.

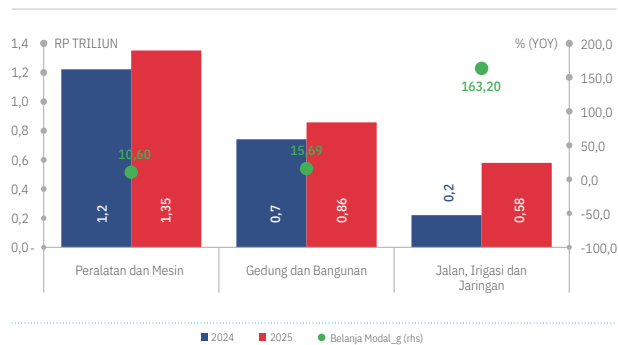
Kinerja Belanja Modal juga meningkat sejalan dengan peningkatan pagu dikarenakan perbaikan belanja pada seluruh komponen Belanja Modal. Realisasi Belanja Modal tumbuh positif sebesar 30,62% dibandingkan tahun lalu terutama ditopang oleh meningkatnya realisasi Belanja Modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tumbuh 163,20% (yoy) sejalan dengan implementasi Inpres No.2 Tahun 2025⁷. Peningkatan tersebut bersumber dari pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumber Daya Air, dan Dinas PU Bina Marga, meliputi pembangunan dan rehabilitasi jalan serta jembatan, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, serta pembangunan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Upaya tersebut turut mendukung penguatan infrastruktur pertanian dan peningkatan produksi pertanian di Jawa Timur pada tahun 2025.

Grafik 2.22. Anggaran Belanja Modal APBD Provinsi Jawa Timur 2020-2025



Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur

Grafik 2.24. Rincian Belanja Modal 2024-2025



Sumber: BPKAD Jawa Timur

6. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD TA 2025 menetapkan langkah penghematan anggaran secara nasional.

7. Inpres No. 2 Tahun 2025 berfokus pada percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan nasional. Kebijakan ini menargetkan perbaikan jaringan irigasi utama, sekunder, dan tersier, termasuk pompa/pipanisasi di berbagai daerah untuk memastikan suplai air yang optimal bagi produktivitas pertanian.

2.4. APBD 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Pagu dan realisasi pendapatan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2025 tumbuh tipis berkat peningkatan PAD dan naiknya Derajat Otonomi Fiskal (DOF) pasca penerapan skema opsen pajak. Secara spasial, Kabupaten Bojonegoro mencatat realisasi tertinggi melalui akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sementara Kabupaten Bangkalan mencatat realisasi terendah akibat terbatasnya pendapatan transfer. Kendati realisasi masih terkonsentrasi di triwulan IV, kebijakan penurunan transfer menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dan efisiensi belanja.

Anggaran dan realisasi belanja 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2025 mengalami kontraksi akibat penurunan pagu Belanja Modal serta kebijakan efisiensi pada Belanja Barang. Meskipun realisasi belanja secara agregat melambat, pertumbuhan positif pada Belanja Pegawai tetap menjadi penopang kinerja belanja secara keseluruhan. Secara spasial, Kabupaten Magetan mencatat realisasi tertinggi karena Belanja

Operasi yang *on track*, sementara Kabupaten Lumajang mencatat realisasi terendah akibat belum optimalnya penyerapan Belanja Operasi maupun Belanja Modal.

2.4.1. Pendapatan Daerah APBD Kabupaten/Kota

2.4.1.1. Anggaran Pendapatan Daerah

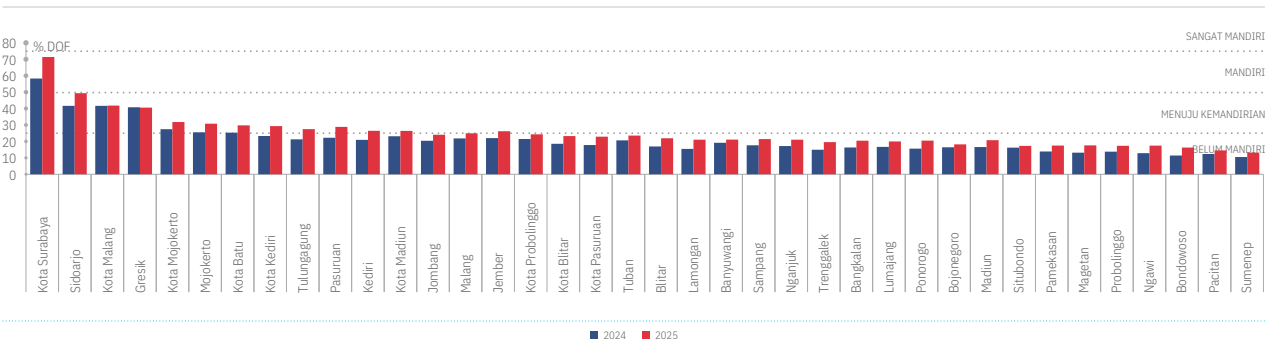
Pagu pendapatan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2025 tumbuh tipis, ditopang oleh peningkatan PAD meski dengan Pendapatan Transfer yang menurun. Pagu pendapatan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp107,72 triliun atau tumbuh tipis 0,24% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kenaikan PAD, sementara Pendapatan Transfer mengalami penurunan. Kenaikan PAD terutama dipengaruhi oleh pemberlakuan opsen pajak mulai 2025. Namun, kebijakan ini hanya mengubah mekanisme pencatatan tanpa meningkatkan kapasitas fiskal secara riil, tecermin dari kenaikan PAD Rp5,66 triliun yang hampir setara

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD 38 Kab/kota Tahun 2024 dan 2025

Uraian	Pagu APBD Prov. Jawa Timur		% Perubahan Pagu	Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur				Pertumbuhan Realisasi s.d. IV 2025 (%yoy)
	P-APBD 2024	APBD 2025		Realisasi s.d. Tw IV 2024		Realisasi s.d. Tw IV 2025		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
Pendapatan Daerah	107.463	107.718	0,24	105.444	98,12	106.705	99,06	1,20
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	26.674	32.338	21,24	25.807	96,75	31.422	97,17	21,76
Pajak Daerah	13.739	18.628	35,58	13.433	97,77	17.912	96,16	33,34
Retribusi Daerah	6.733	10.833	60,89	6.172	91,66	10.385	95,86	68,25
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	728	733	0,69	707	97,13	623	85,06	(11,83)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.474	2.145	(60,82)	5.495	100,39	2.502	116,67	(54,46)
Pendapatan Transfer	80.436	75.203	(6,51)	79.337	98,63	75.097	99,86	(5,34)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	70.828	70.308	(0,73)	70.695	99,81	69.865	99,37	(1,17)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	9.608	4.895	(49,05)	8.642	89,95	5.233	106,90	(39,45)
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	353	176	(50,09)	300	85,01	186	105,45	(38,08)
Pendapatan Hibah	73	24	(67,06)	58	80,08	24	101,66	(58,19)
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	280	152	(45,66)	241	86,29	161	106,05	(33,21)

Sumber: BPKAD Jawa Timur, diolah

Grafik 2.25. DOF Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2024-2025 (berdasarkan anggaran)



Sumber: BPKAD Jawa Timur

dengan penurunan Pendapatan Transfer Rp5,23 triliun (Tabel 2.6). Meski secara agregat hanya terjadi reposisi pendapatan, dampaknya tidak merata antardaerah karena sangat bergantung pada basis pajak kendaraan, sehingga berpotensi meningkatkan ketimpangan kapasitas fiskal.

Rata-rata nilai DOF kabupaten/kota di Jawa Timur turut meningkat seiring dengan naiknya pagu PAD setelah penerapan skema opsen. Rata-rata DOF 38 kab/kota tahun 2025 mencapai 25,27%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang tercatat 21,08%. Enam daerah yang beralih dari kategori belum mandiri menuju kemandirian meliputi Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Kediri, Kota Madiun, dan Kabupaten Jember (Grafik 2.25). Perubahan status tersebut didorong oleh tambahan PAD dari opsen yang lebih optimal pada daerah dengan basis kendaraan bermotor besar melalui penerimaan PKB dan BBNKB, sehingga mendorong kenaikan DOF secara signifikan.

2.4.1.2. Realisasi Pendapatan Daerah

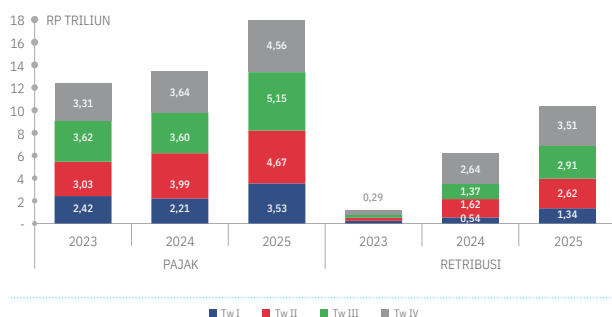
Realisasi pendapatan 38 kab/kota di Jawa Timur tahun 2025 tumbuh sejalan dengan pagu, ditopang oleh peningkatan PAD meski Pendapatan Transfer berkontraksi. Realisasi pendapatan 38 kab/kota tahun 2025 tercatat sebesar Rp106,71 triliun (99,06%), meningkat secara nominal maupun persentase terhadap capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp105,44 triliun (98,12%). Peningkatan tersebut ditopang oleh

peningkatan PAD, pada komponen penerimaan pajak (33,34%, yoy) dan retribusi daerah (68,25%, yoy) (Grafik 2.26). Namun demikian, peningkatan lebih tinggi tertahan oleh kontraksi pada Pendapatan Transfer (-5,34%, yoy) yang berkontribusi sebesar 70,38% terhadap total pendapatan.

Realisasi PAD dan Pendapatan Transfer masih relatif terkonsentrasi pada triwulan IV, sehingga terdapat ruang untuk perbaikan dalam pemerataan penerimaan sepanjang tahun. Pada triwulan IV 2025, persentase realisasi PAD dan Pendapatan Transfer masing-masing mencapai 27,28% dan 28,50% dari total tahunan (Grafik 2.27). Meskipun proporsinya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, pola konsentrasi di akhir tahun tetap perlu dikelola agar pembiayaan belanja daerah dapat berlangsung lebih stabil dan terencana.

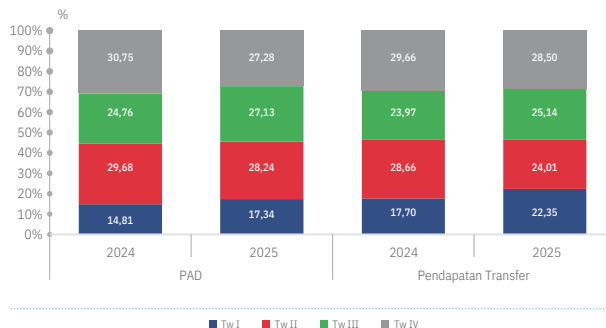
Secara spasial, Kabupaten Bojonegoro mencatat realisasi pendapatan tertinggi pada tahun 2025 yang didukung oleh transformasi digital melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETPD). Realisasi pendapatan mencapai 109,95% dari target, ditopang oleh realisasi PAD sebesar 106,60% dan Pendapatan Transfer sebesar 110,70%. Kinerja tersebut turut meningkatkan kemandirian fiskal daerah dari 16,41% pada 2024 menjadi 18,19% pada 2025, meskipun masih tergolong belum mandiri. Peningkatan PAD didorong oleh optimalisasi pengelolaan BUMD dan BLUD RS serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan retribusi. Kabupaten Bojonegoro juga meraih Program Unggulan Terbaik III kategori Peningkatan Layanan PKB dan mencatat Indeks ETPD Semester I 2025 tertinggi

Grafik 2.26. Realisasi PAD 2023-2025



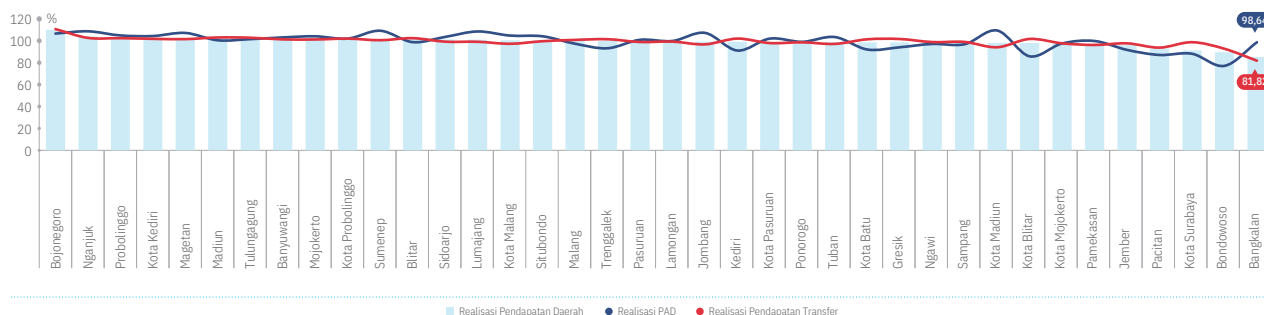
Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.27. Persentase Realisasi Pendapatan Daerah 2024-2025 (triwulanan)



Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.28. Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2025



Sumber: BPKAD Jawa Timur

se-Jawa Timur. Capaian ini mencerminkan keberhasilan digitalisasi pendapatan melalui integrasi layanan elektronik dan optimalisasi kanal pembayaran nontunai, sehingga proses menjadi lebih efisien, transparan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat karena pembayaran langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Di sisi lain, Kabupaten Bangkalan mencatat realisasi pendapatan daerah terendah pada tahun 2025, terutama dipengaruhi oleh capaian pendapatan transfer. Realisasi pendapatan transfer Kabupaten Bangkalan tahun 2025 tercatat sebesar 81,82% dari target Rp2,47 triliun. Meskipun demikian, kinerja PAD relatif terjaga dengan realisasi tahunan sebesar 98,64%. Kondisi tersebut turut mendorong peningkatan kemandirian fiskal dari 16,33% pada tahun 2024 menjadi 20,41% pada tahun 2025 atau naik 4,09%, meskipun kontribusi transfer yang belum optimal masih menahan pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan.

Kebijakan penurunan TKD di awal tahun menjadi momentum daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan melakukan efisiensi belanja. Realisasi pendapatan pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2025 cenderung berkontraksi, tecermin dari 19 daerah yang mencatatkan pertumbuhan negatif pada pendapatan total (Grafik 2.29). Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh kontraksi realisasi Pendapatan Transfer yang terjadi di 35 kabupaten/kota, sejalan dengan tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah

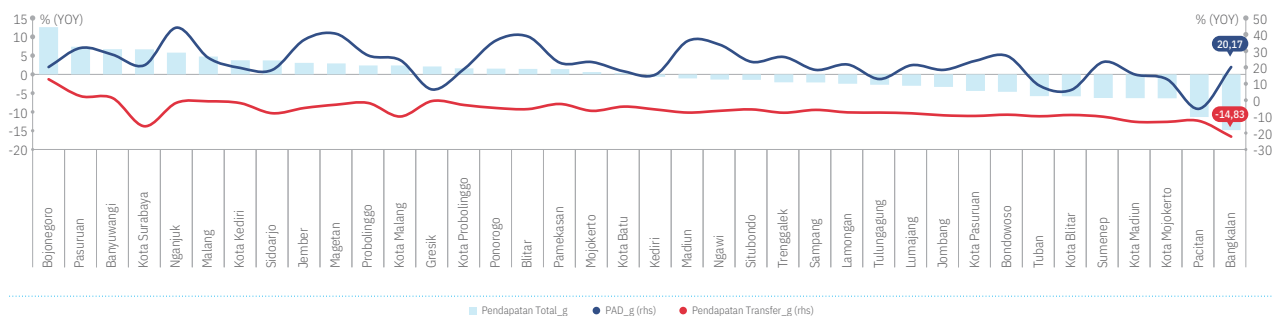
terhadap transfer pusat tersebut dengan rata-rata rasio Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Total mencapai 74,51%. Kondisi ini mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan PAD, yang tecermin dari pertumbuhan positif PAD di 37 kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Ngawi, akibat tidak tercapainya target pendapatan sektor pariwisata serta terhambatnya realisasi retribusi perikanan. Secara keseluruhan, kontraksi pendapatan berdampak pada menurunnya kapasitas fiskal daerah sehingga diperlukan efisiensi anggaran guna memitigasi risiko defisit.

2.4.2. Belanja Daerah APBD 38 Kabupaten/Kota

2.4.2.1 Anggaran Belanja Daerah

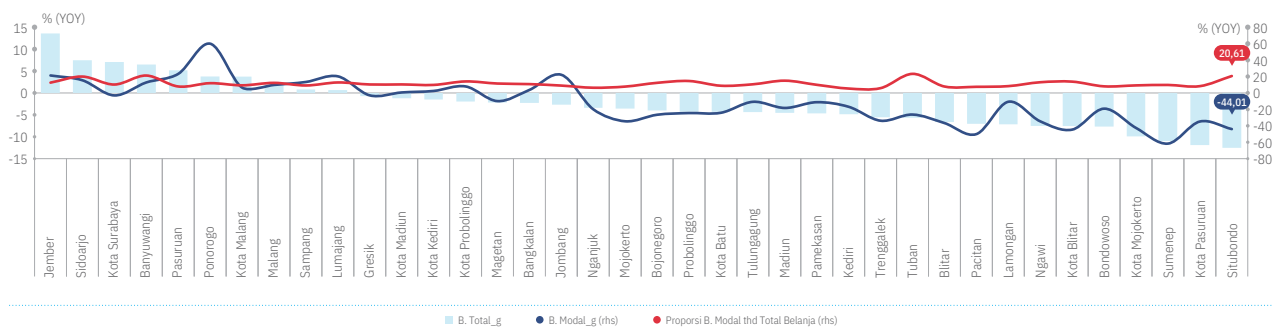
Anggaran Belanja 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2025 sedikit berkontraksi karena penurunan pagu Belanja Modal. Anggaran Belanja 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2025 sebesar Rp117,12 triliun, berkontraksi 0,96% (yoy) dibanding tahun lalu yang sebesar Rp118,25 triliun (Tabel 2.7). Penurunan tersebut dipengaruhi penurunan komponen Belanja Modal (-10,88%, yoy) yang berkontribusi 13,06% terhadap total belanja. Lebih lanjut, penurunan belanja modal terjadi karena semua komponen utamanya menurun, yaitu Belanja Modal untuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Meskipun demikian, anggaran belanja transfer tahun 2025 sedikit meningkat sebesar 0,61% (yoy) dari periode tahun lalu.

Grafik 2.29. Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2025



Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.30. Pertumbuhan Anggaran Belanja Daerah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2024-2025



Sumber: BPKAD Jawa Timur

8. Keputusan Bupati Ponorogo No.100.3.3.2/ARH/368/405.02.3/2025 tentang Penetapan 10 (sepuluh) Paket Strategis Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2024-2025

Uraian	Pagu APBD 38 Kab/Kota		% Perubahan Pagu	Realisasi APBD 38 Kab/Kota di Jawa Timur				Pertumbuhan Realisasi s.d. IV 2025 (%yoy)
	P-APBD 2024	P-APBD 2025		Realisasi s.d. IV 2024		Realisasi s.d. IV 2025		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
Belanja Daerah	118.253,08	117.117,37	(0,96)	106.424,41	90,00	103.021,21	87,96	(3,20)
Belanja Operasi	85.577,38	86.077,92	0,58	77.543,75	90,61	76.176,51	88,50	(1,76)
Belanja Pegawai	40.752,34	43.761,51	7,38	37.535,98	96,17	39.192,35	89,56	4,41
Belanja Barang dan Jasa	36.424,21	36.695,62	0,75	32.491,54	88,37	32.186,83	87,71	(0,94)
Belanja Bunga	31,65	41,49	31,10	30,76	98,25	31,09	74,94	1,10
Belanja Subsidi	44,97	118,15	162,70	33,26	230,17	103,52	87,62	211,23
Belanja Hibah	7.507,81	4.717,19	(37,17)	6.725,30	53,90	4.046,85	85,79	(39,83)
Belanja Bantuan Sosial	816,39	743,97	(8,87)	726,90	75,44	615,86	82,78	(15,28)
Belanja Modal	17.165,05	15.296,91	(10,88)	14.277,30	83,18	12.163,85	79,52	(14,80)
Belanja Modal Tanah	566,50	685,71	21,04	348,16	78,24	443,25	64,64	27,31
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.510,12	3.399,46	(3,15)	2.967,05	78,26	2.747,12	80,81	(7,41)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.475,93	3.584,89	(19,91)	3.728,58	61,32	2.744,58	76,56	(26,39)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.371,45	7.379,54	(11,85)	7.056,99	72,60	6.078,07	82,36	(13,87)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	205,18	211,84	3,25	145,68	59,78	122,65	57,90	(15,81)
Belanja Modal Aset Lainnya	35,86	35,47	(1,10)	30,84	78,58	28,18	79,45	(8,62)
Belanja Tak Terduga	354,19	493,00	39,19	147,56	41,66	137,92	27,98	(6,53)
Belanja Transfer	15.156,47	15.249,54	0,61	14.455,79	95,38	14.542,92	95,37	0,60
Belanja Bagi Hasil	819,02	1.065,84	30,14	756,76	92,40	999,34	93,76	32,05
Belanja Bantuan Keuangan	14.337,45	14.183,70	(1,07)	13.699,03	95,55	13.543,59	95,49	(1,13)

Sumber: BPKAD Jawa Timur, diolah

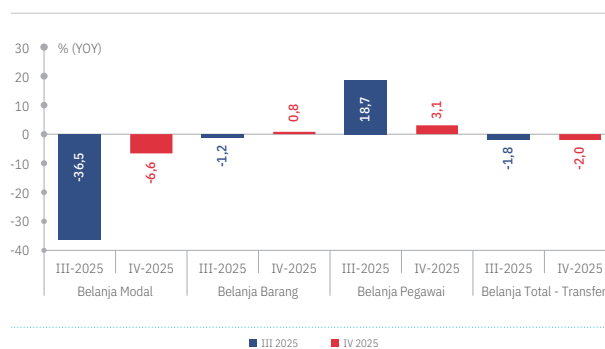
Secara spasial, penurunan anggaran belanja terjadi pada sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur. Perkembangan tersebut tecermin dari kontraksi pagu belanja pada 28 daerah, sementara hanya 10 kabupaten/kota yang mencatatkan pertumbuhan positif (Grafik 2.30). Penurunan tersebut berdampak pada terbatasnya ruang pembangunan infrastruktur daerah melalui Belanja Modal. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja secara agregat turun menjadi 11,27% dari 12,83% pada tahun 2024, dengan penurunan terjadi di 28 daerah. Meski demikian, akselerasi Belanja Modal masih terjadi di beberapa daerah, dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Ponorogo sebesar 59,95% (yoy), sejalan dengan pelaksanaan sepuluh paket strategis pekerjaan konstruksi yang mencakup pembangunan puskesmas, IPAL, sekolah, dan konektivitas jalan⁶. Sementara itu, proporsi Belanja Modal terbesar terhadap total belanja tercatat pada Kabupaten Tuban.

2.4.2.2 Realisasi Belanja Daerah

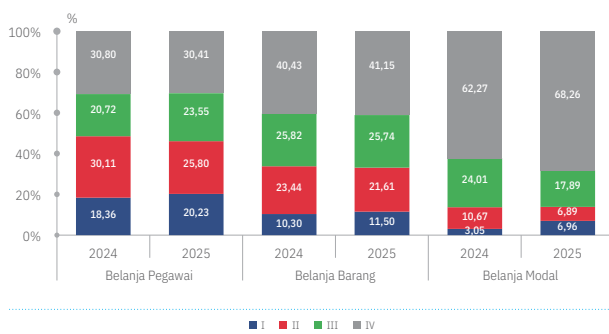
Realisasi belanja APBD 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2025 mengalami perlambatan akibat kontraksi pada Belanja Barang dan Belanja Modal, meskipun masih ditopang oleh pertumbuhan positif Belanja Pegawai. Realisasi belanja tercatat sebesar Rp103,02 triliun atau 87,96% dari pagu, menurun 3,20% (yoy) dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp106,42 triliun (Tabel 2.7). Perlambatan tersebut terutama

dipengaruhi oleh penurunan Belanja Modal seiring berkurangnya alokasi DAK Fisik sebesar Rp1,05 triliun untuk 38 kabupaten/kota. Selain itu, realisasi Belanja Barang juga tertahan akibat *base effect* tahun 2024 yang merupakan periode penyelenggaraan tahun politik, sehingga capaian belanja tahun 2025 relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun demikian, secara triwulanan realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal menunjukkan perbaikan pada triwulan IV 2025 sejalan dengan pola historis penyerapan anggaran. Belanja Barang meningkat dari terkontraksi sebesar -1,2% (yoy) pada triwulan III menjadi tumbuh 0,8% (yoy) pada triwulan

Grafik 2.31. Pertumbuhan realisasi Belanja triwulan III & IV 2025 (triwulanan)

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur

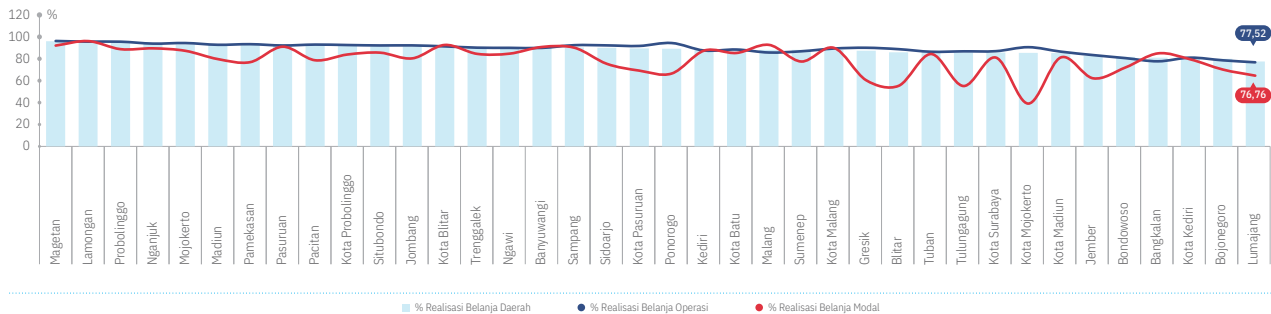
Grafik 2.32. Anggaran Belanja Modal APBD Provinsi Jawa Timur 2024-2025

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur

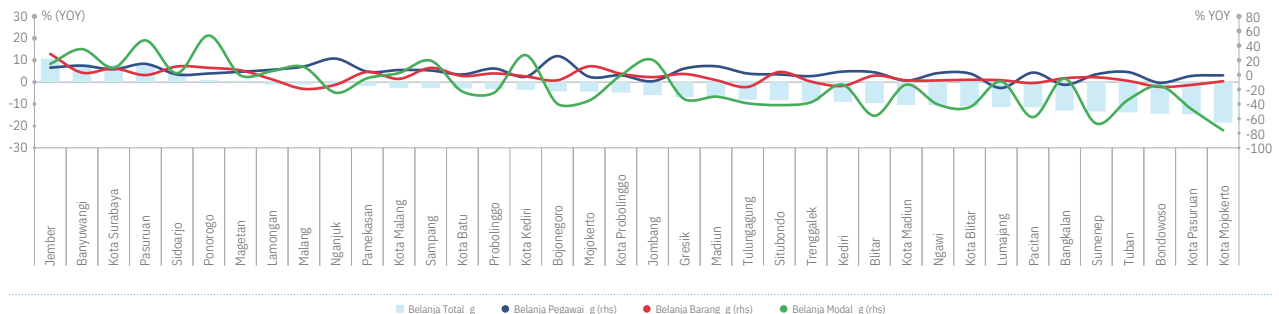
laporan. Sementara itu, kontraksi Belanja Modal turut mereda dari -36,5% (yoy) menjadi -6,6% (yoy) (Grafik 2.31), mencerminkan akselerasi realisasi belanja pada akhir tahun. Kondisi tersebut tecermin dari tingginya konsentrasi realisasi pada triwulan IV 2025, dengan 68,26% Belanja Modal dan 41,15% Belanja Barang direalisasikan pada periode tersebut (Grafik 2.32). Secara keseluruhan, persentase realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal pada triwulan IV 2025 menjadi yang tertinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan pola historis penyerapan anggaran dan menunjukkan masih terbukanya ruang perbaikan kualitas penyerapan belanja pada periode mendatang.

Secara spasial, Kabupaten Magetan memiliki capaian realisasi Belanja Daerah tertinggi didorong oleh realisasi Belanja Operasi yang *on track*. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun 2025 mencapai 96,02% dari total anggaran sebesar Rp2,13 triliun (Grafik 2.33). Capaian tersebut didukung oleh tingginya realisasi Belanja Operasi, meskipun kinerja Belanja Modal masih perlu dioptimalkan. Di sisi lain, realisasi Belanja Modal tertinggi pada tahun 2025 tercatat di Kabupaten Lamongan seiring akselerasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Daerah. Komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mempercepat pelaksanaan anggaran fisik menjadi faktor utama tingginya capaian Belanja Modal di Jawa Timur pada tahun 2025.

Di sisi lain, Kabupaten Lumajang tercatat sebagai daerah dengan realisasi belanja terendah pada tahun 2025, yang dipengaruhi oleh belum optimalnya realisasi Belanja Operasi maupun Belanja Modal. Hingga akhir tahun, realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lumajang baru mencapai 77,52% dari pagu anggaran, dengan capaian Belanja Operasi sebesar 76,76% dan Belanja Modal sebesar 64,57% (Grafik 2.33). Rendahnya realisasi Belanja Modal terutama terjadi pada belanja infrastruktur jalan dan irigasi, yang antara lain dipengaruhi oleh keterlambatan proses lelang serta kendala teknis pelaksanaan di lapangan. Selain itu, permasalahan administratif terkait penatausahaan aset daerah turut menjadi hambatan dalam

Grafik 2.33. Persentase Realisasi Belanja Daerah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2025

Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.34. Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2025

Sumber: BPKAD Jawa Timur

penyusunan dokumen anggaran dan pelaksanaan belanja. Di tengah adanya tekanan fiskal dan potensi penyesuaian transfer dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Lumajang cenderung lebih berhati-hati dalam merealisasikan anggaran guna menjaga kepatuhan terhadap ketentuan fiskal yang berlaku.

Mayoritas realisasi belanja total pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan kebijakan efisiensi yang berdampak pada Belanja Barang dan Belanja Modal. Dari seluruh daerah, hanya tujuh kabupaten/kota yang mencatatkan pertumbuhan positif, sementara 31 daerah lainnya mengalami penurunan realisasi belanja, dengan kontraksi terdalam terjadi di Kota Mojokerto sebesar -18,47% (yoy), terutama dipengaruhi oleh penurunan tajam Belanja Modal sebesar -76,12% (yoy) dan Belanja Barang sebesar -8,80% (yoy). Secara spasial, perlambatan Belanja Barang terjadi di 25 daerah, sedangkan kontraksi Belanja Modal tercatat pada 26 kabupaten/kota (Grafik 2.34). Rendahnya serapan belanja tersebut antara lain dipengaruhi oleh perubahan regulasi dan sistem pengadaan barang/jasa di tingkat pusat, termasuk transisi sistem pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan tertundanya proses administrasi pada awal tahun. Sebagai respons, Pemerintah Daerah melakukan percepatan pengadaan, penyederhanaan proses administrasi teknis, serta penguatan koordinasi lintas instansi guna mendorong akselerasi realisasi belanja.



Perkembangan Inflasi



3.1. Kondisi Umum

Inflasi Provinsi Jawa Timur pada akhir triwulan IV 2025 tercatat masih terjaga dalam rentang sasaran nasional $2,5 \pm 1,0\%$ (yoy), meski lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan III 2025. Inflasi pada triwulan laporan sebesar 2,93% (yoy) atau meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat 2,53% (yoy). Tekanan inflasi dipengaruhi oleh (i) kenaikan harga komoditas hortikultura akibat terbatasnya pasokan dari wilayah sentra produksi, (ii) kenaikan permintaan akan bahan pokok strategis di tengah masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, (iii) dinamika curah hujan yang tinggi pada periode November dan Desember mengganggu hasil panen (iv) harga emas pada akhir triwulan IV tercatat mencapai level tertinggi sepanjang tahun 2025 seiring dengan tingginya ketidakpastian perekonomian global. Berdasarkan kelompok pengeluaran, meningkatnya tekanan inflasi Jawa Timur pada periode laporan didorong oleh (i) kelompok makanan, minuman, dan tembakau; (ii) kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; (iii) kelompok transportasi; serta (iv) kelompok kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Adapun, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan menjadi kelompok penahan inflasi pada triwulan IV 2025. Selain itu, stimulus ekonomi Pemerintah melalui program diskon tiket transportasi pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2026 juga dapat menekan lonjakan tarif angkutan udara pada triwulan IV 2025.

Inflasi Provinsi Jawa Timur pada triwulan I 2026 diperkirakan lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan IV 2025 serta akan tetap dalam rentang sasaran target inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Prakiraan meningkatnya inflasi pada triwulan I 2026 didorong oleh momen Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional Idulfitri 1447 Hijriah. Peningkatan permintaan terhadap bahan pokok strategis akan meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat dalam menyambut Idulfitri, namun di sisi lain risiko gagal panen yang diakibatkan oleh curah hujan akan berdampak pada tekanan harga yang lebih tinggi. Lebih lanjut, penyesuaian tarif diskon listrik juga akan berdampak terhadap tingkat inflasi sepanjang triwulan I, khususnya pada kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga. Namun demikian, harga emas dunia diperkirakan akan menurun seiring dengan faktor fundamental yang mempengaruhi sentimen investor.

Sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah, TPID Jawa Timur secara konsisten mengimplementasikan strategi 4K TPIP. Pada aspek keterjangkauan harga, berbagai langkah ditempuh melalui optimalisasi Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK), penyelenggaraan pasar murah, serta penyaluran beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar komoditas strategis tetap dapat dijangkau masyarakat. Dari sisi ketersediaan pasokan, penguatan dilakukan melalui pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), peningkatan produktivitas pertanian baik *on-farm* maupun *off-farm*, penguatan kelembagaan melalui korporasi petani, serta

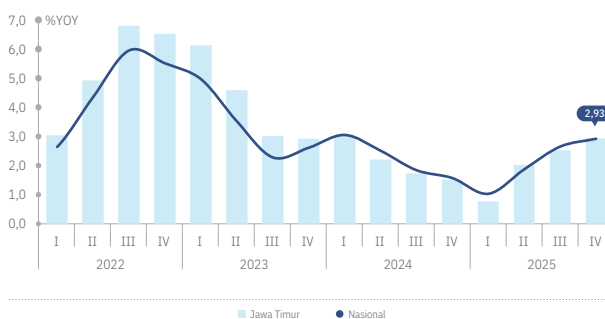
dukungan sarana dan prasarana ketahanan pangan oleh KPwDN Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kelancaran distribusi turut diperkuat melalui kerja sama intra dan antarprowinsi serta pemanfaatan truk EPIK Mobile untuk mendistribusikan beras Jatim Cettar ke Toko EPIK Surabaya. Sementara itu, aspek komunikasi efektif diwujudkan melalui penyelenggaraan *High Level Meeting* (HLM) dan digitalisasi *monitoring* harga guna memastikan inflasi tetap terkendali.

3.2. Kinerja Inflasi Jawa Timur

3.2.1. Perkembangan Inflasi Triwulan IV 2025

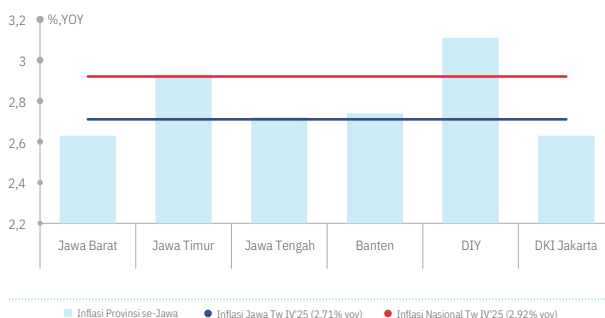
Pada triwulan IV 2025 Provinsi Jawa Timur tercatat mengalami kenaikan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan pada periode pelaporan sebelumnya. Inflasi pada triwulan laporan tercatat sebesar 2,93% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,53% (yoy). Capaian inflasi Jawa Timur di triwulan laporan terpantau terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional yakni $2,5 \pm 1,0\%$ (yoy). Secara spasial, seluruh provinsi di Pulau Jawa mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta, sementara Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta tercatat mengalami inflasi terendah. Adapun inflasi Provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua tertinggi. Selanjutnya, meningkatnya tekanan inflasi pada triwulan IV 2025 didorong oleh berbagai komoditas sebagai berikut: emas perhiasan, beras, cabai rawit, daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, angkutan udara, mobil, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bawang merah, dan minyak goreng.

Grafik 3.1. Perkembangan Inflasi Jawa Timur dan Nasional (yoy)



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.2. Inflasi Provinsi di Jawa Triwulan IV 2025 (yoy)



Sumber: BPS, diolah

Tabel 3.1. Komoditas Penyumbang Utama Inflasi Jawa Timur Triwulan IV 2025 (yoy)

Jenis Komoditi/Barang	Sumbangan Inflasi (%)
Emas Perhiasan	0,92
Beras	0,21
Cabai Rawit	0,19
Daging Ayam Ras	0,14
Bahan Bakar Rumah Tangga	0,10
Angkutan Udara	0,09
Mobil	0,07
Sigaret Kretek Mesin	0,06
Bawang Merah	0,06
Cabai Merah	0,05

Sumber: BPS, diolah

Secara umum, meningkatnya harga beras disebabkan oleh penurunan pasokan seiring dengan berakhirnya masa panen raya dan saat ini sebagian besar tanaman padi berada pada *vegetatif*. Selain itu, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah yang disesuaikan pada awal tahun 2025 juga menyebabkan harga beras lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Pada komoditas hortikultura, curah hujan dari kategori sedang hingga sangat tinggi mengakibatkan budidaya tanaman tersebut tidak optimal dan berdampak pada ketersediaan pasokan. Kenaikan bahan bakar rumah tangga didorong penyesuaian harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamina pada triwulan IV 2025. Adapun, penyesuaian batasan Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau menyebabkan Sigaret Kretek Mesin, Sigaret Kretek Putih, Sigaret Kretek Tangan dan Sigaret Kretek Tangan Filter mengalami peningkatan harga pada periode laporan.

3.2.2. Analisis Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

Berdasarkan kelompok barang dan jasa, tekanan inflasi Jawa Timur yang meningkat pada triwulan IV 2025 terutama disumbang oleh inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Pada triwulan laporan, inflasi berdasarkan kelompok barang dan jasa adalah sebagai berikut: kelompok makanan, minuman, dan tembakau (inflasi 4,19% yoy; andil 1,15%); kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (inflasi 15,26% yoy; andil 1,02%); kelompok transportasi (inflasi 1,82%; andil 0,23%); dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (inflasi 1,49%; andil 0,17%). Namun demikian, meningkatnya inflasi pada periode laporan ditahan oleh kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (deflasi -0,53% yoy; andil -0,05%) (Grafik 3.3).

Inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada triwulan laporan didorong oleh komoditas bahan pangan utamanya komoditas beras. Kenaikan harga beras turut dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam menyesuaikan

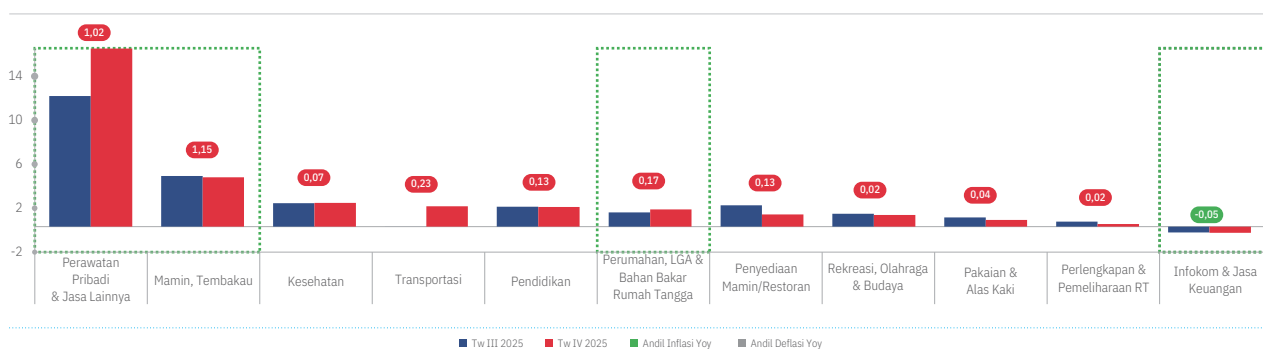
Tabel 3.2. Komoditas Penyumbang Utama Deflasi Jawa Timur Triwulan IV 2025 (yoy)

Jenis Komoditi/Barang	Sumbangan Deflasi (%)
Bawang Putih	-0,08
Pisang	-0,02
Ikan Mujair	-0,02
Tomat	-0,02
Telepon Seluler	-0,02
Laptop/Notebook	-0,01
Udang Basah	-0,01

Sumber: BPS, diolah

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025 yang berlaku sejak 15 Januari 2025, serta kebijakan peningkatan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sesuai Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 22 Agustus 2025. Harga gabah juga tercatat melampaui harga acuan pembelian Gabah Kering Panen (GKP) yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp6.500/kg, sehingga mendorong tekanan harga di sepanjang rantai pasok. Selain itu, pada periode pelaporan, sebagian besar lahan sawah masih berada pada fase vegetatif, yang menyebabkan volume panen relatif terbatas dibandingkan triwulan sebelumnya. Kemudian, tekanan harga pada komoditas bawang merah disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan pasokan seiring dengan penurunan luasan area tanam bawang merah dikarenakan penurunan minat petani bawang akibat harga jual yang kurang menguntungkan pada tahun lalu. Selanjutnya, kenaikan harga cabai rawit yang signifikan pada triwulan IV 2025 diakibatkan oleh faktor curah hujan yang berada pada rentang menengah hingga sangat tinggi serta gangguan Operasi Pengganggu Tanaman (OPT). Sementara itu, inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya utamanya didorong oleh komoditas emas perhiasan. Naiknya harga emas perhiasan ini seiring dampak *imported inflation* dari kenaikan harga emas global yang terus meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan oleh tensi geopolitik yang tinggi di berbagai wilayah di dunia, antara lain penerapan kebijakan tarif resiprok AS kepada berbagai negara di dunia serta preferensi investor dalam menempatkan dana dalam bentuk *safe-haven asset*. Pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, inflasi disumbang oleh komoditas bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 0,10%. Selanjutnya, kelompok transportasi didorong oleh komoditas angkutan udara dengan andil 0,09% dan mobil dengan andil 0,07%. Di sisi lain, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mendukung tertahannya inflasi pada periode laporan.

Grafik 3.3. Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran



Sumber: BPS, diolah

3.2.2.1 Kelompok Pendorong Inflasi

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

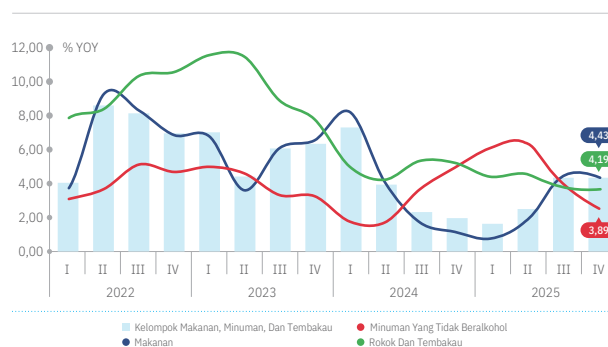
Pada triwulan IV 2025, kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat mengalami inflasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan III 2025. Pada periode laporan, inflasi pada kelompok ini tercatat sebesar 4,19% (yoy) dengan andil 1,15% atau lebih rendah dibanding triwulan III 2025 sebesar 4,36% (yoy) dengan andil 1,18%. Tekanan inflasi disumbang oleh subkelompok makanan sebesar 4,43% (yoy), rokok dan tembakau sebesar 3,65% (yoy) dan minuman tidak beralkohol sebesar 2,56% (yoy). (Grafik 3.4).

Pendorong inflasi tahunan pada kelompok ini terutama didorong inflasi komoditas pangan dan berbagai sigaret. Berikut adalah komoditas-komoditas yang menjadi penyumbang inflasi: beras (andil 0,21%); daging ayam ras (andil 0,14%); sigaret kretek mesin (andil 0,06%); bawang merah (andil 0,06%); minyak goreng (andil 0,05%); cabai merah (andil 0,05%); santan jadi (andil 0,05%); telur ayam ras (andil 0,05%); kelapa (andil 0,04%). Secara umum dinamika harga pada komoditas pangan dipengaruhi oleh perubahan permintaan dan ketersediaan pasokan. (lihat Boks 3: Studi Konseptual Integrasi Dinamika Harga, Struktur Permintaan, Dan Keseimbangan Pasokan Pangan Jawa Timur).

Tekanan inflasi pada komoditas beras dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang mulai berlaku sejak 15 Januari 2025 sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025, serta peningkatan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium per 22 Agustus 2025 sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 Tahun 2025. Selain itu, pada periode pelaporan, sebagian besar lahan sawah di Jawa Timur masih berada pada fase vegetatif, sehingga ketersediaan pasokan beras di pasar relatif terbatas. Dari sisi permintaan, tekanan harga turut didorong oleh meningkatnya kebutuhan beras seiring dengan bertambahnya penerima manfaat program MBG, serta kenaikan permintaan musiman pada momentum HBKN Natal dan Tahun Baru 2026. Berdasarkan pantauan harga SISKAPERBAPO, harga komoditas beras medium tercatat naik 4,91% (yoy) dari Rp12.252/kg menjadi Rp12.853/kg. Selanjutnya, komoditas hewan ternak

seperti daging ayam ras dan telur ayam juga terpantau mengalami kenaikan dalam SISKAPERBAPO. Pada akhir triwulan IV 2025, harga daging ayam ras tercatat meningkat 8,97% (yoy), dengan posisi harga saat ini sebesar Rp37.170/Kg meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya pada harga Rp34.110/Kg. Telur ayam ras juga tercatat meningkat 4,98% (yoy) dari harga Rp27.558 pada triwulan IV 2024 menjadi Rp28.962/Kg pada periode laporan. Selanjutnya, komoditas pangan hortikultura seperti cabai merah dan bawang merah mengalami kenaikan harga disebabkan curah hujan yang tinggi pada bulan November-Desember 2025 serta gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) berupa bercak daun di beberapa sentra produksi komoditas hortikultura Jawa Timur. Dari pantauan harga SISKAPERBAPO, komoditas cabai merah meningkat dari Rp29.832/Kg menjadi Rp42.329/Kg atau naik sebesar 41,89% (yoy). Selanjutnya, inflasi bawang merah juga meningkat, tecermin dari kenaikan harga dari Rp36.013/kg menjadi Rp43.267/Kg atau naik sebesar 20,14% (yoy). Kenaikan harga bawang merah dan cabai rawit secara tahunan dipicu oleh penurunan produksi sepanjang tahun 2025. Cabai rawit menunjukkan peningkatan harga paling tinggi jika dibandingkan dengan komoditas pada kelompok makanan, minuman dan tembakau. Pada akhir triwulan IV 2025, harga cabai rawit di Jawa Timur mencapai Rp62.227/Kg atau meningkat 64,94% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang

Grafik 3.4. Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau



Sumber: BPS, diolah

sama tahun 2024 yang tercatat Rp37.727/Kg. Produksi cabai rawit pada triwulan IV 2025 juga tercatat paling rendah jika dibandingkan dengan keseluruhan tahun 2025. Produksi yang terbatas diikuti permintaan yang meningkat seiring dengan HBKN memberikan tekanan peningkatan harga pada komoditas dimaksud.

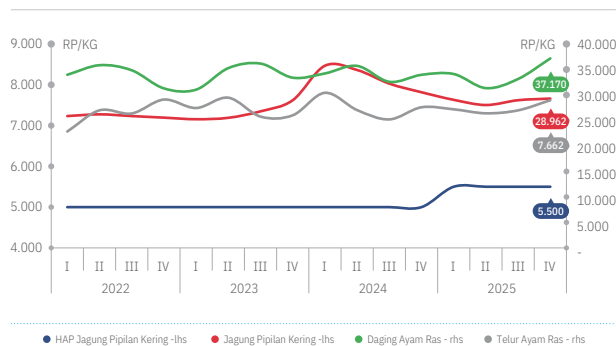
Selanjutnya, inflasi tahunan komoditas minyak goreng meningkat seiring kenaikan harga minyak kelapa sawit dunia yang turut tertransmisi pada harga minyak goreng domestik. Adapun produk MinyakKita sebagai opsi minyak goreng terjangkau pasca pencabutan skema pemenuhan dalam negeri atau *Domestic Market Obligation* (DMO) turut mengalami peningkatan harga. Berdasarkan pantauan harga SISKAPERBAPO, komoditas minyak goreng meningkat dari Rp 17.601/ltr menjadi Rp18.246/ltr atau naik 3,66% (yoy). Di sisi lain, kebijakan B30 yang mewajibkan pencampuran 30% biodiesel berbahan minyak sawit dengan 70% solar untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil berdampak pada berkurangnya pasokan CPO sebagai bahan baku minyak goreng. Selanjutnya, tekanan inflasi minyak goreng juga disebabkan oleh *base effect* dari harga yang relatif lebih rendah di triwulan IV 2024. Pada komoditas rokok, kenaikan harga sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, dan sigaret putih mesin secara tahunan terjadi seiring implementasi PMK Nomor 96 dan 97 Tahun 2024, yakni Pemerintah menetapkan HJE baru yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Di sisi lain, beberapa

komoditas yang menahan laju inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau di antaranya adalah bawang putih, yang mencatatkan deflasi dengan andil sebesar -0,08%, serta pisang dan tomat dengan masing-masing mengalami deflasi dengan andil sebesar -0,02%. Penurunan harga ketiga komoditas tersebut membantu meredam tekanan inflasi dari komoditas lain.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

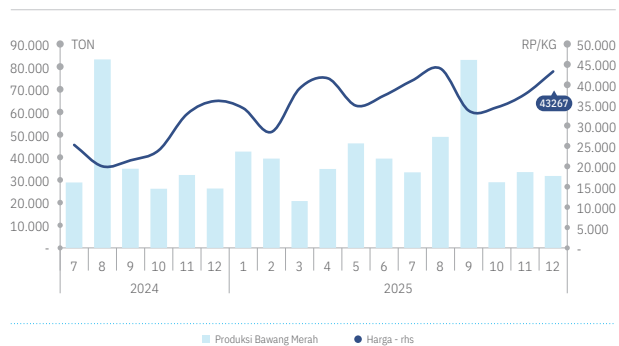
Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya kembali mengalami inflasi tahunan pada triwulan IV 2025. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatatkan inflasi yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 15,26% (yoy) dengan andil 1,02%. Inflasi kelompok dimaksud lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tercatat sebesar 11,09% (yoy) dengan andil 0,74%. Tekanan inflasi terjadi pada subkelompok perawatan pribadi lainnya sebesar 44,09% (yoy) setelah pada periode triwulan III 2025 sebesar 31,84% (yoy). Selanjutnya, subkelompok perawatan pribadi tercatat juga meningkat dari sebelumnya 2,02% (yoy) menjadi 2,15% (yoy) pada periode laporan. Subkelompok jasa lainnya tercatat 1,56% (yoy) atau lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan III 2025 sebesar 1,83% (yoy). Kemudian, subkelompok perlindungan sosial tercatat mengalami inflasi terendah, yaitu 0,44% (yoy).

Grafik 3.5. Perkembangan Produksi dan Harga Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, serta HPP Jagung



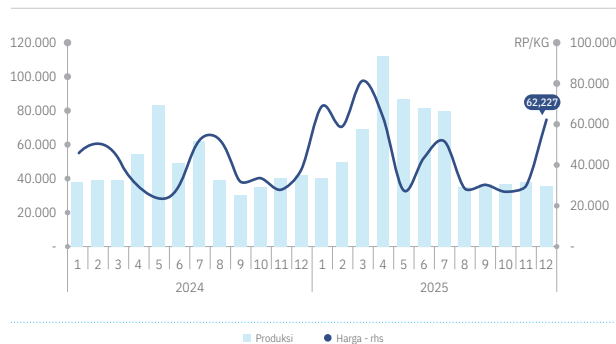
Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dan SISKAPERBAPO, diolah

Grafik 3.6. Perkembangan Produksi dan Harga Bawang Merah di Jawa Timur



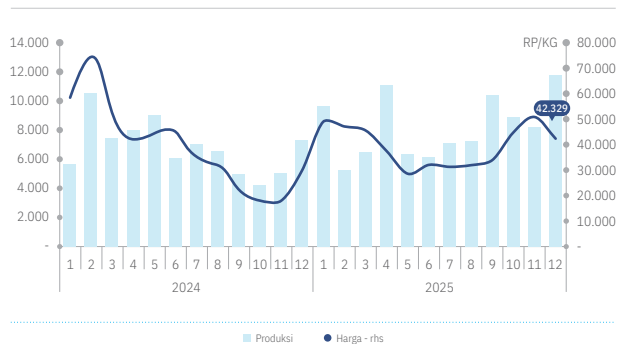
Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dan SISKAPERBAPO, diolah

Grafik 3.7. Perkembangan Produksi dan Harga Cabai Rawit di Jawa Timur

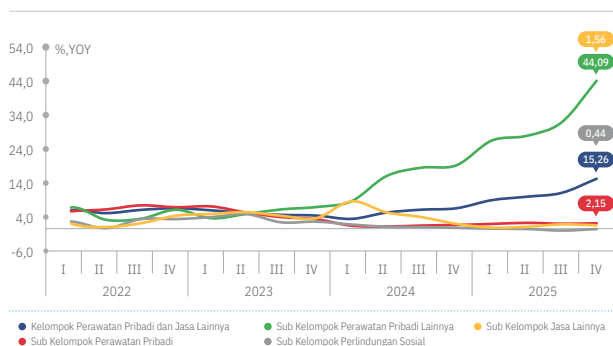


Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dan SISKAPERBAPO, diolah

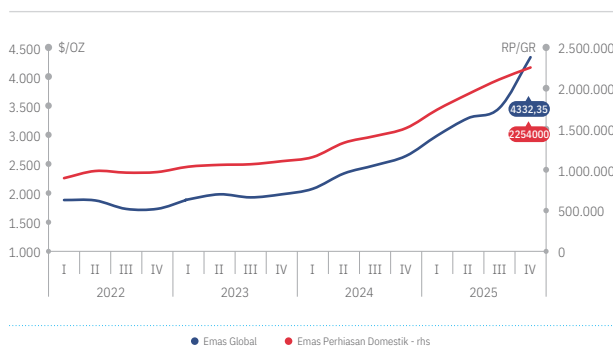
Grafik 3.8. Perkembangan Produksi dan Harga Cabai Merah di Jawa Timur



Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dan SISKAPERBAPO, diolah

Grafik 3.9. Perkembangan Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.10. Perkembangan Rerata Harga Emas Global dan Emas Perhiasan Domestik

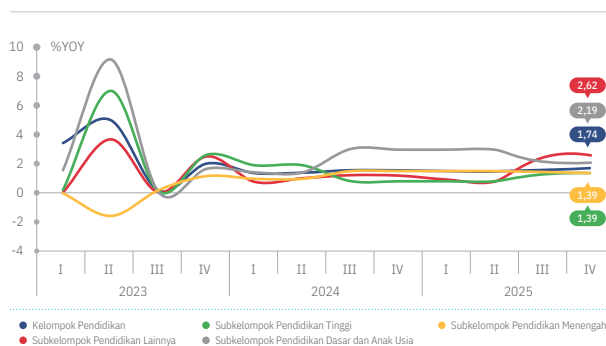
Sumber: GOLDS Comdty dan Kantan.id, diolah

Peningkatan inflasi pada subkelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya didorong oleh inflasi pada komoditas emas perhiasan. Komoditas emas perhiasan tercatat memiliki andil 0,92% terhadap inflasi tahunan atau tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode triwulan III 2025 sebesar 0,72%. Konsistensi peningkatan harga emas domestik disebabkan oleh transmisi harga emas global yang tercatat terus tumbuh sepanjang tahun 2025. Dinamika tren harga emas global dipengaruhi oleh sentimen investor dalam mengalokasikan aset dalam bentuk *safe-haven investment* di tengah tensi geopolitik yang meningkatkan ketidakpastian dalam ekonomi dan pasar global. Pada triwulan IV 2025, harga emas global tercatat *all-time high* jika dibandingkan dengan kurun waktu 3 tahun terakhir sehingga juga berdampak pada komoditas emas perhiasan. Perkembangan rerata harga emas global pada triwulan laporan tercatat 0,74% terhadap inflasi tahunan, lebih tinggi dibandingkan andil triwulan lalu sebesar 0,55%. Kenaikan harga emas sejalan dengan peningkatan harga emas global yang tertransmisi ke harga emas domestik, termasuk harga emas perhiasan. Kenaikan harga emas global dipengaruhi oleh sentimen risiko geopolitik yang meningkatkan ketidakpastian. Dalam kurun waktu setahun, harga emas mengalami tren kenaikan yang pesat disebabkan oleh kondisi ketidakpastian global yang tinggi seiring terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina, penerapan tarif resiprosal AS, konflik Timur Tengah, serta beberapa tensi global lainnya. Peristiwa tersebut terus memicu meningkatnya harga emas global yang tertransmisi pada harga emas domestik, termasuk harga emas perhiasan.

Perkembangan rerata harga emas global pada triwulan laporan tercatat 39,63% (yoy). Pada triwulan laporan harga emas global meningkat dari US\$2.476/oz menjadi US\$3.458/oz atau naik sebesar 39,63% (yoy). Di sisi domestik, harga emas perhiasan tercatat meningkat dari Rp1.431.600/gr menjadi Rp2.108.133/gr atau naik 47,26% (yoy) pada triwulan laporan. Ke depan, risiko kenaikan harga emas global diperkirakan masih terus berlanjut seiring dengan masih tingginya ketidakpastian global (Grafik 3.10).

Kelompok Pendidikan

Kelompok pendidikan tercatat mengalami peningkatan karena kenaikan biaya pendidikan khususnya pada komponen **akademi/ perguruan tinggi**. Pada triwulan IV 2025, kelompok tersebut mencatatkan peningkatan inflasi sebesar 1,74% (yoy) dengan andil 0,13%. Tingkat inflasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tercatat sebesar 1,71% (yoy) dengan andil 0,12%. Peningkatan tekanan inflasi sejalan dengan pola historis komponen akademi/ perguruan tinggi yang lebih tinggi yang disebabkan oleh penyesuaian biaya kuliah (UKT atau SPP) pada tahun ajaran 2025/2026. Subkelompok yang mengalami inflasi tertinggi yaitu subkelompok pendidikan lainnya sebesar 2,62% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 2,45% (yoy) (Grafik 3.11). Kelompok komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada periode laporan antara lain akademi/ perguruan tinggi (andil 0,03%), sekolah dasar (andil 0,02%) dan bimbingan belajar (0,02%). Secara historis, komponen tersebut tercatat mengalami penyesuaian harga biaya pendidikan khususnya dalam hal peningkatan fasilitas dan infrastruktur.

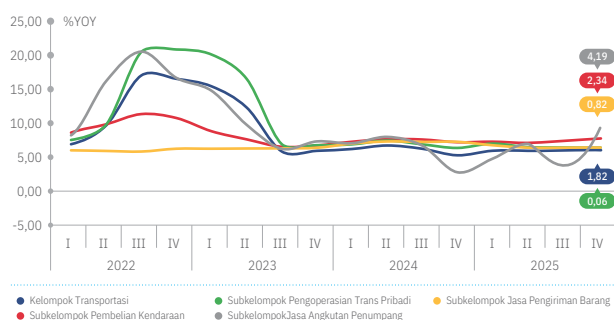
Grafik 3.11. Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Sumber: BPS, diolah

Kelompok Transportasi

Kelompok transportasi tercatat mengalami tingkat inflasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan III 2025. Pada triwulan laporan, inflasi pada kelompok transportasi tercatat sebesar 1,82% (yoy) dengan andil 0,23% atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 0,05% (yoy) dengan andil 0,01%. Subkelompok jasa angkutan penumpang pada triwulan IV tercatat sebesar 4,19% (yoy) setelah pada triwulan III 2025 tercatat deflasi -2,85% (yoy).

Grafik 3.12. Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi



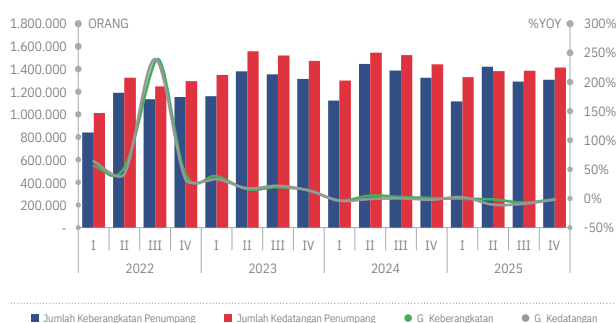
Sumber: BPS, diolah

Selanjutnya, subkelompok pembelian kendaraan mengalami tekanan inflasi sebesar 2,34% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,09% (yoy). Selain itu, subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi dan subkelompok jasa pengiriman barang masing-masing tercatat mengalami inflasi sebesar 0,82% (yoy) dan 0,06% (yoy).

Pendorong utama inflasi tahunan pada kelompok ini bersumber dari subkelompok jasa angkutan penumpang.

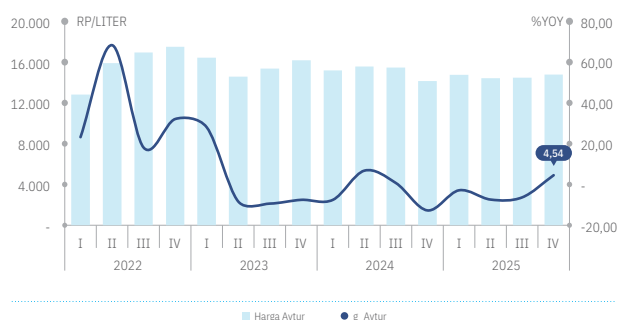
Adapun komoditas dengan andil tertinggi adalah angkutan udara sebesar 0,09% serta bensin 0,03%. Tarif angkutan udara mengalami peningkatan harga seiring dengan peningkatan harga avtur pada akhir triwulan IV sebesar Rp14.774/liter dari harga Rp14.131 di periode yang sama tahun 2024 atau meningkat 4,54% (yoy). Tekanan inflasi pada angkutan udara juga didukung oleh tingginya mobilitas masyarakat dalam menyambut HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Jumlah keberangkatan penumpang domestik juga tercatat sebanyak 1,3 juta orang atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan III 2025 sebanyak 1,2 juta orang. Jumlah kedatangan orang ke Jawa Timur di triwulan IV 2025 juga tercatat sebanyak 1,4 juta atau tertinggi sepanjang tahun 2025. Namun di sisi lain, kenaikan inflasi yang lebih tinggi pada komoditas dimaksud dapat tertahan seiring dengan stimulus kebijakan Pemerintah melalui pemberian diskon tarif angkutan udara dengan skema, (i) PPN ditanggung Pemerintah (PPN DTP), (ii) penurunan *fuel surcharge*, (iii) pemotongan biaya layanan penumpang udara

Grafik 3.13. Perkembangan Jumlah Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang Domestik di Bandara Juanda, Surabaya



Sumber: Bapenda, diolah

Grafik 3.14. Perkembangan Harga Avtur di Bandara Juanda Surabaya



Sumber: Bapenda, diolah

(PJP2U & PJP4U), (iv) penurunan harga avtur pada 37 bandara, serta (v) perpanjangan jam layanan bandara (*advance & extend operating hours*).

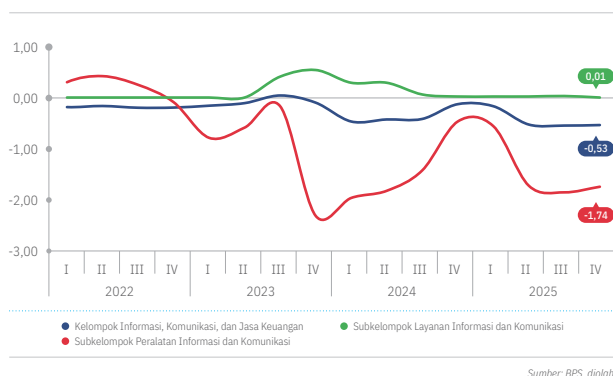
Lebih lanjut, komoditas inflasi bensin meningkat seiring dengan penyesuaian harga BBM Nonsubsidi.

Bensin menyumbang andil 0,03% pada periode laporan atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tercatat deflasi -0,04%. Kenaikan inflasi bensin dan solar tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi berupa kenaikan BBM jenis Pertamina, Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Penyesuaian harga bahan bakar minyak nonsubsidi per 1 Oktober 2025 oleh Pertamina pada jenis Pertamina Dex dari Rp13.850/ltr menjadi Rp14.000/ltr serta jenis Dexlite yang sebelumnya di harga Rp13.600/ltr menjadi Rp13.700/ltr. Penyesuaian harga juga terjadi pada bulan Desember 2025 yakni pada Pertamina RON 92 naik dari Rp12.200 menjadi Rp12.750. Selanjutnya pertamax turbo juga mengalami peningkatan harga dari Rp13.100/ltr menjadi Rp13.750/ltr. Pertamina dex juga turut meningkat dari Rp14.200/ltr menjadi Rp15.000/ltr.

3.2.2.2 Kelompok Penahan Inflasi

Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan kembali mengalami deflasi pada triwulan IV 2025. Selama dua triwulan berturut-turut, kelompok ini terus mencatatkan penurunan. Deflasi pada periode laporan tercatat relatif sama dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tercatat mengalami deflasi sebesar -0,53% (yoy) dengan andil sebesar -0,05%. Tekanan deflasi pada triwulan IV 2025 didorong oleh subkelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 1,74% (yoy) dengan komponen telepon seluler memiliki andil paling besar yakni -0,02%. Selain itu, komoditas laptop/notebook juga mendukung deflasi tahunan dengan andil -0,01%. Penurunan biaya telepon seluler didorong oleh banyaknya promo yang diberikan oleh berbagai operator seluler selama triwulan IV 2025, khususnya untuk menyambut Natal dan Tahun Baru 2026.

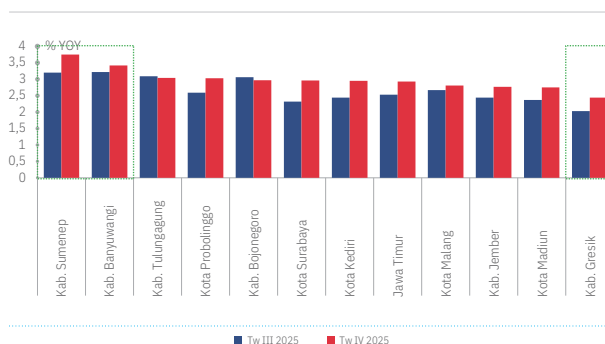
Grafik 3.15. Perkembangan Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

3.3. Analisis Inflasi Spasial Jawa Timur

Pada triwulan IV 2025, seluruh wilayah pantauan IHK Jawa Timur sebanyak 11 kab/kota tercatat mengalami inflasi tahunan dengan catatan inflasi tertinggi di Kab. Sumenep sebesar 3,75% (yoy), dan terendah Kab. Gresik dengan inflasi 2,44% (yoy) (Grafik 3.16). Kab. Sumenep tercatat sebagai kabupaten dengan inflasi tertinggi di triwulan laporan. Inflasi di Kab. Sumenep tercatat 3,75% atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan III 2025 sebesar 3,2% (yoy). Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi pendorong inflasi di triwulan laporan dengan tingkat inflasi 21,42% (yoy) serta andil 2,04%. Catatan inflasi dimaksud lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yaitu sebesar 14,38% (yoy) dengan andil 1,35%. Kenaikan pada kelompok ini utamanya disebabkan oleh komoditas emas perhiasan yang memiliki andil terhadap inflasi Kab. Sumenep sebesar 1,93%. Kenaikan tersebut sejalan dengan peningkatan harga emas global yang tertransmisi ke harga komoditas emas perhiasan domestik termasuk di Kab. Sumenep. Kemudian dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau terdapat beberapa komoditas utama yang mengalami kenaikan antara lain beras dan cabai rawit yang

masing-masing memiliki andil 0,32% dan 0,19%. Berdasarkan pantauan SISKAPERBAPO rata-rata harga beras medium pada triwulan IV 2025 adalah sebesar Rp12.926/Kg, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan III 2025 sebesar Rp12.731/Kg.

Kab. Banyuwangi menjadi kabupaten yang mengalami inflasi terbesar kedua setelah mengalami peningkatan inflasi yang lebih tinggi di triwulan III 2025. Inflasi tercatat 3,42% (yoy) atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan III 2025 yaitu sebesar 3,22% (yoy). Kelompok yang menyumbang inflasi tertinggi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan tingkat inflasi sebesar 20,67% (yoy) serta andil 1,74%. Komoditas emas juga masih menyumbang andil terbesar bagi tekanan inflasi di Kabupaten Banyuwangi di triwulan IV 2025 yang tercatat sebesar 1,71%. Selain itu, kelompok makanan, minuman, tembakau juga mengalami inflasi sebesar 4,15% (yoy) dengan andil 1,34%. Komoditas cabai rawit memiliki andil terbesar dalam mendorong tingkat inflasi sebesar 0,37%. Berdasarkan pantauan SISKAPERBAPO, lonjakan harga terjadi pada minggu pertama bulan Desember 2025, dengan harga mencapai Rp83.000. Hal tersebut seiring dengan penurunan pasokan jika dibandingkan dengan tahun 2024 serta permintaan yang tinggi di tengah masyarakat dalam HBKN Natal dan Tahun Baru.

Grafik 3.16. Capaian Inflasi 11 Kab/Kota IHK di Jawa Timur (%yoy)**Tabel 3.3.** Inflasi Spasial per Kelompok Barang dan Jasa pada Triwulan IV 2025 (%yoy)

Kelompok Barang	Jawa Timur	Kota Surabaya	Kota Malang	Kota Kediri	Kab. Jember	Kab. Sumenep	Kota Probolinggo	Kota Madiun	Kab. Banyuwangi	Kab. Bojonegoro	Kab. Gresik	Kab. Tulungagung
UMUM	2,93	2,96	2,81	2,95	2,77	3,75	3,03	2,75	3,42	2,97	2,44	3,04
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,19	4,6	3,64	3,92	4,26	3,44	3,24	4,60	4,15	4,82	3,38	3,73
Pakaian dan Alas Kaki	0,63	0,65	1,39	1,21	0,70	0,36	0,45	0,54	-1,04	0,55	1,82	0,95
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT	1,49	1,44	1,58	1,79	1,30	2,11	1,16	1,50	2,03	1,49	0,93	2,31
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT	0,3	0,08	0,63	0,62	0,03	0,5	-1,07	0,24	1,16	0,72	-0,61	1,40
Kesehatan	2,08	2,21	2,22	0,05	1,54	0,68	0,22	4,99	0,02	-0,76	7,91	0,39
Transportasi	1,82	2,79	0,84	2,09	0,84	0,31	1,08	1,76	0,71	0,94	0,97	0,75
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,53	-0,49	0,06	0,05	-2,56	0,03	0,04	0,50	-0,33	~0	-0,25	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,96	0,73	1,29	0,35	0,89	3,02	-0,01	0,02	0,66	0,24	1,42	2,43
Pendidikan	1,74	1,65	1,69	2,38	0,26	1,67	1,20	3,55	0,38	1,14	4	1,19
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,18	1,15	0,88	1,07	2,07	1,02	1,05	1,46	0,6	2,26	1,01	0,18
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	15,26	15,7	16,95	14,34	13,66	21,42	17,83	8,11	20,67	10,83	6,67	15,96

■ Lebih Tinggi dari Inflasi Jawa Timur ■ Lebih Rendah dari Inflasi Jawa Timur

Sumbu: BPS, diolah

Kabupaten Gresik tercatat menjadi wilayah pantauan IHK dengan inflasi terendah sebesar 2,44% (yoy). Kelompok penyumbang inflasi bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 3,38% (yoy) dengan andil 1,12%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi 2,95% (yoy) dengan andil 0,96%. Komoditas yang signifikan memberikan andil inflasi tahunan pada periode laporan beras, cabai rawit, ikan bandeng/ikan bolu, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah dan santan jadi. Berdasarkan pantauan harga di SISKAPERBAPO, komoditas beras medium tercatat mengalami kenaikan harga dari Rp12.167/Kg menjadi Rp13.367/Kg atau meningkat 9,86% (yoy). Selanjutnya komoditas cabai rawit juga tercatat mengalami peningkatan dari Rp35.472/Kg menjadi Rp59.387/Kg atau naik 66,15% (yoy). Keterbatasan pasokan dari sentra-sentra produksi cabai memberikan dampak pada tekanan harga cabai rawit di Kabupaten Gresik.

3.4. Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

Inflasi Jawa Timur yang tetap terjaga dan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ tidak terlepas dari dukungan sinergi berbagai program pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa Timur. Upaya tersebut mengacu pada Kerangka Pengendalian Inflasi Jawa Timur Tahun 2025 yang selaras dengan pedoman 4K Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Sejalan dengan hal tersebut, selama tahun 2025, TPID se-Jawa Timur telah mengimplementasikan sejumlah program pengendalian inflasi, antara lain:

K1 – Keterjangkauan Harga:

1. Optimalisasi Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) di Jawa Timur dilaksanakan melalui warung atau toko sebagai sarana penyelenggaraan Operasi Pasar secara berkelanjutan. Pada tahun 2025, EPIK telah beroperasi pada 708 titik di 32 kabupaten/kota serta didukung bantuan distribusi ke 99 titik yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. EPIK menyediakan bahan pokok strategis sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan harga lebih rendah dari harga pasar. Keberadaan EPIK diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap komoditas kebutuhan pokok, khususnya komoditas pengendalian inflasi.
2. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 2.527 kali. Kegiatan tersebut menyediakan bahan pokok strategis dengan harga sesuai HET atau lebih rendah dari harga pasar serta menjangkau seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk daerah terluar seperti Pulau Bawean. OPM dan GPM dilaksanakan secara masif oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur.

3. Penyaluran beras SPHP selama tahun 2025 mencapai total 103,4 ribu ton. Penyaluran dilakukan melalui berbagai saluran, yaitu: (1) Pasar Murah yang diinisiasi Pemerintah Daerah bersama Perum Bulog Kanwil Jatim; (2) koperasi/outlet instansi Pemerintah; (3) Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP); (4) outlet BUMN; (5) outlet pangan binaan Pemerintah Daerah; (6) pengecer di pasar rakyat; (7) ritel modern; (8) Rumah Pangan Kita (RPK); dan (9) pengecer di luar pasar.
4. Pelaksanaan Pasar Murah yang diinisiasi oleh Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk komoditas beras, minyak goreng, gula pasir, minyak goreng, dan bawang merah. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak, baik sesama instansi Pemerintah maupun swasta, dalam bentuk Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Bentuk kolaborasi meliputi dukungan penyediaan barang/komoditas, anggaran, serta distribusi.

K2 – Ketersediaan Pasokan

1. Per 29 Desember 2025, total stok beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Komersial di Jawa Timur mencapai 895,16 ribu ton atau sebesar 23% dari stok nasional, yang diperkirakan mencukupi kebutuhan hingga 15 bulan ke depan. Jawa Timur juga tercatat sebagai provinsi dengan penyerapan gabah terbesar, yaitu sebesar 684,79 ribu ton atau 100,95% dari target, dengan nilai penyerapan mencapai Rp8,9 triliun.
2. Dalam rangka percepatan penyaluran beras SPHP, Perum Bulog Kanwil Jawa Timur telah melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain sosialisasi Aplikasi SPHP serta pembagian Penanggung Jawab (PIC) untuk mendukung sosialisasi kepada mitra penyalur, khususnya di pasar pencatatan BPS. Tugas PIC meliputi: (i) menginformasikan mekanisme pemesanan dan pelaporan beras SPHP oleh pedagang melalui aplikasi; (ii) membantu proses pemesanan SPHP secara manual apabila pedagang mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi KLIK SPHP; dan (iii) menyusun rekapan mingguan terkait pemesanan dan pelaporan penjualan SPHP. Selain itu, Bulog Jawa Timur menerapkan strategi akselerasi melalui optimalisasi berbagai saluran penjualan, antara lain pengecer di pasar rakyat, koperasi desa/kelurahan Merah Putih, BUMN, instansi Pemerintah (Polri dan TNI), Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, serta swalayan atau toko ritel modern.
3. Sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan, sebanyak 993 program peningkatan produktivitas (*on-farm* dan *off-farm*) telah diimplementasikan oleh 38 kabupaten/kota, dengan rincian 879 program *on-farm* dan 114 program *off-farm*. Peningkatan produktivitas *on-farm* difokuskan pada optimalisasi hasil panen dan ternak melalui program budidaya, intensifikasi inseminasi buatan untuk perbaikan kualitas, serta pengendalian hama dan penyakit. Sementara itu, peningkatan produktivitas *off-farm* mencakup hilirisasi

Produk untuk menciptakan nilai tambah, optimalisasi pemasaran dan distribusi, serta pengelolaan pasca panen yang lebih efisien. Program ini menyasar komoditas beras, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, bawang merah, tomat, ikan, jagung, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang putih, minyak goreng, dan tebu. Selain itu, telah dilaksanakan 8 (delapan) kali Panen Raya di tingkat Provinsi.

4. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui pendirian 68 Korporasi Petani yang diinisiasi oleh TPID di 29 kabupaten/kota. Korporasi Petani tersebut mayoritas berbentuk badan usaha koperasi dan turut mendukung program KDKMP. Komoditas yang dikelola meliputi beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, tomat, minyak goreng, jagung, dan tebu.
5. Adapun beras hasil produksi Korporasi petani di Madiun diserap secara langsung dengan merk kolektif Jatim Cettar dan didistribusikan oleh BUMD sebagai single *offtaker* dengan harga yang lebih murah dari harga pasar kepada ASN secara langsung (30 - 35 ton/bulan) dan kepada masyarakat melalui berbagai EPIK yang tersebar di Jawa Timur (15 - 20 ton/bulan). KAD dilakukan secara *Business to Business* (B2B) antara BUMD dengan EPIK untuk mengakselerasi implementasi dan didukung surat penetapan toko TPID oleh Pemprov sebagai payung hukum. Sinergi Bank Indonesia dalam TPID Jawa Timur adalah melalui fasilitasi distribusi logistik penyaluran beras Jatim Cettar didukung hibah truk dari KPwBI Prov Jawa Timur, modernisasi alsintan bagi korporasi petani, dan dukungan media promosi beras Jatim Cettar di seluruh EPIK di Jawa Timur (**lihat Boks 5: Model Bisnis Korporasi Petani Beras: Strategi Penguatan Kesejahteraan Petani, Ketahanan Pangan, dan Stabilitas Harga di Jawa Timur**).
6. Optimalisasi BUMD yakni PT Jatim Grha Utama (JGU) sebagai *offtaker* pangan strategis (beras) dari korporasi petani Jombang (KMP Sarana Agro Lestari) yang mendistribusikan beras untuk keperluan ASN; serta dengan korporasi petani Madiun yakni Koperasi Multi Pihak Jatim Makmur Sentosa (KMP JMS) untuk kebutuhan pasokan beras dalam rangka mendukung operasional EPIK.
7. Pemberian bantuan sarana prasana untuk ketahanan pangan dari Bank Indonesia Jawa Timur selama triwulan IV tahun 2025, yakni:
 - a. Mesin ekstraksi dan *power welder* kepada Poktan Sumber Makmur 1 di Kab. Lamongan untuk meningkatkan produktivitas. Dengan bantuan yang diberikan, Poktan tersebut mampu memproduksi beras hingga 9,4 ton/ha, meningkat dibandingkan dengan sebelumnya 7,7 ton/ha.
 - b. Mesin pompa diesel kepada Pokdakan Tambak Jaya Kab. Gresik yang berfokus untuk irigasi pertanian. Melalui bantuan tersebut, produktivitas Bandeng meningkat sebanyak 4,5 ton/siklus dan udang sebanyak 0.1 ton/siklus.
 - c. *Hand Tractor Quick Kronos* kepada Poktan Harum Tani dan Poktan Tani Mulya di Kab. Tuban untuk membantu petani dalam membajak sawah.

- d. Traktor roda 4 kepada Poktan Sri Rejeki di Kab. Bojonegoro untuk menggemburkan lahan sebelum tanam.
 - e. *Hand Tractor G3000* kepada Poktan Sido Makmur 1 di Kab. Lamongan untuk mempersiapkan lahan pertanian sebelum penanaman padi.
 - f. *Quick Kronos* untuk Poktan Sengon Agung 2 di Kab. Bojonegoro untuk Tuban untuk membantu petani dalam membajak sawah dan pengolahan lahan secara efisien.
8. Selain itu, sepanjang tahun 2025, bantuan sarana dan prasarana telah diberikan kepada beberapa Kab/Kota di Jawa Timur, yakni:

Kab. Lamongan

- a. *Combine Harvester* Tipe Besar dan *Smart Irrigation and Climate Monitoring Controller* kepada Poktan Sumber Makmur 1 untuk meningkatkan produktivitas.
- b. *Hand Tractor Quick G3000 Zeva* dan *Quiltivator Quick Cakar Baja* kepada Kelompok Tani Mugi Mulyo dan Tani Rekso Mulyo Bendo untuk mengolah lahan pertanian agar siap tanam.
- c. *Hand Tractor G3000* kepada Poktan Sido Makmur 1 untuk mempersiapkan lahan pertanian sebelum penanaman padi.

Kab. Sumenep

Geomembrane kepada Koperasi Konsumen Mandiri Jaya Satu untuk menahan air agar tidak membanjiri lahan.

Kab. Gresik

- a. Jaring Kakap/Milenium kepada KUB Mandiri Bangsalsari untuk menangkap hasil budidaya.
- b. Mesin Diesel Perahu kepada KUB Sinar Jaya untuk memudahkan nelayan dalam mencari ikan.
- c. Mesin Pompa Diesel untuk Pokdakan Mina Karya dan Tambak Jaya untuk memompa air.

Kab. Tuban

Hand Tractor Quick Kronos dan Sensor Tanah *Digital Farming IOT* kepada Poktan Harum Tani untuk membantu petani dalam membajak sawah serta untuk memantau kondisi tanah secara *real time*.

Kab. Bojonegoro

- a. *Freezer* kepada KTT Ustan Mandiri untuk membantu mengawetkan daging.
- b. Kendaraan angkut kepada Koperasi Produsen Padangan untuk mendistribusikan hasil pertanian.
- c. Traktor Roda 4 kepada Poktan Sri Rejeki menggemburkan lahan sebelum tanam.
- d. *Hand Tractor Quick G3000 Zeva* kepada Poktan Suka Maju untuk mempersiapkan lahan pertanian sebelum penanaman padi.
- d. *Quick Kronos* dan Mesin Pengayak Pupuk kepada Poktan Sengon Agung 2 untuk pembajakan sawah dan menghaluskan pupuk agar dapat terserap oleh tanah.

K3 – Kelancaran Distribusi:

1. Telah dilaksanakan 56 KAD baru dan 117 KAD eksisting dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan pemetaan pasokan intra Jatim. Dari total 117 KAD tersebut, 92 KAD bersifat intra provinsi dan 25 KAD bersifat antarprovinsi dengan komoditas antara lain beras, bawang merah, dan cabai rawit dan cabai merah.
2. Telah dilaksanakan 120 program kelancaran mobilitas baik berupa penetapan pengaturan tarif angkutan dalam kota, subsidi angkutan barang, serta subsidi angkutan barang.
3. Optimalisasi dukungan fasilitas distribusi pangan berupa kendaraan oleh KPwBI Provinsi Jawa Timur dalam pendistribusian beras Jatim Cettar ke sejumlah toko EPIK di Surabaya.
4. Penajakan kolaborasi bersama PT Pos Indonesia (melalui unit bisnis Agripis) dalam rangka memperluas jangkauan distribusi beras hasil korporasi petani, dengan usulan *pilot project* di Agripis Surabaya.

K4 – Komunikasi Efektif:

1. Perumusan Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan TPID Jawa Timur

Perumusan kebijakan pengendalian inflasi di Jawa Timur ditetapkan melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 500/11530/021.1/2025 Tahun 2025 tentang Kerangka Kerja Strategi Pengendalian Inflasi Jawa Timur Tahun 2025. Penguatan kelembagaan TPID Provinsi Jawa Timur juga ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/385/013/2025 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2027. Selanjutnya, *Roadmap* Pengendalian Inflasi Jawa Timur Tahun 2025–2027 disahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/364-021/013/2025 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2027 pada tanggal 29 Oktober 2025, yang turut diikuti dengan pengesahan peta jalan pengendalian inflasi di tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

2. Penguatan Koordinasi melalui Rapat dan *High Level Meeting* (HLM)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara rutin melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan yang dihadiri oleh TPID Provinsi dan seluruh 38 Kabupaten/Kota sebagai forum konsolidasi dan evaluasi perkembangan harga. Penguatan sinergi juga dilakukan melalui berbagai *High Level Meeting* (HLM) di tingkat daerah, antara lain oleh TPID Kabupaten Gresik pada 10 September 2025 sebagai respons atas meningkatnya harga di Pulau Bawean akibat kendala pengiriman pasokan karena ombak tinggi di tengah kondisi deflasi, oleh TPID Kabupaten Sumenep pada 18 September 2025, serta oleh TPID Kabupaten Lamongan menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru dan kembali pada 11 November 2025 untuk mengintensifkan pengendalian inflasi. Di tingkat provinsi, HLM gabungan TPID, TP2DD, dan TP2ED se-Jawa Timur juga dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan HBKN Natal dan Tahun Baru 2026 serta pada 25 November 2025 untuk memperkuat sinergi

kebijakan dan program dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan digitalisasi sistem pembayaran di seluruh Jawa Timur.

3. **Penguatan Transparansi dan Digitalisasi *Monitoring* Harga**
Transparansi informasi harga bahan pokok diperkuat melalui fitur scan barcode di 5 pasar tradisional kelolaan PD Pasar Surya di Kota Surabaya (Pasar Wonokromo, Tambahrejo, Genteng Baru, Pucang Anom, dan Pabean) serta di 2 pasar utama Kota Madiun (Pasar Besar Madiun dan Pasar Sleko). Penguatan SISKAPERBAPO dan optimalisasi website/aplikasi *monitoring* harga juga telah dilakukan oleh 26 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk mendukung perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pengendalian inflasi yang tepat waktu dan tepat sasaran.
4. **Pengembangan dan Implementasi *Dashboard* Pengendalian Inflasi**

Dalam rangka mendukung *monitoring* dan evaluasi program TPID Jawa Timur sesuai Kerangka Kerja Pengendalian Inflasi Jawa Timur, telah dikembangkan *dashboard* pelaporan pengendalian inflasi yang dapat diakses melalui <https://tpidjatim.com>. Sosialisasi konsep *dashboard* dilaksanakan pada tanggal 16 September 2025 dan dilanjutkan dengan asistensi pengisian kepada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tanggal 22 September 2025, sehingga *monitoring* dan evaluasi program dapat dilakukan secara lebih rutin dan berkelanjutan.

3.5. Tracking Inflasi Triwulan I 2026

Inflasi Jawa Timur Triwulan I 2026 (realisasi hingga bulan Januari 2026) diperkirakan lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan IV 2025 dan tetap dalam rentang sasaran target inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Inflasi tahunan Jawa Timur pada bulan Januari 2026 tercatat sebesar 3,29% (yoy) atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi triwulan IV 2025 sebesar 2,93% (yoy). Prakiraan inflasi Jawa Timur pada triwulan I 2026 lebih tinggi dengan triwulan sebelumnya yang didorong oleh perkembangan harga terkini komoditas pangan strategis, khususnya pada bulan Februari 2026. Beberapa komoditas pangan strategis menunjukkan lonjakan harga seiring dengan permintaan masyarakat dalam menyambut Ramadan serta Idulfitri 1447 Hijriah (**lihat Boks 4: Perkembangan Harga Komoditas Pangan Strategis Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idulfitri 1447 Hijriah**). Namun di sisi lain, hadirnya stimulus kebijakan Pemerintah yakni diskon tarif moda transportasi seperti subsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada angkutan udara diperkirakan mendukung terjaganya inflasi di wilayah Jawa Timur. Lebih lanjut, rencana panen raya komoditas beras di sentra-sentra produksi seperti Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Jember akan mendorong terjaganya harga beras di Jawa Timur.

Beberapa faktor pendorong inflasi tahunan pada Triwulan I 2026 di antaranya (i) peningkatan permintaan pada momen Ramadan serta HBKN Idulfitri 1447 Hijriah, (ii) peningkatan

harga komoditas hortikultura serta peternakan seiring dengan pola historisnya menjelang HBKN Idulfitri, serta (iii) masih tingginya ketidakpastian global yang berpotensi mendorong kenaikan harga emas perhiasan domestik. Menjelang momen Ramadan dan HBKN Idulfitri, permintaan akan komoditas pangan strategis diperkirakan lebih tinggi jika dibandingkan dengan momen HBKN Natal dan Tahun Baru di wilayah Jawa Timur. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau berpotensi mengalami tekanan sejalan dengan tingginya konsumsi masyarakat akan bahan pokok serta risiko keterbatasan pasokan seiring dengan curah hujan yang diperkirakan berada pada level tinggi hingga sangat tinggi selama periode triwulan IV 2025 dan triwulan I 2026. Adapun risiko peningkatan harga komoditas peternakan seperti daging ayam ras dan telur ayam ras juga perlu diwaspadai sehubungan dengan pola historisnya sepanjang 3 tahun terakhir. Selain itu, tekanan inflasi emas perhiasan juga diproyeksikan akan tetap tinggi seiring masih meningkatnya harga emas global yang berdampak pada harga emas domestik. Mobilitas masyarakat juga berpotensi akan berdampak pada tekanan harga angkutan udara, meski stimulus ekonomi yang diterapkan oleh Pemerintah berupa tarif diskon moda transportasi serta PPN DTP diperkirakan dapat menjaga inflasi kelompok transportasi tetap stabil. Dalam menghadapi berbagai tekanan tersebut, berlanjutnya penguatan sinergi program pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) seluruh Jawa Timur serta koordinasi erat dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) diperkirakan dapat menjaga inflasi tetap terkendali pada triwulan I 2026.

Studi Konseptual Integrasi Dinamika Harga, Struktur Permintaan, dan Keseimbangan Pasokan Pangan Jawa Timur

BOKS 3

Ketahanan pangan daerah merupakan fondasi penting bagi stabilitas ekonomi dan sosial, terutama di wilayah dengan peran strategis dalam pasokan nasional seperti Jawa Timur. Sebagai salah satu sentra utama produksi beras, bawang merah, dan telur ayam ras, Jawa Timur tidak hanya menopang kebutuhan internal, tetapi juga memasok berbagai provinsi lain. Kontribusi besar Jawa Timur terhadap pasokan nasional, baik melalui distribusi antardaerah maupun dominasi produksi, menunjukkan peran vitalnya dalam stabilitas harga dan pasokan, sekaligus mengandung potensi kerentanan terhadap keseimbangan pasokan lokal dan inflasi regional.

Keseimbangan antara permintaan, harga, dan pasokan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pangan regional. Tingginya konsumsi rumah tangga terhadap komoditas strategis menuntut pemahaman yang komprehensif mengenai elastisitas permintaan terhadap perubahan harga dan pendapatan serta implikasinya terhadap kesejahteraan. Di sisi lain, berbagai kendala struktural, seperti ketimpangan distribusi antarwilayah, fluktuasi musiman, keterbatasan infrastruktur logistik, ketergantungan arus masuk dan keluar komoditas, serta belum optimalnya pengelolaan rantai pasok menambah kompleksitas pengendalian stabilitas pangan.

Kompleksitas tersebut menegaskan perlunya integrasi analisis antara dinamika permintaan dan pasokan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan kuantitatif yang diperkuat dengan *Focus Group Discussion* (FGD), dirumuskan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada stabilisasi harga, peningkatan efisiensi distribusi, penguatan rantai pasok, serta peningkatan koordinasi dan konektivitas antarwilayah guna memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

Dalam kerangka integrasi analisis permintaan dan pasokan, ketimpangan spasial dalam sistem pangan terjadi karena perbedaan kemampuan produksi, pola konsumsi, dan efektivitas distribusi antarwilayah, yang kemudian menimbulkan perbedaan harga dan belum optimalnya integrasi pasar. Untuk memahami pola interaksi tersebut, dilakukan analisis menggunakan pendekatan *Partial Spatial Equilibrium Model* (PSEM), sementara dari analisis dari sisi permintaan digunakan *Quadratic Almost Ideal Demand System* (QUAIDS) sebagai pengembangan dari

Almost Ideal Demand System oleh Banks, Blundell, dan Lewbel (1997), sehingga memungkinkan pengukuran respons konsumsi terhadap perubahan harga dan pendapatan sekaligus estimasi implikasi kesejahteraan rumah tangga.

Penyusunan Desain Keseimbangan Pasokan Pangan Strategis (KPPS) Jawa Timur memadukan hasil analisis ini dengan data kuantitatif SUSENAS 2024 serta pendalaman kualitatif melalui FGD dan wawancara pelaku distribusi komoditas utama. Estimasi QUAIDS digunakan untuk mengidentifikasi sensitivitas komoditas dan kelompok masyarakat rentan, sedangkan analisis rantai pasok menelusuri struktur margin, hambatan logistik, dan perbedaan harga antarwilayah. Kedua analisis tersebut kemudian disinergikan dalam kerangka PSEM-lite berbasis prinsip *transfer-cost parity* untuk menilai kewajaran selisih harga dan mendeteksi potensi inefisiensi distribusi, dengan dukungan data neraca pangan, harga daerah, serta validasi temuan lapangan.

A. Analisis Kuantitatif: Permintaan Rumah Tangga dan Dinamika Harga

Sebagai langkah awal untuk memahami respons rumah tangga terhadap perubahan harga dan pendapatan, dilakukan analisis elastisitas pendapatan menggunakan model QUAIDS (Tabel 1). Hasil estimasi menunjukkan bahwa beras, jagung, telur, dan bawang merah termasuk komoditas pokok dengan elastisitas pendapatan kurang dari 1, sedangkan daging dan ikan tergolong barang mewah atau semi-mewah dengan elastisitas lebih tinggi. Artinya, kenaikan pendapatan cenderung meningkatkan konsumsi protein hewani lebih cepat daripada komoditas pokok, sehingga pasokan protein perlu menjadi fokus dalam perencanaan kebijakan pangan.

Tabel 1. Elastisitas Pendapatan dengan Model QUAIDS

Komoditas	Elastisitas	Kategori
Beras	0,92	Kebutuhan Pokok
Jagung	0,48	Kebutuhan Pokok
Daging	1,34	Luxury
Telur	0,84	Kebutuhan Pokok
Ikan	1,08	Luxury Ringan
Bawang Merah	0,61	Kebutuhan Pokok

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

BOKS 3

Analisis dilanjutkan dengan mengestimasi elastisitas Marshallian untuk menangkap perubahan konsumsi sebagai respons langsung terhadap perubahan harga (Tabel 2). Hasil estimasi menunjukkan bahwa komoditas beras tidak elastis terhadap harga, sehingga kenaikan harga hanya sedikit menurunkan konsumsinya. Sebaliknya, telur menjadi komoditas paling responsif terhadap harga dan mudah disubstitusi oleh daging atau ikan. Sementara, bawang merah juga cukup sensitif terhadap harga, namun sulit disubstitusi, sehingga rentan memicu tekanan pangan ketika harganya meningkat.

Tabel 2. Elastisitas Marshallian

Komoditas	Beras	Jagung	Daging	Telur	Ikan	Bawang
Beras	-0,59	0,00	-0,23	0,01	-0,11	0,01
Jagung	0,23	-0,87	-0,09	-0,10	0,16	0,19
Daging	-0,65	-0,05	-0,76	0,11	0,07	-0,05
Telur	0,06	-0,06	0,38	-0,17	-0,01	-0,05
Ikan	-0,35	0,01	0,14	-0,02	-0,86	0,00
Bawang	0,25	0,22	-0,11	-0,11	0,09	-0,95

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

B. Analisis Kualitatif: Rantai Pasok dan Kurva Penawaran

Selanjutnya, dilakukan analisis kualitatif untuk menjembatani perbedaan antara estimasi permintaan rumah tangga dan kondisi harga, serta pasokan di lapangan melalui FGD dan wawancara dengan pelaku kunci rantai pasok beras, bawang merah, dan telur ayam ras di sentra produksi dan simpul distribusi utama Jawa Timur. FGD menggunakan panduan semi-kuantitatif untuk mengeksplorasi respons pasokan terhadap harga, biaya logistik, musim, dan susut. Untuk beras, FGD dilakukan di Kabupaten Lamongan, dengan hasil menunjukkan bahwa

Tabel 3. Parameter Elastisitas Penawaran

Parameter	Nilai Baseline	Keterangan
Beras	1,2 - 1,4	Estimasi Lapangan dan Diskusi FGD
Bawang Merah	+0,85	
Telur Ayam	1,3	

Sumber: Estimasi Lapangan, Pendekatan FGD dan Wawancara

pasokan dan harga dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, kondisi alam, kualitas gabah, serangan hama, serta inefisiensi rantai pasok, persaingan pasar, regulasi, modal, tenaga kerja, dan teknologi.

Sementara pada bawang merah, FGD dilakukan di Kabupaten Nganjuk mengungkap bahwa harga dan pasokan dipengaruhi oleh biaya produksi tinggi (benih, tenaga kerja, pupuk, hama), biaya logistik dan penyimpanan, ketergantungan pada perantara, persaingan dengan pedagang luar daerah, serta lemahnya koordinasi kelembagaan. Lebih lanjut, untuk telur ayam ras, FGD di Kabupaten Blitar, menunjukkan bahwa harga dan pasokan dipengaruhi oleh biaya pakan dan DOC/pullet, penurunan produksi karena cuaca atau penyakit, kerusakan saat penyimpanan dan distribusi, serta tekanan biaya, aturan distribusi, modal terbatas, dukungan teknis, dan persaingan pengiriman.

Berdasarkan hasil FGD dan wawancara, diperoleh angka estimasi elastisitas penawaran dari ketiga komoditas disajikan pada Tabel 3.

C. Analisis Counterfactual (Integrasi Analisis Kuantitatif – Kualitatif)

Setelah diperoleh hasil estimasi elastisitas permintaan dari QUAIDS, fungsi penawaran dan struktur biaya dari FGD, analisis dilanjutkan dengan mengintegrasikan kedua hasil analisis tersebut menggunakan kerangka PSEM-lite. PSEM-lite menyajikan analisis kebijakan berbasis simulasi yang memperlihatkan secara nyata efek berbagai intervensi terhadap keseimbangan pasokan beras, bawang merah, dan telur ayam ras di Jawa Timur. Simulasi ini dirancang untuk menilai dampak kebijakan terhadap surplus konsumen (ΔCS), pendapatan produsen (ΔPS), efisiensi logistik (ΔC_{log}), serta status surplus atau defisit pasokan domestik (Net_Surplus_Dom).

Skenario PSEM-lite dibangun berdasarkan fluktuasi harga historis 2022–2024, dengan intervensi yang berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi dan hasil FGD, seperti perbaikan logistik, peningkatan kapasitas penyimpanan, pengaturan arus pasokan antarwilayah, dan penyediaan input seperti pakan, pupuk. Setiap komoditas dianalisis melalui satu skenario *baseline* dan tiga skenario

BOKS 3

“*shock* + intervensi” untuk menilai dampaknya terhadap harga dan aliran pasokan. Simulasi untuk beras, *shock* (S1) memodelkan tekanan biaya dan logistik yang menaikkan harga produsen dan ongkos distribusi tanpa mengurangi arus keluar provinsi, sehingga pasokan lokal menurun. Tiga intervensi diuji: perbaikan logistik (S2), penambahan *buffer stock* provinsi (S3), dan pengelolaan arus keluar lewat KAD (S4). Hasil menunjukkan perbaikan logistik (S2) paling efektif menurunkan harga konsumen tanpa menekan harga produsen (Tabel 4a).

Pada bawang merah, simulasi menyoroti lonjakan harga Juni–Agustus 2022 akibat gagal panen, keterbatasan fasilitas simpan, dan arus masuk dari luar provinsi. *Shock* (S1) merepresentasikan kondisi tanpa intervensi, sementara S2–S4 menguji penguatan *cold storage*, efisiensi logistik hortikultura, dan manajemen *inflow* antarprovinsi. Hasil menunjukkan penguatan fasilitas simpan (S2) dan manajemen *inflow* (S4) paling efektif menurunkan harga konsumen tanpa mengurangi kesejahteraan petani (Tabel 4b).

Sementara untuk telur ayam ras, lonjakan harga Agustus 2022 disebabkan oleh kenaikan biaya pakan (terutama jagung) dan hambatan distribusi saat permintaan tinggi. *Shock* S1 memodelkan kenaikan biaya tanpa intervensi, sedangkan S2 dan S3 menguji penurunan biaya pakan melalui SPHP jagung dan penataan koridor logistik. Simulasi menunjukkan pengurangan biaya pakan (S2) paling mampu menurunkan harga konsumen sambil mempertahankan kesejahteraan produsen (Tabel 4c).

Berdasarkan hasil simulasi PSEM-*lite*, untuk mengoptimalkan integrasi antara dinamika harga,

permintaan, dan pasokan, diperlukan beberapa rekomendasi kebijakan, yaitu:

1. Menurunkan biaya logistik melalui penertiban pungutan, standar tarif bongkar muat, perbaikan infrastruktur konektivitas sentra, dan membangun pusat distribusi.
2. Mengembangkan fasilitas simpan, seperti gudang/pengering/*cold storage* yang terkelola baik dan memprioritaskan produsen kecil, serta memperkuat manajemen stok untuk mengurangi susut pascapanen, dan menjaga ketersediaan pada periode non-panen.
3. Mengoptimalkan distribusi dan penyaluran pasokan melalui KAD/KAP, GPM/SPHP, serta *buffer stock*, sekaligus mengatur arus keluar–masuk komoditas secara terukur, menjadi upaya terpadu untuk menjaga kestabilan dan kelancaran pasokan, serta mencegah kelangkaan maupun gejolak harga di daerah defisit.
4. Memperkuat kelembagaan produsen melalui koperasi atau kelompok tani–peternak, menyediakan fasilitas penyimpanan kolektif, dan meningkatkan akses pembiayaan yang sesuai siklus usaha untuk meningkatkan daya tawar dan keberlanjutan usaha.
5. Menata ulang tata niaga dan transparansi harga melalui indeks harga provinsi dan pengawasan pungutan dan logistik.

Hal ini menegaskan bahwa efisiensi logistik efektif menurunkan harga beras, penguatan fasilitas simpan penting bagi bawang merah, dan penurunan biaya pakan menjadi kunci stabilisasi harga telur. Intervensi terpadu diperlukan untuk memperkuat rantai pasok dan ketahanan pangan daerah.

Tabel 4. Hasil Simulasi PSEM-*lite*

a. Komoditas Beras

Skenario	Harga ritel (Rp/kg)	Perubahan harga ritel dibanding baseline (S0)	Konsumsi Jatim (indeks, 2024 = 100)	Pasokan Jatim (indeks, 2024 = 100)	Net surplus fisik (indeks, baseline = 100)	Surplus Konsumen (Rp)	Surplus Produsen (Rp)	Biaya Logistik total (Rp)
S0-Baseline	14.500	0%	100,0	100,0	0,0	0	0	0
S1- <i>Shock</i> tanpa intervensi	15.733	≈ +8,5%	92,7	110,4	6,65	-166.982	+253.862	16.409
S2- <i>Shock</i> + logistik	15.615	≈ +7,7%	93,2	110,4	6,15	-156.013	+253.862	5.499
S3- <i>Shock</i> + <i>Buffer</i> provinsi	15.733	≈ +8,5%	92,7	110,4	16,65	-166.982	+253.862	16.409
S4- <i>Shock</i> + KAD Beras	15.733	≈ +8,5%	92,7	110,4	12,17	-166.982	+253.862	16.409

BOKS 3

b. Komoditas Bawang Merah

Skenario	Harga ritel (Rp/kg)	Perubahan harga ritel dibanding baseline (S0)	Konsumsi Jatim (indeks, 2024 = 100)	Pasokan Jatim (indeks, 2024 = 100)	Net surplus fisik (indeks, baseline = 100)	Surplus Konsumen (Rp)	Surplus Produsen (Rp)	Biaya Logistik total (Rp)
SO-Baseline 2024	24.500	0%	100,0	0,0	0,0	0	0	0
S1-Shock volatilitas 2022 tanpa intervensi	31.125	≈ +27,0%	125,5	36,2	36,2	-541.445	1.294.575	19.200
S2-Shock + cold storage & fasilitas Simpan	29.485	≈ +20,3%	118,7	33,8	33,8	-410.402	918.687	20.753
S3-Shock + efisiensi logistik hortikultura	30.800	≈ +25,7%	125,5	34,9	34,9	-516.286	1.294.575	0
S4-Shock+manajemen inflow bawang luar provinsi	29.950	≈ +22,2%	121,3	32,9	32,9	-448.592	1.057.031	8.125

c. Komoditas Telur Ayam

Skenario	Harga ritel (Rp/kg)	Perubahan harga ritel dibanding baseline (S0)	Konsumsi Jatim (indeks, 2024 = 100)	Pasokan Jatim (indeks, 2024 = 100)	Net surplus fisik (indeks, baseline = 100)	Surplus Konsumen (Rp)	Surplus Produsen (Rp)	Biaya Logistik total (Rp)
SO-Baseline	25.00	0%	100,0	100,0	0,0	0	0	0
S1-Shock tanpa intervensi	29.075	≈ +14%	80,9	119,5	26,6	-368.643	+879.488	+4.046
S2-Shock + SPHP Jagung	27.313	≈ +7%	89,2	109,8	9,6	-218.736	+422.559	+4.459
S3-Shock + koridor logistik	29.040	≈ +14%	81,1	119,5	26,5	-365.807	+879.488	+1.216

Perkembangan Harga Komoditas Pangan Strategis Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idulfitri 1447 Hijriah

BOKS 4

Stabilitas harga komoditas pangan strategis menjadi fokus utama pengendalian inflasi di Jawa Timur khususnya menjelang Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 Hijriah. Pada Februari 2026, tekanan harga di Jawa Timur tercatat cukup tinggi dengan tingkat inflasi sebesar 4,88% (yoy) dan inflasi bulanan 0,95% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 4,55% (yoy) dan -0,20% (mtm) (Grafik 1). Peningkatan inflasi tersebut terjadi seiring penurunan produksi dan pasokan pada komoditas hortikultura khususnya cabai rawit dan bawang merah seiring curah hujan tinggi, pola historis kenaikan permintaan Ramadan 2026, serta dampak transmisi kenaikan harga emas global. Selain itu, faktor *low base effect* kebijakan diskon tarif listrik turut menjadi salah satu penyumbang inflasi secara tahunan.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, faktor pendorong inflasi Jawa Timur pada bulan Februari 2026 didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok transportasi (Tabel 1). Komoditas cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, dan beras menjadi kontributor utama penyumbang inflasi bulanan pada Februari 2026 dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu, penyumbang utama dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah komoditas emas perhiasan serta komoditas angkutan udara dari kelompok transportasi. Secara umum, penyebab inflasi tersebut adalah peningkatan permintaan di tengah berbagai kegiatan keagamaan dan tradisi, terutama memasuki bulan Ramadan serta gangguan produksi dan

Tabel 1. Komoditas Penyumbang Inflasi Jawa Timur Bulan Februari 2026

Komoditas	Inflasi (mtm)	Andil Inflasi
Cabai Rawit	63,73%	0,23%
Emas Perhiasan	8,26%	0,20%
Daging Ayam Ras	9,34%	0,17%
Angkutan Udara	3,60%	0,05%
Telur Ayam Ras	4,32%	0,04%
Bawang Merah	6,82%	0,03%
Beras	0,41%	0,02%

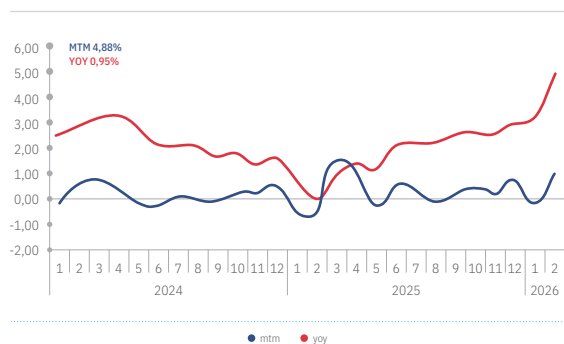
Sumber: BPS, 2026

pasokan seiring curah hujan yang tinggi. Adapun inflasi pada komoditas emas perhiasan terjadi seiring dampak transmisi berlanjutnya tren kenaikan harga emas global akibat kembali meningkatnya tensi geopolitik, khususnya di Timur Tengah.

Berdasarkan tren inflasi pada momen Ramadan dan HBKN Idulfitri selama periode 2022–2025, pola kenaikan inflasi di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan berulang dengan inflasi bulanan yang cenderung terjadi pada momen menjelang dan selama Ramadan hingga Idulfitri. Secara historis, pada momen tersebut inflasi bulanan tercatat meningkat, antara lain pada tahun 2025 (bulan Maret sebesar 1,45%) dan pada tahun 2024 (bulan Maret sebesar 0,64%; bulan April sebesar 0,36%) (Grafik 2).

Ditinjau dari frekuensi komoditas penyumbang utama inflasi bulanan selama Ramadan dan HBKN Idulfitri 2022–2025, komoditas peternakan dan hortikultura tercatat paling dominan. Komoditas bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras muncul sebanyak 5 kali sebagai penyumbang inflasi utama di tingkat Provinsi Jawa Timur, diikuti komoditas beras dan tomat sebanyak 4 kali. Sementara itu, komoditas angkutan udara tercatat muncul 6 kali, mencerminkan tingginya permintaan terkait mobilisasi masyarakat selama periode Ramadan dan HBKN Idulfitri. Frekuensi tersebut menunjukkan bahwa tekanan inflasi musiman tidak hanya berasal dari peningkatan konsumsi pangan, tetapi juga dari komoditas transportasi seiring arus mudik dan perjalanan antarwilayah (Tabel 2).

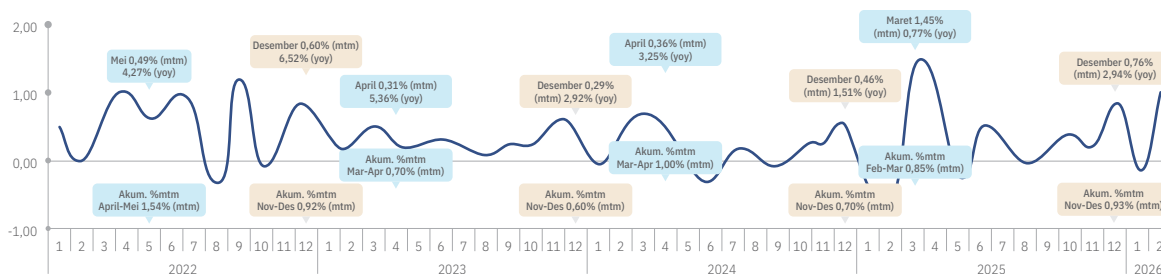
Grafik 1. Perkembangan Inflasi Jawa Timur



Sumber: BPS, 2026 (diolah)

BOKS 4

Grafik 2. Event Analysis Tekanan Inflasi HBKN



Sumber: BKPM (diolah, 2025)

Tabel 2. Frekuensi Komoditas Sebagai 10 Penyumbang Utama pada Ramadan dan HBKN Idul Fitri (2022 – 2025)

Komoditas	Jawa Timur	Kota Surabaya	Kota Malang	Kota Kediri	Kab. Jember	Kota Madiun	Kota Probolinggo	Kab. Sumenep	Kab. Banyuwangi	*Kab. Gresik	*Kab. Tulungagung	*Kab. Bojonegoro
Angkutan Udara	6	7	5	1	0	0	0	0	2	0	0	0
Emas Perhiasan	6	6	5	6	6	2	7	6	7	2	4	3
Bawang Merah	5	5	4	5	3	4	4	4	5	4	4	3
Daging Ayam Ras	5	5	5	6	5	5	4	4	5	1	1	2
Telur Ayam Ras	5	5	4	3	3	4	5	4	6	2	1	1
Beras	4	4	4	3	5	5	4	3	2	2	2	0
Tomat	4	3	3	4	3	3	3	4	2	2	3	3
Ayam Hidup	3	1	3	0	1	2	0	5	1	0	0	2
Bawang Putih	3	4	2	2	2	2	2	3	2	3	1	2
Daging Sapi	3	2	1	0	4	2	2	6	3	1	0	1
Jumlah	44	42	36	30	32	29	31	39	35	17	16	17

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

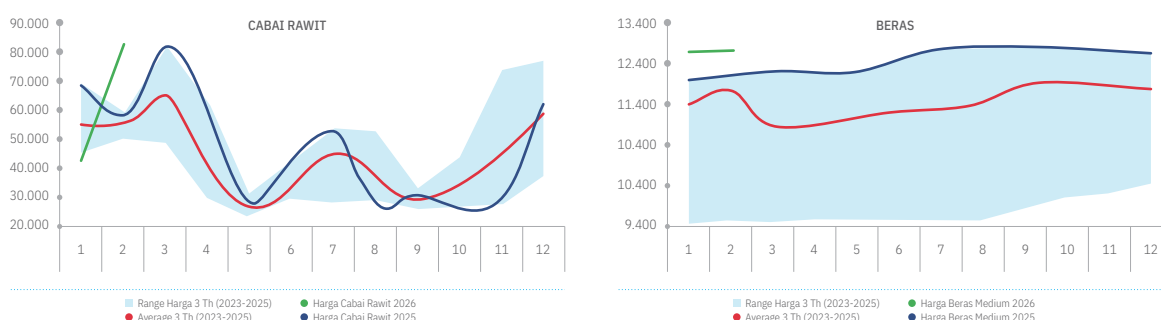
Memasuki bulan Maret 2026, risiko tekanan harga masih membayangi sejumlah komoditas pangan, khususnya komoditas hortikultura dan telur ayam ras (Grafik 3). Tingkat curah hujan di beberapa wilayah sentra produksi yang masih cukup tinggi berpotensi mengganggu produksi komoditas tersebut. Dibandingkan provinsi lainnya, seluruh komoditas pangan strategis tercatat berada di bawah rerata level harga nasional. Namun demikian, level harga yang cenderung lebih rendah tersebut tetap perlu diwaspadai seiring risiko keluarnya pasokan dan produksi Jawa Timur ke luar Jawa Timur (Grafik 4). Adapun momen panen raya padi yang diperkirakan pada akhir bulan Maret/awal bulan April 2026 diperkirakan mampu menahan kenaikan harga beras. Namun demikian,

beberapa bagian di wilayah sentra produksi telah memulai periode panen padi pada bulan Februari 2026. Variasi kondisi produksi antarwilayah tersebut menjadikan analisis spasial dan distribusi pasokan sebagai aspek penting dalam memahami sumber tekanan harga di tingkat kabupaten/kota.

Dalam mengantisipasi inflasi yang lebih tinggi, TPID se-Jawa Timur telah melaksanakan *High Level Meeting* pada tanggal 26 Februari 2026 guna merumuskan dan mensinergikan program pengendalian inflasi, khususnya langkah cepat (*quick wins*) selama momen Ramadan dan HBKN Idulfitri. Pada rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur tersebut, disampaikan bahwa Jawa Timur

BOKS 4

Grafik 3. Perkembangan Harga Komoditas Pangan Jawa Timur



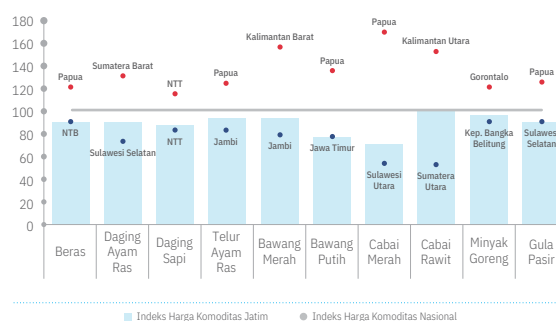
Sumber: SISKAPERBAPO, per 24 Feb 2026 (diolah)

secara aktif telah mengantisipasi dampak curah hujan tinggi dengan melakukan operasi modifikasi cuaca yang terbukti berhasil meminimalisir bencana hidrometeorologi, termasuk dampaknya terhadap perekonomian. Selain itu, melalui penerapan strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan mengelola Komunikasi efektif), beberapa fokus langkah pengendalian inflasi selama momen Ramadan dan HBKN Idulfitri, antara lain:

1. Intensifikasi pasar murah, termasuk penyaluran beras SPHP dan MinyaKita untuk mendukung keterjangkauan harga.
2. Sinergi pengawasan bersama Satgas Bersama (SABER) dan aparat penegak hukum lainnya terkait harga dan pasokan komoditas pangan dan energi.
3. Pengawasan dan pengamanan hasil produksi dan distribusi komoditas pertanian dan peternakan.
4. Pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media lain pembawa penyakit.
5. Pengendalian dan pencegahan penyakit hewan menular strategis (PHMS).
6. Penguatan kerja sama intraprovinci guna mendukung pemerataan distribusi pangan serta pelaksanaan program EPIK Mobile untuk mendukung pemenuhan pasokan komoditas harga terjangkau di Jawa Timur.
7. Dukungan penurunan tarif angkutan udara di Bandara Abdurrachman Saleh, melengkapi kebijakan diskon tarif angkutan udara di tingkat nasional.

8. Penyelenggaraan Mudik Gratis (Darat, Translaut, dan Kapal) serta mendukung ketersediaan moda transportasi intra dan luar provinsi (termasuk angkutan selama lebaran).
9. Penguatan pengendalian ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga yang didukung *platform monitoring* harga SISKAPERBAPO di level provinsi – kabupaten/kota dan *platform* lainnya di level kabupaten/kota – Kecamatan.
10. Edukasi publik terkait keamanan pasokan di media sosial untuk menjaga ekspektasi masyarakat.

Grafik 4. Perbandingan Indeks Harga Komoditas Jawa Timur vs Nasional Bulan Februari 2026

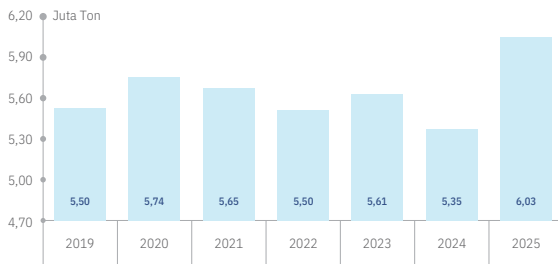


Sumber: PTHPS, 2026 (diolah)

BOKS 5

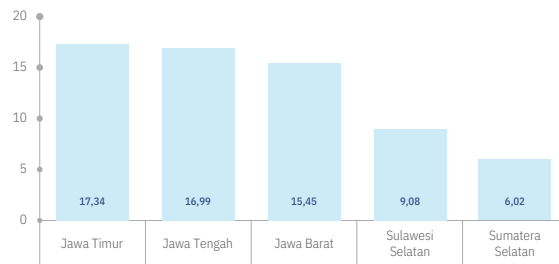
Model Bisnis Korporasi Petani Beras: Strategi Penguatan Kesejahteraan Petani, Ketahanan Pangan, dan Stabilitas Harga di Jawa Timur

Grafik 1. Perkembangan Produksi Beras Jawa Timur



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah, 2025)

Grafik 2. %Share Produksi Padi Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah, 2025)

Jawa Timur sebagai provinsi produsen komoditas padi terbesar di tingkat nasional memegang peranan penting bagi ketahanan pangan nasional. Pada tahun 2025⁹, produksi beras Jawa Timur diperkirakan mencapai 6,03 juta ton dengan kondisi surplus untuk mendukung kebutuhan nasional dengan pangsa produksi $\pm 17\%$ (Grafik 1 dan Grafik 2). Namun demikian, beras masih konsisten menjadi komoditas kontributor utama penyumbang inflasi Jawa Timur dan seringkali lebih tinggi dibanding nasional seiring *outflow* pasokan ke luar wilayah Jawa Timur. Selain itu, pada momen tertentu khususnya sebelum musim panen yang bersamaan dengan momen bulan Ramadan dan HBKN Idulfitri, pada beberapa periode tingkat inflasi lebih tinggi dibandingkan peningkatan kesejahteraan petani.

Di sisi lain, pada momen musim panen raya, tingkat deflasi harga konsumen pada komoditas beras cenderung lebih landai dibandingkan penurunan harga yang dialami petani. Kondisi tersebut salah satunya ditengarai akibat masih bergantungnya petani terhadap beberapa level distributor dalam memasarkan produknya. Diperlukan penguatan kelembagaan petani yang mampu menciptakan ekosistem rantai pasok beras yang lebih efisien guna meningkatkan produktivitas dan penerimaan petani yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan.

Gambar 1. MPP Jawa Timur



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah, 2025)

Korporasi petani sebagai salah satu konsep kelembagaan petani dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kapasitas petani lebih jauh. Melalui model bisnis kelembagaan yang mengintegrasikan sumber daya dari berbagai gabungan kelompok petani, skala ekonomi menjadi lebih besar, efisiensi produksi, dan peningkatan daya saing melalui tata kelola badan usaha yang profesional, transparan, dan partisipatif. Konsep ini didukung oleh *Economies of Scale Theory* yang menekankan efisiensi biaya melalui produksi kolektif (Candemir & Duvaleix, 2021), *Institutional Economics* yang menyoroti penguatan rantai pasok dan peran kelembagaan seperti koperasi dan BUMDes (Douglass, 1990 dan Porter, 1990), serta *Collective Action Theory* yang memungkinkan aksi bersama untuk negosiasi harga dan pengendalian pasokan (Olson, 1965). Dalam pembentukan dan operasional korporasi petani, terdapat beberapa kunci keberhasilan antara lain (i) kelembagaan yang kuat; (ii) tata kelola profesional; (iii) modal sosial; (iv) strategi bisnis; dan (v) *Collective Empowerment*.

Dalam rangka pengendalian inflasi dan mendukung pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, terdapat 3 pilar penting kebijakan yang digagas Bank Indonesia antara lain korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan yang optimal (Gambar 2). Langkah korporatisasi UMKM, dalam hal ini juga dapat termasuk petani, diharapkan mampu meningkatkan skala bisnis produsen yang pada gilirannya mampu menghadirkan produksi lebih tinggi dengan harga yang lebih terjangkau guna mendukung stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

9. Sumber: Prognosa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, November 2025

BOKS 5

Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan korporasi petani. Hal tersebut ditunjukkan melalui penerbitan Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2020 mengenai Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani. Kebijakan ini menempatkan korporatisasi sebagai elemen strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan produsen serta ketahanan dan kedaulatan pangan.

Saat ini Jawa Timur telah memiliki beberapa korporasi petani beras, di antaranya Koperasi Produsen Multi Pihak (KMP) Sarana Agro Lestari di Jombang dan KMP Jatim Makmur Sentosa di Kabupaten Madiun. Korporasi petani tersebut mengembangkan model bisnis berbasis ekosistem *closed-loop* dari hulu hingga hilir. Pada tahap hulu, para petani yang tergabung sebagai anggota korporasi petani menanam padi untuk kemudian dijual dalam bentuk gabah ke korporasi petani. Gabah yang dibeli kemudian disimpan di gudang dan dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan Sistem Resi Gudang (SRG) dengan mitra lembaga keuangan. Selanjutnya, gabah diolah menjadi beras oleh korporasi petani dan dikemas dengan berbagai macam *brand*, termasuk *brand* Jatim Cettar yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemasaran beras dilakukan melalui berbagai kanal komersial antara lain BUMD PT Jatim Grha Utama,

e-commerce, toko Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/ Kota, pasar murah, serta penjualan kepada ASN/BUMD Provinsi Jawa Timur. Dukungan akademisi turut diberikan untuk pendampingan manajemen dan inovasi produk serta dukungan media untuk pemasaran khususnya beras dengan *brand* Jatim Cettar.

Proses pembentukan Korporasi Petani secara umum dilakukan melalui 6 (enam) tahapan umum. Keenam tahapan tersebut yaitu: (i) konsolidasi Gapoktan; (ii) Pembentukan Manajemen; (iii) Kerjasama Swasta/Investor; (iv) Legalisasi Badan Usaha Korporasi Petani; (v) Pengumpulan Modal; (vi) Operasional Korporasi Petani. Pelaksanaan 3 (tiga) tahap awal tersebut dibutuhkan untuk membentuk struktur kepemilikan Korporasi Petani, di mana petani sebagai pemilik modal terbesar, investor sebagai mitra strategis, dan manajemen untuk operasional Korporasi Petani. Adapun keuntungan korporasi petani nantinya akan dibagikan dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU) kepada 3 pihak, yaitu petani, investor, dan manajemen koperasi.

Dalam mewujudkan kelembagaan petani yang profesional, secara umum dapat digunakan struktur organisasi sebagaimana Gambar 4. Struktur tersebut dirancang untuk membangun ekosistem terintegrasi dari hulu-hilir proses produksi beras dalam satu entitas Korporasi Petani Beras. Kelompok Anggota/ Kepemilikan

Gambar 2. Strategi Penguatan Kelembagaan UMKM/Produsen



Sumber: Bank Indonesia (2024)

```

graph TD
    subgraph Input
        A[Pembelian Gabah dgn Sistem Resi Gudang] --> C[Gabah]
    end
    subgraph Petani
        B[Petani] --> C
    end
    subgraph Pengolahan
        C --> D[Bisnis-Pembiayaan SRG  
- PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia  
- PT. Thara Jaya]
        C --> E[Komunitas-Produsen  
Gapoktan Pojokkulon]
        D --> F[Pengolahan RMU]
        E --> F
        F --> G[Beras]
    end
    subgraph Korporasi_Petani [Korporasi Petani KMP Sarana Agro Lestari]
        F --> H[SHU]
        F --> I[Investor]
        F --> J[Manajemen]
        H --> K[Petani dalam 10 Gapoktan]
        I --> K
        J --> K
    end
    subgraph Bantuan [Pemberian Bantuan :  
Dryer, Color Sorter, Mesin Penepung]
        L[Pemprov - K/L  
Pembkab, Jombang  
Pemprov Jatim  
BI Jatim] --> K
    end
    K --> G
    K --> M[Tepung Beras]
    M --> N[Produk Hilirisasi]
    G --> O[Beras Jatim Cettar]
    O -- "Via E-commerce" --> P[Komersial]
    O -- "Via E-commerce" --> Q[ASN & Pegawai BUMD]
    O --> R[Bisnis  
PT Jatim Grha Utama]
    O -- "Didukung Subsidi Ongkos angkut" --> S[TPID  
EPiK (Warung Tekan Inflasi Surabaya)]
    S --> T[Masyarakat Pasar Murah]
    
```

Input

- Pembelian Gabah dgn Sistem Resi Gudang

Petani

- Petani

Pengolahan

- Bisnis-Pembiayaan SRG
 - PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia
 - PT. Thara Jaya
- Komunitas-Produsen
 - Gapoktan Pojokkulon
- Pengolahan RMU
- Beras

Korporasi Petani KMP Sarana Agro Lestari

- SHU
- Investor
- Manajemen
- Petani dalam 10 Gapoktan

Pemberian Bantuan : Dryer, Color Sorter, Mesin Penepung

- Pemprov - K/L
- Pembkab, Jombang
- Pemprov Jatim
- BI Jatim

Tepung Beras

Produk Hilirisasi

Distribusi-Pemasaran

- Beras Jatim Cettar
 - Via E-commerce
 - Komersial
 - ASN & Pegawai BUMD
 - Bisnis
 - PT Jatim Grha Utama
 - Didukung Subsidi Ongkos angkut
 - TPID
 - EPiK (Warung Tekan Inflasi Surabaya)
- Masyarakat Pasar Murah

Akademisi : Technical Advisor

- Universitas Airlangga
- Universitas Bhayangkara
- UPN Surabaya

Media : Market Sounding & Brand Awareness

terdiri dari tiga pilar yaitu, (1) Pemrakarsa/ Manajemen yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan operasional; (2) Produsen/Petani sebagai pemilik mayoritas sekaligus produsen; dan (3) Investor: penyedia modal untuk pengembangan usaha. Usulan struktur korporasi petani beras didasarkan pada fungsi spesifik berdasarkan proses bisnis umum penanaman padi hingga ke penjualan dalam bentuk beras.

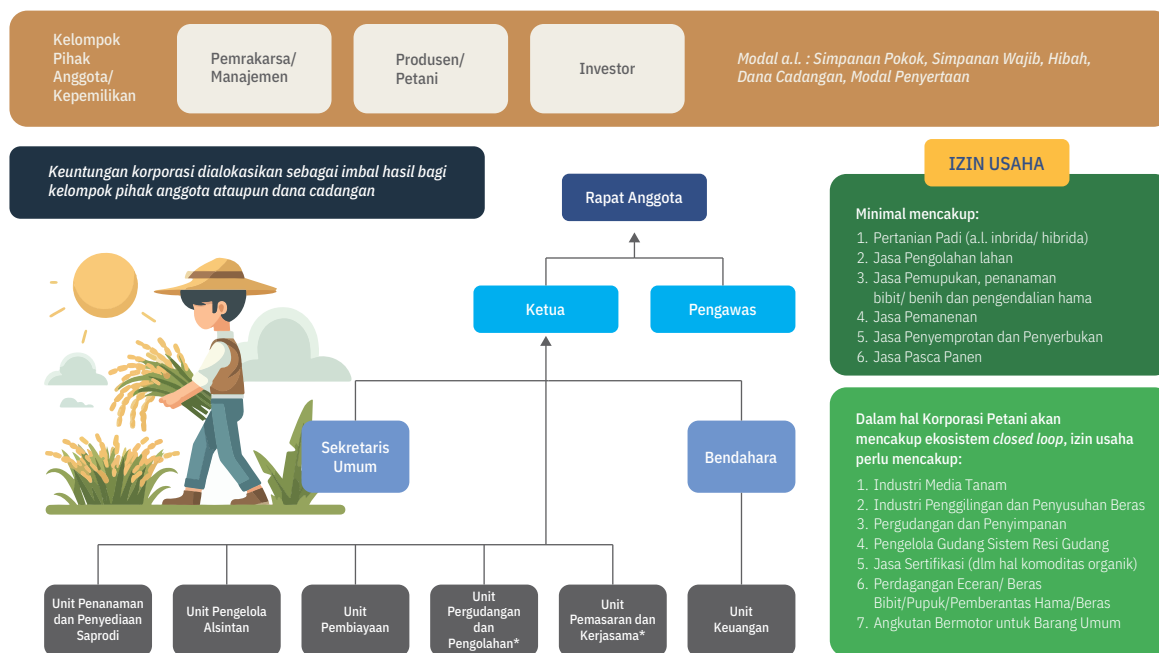
i. Kepengurusan dipimpin oleh Ketua, didukung Sekretaris Umum dan Bendahara, serta enam unit kerja yaitu, (1) Unit Penanaman & Penyediaan Saprod; (2) Unit Pengelola Alsintan; (3) Unit Pembiayaan; (4) Unit Pergudangan & Pengolahan; (5) Unit Pemasaran & Kerjasama; dan (6) Unit Keuangan. Terdapat fungsi pengawas untuk memastikan penerapan *check and balance*.

- Konsep struktur organisasi ini diharapkan membentuk kelembagaan korporasi petani yang mendukung efisiensi

Model bisnis tersebut berupaya menghadirkan solusi bagi petani untuk peningkatan kapasitas dan integrasi proses bisnis penanaman padi dengan menciptakan skala ekonomi melalui konsolidasi bahan pertanian, alsintan, hingga pergudangan. Berbagai manfaat dapat ditawarkan korporasi petani bagi para petani anggota di setiap titik proses bisnis, mulai dari penyiapan lahan hingga penjualan gabah (Gambar 5). Manfaat yang dapat ditawarkan antara lain efisiensi biaya produksi melalui pembelian dalam kuantitas besar dan penyewaan alsintan modern dan gudang dengan harga terjangkau, akses dan dukungan pembiayaan, pendampingan hingga

BOKS 5

Gambar 4. Struktur Organisasi Korporasi Petani



*Dalam hal bisnis Korporasi Petani turut mencakup distribusi dan pemasaran

Sumber : Bank Indonesia (2025)

peningkatan harga jual dengan bargaining *position* yang lebih baik di pasar (a.l. melalui kerjasama dengan mitra penggilingan besar). Secara rinci, ekosistem yang dapat dihadirkan secara terintegrasi antara lain:

I. Pada Proses Bisnis Budidaya:

- a. Penyediaan saprodi dan alsintan dengan harga yang terjangkau melalui pembelian secara kolektif sekaligus jasa konsultasi seperti uji tanah
- b. Penyediaan jasa budidaya baik secara parsial (pada proses budidaya tertentu) ataupun jasa budidaya *end-to-end* dengan sistem bagi hasil dengan petani pada saat panen
- c. Penyediaan dukungan pembiayaan bagi petani baik dari Korporasi Petani ataupun dari lembaga keuangan (termasuk skema SRG)
- d. Pendampingan bekerjasama dengan akademisi/ *expert* termasuk konsultasi agronomi

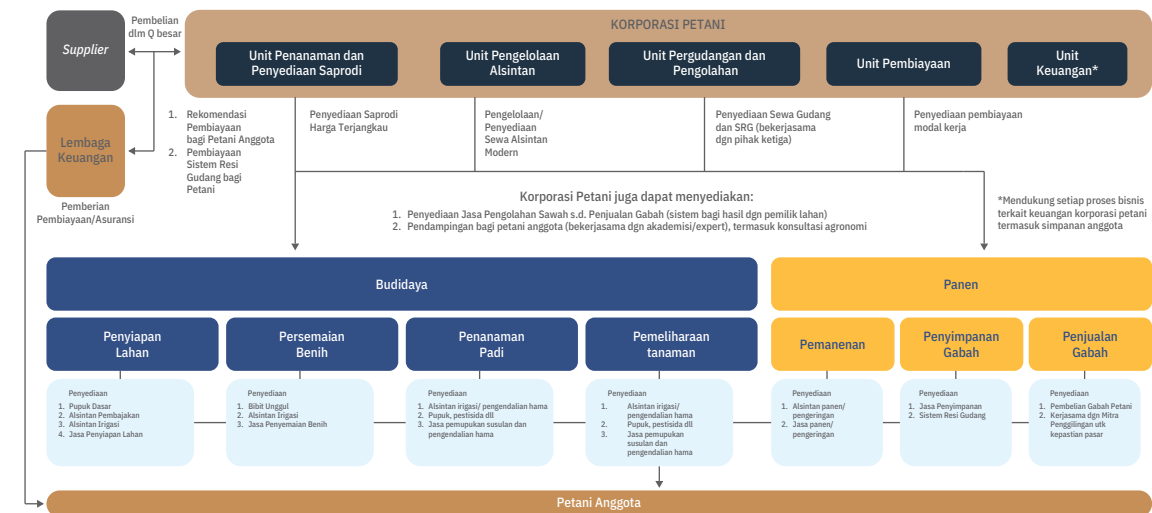
II. Panen:

- a. Penyediaan jasa pemanenan dan penjualan gabah melalui kerja sama dengan mitra penggilingan untuk kepastian pasar.
- b. Penjualan kolektif/kerjasama kontraktual dengan mitra penggilingan untuk kepastian pasar.

Model bisnis dimaksud perlu didukung kerjasama yang baik dengan konsep hexahelix oleh korporasi petani dengan (i) *supplier* & mitra penggilingan (swasta); (ii) lembaga keuangan; (iii) akademisi; (iv) media; (v) komunitas; dan (vi) Pemerintah (lembaga publik). Skema sebagaimana Gambar 5 relevan untuk gabungan petani yang memiliki preferensi untuk fokus pada produksi padi, namun demikian model bisnis ini dapat lebih optimal jika turut mengadopsi konsep hilirisasi secara *end-to-end*.

BOKS 5

Gambar 5. Model Bisnis Korporasi Petani (Tanpa Hilirisasi)



Sumber: Bank Indonesia (2025)

Sejalan dengan konsep model bisnis sebelumnya, konsep model bisnis dengan hilirisasi menawarkan *closed-loop ecosystem* yang terintegrasi. Konsep *closed-loop* tersebut artinya adalah gabah petani dijual oleh korporasi petani dalam bentuk produk beras, baik secara langsung kepada konsumen maupun melalui distributor utama (D1), sehingga meningkatkan margin keuntungan serta efisiensi distribusi yang pada akhirnya mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan stabilitas harga. Model ini mengintegrasikan seluruh rantai pasok beras mulai dari hulu (budidaya) hingga hilir (pengolahan dan pemasaran) dalam satu kelembagaan korporasi petani (Gambar 6). Adapun ekosistem pendukung yang dapat dihadirkan oleh korporasi petani pada sisi hilir antara lain sebagai berikut:

- I. Pengolahan gabah menjadi beras, baik dengan pabrik penggilingan milik korporasi petani maupun mitra pabrik penggilingan
- II. Pengemasan dan penjualan dengan *brand* khusus dari korporasi petani

Model bisnis korporasi petani ini relevan untuk gabungan petani yang telah memiliki visi jangka panjang untuk peningkatan kesejahteraan disertai keunikan produk/*brand* yang kuat serta kerja sama yang baik dengan mitra di sisi pemasaran. Adapun tantangan utama yang dihadapi dalam model bisnis ini adalah akseptansi

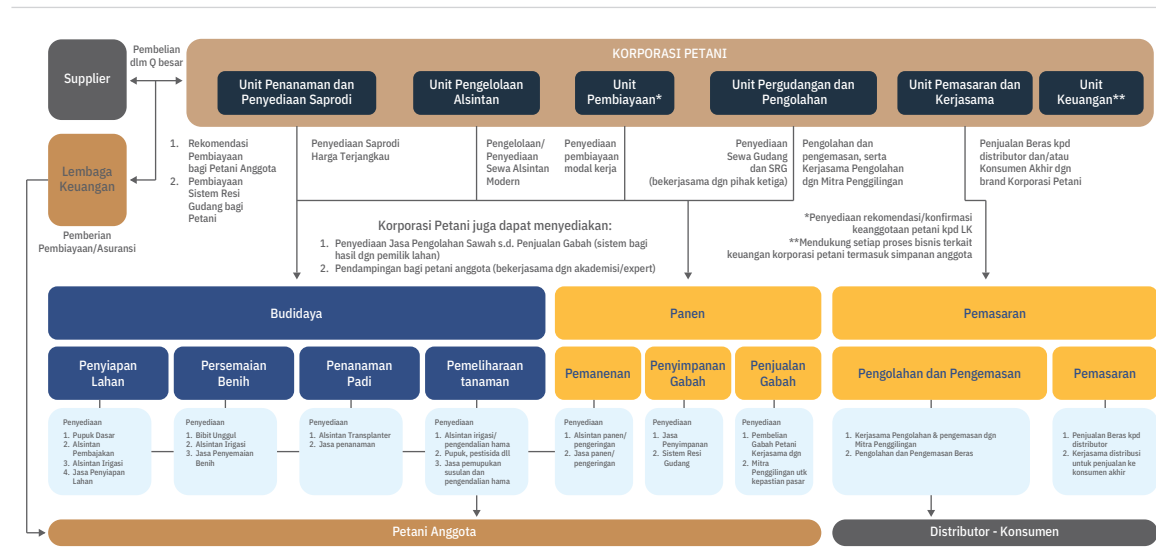
produk dan perluasan *channel* pemasaran. Salah satu strategi yang dapat dilakukan antara lain penguatan *branding* dan inovasi produk, digitalisasi pemasaran, dan kolaborasi dengan mitra distribusi agar korporasi petani mampu bersaing di pasar.

Kedua model bisnis di atas akan semakin optimal dengan adopsi kolaborasi hexahelix, yaitu kolaborasi dengan:

- (i) Swasta: Penyediaan Saprodi, Alsintan, hingga pembiayaan dengan biaya terjangkau melalui *collective buying*. Selain itu, kerjasama *off-taker* dengan distributor/*outlet* komersial untuk perluasan pasar (baik dalam bentuk gabah maupun produk hilirisasi) dan transfer teknologi serta penerapan standar mutu/sertifikasi
- (ii) Lembaga keuangan: Penyediaan pembiayaan dan asuransi dengan biaya terjangkau, digitalisasi pembayaran dan pencatatan keuangan, serta peningkatan literasi keuangan petani anggota
- (iii) Akademisi: Pendampingan dan penguatan riset terapan baik untuk anggota petani dan manajerial
- (iv) Media: meningkatkan eksposur publik sekaligus promosi produk dan edukasi pasar
- (v) Komunitas: Konsolidasi gabungan petani untuk memperkuat skala korporasi petani, peningkatan literasi anggota, penguatan kepatuhan anggota terhadap kualitas produksi, regenerasi petani

BOKS 5

Gambar 6. Model Bisnis Korporasi Petani (Dengan Hilirisasi)



Sumber : Bank Indonesia (2025)

- (vi) Pemerintah dan lembaga publik lainnya:
Pendampingan, fasilitasi legalitas, dukungan hibah/
bantuan/fasilitasi lainnya baik dalam bentuk *tangible*/
non-tangible hingga promosi produk.



Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM



4.1. Kondisi Umum

Kinerja intermediasi perbankan pada triwulan IV 2025 tetap solid, ditopang oleh pertumbuhan kredit yang berlanjut dengan risiko kredit yang tetap terkendali. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) masih mencatatkan pertumbuhan, meskipun dengan laju yang lebih moderat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perkembangan ini sejalan dengan pertumbuhan DPK korporasi yang tercatat mengalami perlambatan didorong penurunan pada komponen giro dan deposito seiring ketidakpastian global yang masih berlanjut. Di sisi lain, meskipun mengalami perlambatan, DPK rumah tangga tetap tumbuh positif, terutama didorong oleh peningkatan pada komponen tabungan dan giro. Penyaluran kredit perbankan umum juga tetap mencatatkan pertumbuhan positif, meskipun dalam tren melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, baik pada segmen korporasi, UMKM, maupun rumah tangga. Pertumbuhan kredit korporasi tercatat berkontraksi sejalan dengan masih berlangsungnya preferensi korporasi untuk melakukan pembiayaan internal (*internal financing*), di tengah penurunan suku bunga kredit secara terbatas. Sementara itu, pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan libur Natal dan Tahun Baru, kredit rumah tangga tetap tumbuh positif, meskipun melambat. Perlambatan tersebut terjadi pada hampir seluruh komponen pembentuk kredit kecuali komponen peralatan rumah tangga (RT) yang menunjukkan kenaikan. Kondisi penurunan tersebut, sejalan dengan preferensi masyarakat untuk menggunakan dana pribadi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi jangka pendek serta moderasi peminatan terhadap pembelian aset properti dan kendaraan bermotor, yang tercermin dari penurunan realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Lebih lanjut, tingkat intermediasi perbankan pada triwulan laporan terpantau optimal, tercermin dari rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) bank umum sebesar 91,08%. Capaian tersebut berada dalam rentang intermediasi optimal 84%–94% sebagaimana digunakan dalam ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Bank Indonesia.

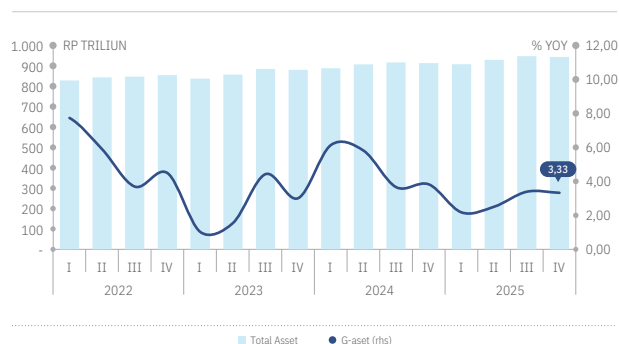
Ketahanan perbankan di Jawa Timur tetap terjaga, tercermin dari risiko kredit yang menurun serta kapasitas permodalan yang berada dalam batas aman. Secara agregat, rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) pada triwulan laporan tercatat sebesar 3,23%, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,37%. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) meningkat menjadi 31,38% pada triwulan IV 2025, jauh di atas ketentuan minimum 8% yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kondisi ini menunjukkan ketahanan perbankan yang kuat dalam menghadapi berbagai potensi risiko di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

4.2. Pembiayaan Daerah di Jawa Timur

Kinerja intermediasi perbankan pada triwulan IV 2025 tumbuh positif dan terus berperan dalam mendukung pembiayaan ekonomi Jawa Timur. Hal ini tercermin dari

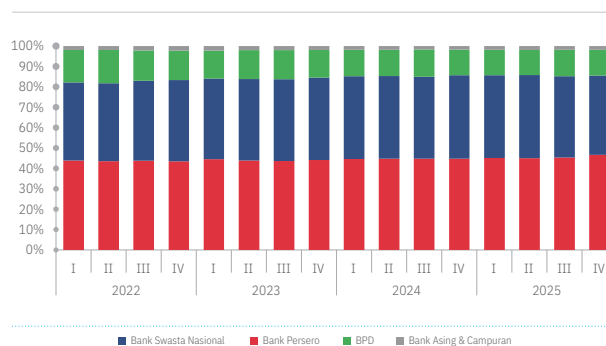
penyaluran kredit yang tetap tumbuh, meskipun lebih moderat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Likuiditas perbankan tetap tumbuh positif meskipun melambat, tercermin dari perlambatan pertumbuhan DPK, terutama pada komponen deposito. Sejalan dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan total aset perbankan turut termoderasi dari 3,39% (yoy) atau sebesar Rp947,7 triliun pada triwulan III 2025 menjadi 3,33% (yoy) atau sebesar Rp943,9 triliun pada triwulan laporan (Grafik 4.1). Penurunan total aset terutama terjadi pada kelompok Bank Persero yang mengalami kontraksi serta pada kelompok Bank Asing dan Bank Campuran yang mencatatkan perlambatan pertumbuhan. Sementara itu, Bank Swasta Nasional dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) tetap mencatatkan pertumbuhan positif. Kondisi tersebut ditengarai sejalan dengan strategi penguatan neraca melalui pengurangan utang luar negeri dan peningkatan cadangan pada Bank Persero. Adapun perlambatan pertumbuhan aset pada Bank Asing dan Bank Campuran dipengaruhi oleh dinamika pasar global yang masih fluktuatif serta kebijakan suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama (*high for longer*) di negara asal, sehingga mendorong sikap lebih konservatif di tengah pelonggaran moneter yang berlangsung. Lebih lanjut, berdasarkan kelompok bank, pangsa aset terbesar masih didominasi oleh Bank Swasta Nasional sebesar 46,68%, diikuti oleh Bank Persero sebesar 38,82%, BPD sebesar 12,71%, dan Bank Asing sebesar 1,79% (Grafik 4.2).

Grafik 4.1. Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan di Jawa Timur



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.2. Perkembangan Pangsa Kepemilikan Aset Perbankan



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

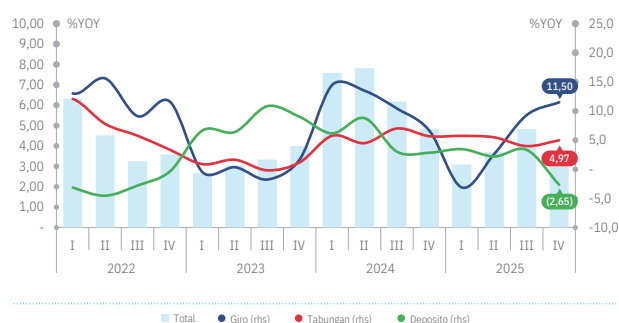
4.2.1. Dana Pihak Ketiga

Laju pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan pada triwulan IV 2025 terindikasi mengalami deselerasi. Total DPK tercatat sebesar Rp799,49 triliun dengan pertumbuhan 3,60% (yoy), melambat dibandingkan dengan 4,83% (yoy) pada periode sebelumnya (Grafik 4.3). Perlambatan DPK utamanya didukung oleh perlambatan DPK Korporasi seiring ketidakpastian global yang masih berlanjut¹⁰ serta perlambatan ekspor¹¹. Sementara itu, perlambatan pertumbuhan terjadi baik pada DPK korporasi dan rumah tangga.

Berdasarkan jenis DPK, perlambatan pertumbuhan DPK terutama bersumber dari penurunan pada komponen **deposito**. Pada triwulan IV 2025, deposito tercatat berkontraksi sebesar -2,65% (yoy), berbalik arah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,33% (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh preferensi korporasi untuk mengoptimalkan penggunaan dana internal (*internal financing*) serta mencairkan deposito guna mendukung ekspansi usaha atau belanja modal (*capital expenditure/CAPEX*) menjelang akhir tahun. Selain itu, kebijakan moneter yang lebih ekspansif dan penurunan tingkat bunga penjaminan¹² turut mendorong

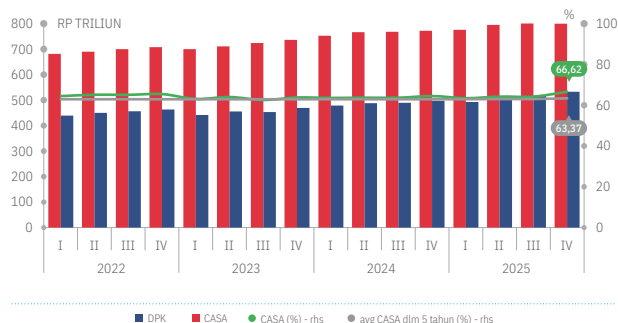
pergeseran struktur dana, yang tecermin dari migrasi dana ke komponen giro yang lebih likuid. Realisasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang terkonsentrasi pada penghujung triwulan IV 2025 juga mendorong Pemerintah Daerah menempatkan dana tersebut pada instrumen giro dan akses likuiditas jangka pendek. Sementara itu, komponen tabungan tetap mencatatkan pertumbuhan positif, meningkat dari 3,98% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 4,97% (yoy) pada triwulan laporan. Peningkatan ini sejalan dengan kecenderungan masyarakat mengalihkan dana dari instrumen deposito¹³ ke tabungan guna menjaga likuiditas dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi, belanja, dan perjalanan pada akhir tahun. Lebih lanjut, berdasarkan kelompok nominal simpanan, perlambatan DPK terutama terjadi pada kelompok depasan menengah (nilai simpanan lebih dari Rp1 miliar hingga Rp10 miliar). Kondisi ini mengindikasikan adanya penggunaan cadangan dana oleh pelaku usaha kategori menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan pembiayaan operasional melalui skema *internal financing*, sekaligus membentuk cadangan likuiditas.

Grafik 4.3. Perkembangan Pertumbuhan DPK Bank Umum



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.4. Perkembangan Rasio CASA Bank Umum



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Tabel 4.1. Pertumbuhan DPK Perbankan Jawa Timur berdasarkan Kelompok Nilai

Klasifikasi	Kelompok Nilai	II 2025		III 2025		IV 2025	
		Nominal (Rp Miliar)	%yoy	Nominal (Rp Miliar)	%yoy	Nominal (Rp Miliar)	%yoy
Kecil	<10 JT	34.023	5,23	33.915	4,78	35.624	4,15
	>10 JT - 100 JT	114.428	3,29	112.984	1,04	115.720	0,74
	>100JT - 500JT	144.689	3,72	145.671	2,32	147.656	2,30
Menengah	>500JT - 1 M	72.897	3,96	73.521	3,04	73.737	1,36
	>1 M - 2 M	60.460	3,98	60.996	3,66	59.747	4,68
	>2 M - 5M	78.407	0,75	79.513	1,16	76.989	(1,02)
	>5M - 10M	53.972	0,87	56.094	4,92	53.263	0,18
Besar	>10M - 15M	23.906	11,57	24.382	8,22	24.557	3,90
	>15M - 20M	20.083	10,69	20.830	9,23	19.335	4,65
	>20M	192.131	3,93	197.649	11,01	192.858	9,93

Sumber: Laporan Bank Umum, Diolah

10. Berdasarkan Global Economic Policy Uncertainty (GEPU) Index, indeks ketidakpastian global masih tinggi kendati melambat dari 302,70 pada triwulan III 2025 menjadi 389,43 pada triwulan IV 2025.

11. Kinerja Ekspor Luar Negeri Provinsi Jawa Timur melambat 25,63% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 5,41% (yoy) pada triwulan IV 2025.

12. Suku bunga penjaminan LPS pada periode triwulan IV 2025 adalah 3,50% turun dari periode sebelumnya yakni 3,75%.

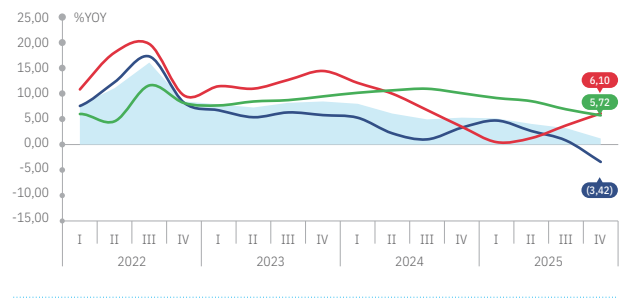
13. Seiring dengan melandainya suku bunga DPK deposito, dari 4,81% pada triwulan sebelumnya menjadi 4,48% pada triwulan IV 2025

Rasio dana murah atau *Current Account Saving Account (CASA)* perbankan di Jawa Timur tetap berada pada level yang tinggi. Pada triwulan IV 2025, rasio CASA tercatat sebesar 66,62%, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 64,20%, serta berada di atas rata-rata rasio CASA dalam lima tahun terakhir sebesar 63,37%¹⁴ (Grafik 4.4). Dominasi rasio CASA pada periode ini didukung oleh ekspansi simpanan giro dan tabungan. Dari sisi korporasi, peningkatan penempatan dana pada instrumen giro mengonfirmasi preferensi pelaku usaha untuk mengoptimalkan sumber pendanaan internal sebagai penyangga utama biaya operasional. Selain itu, meningkatnya adopsi transaksi keuangan digital turut mendorong pertumbuhan dana CASA, terutama ketika deposan ritel mulai mengalihkan sebagian asetnya ke produk pasar modal guna memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi di tengah tren penurunan suku bunga BI Rate.

4.2.2. Penyaluran Kredit

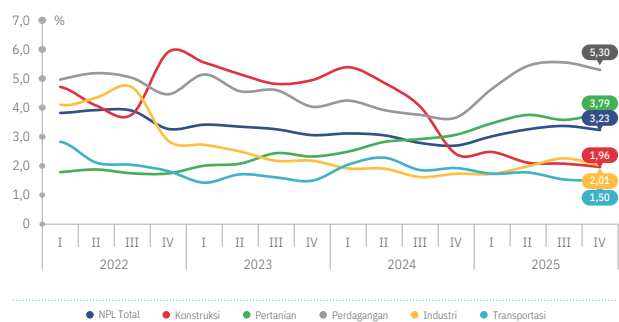
Pada triwulan IV 2025, kinerja kredit perbankan berdasarkan lokasi proyek di Jawa Timur tercatat tumbuh positif. Total kredit yang disalurkan mencapai Rp728,2 triliun atau tumbuh 1,18% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,19% (yoy) (Grafik 4.5). Berdasarkan jenis penggunaannya, perlambatan pertumbuhan terutama terjadi pada kredit modal kerja (pangsa 48,22%) yang berkontraksi sebesar 3,42% (yoy), serta pada kredit konsumsi (pangsa 31,16%) yang melambat dari 6,91% (yoy) menjadi 5,72% (yoy). Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh melambatnya kredit LU Industri Pengolahan¹⁵ dan kontraksi kredit LU Perdagangan. Ke depan, optimisme prospek pertumbuhan kredit diperkirakan didukung oleh berlanjutnya proyek Pemerintah dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor konstruksi dan infrastruktur jalan pada periode 2026–2027¹⁶. Sementara itu, perlambatan kredit konsumsi dipengaruhi oleh terjadinya pergeseran dari konsumsi barang tahan lama (*durable goods*) yang biasanya menggunakan kredit, ke sektor jasa dan pengalaman (*leisure*) seiring adanya HBKN Natal dan Tahun Baru. Selain itu, preferensi rumah tangga yang cenderung menggunakan dana sendiri (*self-financing*) untuk kebutuhan konsumsi jangka pendek, serta menurunnya minat terhadap pembelian barang tahan lama turut menekan pertumbuhan, yang tercermin dari penurunan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Kondisi ini juga terkonfirmasi dari penurunan kinerja kredit RT Jawa Timur pada triwulan laporan yang menjadi komponen utama dari kredit konsumsi. Di sisi lain, kredit investasi (pangsa 20,62%) terpantau tumbuh 6,10% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,74% (yoy) ditopang kredit LU Industri Pengolahan dan Perdagangan pada triwulan IV 2025 yang mengalami perbaikan¹⁷. Peningkatan ini juga di antaranya didukung oleh berlanjutnya beberapa proyek investasi pada PSN, Perpres 80/2019, dan proyek – proyek strategis Jawa Timur¹⁸ serta kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi dan kinerja korporasi yang membaik tercermin dari penguatan IHSG.

Grafik 4.5. Perkembangan Pertumbuhan Penyaluran Kredit Bank Umum Berdasarkan Lokasi Proyek



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.6. Perkembangan NPL Berdasarkan LU Utama



Sumber: Laporan Bank Umum, Diolah

Kualitas kredit perbankan di Jawa Timur pada triwulan IV 2025 tetap terjaga dengan baik, tercermin dari rasio *Non-Performing Loan (NPL)* yang berada di bawah ambang batas 5%. NPL *gross* tercatat sebesar 3,23%, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,37% (Grafik 4.8). Berdasarkan LU, penurunan NPL terutama terjadi pada LU Industri Pengolahan dan Perdagangan, sejalan dengan perbaikan kinerja PDRB kedua LU tersebut pada triwulan IV 2025 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selain itu, penguatan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit baru turut menopang kualitas kredit. Berdasarkan jenis penggunaan, penurunan rasio NPL terjadi pada komponen Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Konsumsi (KK), dan Kredit Investasi (KI). Selain itu, tingkat kredit berisiko atau *Loan at Risk (LaR)* menunjukkan perbaikan seiring dengan menurunnya *outstanding* kredit kolektabilitas 2. Pada triwulan IV 2025, rasio LaR tercatat sebesar 7,37%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 7,76% (Grafik 4.9).

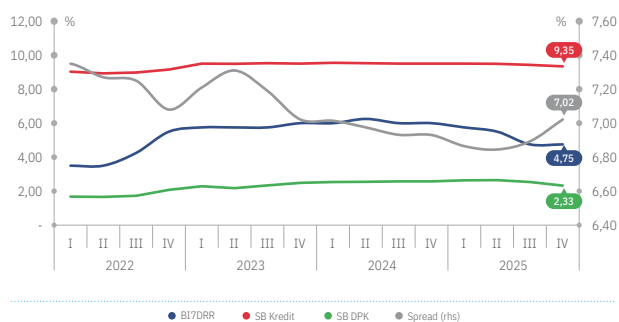
14. Rata-rata 5 tahun terakhir (2021-2025).

15. Kinerja kredit LU Industri Pengolahan berkontraksi dari 2,58% (yoy) menjadi lebih dalam sebesar 4,05% (yoy), LU Perdagangan dari tumbuh 1,19% (yoy) menjadi berkontraksi 0,02% (yoy).

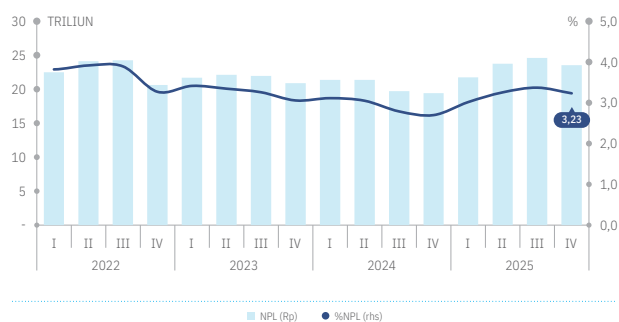
16. SRRL Surabaya masih dalam tahap administrasi dan rencana konstruksi pada tahun 2027, Waterfront Land Surabaya masih tahap pembebasan lahan hingga akhir tahun 2025.

17. Berdasarkan LBUT, kredit investasi LU Industri Pengolahan dan Perdagangan mengalami perbaikan masing-masing dari kontraksi 6,84% (yoy) dan 0,16% (yoy) menjadi tumbuh sebesar 5,41% (yoy) dan 8,11% (yoy) pada akhir triwulan IV 2025.

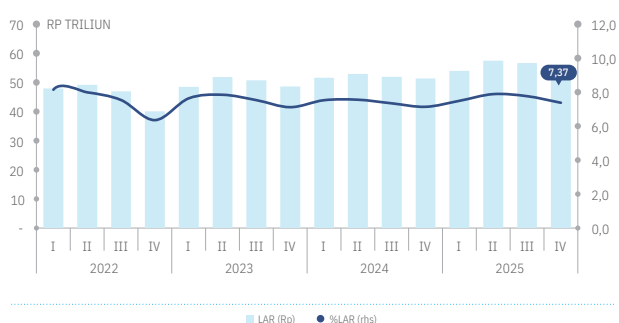
18. Berdasarkan data BPS, proyek strategis triwulan IV 2025 yang mendukung a.l. pembangunan Tol Probawangi Sesi III, JLS Banyuwangi, proyek LPG Refrigerated Tuban, Jalan Tol Kediri - Tulungagung, pengembangan akses Bandara Doho Kediri.

Grafik 4.7. Perkembangan BI Rate dan Suku Bunga Bank Tertimbang

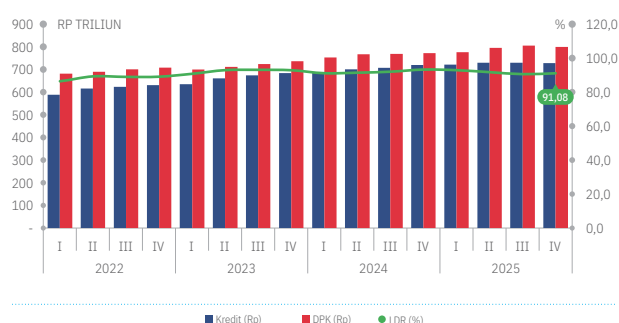
Sumber: Laporan Bank Umum & Website Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.8. Perkembangan Rasio NPL Bank Umum

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.9. Perkembangan Loan at Risk (LAR) Bank Umum

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.10. Perkembangan Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Umum

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Spread suku bunga perbankan di Jawa Timur pada triwulan IV 2025 tercatat meningkat. *Spread* suku bunga naik dari 6,89% pada triwulan III 2025 menjadi 7,02% pada triwulan laporan. Peningkatan tersebut terjadi seiring penurunan suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) yang lebih dalam dibandingkan dengan penurunan suku bunga kredit. Suku bunga DPK menurun dari 2,54% pada triwulan III menjadi 2,33% pada triwulan IV 2025, sejalan dengan penurunan *BI Rate* dari 5,00% pada 20 Agustus 2025 menjadi 4,75% sejak tanggal 17 September 2025. Sementara itu, suku bunga kredit turun terbatas, dari 9,43% menjadi 9,35% pada periode yang sama. Terbatasnya penurunan suku bunga kredit sejalan dengan proses yang dibutuhkan oleh perbankan dalam melakukan penyesuaian struktur pendanaan dan *repricing* aset secara gradual guna menjaga *margin*, profitabilitas, dan kualitas aset. Penurunan suku bunga DPK yang nilainya menyerupai penurunan *BI Rate* menunjukkan kecukupan likuiditas perbankan, meski tingginya sensitivitas serta daya tawar deposito besar terhadap tingkat imbal hasil simpanan masih tetap perlu dicermati.

4.2.3. Loan To Deposit Ratio (LDR)

Rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) bank umum di Jawa Timur pada penghujung tahun 2025 meningkat menjadi 91,08% dan masih berada dalam rentang intermediasi optimal (Grafik 4.10). Capaian tersebut mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi perbankan di Jawa Timur pada triwulan laporan tetap berjalan optimal, sejalan dengan rentang intermediasi ideal sebesar 84%–94% sebagaimana diatur dalam ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Bank Indonesia.

4.3. Perkembangan Kinerja Korporasi

4.3.1. Kinerja Umum Korporasi

Kinerja umum korporasi di Jawa Timur tetap solid, tecermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, aktivitas dunia usaha di Jawa Timur masih berada pada level yang kuat, ditunjukkan oleh nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) positif sebesar 16,95 pada triwulan IV 2025. Ketahanan tersebut turut didukung oleh peningkatan kinerja pada beberapa LU utama, antara lain LU Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) serta LU Perdagangan, sejalan dengan membaiknya kinerja manufaktur negara mitra dagang¹⁹. Kinerja korporasi yang terjaga juga tecermin dari kondisi rentabilitas dan likuiditas yang tetap positif. Hasil SKDU menunjukkan bahwa 75,49% korporasi menilai rentabilitas pada triwulan IV 2025 berada dalam kondisi stabil, meskipun proporsinya menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, 73,40% korporasi menyatakan likuiditas berada dalam kondisi yang relatif sama, yang turut terkonfirmasi oleh perlambatan penghimpunan DPK korporasi di perbankan selama periode laporan.

19. Kinerja manufaktur negara mitra dagang, seperti AS, Jepang, Tiongkok, Eropa, Swiss, dan Vietnam, masing-masing meningkat dari 52,3; 50,5; 50,6; 52,2; 47,0; dan 52,0 menjadi 52,4; 51,5; 50,3; 49,5; 48,8; dan 52,5 (Sumber: *tradingeconomics*)

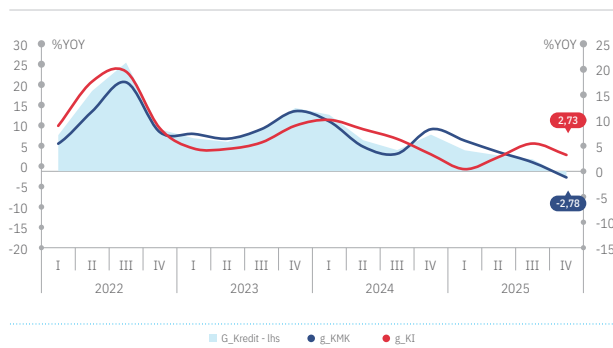
4.3.2. Eksposur Perbankan Pada Sektor Korporasi

4.3.2.1 Penyaluran Kredit Korporasi

Penyaluran kredit ke segmen korporasi pada triwulan IV 2025 tercatat mengalami kontraksi. Secara nominal, kredit korporasi mencapai Rp302,06 triliun dengan pertumbuhan terkontraksi sebesar 1,16% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 4.11). Kondisi tersebut sejalan dengan preferensi korporasi untuk melakukan *internal financing*, salah satunya tecermin dari perlambatan kinerja kredit pada lapangan usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan, meskipun suku bunga kredit terus menunjukkan penurunan secara *gradual*. Selain itu, perlambatan kinerja ekspor turut menekan kebutuhan pembiayaan modal kerja sehingga memoderasi permintaan kredit. Korporasi juga cenderung menahan ekspansi dan investasi baru dengan sikap *wait and see* di tengah ketidakpastian prospek permintaan ekspor.

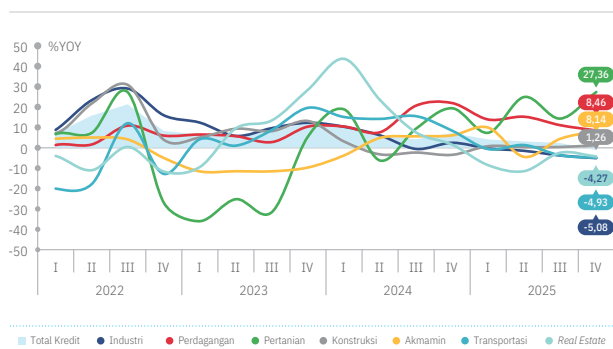
Meski demikian, kontraksi kredit yang lebih dalam tertahan oleh kebijakan perbankan yang menerapkan standar penyaluran kredit yang relatif lebih longgar²⁰. Kebijakan penyaluran kredit yang lebih longgar antara lain terdapat pada aspek biaya persetujuan kredit, jangka waktu kredit, dan suku bunga kredit. Selanjutnya, pada triwulan I 2026, standar penyaluran kredit diperkirakan lebih berhati-hati dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, tecermin dari Indeks *Lending Standard* (ILS) sebesar 2,75. Berdasarkan jenis penggunaan,

Grafik 4.11. Perkembangan Pertumbuhan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis



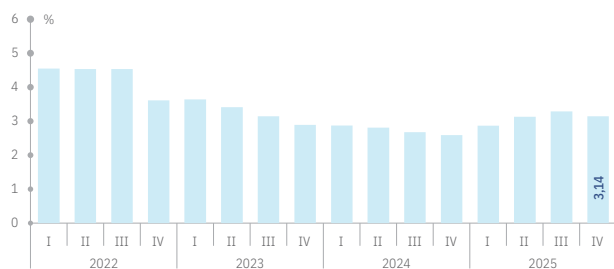
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.12. Perkembangan Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Utama Jawa Timur



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.13. Perkembangan Rasio NPL Kredit Korporasi



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

perlambatan terutama bersumber dari melambatnya kredit modal kerja (pangsa 69,32%) yang terkontraksi sebesar 2,78% (yoy) pada triwulan laporan. Sejalan dengan itu, kredit investasi korporasi (pangsa 30,59%) juga mencatatkan perlambatan dari 5,53% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 2,73% (yoy), seiring sikap *wait and see* korporasi terhadap ekspansi usaha di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Secara sektoral, perlambatan kredit korporasi terutama didorong oleh kontraksi pada lapangan usaha Industri Pengolahan serta perlambatan pada sektor Perdagangan (Grafik 4.12). Pada triwulan IV 2025, penyaluran kredit kepada LU Industri Pengolahan (pangsa 45,05%) mengalami kontraksi sebesar 5,08% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 3,08% (yoy) sejalan dengan penurunan kapasitas produksi Industri Pengolahan²¹. Penyaluran kredit kepada LU Perdagangan (pangsa 21,88%) juga melambat dari 11,07% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 8,46% (yoy) pada triwulan laporan, meskipun di tengah peningkatan daya beli masyarakat²². Di sisi lain, pelemahan kredit korporasi yang lebih dalam tertahan oleh perbaikan kinerja penyaluran kredit pada lapangan usaha (LU) pertanian (pangsa 2,05%) yang tumbuh sebesar 27,36% (yoy) pada triwulan laporan. Perbaikan tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja PDRB LU Pertanian Jawa Timur yang mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi pada triwulan IV 2025²³.

Risiko kredit korporasi tetap terjaga dan menunjukkan tren penurunan. Pada triwulan IV 2025, rasio NPL kredit korporasi di Jawa Timur masih berada di bawah *threshold* 5%, menurun dari 3,29% pada triwulan III 2025 menjadi 3,14% pada triwulan laporan (Grafik 4.13).

20. Berdasarkan Survei Perbankan, standar penyaluran kredit pada triwulan IV 2025 terindikasi lebih longgar, tecermin dari Indeks Lending Standard (ILS) untuk keseluruhan jenis kredit yang negatif -2,59% lebih rendah dari triwulan III 2025.

21. Berdasarkan data SKDU Bank Indonesia, Rata-rata kapasitas produksi industri pengolahan triwulan IV 2025 67,77% turun dari triwulan sebelumnya sebesar 70,69%.

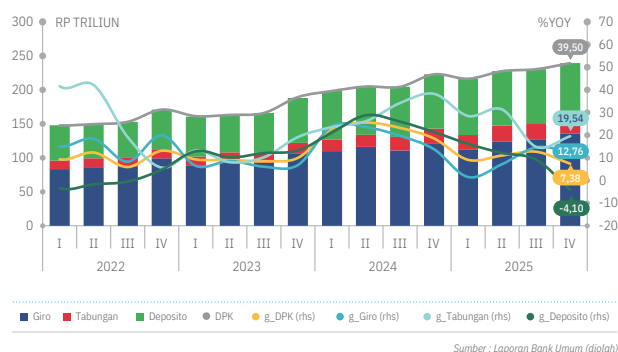
22. IKE triwulan IV 2025 berada pada angka 118,03, naik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yakni 110,56.

23. Kinerja PDRB LU pertanian tumbuh 6,01% (yoy) pada triwulan IV 2025, meningkat dibandingkan triwulan III 2025 sebesar 4,43% (yoy).

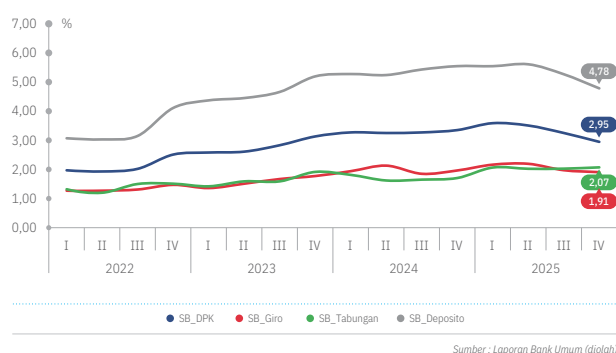
4.3.2.2 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Korporasi

Penghimpunan DPK korporasi perbankan tercatat lebih moderat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2025, DPK korporasi tercatat tumbuh sebesar 7,38% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 12,68% (yoy) (Grafik 4.14). Perlambatan tersebut sejalan dengan pembayaran bonus akhir tahun maupun pembagian dividen interim di tengah perlambatan kinerja ekspor serta preferensi korporasi dalam pemanfaatan *internal financing* untuk operasional kinerja di tengah ketidakpastian global yang tinggi. Berdasarkan komponennya, perlambatan pertumbuhan DPK korporasi terjadi pada komponen giro yang tumbuh melambat dari 14,63% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 12,76% (yoy) pada triwulan laporan, serta komponen deposito yang turun dari 9,17% (yoy) menjadi terkontraksi sebesar 4,10% (yoy) pada triwulan laporan. Pertumbuhan komponen tabungan tercatat sebesar 14,84% (yoy) juga melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 19,54% (yoy). Kondisi ini sejalan dengan preferensi pengelolaan dana korporasi yang berupaya mengoptimalkan dana internal untuk operasional. Komposisi DPK korporasi perbankan masih terkonsentrasi pada instrumen giro dan deposito, dengan pangsa masing-masing sebesar 56,79% dan 32,08% dari total DPK korporasi. Sementara itu, porsi tabungan relatif terbatas, yakni hanya 11,13%, mencerminkan preferensi korporasi terhadap instrumen yang lebih likuid dan fleksibel dalam mendukung kebutuhan transaksi serta pengelolaan arus kas.

Grafik 4.14. Pertumbuhan DPK Korporasi



Grafik 4.15. Perkembangan Suku Bunga Tertimbang DPK Korporasi



Suku bunga tertimbang DPK korporasi tercatat mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, sejalan dengan tren pelonggaran suku bunga di perbankan (Grafik 4.15). Pada triwulan IV 2025, suku bunga tertimbang DPK korporasi tercatat sebesar 2,95%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,25% sejalan dengan tren penurunan BI *Rate*. Penurunan suku bunga DPK terjadi pada komponen giro dari 1,97% menjadi 1,91% dan komponen deposito dari 5,27% menjadi 4,78%. Sementara itu, suku bunga tabungan terpantau sedikit meningkat dari 2,03% menjadi 2,07%.

4.4. Perkembangan Kinerja Rumah Tangga

4.4.1. Kinerja Umum Rumah Tangga

Kinerja Rumah Tangga (RT) di Jawa Timur tetap solid di tengah pertumbuhan penyaluran kredit yang tumbuh melambat. Kondisi ini terjadi seiring (i) preferensi rumah tangga yang cenderung menggunakan dana pribadi untuk kebutuhan konsumsi jangka pendek, (ii) dan moderasi peminatan terhadap pembelian properti dan kendaraan bermotor, yang tecermin dari perlambatan penyaluran KPR, KPA, dan KKB. Perlambatan kredit rumah tangga juga ditengarai seiring masih tingginya rerata tertimbang suku bunga kredit Rumah Tangga di tengah tren penurunan BI *Rate*. Namun demikian, kinerja rumah tangga masih tetap resilien, terutama didukung oleh berbagai stimulus Pemerintah dan Bank Indonesia, antara lain insentif PPN DTP sektor properti sebesar 100% hingga 31 Desember 2025, stimulus ekonomi melalui perpanjangan relaksasi LTV/FTV hingga rasio maksimum 100% dan relaksasi uang muka kredit kendaraan bermotor minimal 0% sampai akhir 2025. Di samping itu, kesinambungan insentif Pemerintah melalui program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan dan menjaga stabilitas kinerja rumah tangga (RT) pada triwulan laporan. Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya memperkuat daya beli dan kesejahteraan rumah tangga di wilayah tersebut melalui beberapa program strategis, di antaranya adalah pemberian insentif pajak PPh 21 bagi pekerja di sektor padat karya untuk meningkatkan *disposable income*. Selain itu, guna menyambut periode Natal dan Tahun Baru 2026, Pemerintah turut mengalokasikan stimulus ekonomi termasuk diskon tiket transportasi²⁴, dan Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 12.12 untuk mendorong konsumsi rumah tangga.

4.4.2. Eksposur Perbankan Pada Rumah Tangga

4.4.2.1 Penyaluran Kredit Rumah Tangga

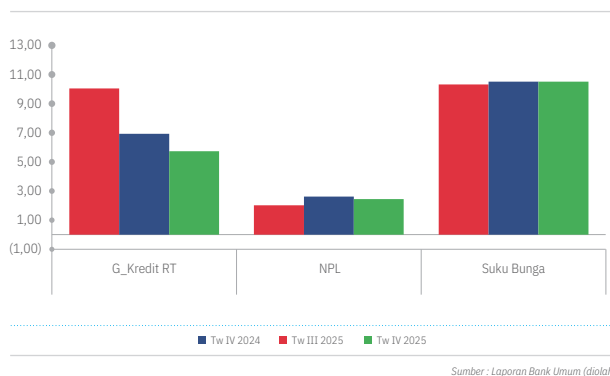
Penyaluran kredit RT tercatat tumbuh melambat pada triwulan IV 2025. Pada triwulan laporan, kredit RT tumbuh sebesar 5,73% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 6,93% (yoy) (Grafik 4.16).

24. Pematangan harga tiket kereta api (hingga 30%), angkutan laut (20%), dan tiket pesawat (13-14%) untuk mendorong mobilitas dan konsumsi di sektor pariwisata

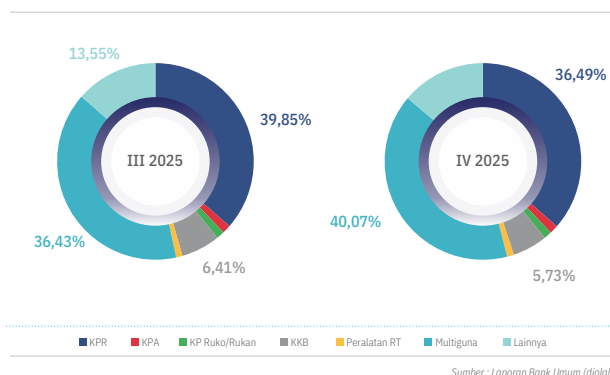
Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh preferensi rumah tangga yang cenderung menggunakan dana pribadi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jangka pendek, seiring dengan penurunan belanja ritel masyarakat. Selain itu, moderasi peminatan terhadap pembelian properti dan kendaraan bermotor juga turut menekan pertumbuhan kredit, yang tecermin dari perlambatan penyaluran KPR, KPA, dan KKB serta penurunan indeks konsumsi barang tahan lama²⁵. Berdasarkan jenisnya, perlambatan kredit RT terutama bersumber dari melambatnya penyaluran KPR, KKB, dan kredit multiguna, yang masing-masing memiliki pangsa sebesar 36,49%, 5,73%, dan 40,07% (Grafik 4.17). Di sisi lain, perlambatan yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan pertumbuhan penyaluran Kredit Peralatan Rumah Tangga (pangsa 1,13%).

Risiko kredit rumah tangga tetap terjaga, tecermin dari rasio *Non-Performing Loan (NPL)* yang masih berada di bawah ambang batas pengawasan kualitas aset. Pada triwulan IV 2025, rasio NPL kredit rumah tangga menurun dari 2,62% pada triwulan sebelumnya menjadi 2,45%, dan tetap berada di bawah *threshold* 5% (Grafik 4.16). Terkendalnya rasio NPL tersebut mencerminkan bahwa daya beli serta kemampuan bayar rumah tangga masih berada pada tingkat yang solid.

Grafik 4.16. Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga



Grafik 4.17. Pangsa Kredit RT Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kredit



Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPR dan KPA)

Kinerja penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tercatat melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 4.18). Pada triwulan IV 2025, penyaluran KPR tetap tumbuh positif sebesar 6,39% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 7,37% (yoy) pada triwulan III 2025. Perlambatan ini dipengaruhi oleh keterbatasan ketersediaan properti *ready stock* di Jawa Timur, khususnya jenis *landed house*, akibat penyerapan cepat PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% pada semester I 2025. Kondisi ini menghambat pemenuhan persyaratan serah terima dalam skema PPN DTP²⁶. Selain itu, proporsi Jawa Timur sebagai penerima manfaat KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya sekitar 6,58%, relatif kecil dibandingkan dengan provinsi lain dengan serapan lebih besar²⁷. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi KPR FLPP di Jawa Timur masih belum optimal sehingga terdapat ruang untuk meningkatkan akses pembiayaan perumahan bersubsidi. Perlambatan penyaluran KPR juga tecermin dari menurunnya pertumbuhan pada rumah tipe 22–70 m² dan tipe di atas 70 m², masing-masing melambat dari 9,19% (yoy) dan 5,61% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 8,40% (yoy) dan 4,35% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, penyaluran KPR untuk rumah tipe di bawah 21 m² tumbuh positif dari 8,00% (yoy) menjadi 11,00% (yoy), mencerminkan tetap kuatnya permintaan pada segmen menengah bawah.

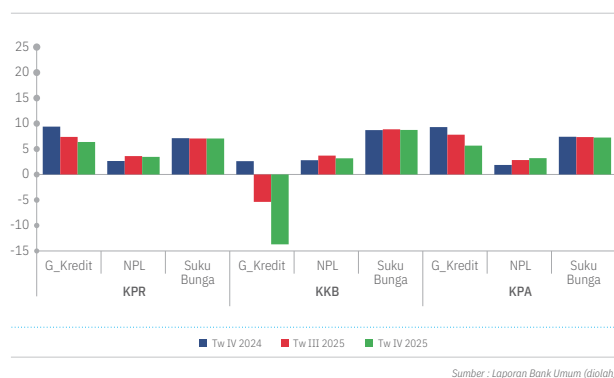
Kinerja KPR yang terus bertumbuh positif tidak lepas dari dukungan kebijakan akomodatif dari Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain insentif PPN DTP, Bank Indonesia melanjutkan kebijakan makprudensial yang bersifat akomodatif dan longgar hingga akhir tahun 2025²⁸ untuk mendorong penyaluran kredit perbankan. Perkembangan positif tersebut juga didukung kerangka regulasi OJK, antara lain: (i) POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dengan penetapan kualitas Aset Produktif untuk debitur dengan plafon sampai Rp5 miliar; (ii) SE OJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum, yang memberikan bobot risiko ATMR rendah untuk kredit properti rumah tinggal dibandingkan kredit lain, termasuk kredit korporasi; dan (iii) dukungan likuiditas untuk program 3 juta rumah, termasuk penyempurnaan skema EBA-SP di pasar modal, yang memungkinkan kelonggaran pembiayaan pengadaan lahan oleh pengembang sehingga berpotensi meningkatkan ketersediaan hunian *ready stock*. Selain itu, kebijakan yang bersifat akomodatif diperkuat oleh penawaran pembiayaan perbankan yang menjaga suku bunga KPR pada level relatif stabil dan cenderung menurun tipis, dari 7,06% pada triwulan III 2025 menjadi 7,05% pada triwulan IV 2025, sejalan dengan tren penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Untuk mendorong akselerasi penyaluran KPR pada semester II 2025, Pemerintah Pusat kembali memperpanjang insentif PPN DTP sektor properti sebesar 100% hingga 31 Desember 2025, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 15 Agustus 2025.

25. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia di wilayah Jawa Timur, indeks konsumsi barang tahan lama tercatat pada level 114,21 pada triwulan IV 2025, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 108,91.

26. Kebijakan PPN DTP 100% mensyaratkan rumah harus siap huni (*ready stock*) dan dilakukan berita acara serah terima (BAST) paling lambat Desember 2025.

27. Selama tahun 2025, Jawa Barat masih menjadi provinsi tertinggi penerima manfaat KPR FLPP di seluruh Indonesia dengan capaian 62.591 unit rumah (22,44%). Diikuti oleh provinsi lainnya yaitu Jawa Tengah (24.470 unit/8,77%), Sulawesi Selatan (23.255 unit/8,34%), Banten (18.966 unit/6,80%), Jawa Timur (18.361 unit/6,58%).

28. Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025, tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Grafik 4.18. Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga KPR, KPA dan KKB

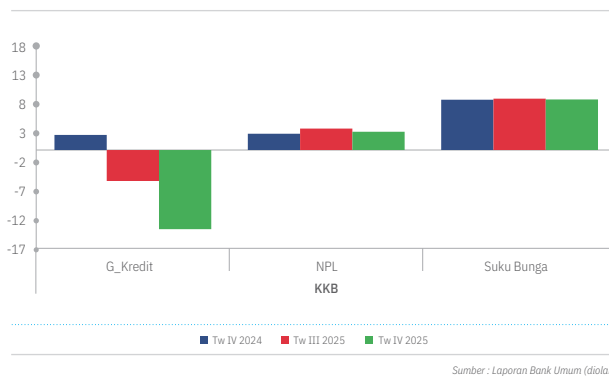
Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan penyaluran Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) tercatat melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 4.18). Kinerja penyaluran KPA menurun dari 7,82% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 5,67% (yoy) pada triwulan IV 2025. Perlambatan ini dipengaruhi oleh tantangan yang muncul sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025, yang mengatur batas waktu dua tahun untuk pembebasan lahan dan penyelesaian perizinan²⁹. Selain itu, masyarakat cenderung lebih sensitif terhadap isu ekonomi global dan tingkat suku bunga. Pada triwulan IV 2025, preferensi penempatan dana rumah tangga ditengarai masih cenderung *risk averse* sebagai respons terhadap potensi ketidakpastian pada awal 2026. Namun, perlambatan penyaluran KPA yang lebih moderat tertahan oleh ketersediaan apartemen *ready stock* yang lebih memadai dibandingkan *landed house*³⁰. Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2025, Pemerintah juga memperkuat Program 3 Juta Rumah melalui instrumen Kredit Program Perumahan (KPP), yang memfasilitasi kebutuhan dana pembangunan dan renovasi hunian bagi sektor UMKM, perorangan, hingga badan hukum. Kondisi ini turut didukung oleh penawaran suku bunga pembiayaan dari perbankan yang semakin moderat, yakni turun dari 7,34% pada triwulan sebelumnya menjadi 7,24% pada triwulan IV 2025. Selain itu, apartemen berlayanan di Surabaya masih diminati sebagai alternatif hunian sementara.

Kualitas kredit untuk sektor KPR dan KPA masih terkendali, di mana rasio NPL tetap berada di bawah standar pengawasan kualitas aset dengan maksimal 5%. Pada triwulan IV 2025, rasio NPL KPR tercatat sebesar 3,46%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada di level 3,62%. Sebaliknya, pada NPL KPA meningkat dari 2,84% pada triwulan III 2025 menjadi 3,20% pada triwulan laporan.

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Pertumbuhan penyaluran KKB tercatat melanjutkan tren kontraksi pada akhir triwulan IV 2025 (Grafik 4.19). Pada periode laporan, kinerja penyaluran KKB kembali berkontraksi sebesar 13,69% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang

terkontraksi sebesar 5,36% (yoy). Penurunan terutama terjadi pada KKB jenis mobil roda empat (pangsa 83,38%), yang berkontraksi sebesar 15,97% (yoy) pada triwulan laporan, lebih dalam dibandingkan pada triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 10,02% (yoy). Penurunan tersebut didorong oleh berakhirnya beberapa insentif pajak daerah untuk kendaraan bermotor per 30 November 2024, termasuk pembebasan Bea Balik Nama (BBN) II, penghapusan sanksi administratif, dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) progresif di Jawa Timur. Berakhirnya insentif tersebut diperkirakan menahan minat beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Fenomena serupa juga terjadi pada jenis kendaraan lain, seperti sepeda motor, truk, kendaraan roda enam atau lebih, yang turut menunjukkan kontraksi pertumbuhan. Penyaluran KKB untuk kendaraan roda dua (pangsa 14,35%) tercatat menurun signifikan, berkontraksi sebesar 3,11% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 21,39% (yoy). Sementara itu, KKB untuk truk dan kendaraan roda enam atau lebih mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 17,33% pada triwulan IV 2025. Hal ini terjadi meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerapkan kebijakan pemutihan PKB dan BBNKB melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/712/013/2025, berlaku sejak 1 Oktober hingga 30 November 2025, sebagai upaya mendorong penyaluran KKB dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara keseluruhan, risiko kredit KKB tetap terjaga dan berada di bawah *threshold* 5%, tecermin dari penurunan rasio NPL dari 3,70% pada triwulan III 2025 menjadi 3,16% pada triwulan IV 2025.

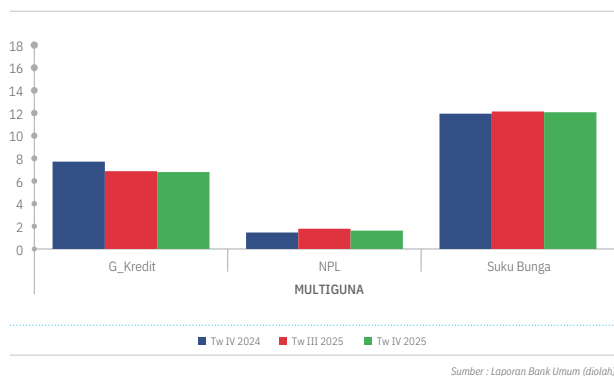
Grafik 4.19. Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga KKB

Kredit Multiguna

Laju ekspansi kredit multiguna menunjukkan tren melambat pada periode laporan, sejalan dengan dinamika kredit rumah tangga secara umum (Grafik 4.20). Kredit multiguna tumbuh positif pada triwulan IV 2025 sebesar 6,79% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,86% (yoy). Perlambatan terjadi pada hampir seluruh tipe kredit multiguna beragunan. Deselerasi tersebut diindikasikan sebagai dampak dari normalisasi konsumsi masyarakat setelah berakhirnya siklus belanja libur sekolah dan persiapan tahun ajaran baru.

29. Berdasarkan informasi anekdot, proses pembebasan lahan di lapangan kerap memakan waktu panjang. Di sejumlah wilayah di Jawa Timur, pengumpulan lahan dalam satu hamparan dapat berlangsung hingga lima sampai enam tahun.

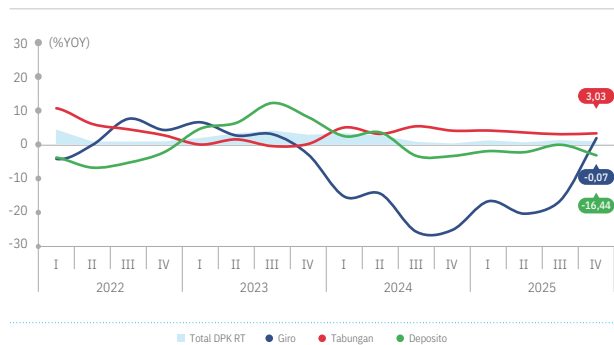
30. Hasil liaison dengan pengembang properti di Jawa Timur.

Grafik 4.20. Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga Kredit Multiguna

Masyarakat cenderung menahan kewajiban baru di akhir tahun untuk menjaga fleksibilitas dana bagi kegiatan konsumtif jangka pendek, seperti liburan Natal dan Tahun Baru. Lebih lanjut, masyarakat kembali fokus pada pengeluaran rutin, sehingga permintaan kredit multiguna untuk membiayai kebutuhan bernilai besar menjadi lebih rendah. Kendati demikian, risiko kredit multiguna tetap terkendali, berada di bawah *threshold* 5%, dan tercatat menurun dari 1,79% pada triwulan III 2025 menjadi 1,62% pada triwulan IV 2025.

4.4.2.2 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga

Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga (DPK RT) di Jawa Timur tercatat tumbuh positif pada triwulan IV 2025. Pada periode laporan, penghimpunan DPK RT mencapai Rp508,90 triliun atau tumbuh 0,90% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,32% (yoy) (Grafik 4.21). Tabungan menjadi motor utama pertumbuhan DPK RT pada triwulan IV 2025. Hal ini tecermin dari kenaikan laju pertumbuhan sebesar 3,29% (yoy), meningkat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,03% (yoy). Kinerja giro tumbuh signifikan sebesar 1,88% (yoy) pada triwulan IV 2025, setelah mengalami kontraksi tajam sebesar -16,44% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan tabungan dan giro terutama didorong oleh melandainya tingkat suku bunga DPK³¹. Dengan imbal hasil yang rendah, rumah tangga cenderung mengalihkan

Grafik 4.21. Perkembangan Pertumbuhan DPK RT

31. Berdasarkan Laporan Bank Umum, suku bunga DPK terpantau turun dari 2,20% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 2,03% (yoy) pada triwulan laporan

dana ke simpanan jangka pendek untuk membiayai kebutuhan belanja rutin. Penurunan suku bunga DPK juga berdampak pada kontraksi deposito sebesar 3,29% (yoy) pada akhir 2025. Secara komposisi, DPK RT masih didominasi oleh tabungan (62,67%), diikuti deposito (34,84%) dan giro (2,49%).

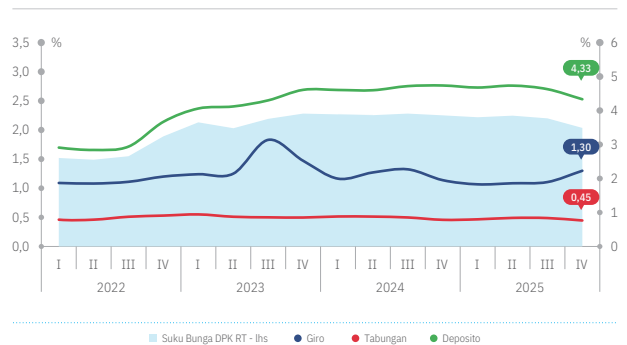
Suku bunga tertimbang Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga (DPK RT) tercatat mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2025, suku bunga tertimbang DPK RT sebesar 2,03%, turun dari 2,20% pada triwulan III 2025. Penurunan ini tecermin pada suku bunga tabungan, yang melandai dari 0,49% menjadi 0,45%, serta suku bunga deposito, yang menurun dari 4,63% menjadi 4,33%. Berbeda dengan komponen simpanan lainnya, suku bunga giro justru meningkat, dari 1,11% menjadi 1,30% pada periode laporan. Tren melandainya suku bunga DPK RT sejalan dengan penurunan BI *Rate*, mencerminkan penyesuaian pasar terhadap kebijakan moneter yang lebih longgar.

4.5. Perkembangan Akses Keuangan dan UMKM

4.5.1. Eksposur Perbankan Pada UMKM

Keterlibatan sektor perbankan dalam pembiayaan UMKM tetap solid. Pada triwulan IV 2025, porsi penyaluran kredit UMKM di Jawa Timur tercatat sebesar 30,80% dari total kredit, melampaui target pangsa kredit UMKM nasional yang ditetapkan Pemerintah sebesar 30% (Grafik 4.23). Dominasi pangsa kredit UMKM ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sektor perbankan dalam mempererat sinergi untuk mengoptimalkan peran UMKM sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi daerah, sejalan dengan posisi UMKM sebagai kontributor utama stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Penyaluran kredit kepada sektor UMKM tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,65% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,95% (yoy) (Grafik 4.24). Total penyaluran kredit UMKM tercatat sebesar Rp224,27 triliun pada triwulan IV 2025. Dari jenis penggunaannya, penurunan pertumbuhan kredit UMKM terutama disebabkan oleh kontraksi tajam pada Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar 4,79% (yoy) dibandingkan triwulan

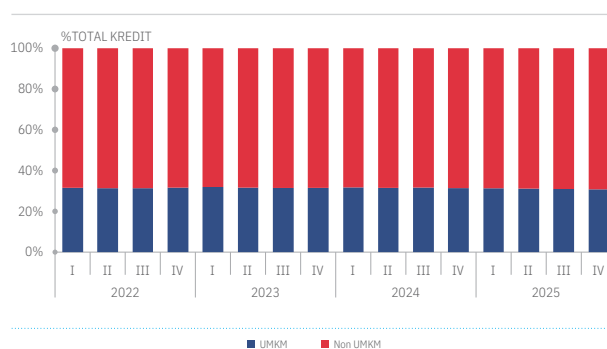
Grafik 4.22. Perkembangan Suku Bunga Tertimbang DPK RT

sebelumnya tumbuh sebesar 0,76% (yoy). Berdasarkan skala usaha, deselerasi penyaluran kredit UMKM terjadi di semua lini. Laju kredit UMKM skala kecil melambat dari 8,79% (yoy) menjadi 6,87% (yoy), sedangkan UMKM skala mikro dan menengah masing-masing terkontraksi dari sebesar 3,95% (yoy) dan 0,03% (yoy) menjadi terkontraksi sebesar 5,65% (yoy) dan 1,03% (yoy). Struktur penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV 2025 masih didominasi segmen mikro dengan porsi 44,88%, diikuti skala kecil sebesar 34,79%, dan skala menengah 20,33% dari total kredit.

Berbagai stimulus kebijakan pada sisi penawaran dan permintaan telah diberikan untuk mendukung kinerja penyaluran kredit UMKM. Penguatan kebijakan insentif likuiditas makprudensial (KLM) pada periode laporan dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui percepatan penurunan suku bunga kredit perbankan, dengan memberikan insentif lebih besar bagi bank yang responsif terhadap penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Selain itu, pemberian kemudahan akses penyaluran pembiayaan UMKM oleh Bank dan Lembaga keuangan nonbank (LKNB)³² berkontribusi pada pemberdayaan UMKM sekaligus meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pemerintah memperpanjang pemberian stimulus sosial pada triwulan IV 2025 melalui kebijakan diskon iuran Jaminan Kelecaaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta penyaluran bantuan pangan periode Oktober–November 2025 berupa 10 kg beras per keluarga penerima manfaat dengan total alokasi anggaran mencapai Rp7 triliun. Pemerintah juga memperkuat sektor riil melalui Program Layanan Tambahan (MLT) perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan, serta optimalisasi Program Padat Karya Tunai oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Upaya ini dibarengi percepatan deregulasi melalui PP No. 28 Tahun 2025 untuk mengintegrasikan sistem K/L ke dalam OSS, serta pelaksanaan program perkotaan yang fokus pada kualitas permukiman dan penyediaan ruang bagi pekerja *gig economy*.

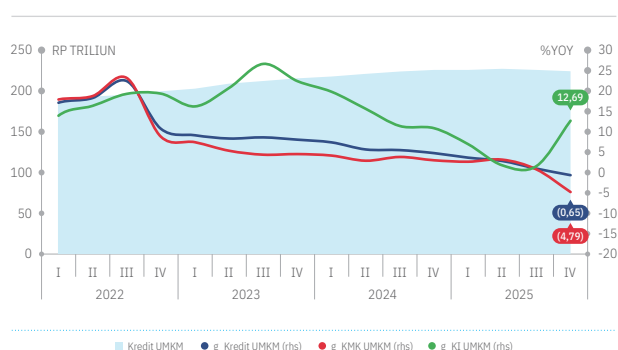
Pemerintah juga memperkuat sektor riil melalui Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan serta optimalisasi Program Padat Karya Tunai oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU. Upaya ini dibarengi dengan percepatan deregulasi PP No. 28 Tahun 2025 guna mengintegrasikan sistem K/L ke dalam OSS, serta pelaksanaan program perkotaan yang fokus pada kualitas permukiman dan penyediaan ruang bagi pekerja *gig economy*. Proyeksi penguatan kinerja UMKM ke depan diperkirakan didukung oleh penetapan tarif PPh Final 0% bagi pelaku usaha beromzet di bawah Rp500 juta dan 0,5% untuk omzet di bawah Rp4,8 miliar secara permanen. Kebijakan ini diperkirakan akan memperkuat kapasitas internal UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan pembiayaan perbankan secara lebih optimal.

Grafik 4.23. Share Kredit UMKM Terhadap Total Kredit di Jawa Timur



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik 4.24. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM Perbankan di Jawa Timur



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

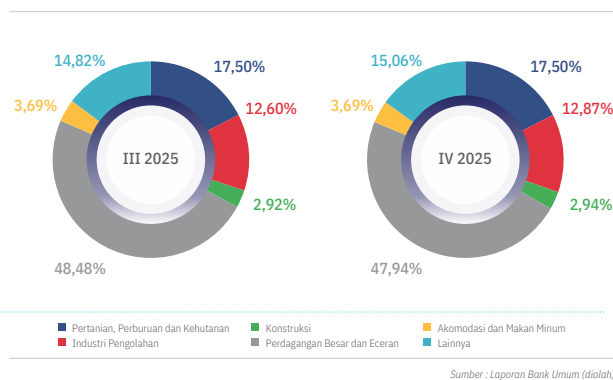
Dari sisi penawaran, Bank Indonesia memperkuat dukungannya melalui implementasi KLM dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makprudensial (RPIM), yang dirancang untuk mendorong perbankan memperluas jangkauan kredit UMKM. Pada triwulan IV 2025, perbankan di Jawa Timur telah memanfaatkan insentif KLM berupa pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) maksimal sebesar 4,5%³³. Tambahan likuiditas dari insentif GWM ini dimanfaatkan perbankan untuk memperkuat fungsi intermediasi, termasuk mendukung Program Kredit Sejahtera (Prokesra) Pemprov Jatim dan Bank UMKM Jatim melalui fasilitas bunga rendah 3%. Langkah ini didukung kemudahan akses pembiayaan yang selaras dengan implementasi POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM. POJK tersebut mewajibkan perbankan dan LKNB menyediakan skema pembiayaan UMKM yang mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif melalui penyederhanaan persyaratan administratif, sehingga memperluas akses modal bagi seluruh pelaku usaha.

Kredit UMKM di Jawa Timur terkonsentrasi pada LU Perdagangan, LU Pertanian, dan LU Industri Pengolahan, yang merupakan tiga kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur. Proporsi penyaluran ke sektor-sektor tersebut masing-masing sebesar LU Perdagangan (47,94%), LU Pertanian (17,50%), dan LU Industri Pengolahan (12,87%) (Grafik 4.25). Secara sektoral, pertumbuhan kredit UMKM mencatatkan kinerja yang bervariasi. LU Perdagangan, Pertanian, Industri Pengolahan, dan Akamamin terpantau mengalami perlambatan. Sebaliknya, LU Konstruksi menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan yang meningkat pada periode laporan (Grafik 4.26).

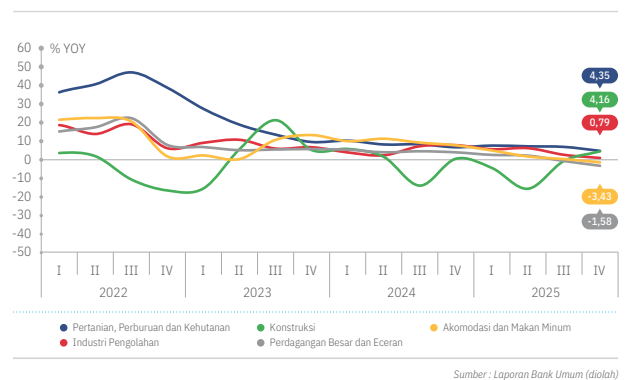
32. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berlaku pada 2 November 2025.

33. Berdasarkan Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Desember 2025, BI menyesuaikan besaran insentif KLM yang berasal dari penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (lending channel) dari semula paling tinggi sebesar 5% menjadi paling tinggi sebesar 4,5%.

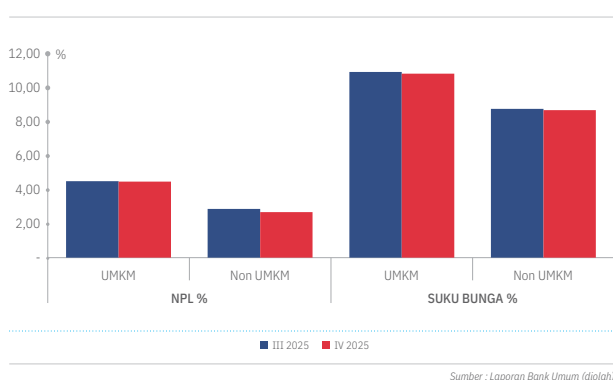
Grafik 4.25. Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Sektoral



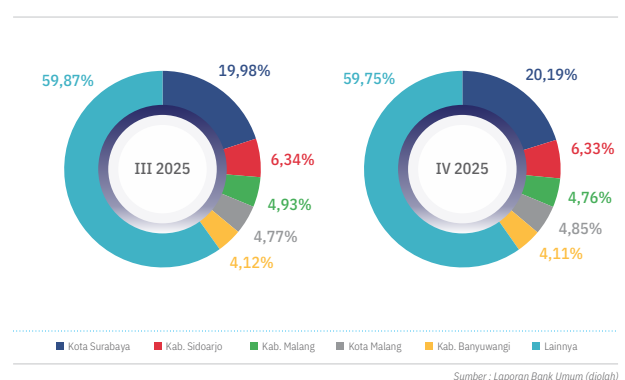
Grafik 4.26. Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM Sektoral



Grafik 4.27. Perkembangan NPL dan Suku Bunga Tertimbang Kredit UMKM



Grafik 4.28. Proporsi Penyaluran Kredit UMKM Terbesar di Kabupaten/Kota di Jawa Timur

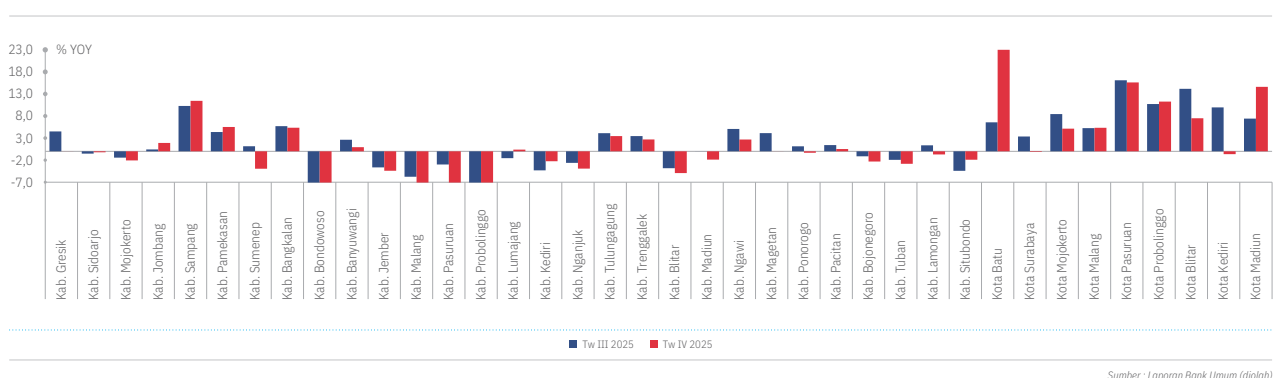


Kualitas kredit UMKM di Jawa Timur terjaga di bawah ambang batas risiko. Rasio NPL kredit UMKM pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 4,47%, stabil dengan kecenderungan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,49% (Grafik 4.27). Kualitas kredit UMKM yang tetap terjaga diduga didukung oleh pelaksanaan PP Nomor 47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, Prokesra (Bunga 3%) untuk meringankan beban agunan sehingga mencegah potensi macet baru, serta POJK 19/2025 yang melakukan penghapusan piutang macet memungkinkan UMKM yang sebelumnya masuk "daftar hitam" karena faktor di luar kendali. Peraturan ini memberikan payung hukum bank dan LKNB BUMN untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih atas kredit macet UMKM sehingga memperkuat struktur keuangan lembaga serta mendorong reaktivasi

pembiayaan sektor riil. Meskipun kebijakan ini memberikan peluang besar bagi pemulihan ekonomi, pelaksanaannya diperkirakan menghadapi tantangan operasional, terutama terkait kompleksitas verifikasi kriteria debitur dan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) oleh perbankan untuk memitigasi risiko penurunan kualitas kredit di masa mendatang. Di sisi lain, suku bunga tertimbang kredit UMKM tercatat turun sejalan dengan tren penurunan BI Rate, yakni dari 10,93% pada triwulan sebelumnya menjadi 10,83% pada triwulan laporan (Grafik 4.27).

Secara spasial, penyaluran kredit UMKM di Jawa Timur terkonsentrasi di Kota Surabaya sebagai wilayah dengan penyerapan modal tertinggi. Konsentrasi spasial kredit UMKM

Grafik 4.29. Pertumbuhan Penyaluran Kredit UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Jawa Timur



di Jawa Timur tecermin dari dominasi tiga wilayah dengan pangsa tertinggi, yakni Kota Surabaya (pangsa 20,19%), Kabupaten Sidoarjo (pangsa 6,33%), dan Kota Malang (pangsa 4,85%) (Grafik 4.28). Pusat penyaluran kredit UMKM mengikuti klaster ekonomi utama Jawa Timur a.l. Kota Surabaya sebagai pusat bisnis, Kabupaten Sidoarjo sebagai basis industri, dan Kota Malang sebagai destinasi pariwisata unggulan Jawa Timur. Pertumbuhan kredit UMKM di sebagian besar Kabupaten/Kota Jawa Timur pada triwulan IV 2025 terpantau lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025, menunjukkan pelemahan permintaan pembiayaan yang merata di tingkat daerah (Grafik 4.29).

4.5.2. Perkembangan Program Akses Keuangan dan UMKM

Dalam rangka mendukung peran *strategic advisor* Pemerintah Daerah dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Timur melaksanakan program pengembangan UMKM serta Ekonomi Syariah. Sinergi dan kolaborasi *pentahelix* antarpemangku kepentingan menjadi elemen penting dalam memperkuat fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas melalui peningkatan kapasitas UMKM. Sejalan dengan tujuan dimaksud, terdapat 3 (tiga) pilar implementasi kebijakan, yaitu korporatisasi (penguatan kelembagaan), peningkatan kapasitas (SDM dan usaha), dan perluasan akses pembiayaan sebagaimana yang dilaksanakan oleh KPwBI Provinsi Jawa Timur pada triwulan IV 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembangan Klaster Tanaman Pangan dan Potensi Ekspor

a. Pengembangan Klaster Pangan Strategis

Sebagai upaya mendukung strategi 4K pengendalian inflasi, khususnya pada pilar ketersediaan pasokan, KPwBI Provinsi Jawa Timur melaksanakan program pengembangan kelompok tani/klaster. Program ini mencakup asesmen pembentukan kelompok tani yang fokus pada komoditas ketahanan pangan di Jawa Timur, dengan tujuan mendukung stabilitas inflasi pangan. Pelaksanaan kajian ini bertujuan untuk menentukan target pengembangan klaster baru guna meningkatkan produksi dan menstabilkan pasokan di daerah sentra. Berdasarkan hasil kajian tersebut, KPwBI Provinsi Jawa Timur telah melakukan pengembangan melalui pendampingan terhadap 4 (empat) klaster pangan dan 2 (dua) klaster potensial ekspor, antara lain sebagai berikut:

1) Klaster Bawang Merah Kabupaten Pamekasan

KPwBI Provinsi Jawa Timur bersama pemangku kepentingan terkait melaksanakan pendampingan pengembangan klaster bawang merah di Pamekasan dengan mengacu pada *Good Agricultural Practices* (GAP). Implementasi GAP berhasil meningkatkan produktivitas sebesar 28,43% (yoy), dari 8,50 ton/ha menjadi 10,9 ton/ha. Selain itu, penggunaan teknologi *sprinkler* dan

lightrap turut membantu menekan biaya produksi hingga 32%.

2) Klaster Cabai Rawit Tuban

Dalam rangka mendukung ketersediaan pasokan komoditas cabai, KPwBI Provinsi Jawa Timur melakukan pendampingan Klaster Cabai Rawit Tuban melalui implementasi agen hayati dan pupuk kompos. Pemanfaatan media tersebut meningkatkan produktivitas sebesar 25,25% (yty), dari 4,95 ton/ha menjadi 6,2 ton/ha. Pada sisi hilir, kelompok tani telah mampu memproduksi olahan cabai rawit yang dipasarkan melalui *e-commerce* sejak 2024.

3) Klaster Padi Kabupaten Lamongan

KPwBI Provinsi Jawa Timur telah memfasilitasi pendampingan program pengembangan budidaya padi melalui penggunaan agen hayati, pupuk organik cair, dan pestisida nabati. Pendampingan ini meningkatkan produktivitas sebesar 11,07% (yoy), dari 8,4 ton/ha menjadi 9,33 ton/ha. Selain itu, produksi beras meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang hanya terfokus pada produksi GKP (Gabah Kering Panen). Peningkatan produktivitas juga didukung oleh penerapan *digital farming* di hulu, termasuk *drip irrigation* dan *smart monitoring controller*.

4) Klaster Sapi Potong Kabupaten Bojonegoro

Pendampingan budidaya sapi potong di Bojonegoro dilakukan melalui penerapan *bio-security* dalam pembibitan dan penggemukan, pengolahan pakan, produksi pupuk organik, pengolahan pangan, serta optimalisasi reproduksi melalui inseminasi buatan (IB) sapi Peranakan Ongole (PO). Program ini meningkatkan potensi kelahiran betina sebesar 33,33%, dari 9 (sembilan) menjadi 12 (dua belas) potensi kelahiran pasca pelaksanaan program, sekaligus menghasilkan olahan daging sapi. Untuk mendukung operasional klaster, KPwBI Provinsi Jawa Timur menyediakan mobil distribusi guna meningkatkan efisiensi logistik serta perlengkapan kelembagaan untuk memperkuat struktur organisasi klaster.

b. Pengembangan Klaster Potensial Ekspor

1) Klaster Kopi Jombang

Dalam rangka mendukung pengembangan klaster unggulan daerah yang berorientasi ekspor, KPwBI Provinsi Jawa Timur melaksanakan program pendampingan pada Klaster Kopi di Jombang dengan fokus pada *specialty coffee*, yaitu Liberica/Excelsa. Sebagai bagian dari upaya memperluas jaringan pasar, Klaster Kopi Wonosalam telah melakukan realisasi ekspor kopi Excelsa ke berbagai negara melalui program *business matching* yang difasilitasi oleh

Bank Indonesia maupun pihak lain. Hingga triwulan IV 2025, klaster ini telah mampu memproduksi berbagai varian kopi secara mandiri, mulai dari *green bean*, *roasted bean*, hingga kopi bubuk.

2) Klaster Kopi Trawas

Sejalan dengan upaya pengembangan kopi sebagai komoditas ekspor potensial, KPwBI Provinsi Jawa Timur telah melakukan pendampingan peningkatan kapasitas Klaster Kopi di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Hingga triwulan IV 2025, kelompok tani yang terlibat dalam program pendampingan berhasil meningkatkan kualitas *green bean* dengan *cupping score* di atas 80 dan kapasitas produksi dari 9 kuintal/tahun menjadi 1,5 ton/tahun.

2. Monitoring terhadap Klaster yang telah *Phasing Out*

Selain melakukan *monitoring* terhadap klaster binaan eksisting, KPwBI Provinsi Jawa Timur melakukan *monitoring* kepada klaster binaan yang telah *phasing out* untuk mempertahankan kualitas klaster. Klaster yang telah *phasing out* diantaranya sebagai berikut:

a. Klaster Padi Organik Kabupaten Mojokerto

Klaster ini mengimplementasikan pertanian organik yang telah tersertifikasi halal dan organik. Selain itu, telah diterapkan *digital farming* pada sisi hulu melalui penggunaan teknologi *drone* untuk proses pemupukan, yang terbukti mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi sebesar 15%. Di sisi hilir, klaster padi organik aktif melakukan pemasaran digital melalui media sosial dan *e-commerce* sebagai strategi perluasan pemasaran guna meningkatkan penjualan.

b. Klaster Jagung Madura

Dalam pengembangannya, klaster menggunakan varietas bibit unggul jagung Madura 3 yang telah mencapai peningkatan produktivitas jagung dari yang sebelumnya 3 ton/Ha menjadi 7,1 ton/Ha. Secara lebih spesifik, teknik budidaya untuk 50% petani klaster jagung ini menggunakan *integrated farming* yang memungkinkan untuk memanfaatkan limbah peternakan menjadi pupuk. Di sisi hilir, klaster telah berhasil memasarkan produk olahan/turunan berupa *tatocis (tortilla)* berbahan jagung yang telah dipasarkan melalui pasar modern, dan briket yang berasal dari limbah bonggol jagung sebagai alternatif pengganti bahan bakar.

c. Klaster Sapi Kabupaten Tuban

Klaster Sapi Tuban telah berhasil menerapkan teknik budidaya sapi potong yang terintegrasi dari hulu ke hilir sehingga mampu meningkatkan produktivitas hingga 200%. Di sisi hilir, klaster bekerja sama dengan *platform* penjualan *online (marketplace)* untuk memperluas pemasaran produk, yang tecermin dari peningkatan transaksi penjualan secara *rolling out*.

3. Penyelenggaraan Sarana Akselerasi Klaster Agribisnis Jawa Timur (SAKA JATIM)

Dalam rangka mendukung penguatan ketahanan pangan, KPwBI Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah se-Jawa Timur melakukan kurasi dan pemilihan kelompok/klaster tani potensial. SAKA JATIM bertujuan menjaring kelompok tani komoditas strategis yang dapat dikembangkan secara *multiyears*. Tercatat 31 (tiga puluh satu) klaster dari 7 (tujuh) komoditas, yaitu Padi, Cabai, Bawang Merah, Sapi, Ayam, dan Kopi yang mengikuti program *capacity building*. Klaster-klaster tersebut dimonitor dan dievaluasi selama 6 (enam) bulan untuk mengidentifikasi penerapan *good agricultural practices*. Selain itu, terdapat 3 (tiga) kelompok yang mendapatkan dukungan sarana prasarana penunjang pertanian guna memperkuat klaster sebagai wujud dukungan terhadap kerangka 4K Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pada 2026, peserta SAKA JATIM diharapkan menjadi target program pengembangan untuk peningkatan produktivitas, efisiensi biaya produksi, dan perluasan pemasaran.

4. Peningkatan Kapasitas dan Promosi Perdagangan UMKM

a. Pelaksanaan *Java Coffee & Flavour Festival*

Java Coffee & Flavour Festival (JCFF) 2025 merupakan *event* tahunan yang diinisiasi oleh KPwBI Prov. Jawa Timur sebagai *event* strategis untuk mengintegrasikan nilai, sejarah, dan filosofi komoditas unggulan dalam mendukung pengembangan komoditas nasional. Melalui pendekatan yang holistik, festival ini memposisikan diri sebagai etalase utama bagi komoditas potensial ekspor Indonesia, khususnya pada komoditas kopi, rempah-rempah, dan cokelat. JCFF 2025 mengangkat tema “*Crafting Futures Through Local Flavors*” dengan rangkaian kegiatan yang terdiri dari *Educoffee (workshop dan talkshow)*, *JCFF competition*, *business matching* dan *showcasing* UMKM dan *hall of fame*, serta promosi digital melalui penggunaan QRIS di kawasan Kota Lama. Selain itu, untuk mendorong ekonomi kreatif pada sektor *fashion* dan *craft* juga dilaksanakan program *BI fashionpreneur* dan semarak JCFF. Adapun capaian *Business Matching* (BM) pembiayaan senilai Rp79,51 miliar, *Business Matching* (BM) perdagangan mencapai Rp28,06 miliar. Selain itu, transaksi *showcase* tercatat sebesar Rp809,24 juta dengan total kunjungan mencapai 32.132 orang, festival ini berhasil menarik perhatian luas dan memberikan manfaat ekonomi bagi UMKM kopi, rempah-rempah, dan cokelat di Jawa Timur.

b. Pelaksanaan UMKM Jatim *Go Export*

Dalam upaya mendorong UMKM potensial ekspor, KPwBI Prov. Jawa Timur melakukan pengembangan UMKM berorientasi ekspor melalui 2 (dua) strategi yaitu *pull strategy (market driven)* melalui pameran dan kurasi nasional atau internasional dan *push strategy* (melalui peningkatan kapasitas, sertifikasi, digitalisasi, akses pemasaran). Program UMKM Jatim *Go Export* diikuti

oleh 45 (empat puluh lima) UMKM pada sektor makanan dan minuman, komoditas, *craft*, dan *home decor* dari wilayah kerja KPwBI Jawa Timur dan perwakilan UMKM unggulan dari KPwBI se-Jawa Timur. Dalam melaksanakan program ini KPwBI Provinsi Jawa Timur bersinergi dengan Akademi Mudah Ekspor (AME) sebagai praktisi UMKM *Go Export*. Materi pelatihan ekspor *Basic to Advanced* mencakup peluang dan tantangan ekspor, riset pasar ekspor, potensi negara tujuan ekspor, strategi menemukan buyer untuk pasar ekspor, perhitungan harga jual sesuai negara potensial, regulasi dan sertifikasi ekspor (*incoterms*, regulasi ekspor, legalitas, sertifikasi ekspor). Lebih lanjut, UMKM *Go Export* juga diberikan pelatihan oleh Atase Perdagangan Beijing terkait strategi pemasaran dan negosiasi bisnis (*market brief*), pemasaran ekspor, bisnis digital, dan Inovasi produk ekspor serta *success story* oleh UMKM Binaan Bank Indonesia. Selain itu KPwBI Provinsi Jawa Timur juga bekerjasama dengan perbankan di Jawa Timur dalam peningkatan akses pembiayaan UMKM dengan skema ekspor.

c. **Pelaksanaan Kencana Loka**

Dalam rangka meningkatkan kapasitas UMKM KPwBI Prov. Jawa Timur melaksanakan Program Kencana Loka (Kreativitas *Entrepreneur* Nusantara dalam Cita Rasa dan Busana) yang dilaksanakan pada tahun 2025 dengan program lanjutan hingga bulan April 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) UMKM potensial yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) UMKM makanan dan minuman dan 25 (dua puluh lima) UMKM *fashion*. Materi program Kencana Loka terdiri dari *food safety* (*food handler*, pembuatan SOP, dan HACCP), *food cost pricing strategy*, *shelf life product*, eksplorasi citarasa, narasi produk, *packaging*, *effective business* UMKM dan development produk sesuai standar global. Pada sektor *fashion* KPwBI Jatim bersinergi dengan IFC sekaligus Dewan IKRA untuk materi terkait *branding* (*DNA brand*, *positioning*, *storytelling* berbasis wastra Jawa Timur), riset tren pasar global (tren *fashion* 2025–2026, peluang pasar potensial, *consumer behavior*), analisis SWOT produk, *sustainability* bisnis *product development*, standarisasi (*quality control*, *packaging*, *sizing internasional*), pemasaran digital (*marketplace global*, *digital marketing*, *buyer approach*), serta *showcasing* dan *networking* (*fashion show*, *trade fair*, *business matching*).

d. **Pelaksanaan Promosi Perdagangan**

KPwBI Provinsi Jawa Timur memfasilitasi promosi produk UMKM potensial ekspor melalui koordinasi dengan K/L di pusat maupun luar negeri, dengan target negara mitra dagang prioritas dengan *outcome* berupa transaksi penjualan, *purchase order*, dan *Letter of Intent* (LoI) bagi UMKM. Sepanjang 2025, partisipasi dilakukan dalam 10 (sepuluh) Misi Dagang, serta berbagai pameran seperti FOODEX, FHA, Jeddah Expo, Jatim Fair, TEI, dan INACRAFT, dan berbagai promosi perdagangan lainnya.

e. **Capacity building** pengembangan UMKM Pangan, Nonpangan, Pariwisata, dan Pelaku Usaha Syariah (PUS). Kegiatan ini diikuti 180 peserta dan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta daya saing pelaku UMKM dan PUS, agar mampu berinovasi, beradaptasi dengan perkembangan pasar, serta memperluas akses ke pembiayaan dan jaringan usaha.

f. **Refreshment Pengisian SIKEPANG dan Laporan Bulanan Ekonomi Syariah**, sebagai upaya monitoring perkembangan UMKM dan usaha pondok pesantren. KPwBI Provinsi Jawa Timur melakukan pengisian laporan SIKEPANG dari 67 UMKM serta laporan bulanan PUS dari 21 pondok pesantren.

g. **Focus Group Discussion (FGD) Prospek Pengembangan Linkage Bisnis** antar pelaku UMKM, klaster, dan pesantren. FGD ini diselenggarakan untuk menumbuhkan *linkage* bisnis antar sektor serta melakukan *knowledge sharing* terkait model dan strategi bisnis, mencakup produksi, penjualan, dan pemasaran.

h. **Studi Banding**, sebagai strategi pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui peningkatan kapasitas SDM agar target dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Untuk mempercepat tujuan tersebut, studi banding dilakukan ke beberapa lokasi, antara lain UMKM Joglo Ayu Yogyakarta, Coklat Monggo Yogyakarta, Sweet Sundae–Yogyakarta, serta Sabila Farm, yang menunjukkan pertumbuhan akseleratif dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Kegiatan ini diharapkan mendorong UMKM saling berbagi praktik tata kelola bisnis, mulai dari proses produksi, pengemasan, penerapan teknologi, hingga pemasaran produk berkualitas ekspor.

i. **Forum Harmonisasi (FORHAR) Pengembangan UMKM dan Ekonomi Syariah**

Sebagai upaya meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan UMKM serta ekonomi syariah, telah dilaksanakan Forum Harmonisasi (Forhar) UMKM dengan tujuan, yaitu menyelaraskan program pengembangan UMKM dan ekonomi syariah antar lembaga/instansi agar saling mendukung dan tidak tumpang tindih; memperkuat sinergi antar instansi melalui kolaborasi program; mengkinikan data UMKM potensial ekspor untuk *presentation book* serta memperbarui isu terkini terkait pengembangan UMKM dan ekonomi syariah.

5. **Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah**

a. **Pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Regional Jawa Tahun 2025**

Dalam rangka mendukung pilar pengembangan ekonomi syariah serta sebagai upaya mewujudkan Indonesia dan Jawa Timur sebagai pusat industri halal dunia, KPwBI Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Regional Jawa Tahun 2025 pada tanggal 12–14 September 2025. Capaian yang dihasilkan adalah komitmen pembiayaan

dan perdagangan pelaku usaha masing-masing sebesar Rp29,66 miliar dan Rp25,14 miliar. Hal tersebut juga didukung oleh tingginya antusias masyarakat Jawa Timur yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan *showcase*. Tercatat nilai transaksi *showcasing* UMKM serta Pelaku Usaha Syariah sebesar Rp7,34 miliar. Selain itu, capaian perluasan wakaf juga tercatat tinggi dengan nominal sebesar Rp3,05 miliar.

b. **Sertifikasi Halal.**

KPwBI Provinsi Jawa Timur melaksanakan proses pendaftaran dan pendampingan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM dan/atau pelaku usaha pesantren sejak tahun 2021. Hingga akhir 2025, tercatat ± 1.300 UMKM telah tersertifikasi halal. Pada tahun 2026, KPwBI menargetkan sertifikasi halal untuk 600 produk UMKM. Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan Pusat Kajian Halal Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Lembaga Halal Universitas Islam Negeri Surabaya, Pusat Halal Universitas Airlangga Surabaya, dan Halal Center Universitas Trunojoyo Madura. Fasilitasi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk agar siap memasuki pasar yang lebih luas. Selain itu, untuk mendukung sertifikasi halal di sisi hulu, dilaksanakan program lanjutan pelatihan dan sertifikasi kompetensi Juru Sembelih Halal (*juleha*) sejak tahun 2022, yang telah menghasilkan 320 peserta lulus ujian sertifikasi. Pada tahun 2026, program *juleha* menargetkan 60 peserta dengan kerja sama Dinas Peternakan Jawa Timur dan Asosiasi Juru Sembelih Halal Indonesia (DPW Jawa Timur).

c. **Gerakan Sadar Wakaf**

Pelaksanaan Gerakan Sadar Jawa Timur bertujuan memastikan terciptanya inklusivitas perekonomian dan meningkatkan akses layanan keuangan sosial syariah bagi kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Program ini fokus pada sub-sektor proyek yang mendukung ketahanan pangan, kelompok subsisten, dan *green waqf*, dengan tujuan meningkatkan realisasi dana zakat dan wakaf melalui kolaborasi kegiatan; memperkuat inklusivitas perekonomian melalui alternatif pembiayaan; mendorong terciptanya ekosistem perwakafan yang optimal; mendorong penggunaan *platform* digital, seperti Aplikasi Satu Wakaf, oleh lembaga ZISWAF. Terdapat 12 (dua belas) lembaga nazhir yang memiliki proyek riil berpotensi dibiayai melalui dana wakaf. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berkolaborasi dengan tenaga ahli dari Universitas Airlangga Surabaya, yang mendampingi lembaga dalam penggalangan dana serta sebagai kurator proyek strategis berbasis wakaf untuk kampanye melalui *platform* digital. Hingga triwulan akhir 2025, sebanyak 15 proyek strategis berbasis wakaf telah berhasil onboarding pada *platform* Satu Wakaf dengan capaian pengumpulan wakaf sebesar Rp3 miliar. Ke depan, program ini diharapkan memberikan dampak signifikan sebagai alternatif pembiayaan yang mendukung perekonomian berkelanjutan di sektor riil.

d. **Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah**

Tingkat literasi ekonomi syariah di Indonesia saat ini baru mencapai 42,84%, masih di bawah target 50% yang ditetapkan Wakil Presiden pada ISEF 2023. Untuk meningkatkan literasi ini, program edukasi, seminar, dan *talkshow* digelar secara masif melalui kerja sama dengan berbagai mitra, terutama *Key Opinion Leader* (KOL) seperti dai, guru, dan penyuluh agama. Hingga akhir 2026, program ini berhasil meningkatkan literasi 300 KOL, dengan tingkat pemahaman mencapai 90%.

e. **Pengembangan Komoditas Pangan Halal Ponpes**

Dalam upaya mengembangkan ekosistem komoditas pangan halal yang mendukung pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), KPwBI Provinsi Jawa Timur sedang mengimplementasikan *best practice greenhouse* sebagai infrastruktur untuk pembenihan, pembibitan, dan pemeliharaan budidaya cabai di pondok pesantren binaan, yakni Ponpes Al Falah, Ponpes Chasbullah, dan Ponpes Fathul Ulum Jombang. Hingga akhir 2025, pesantren-pesantren tersebut telah berhasil melakukan panen dengan produktivitas mencapai 1 kg per pohon. Ke depan, program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren.

f. **Bulan Pembiayaan Syariah Jawa Timur**

Dalam rangka mendukung percepatan pembiayaan syariah bagi pengembangan Pelaku Usaha Syariah (PUS) di Jawa Timur, dilaksanakan program *Kick Off* Bulan Pembiayaan Syariah yang melibatkan 12 (dua belas) perbankan syariah se-Jawa Timur. Program ini mencakup berbagai rangkaian kegiatan, antara lain kurasi UMKM potensial untuk dibiayai, *business matching*, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah. Melalui program ini, diharapkan tercipta peningkatan pembiayaan syariah yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.





05.

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



5.1. Kondisi Umum

Kinerja sistem pembayaran di Jawa Timur pada triwulan IV 2025 meningkat, sejalan dengan pertumbuhan aktivitas konsumsi, industri, dan perdagangan. Kebutuhan uang tunai di Jawa Timur pada triwulan IV 2025 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, mengikuti pola musiman selama periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026. Peredaran uang kartal tercatat *net-outflow*, terutama dari wilayah Surabaya dan Malang yang merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata. Periode libur sekolah dan tingginya aktivitas pariwisata mendorong lonjakan kebutuhan uang tunai di Jawa Timur.

Sistem pembayaran nontunai tumbuh positif, didorong oleh peningkatan penggunaan hampir di seluruh instrumen pembayaran. Peningkatan ini mencerminkan akselerasi aktivitas ekonomi di sektor utama, terutama industri dan perdagangan, yang berdampak langsung pada naiknya volume transaksi dan transfer dana. Transaksi transfer dana besar melalui BI-Real Time Gross Settlement (RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), BI-FAST, alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), serta uang elektronik (UE) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Aktivitas transfer dana menggunakan SKNBI mulai tersubstitusi oleh BI-FAST yang menawarkan layanan lebih murah dan *real-time*. Sementara itu, aktivitas pembayaran dan belanja menggunakan QRIS dan APMK juga meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas konsumsi rumah tangga. Transaksi perdagangan valuta asing di Jawa Timur juga tercatat meningkat, didorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara selama libur akhir tahun dan banyaknya masyarakat Jawa Timur yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Lebih lanjut, rata-rata nilai per transaksi pada mayoritas instrumen pembayaran nontunai meningkat pada triwulan IV 2025, menjadi indikasi bahwa sistem pembayaran di Jawa Timur tetap stabil dan terpelihara (Tabel 5.1).

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus didukung melalui akselerasi digitalisasi pembayaran, penguatan kampanye Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah, serta pemenuhan uang layak edar (ULE) hingga ke wilayah terpencil. Transformasi digital diakselerasi melalui perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta inovasi layanan nontunai yang

lebih efisien di seluruh wilayah. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia konsisten meningkatkan literasi masyarakat melalui kampanye nasional CBP Rupiah dan memperkuat integritas mata uang dengan langkah preventif, preemtif, serta represif dalam menekan peredaran uang palsu melalui kolaborasi lintas instansi. Guna menjaga kedaulatan rupiah di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T), program Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) terus dijalankan untuk menjamin ketersediaan ULE. Melalui berbagai inisiatif strategis ini, Bank Indonesia berkomitmen mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, inklusif, dan aman, guna mendukung stabilitas sektor keuangan serta pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berkelanjutan.

5.2. Perkembangan Sistem Pembayaran di Jawa Timur

5.2.1. Aliran Uang Masuk/Keluar (*Cash Inflow/Outflow*)

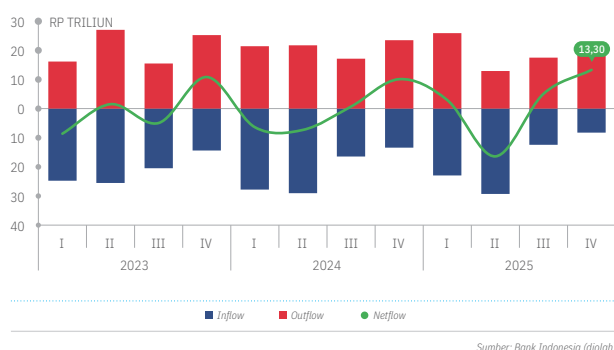
Pada triwulan IV 2025, peredaran uang kartal di Jawa Timur tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp13,3 triliun. Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan uang tunai masyarakat seiring momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, yang mendorong akselerasi konsumsi rumah tangga, khususnya untuk kebutuhan ritel, transportasi, dan pariwisata. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut berdampak pada tingginya penarikan uang kartal oleh perbankan untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat selama periode puncak konsumsi (Grafik 5.1). Selain faktor musiman konsumsi, dinamika sektor eksternal juga turut memengaruhi *net outflow*. Kinerja ekspor Jawa Timur yang tetap kuat pada periode laporan mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi dan perdagangan, sehingga mendorong perputaran likuiditas di daerah. Di sisi lain, aktivitas ekspor umumnya diikuti oleh kebutuhan pembiayaan impor bahan baku dan barang modal, sehingga meningkatkan arus pembayaran ke luar wilayah. Kombinasi antara tingginya kebutuhan uang tunai domestik akibat HBKN dan meningkatnya transaksi eksternal secara agregat berkontribusi terhadap *net outflow* uang kartal di Jawa Timur pada triwulan IV 2025.

Tabel 5.1. Perkembangan Sistem Pembayaran Triwulan III dan IV 2025

Pembayaran Non-tunai	Nominal (Rp Triliun)				Volume (Juta Trx)				Rata-rata Nilai/Transaksi (Rp Triliun/Juta Trx)	
	III-2025	IV-2025	yoy III-25 (%)	yoy IV-25 (%)	III-2025	IV-2025	yoy III-25 (%)	yoy IV-25 (%)	III 2025	IV 2025
SKNBI	49,46	51,62	(7,90)	(8,66)	0,76	0,81	(7,22)	(7,92)	64,78	63,91
BI-RTGS	417,09	489,58	(0,96)	6,18	111,82	111,83	(5,60)	(11,84)	3,73	4,38
APMK	263,23	269,90	3,95	7,73	229,07	232,59	(2,74)	(0,12)	1,15	1,16
UE	17,52	20,00	8,78	18,44	200,28	224,69	13,42	16,92	0,09	0,09
QRIS	36,39	46,26	95,16	105,11	411,41	506,44	148,70	125,70	0,09	0,09
BI-FAST	543,80	580,38	14,36	16,12	207,42	215,64	18,91	13,78	2,62	2,69
KUPVA	2,68	3,10	(2,30)	7,73						

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 5.1. Perkembangan Inflow-Outflow Uang Kartal



Secara umum, pola peredaran uang kartal di Jawa Timur pada 2025 menunjukkan *net outflow* pada triwulan I, III, dan IV, serta *net inflow* pada triwulan II (Grafik 5.1). *Net outflow* pada triwulan I 2025 dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan uang tunai masyarakat selama HBKN Ramadan dan Idulfitri, yang direspons Bank Indonesia melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) untuk memastikan ketersediaan uang layak edar di seluruh wilayah. Tingginya realisasi penukaran uang pada periode tersebut mendorong peningkatan penarikan uang kartal oleh perbankan sehingga tercatat *net outflow*. Memasuki triwulan II 2025, kondisi berbalik menjadi *net inflow* seiring normalisasi likuiditas pasca-Lebaran. Selanjutnya, pada triwulan III 2025, peningkatan aktivitas ekonomi, seperti periode libur sekolah dan akselerasi perdagangan, kembali mendorong kenaikan kebutuhan uang kartal. Pola tersebut berlanjut dan semakin kuat pada triwulan IV 2025 akibat momentum HBKN Natal dan Tahun Baru, yang diantisipasi melalui program Semarak Rupiah Natal di Bulan Penuh Damai (SERUNAI) untuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan uang layak edar. Akibatnya, kebutuhan uang tunai meningkat signifikan dan menyebabkan *net outflow* pada akhir tahun 2025.

Secara spasial, kondisi *net outflow* terjadi di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) di Jawa Timur, terutama di KPwBI Provinsi Jawa Timur pada triwulan IV 2025. *Net outflow* di KPwBI Jatim berkontribusi sebesar Rp7,28 triliun atau 54,76% terhadap total *net outflow* di Jawa Timur, diikuti oleh KPwBI Malang, KPwBI Kediri, dan KPwBI Jember dengan kontribusi masing-masing 17,25%, 14,52%, dan 13,47% (Grafik 5.2). Dominasi KPwBI Jatim mencerminkan peran wilayah Surabaya dan sekitarnya sebagai pusat perdagangan, jasa, dan distribusi regional sehingga memiliki kebutuhan uang kartal tertinggi. Sementara itu, kontribusi Malang, Kediri, dan Jember menunjukkan bahwa peningkatan kebutuhan likuiditas juga terjadi secara merata di wilayah lain, seiring meningkatnya pola konsumsi masyarakat.

Secara keseluruhan pada tahun 2025, perkembangan tersebut sejalan dengan pola musiman peredaran uang kartal di Jawa Timur, yang mencatat *net outflow* pada triwulan I, III, dan IV 2025 serta *net inflow* pada triwulan II 2025. *Net outflow* pada triwulan I dan IV 2025 terutama dipengaruhi oleh momentum

Grafik 5.2. Kondisi Perkembangan Inflow-Outflow Secara Spasial



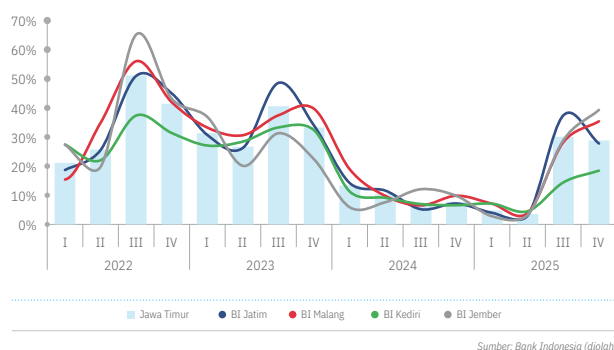
HBKN, yang diantisipasi melalui program SERAMBI dan SERUNAI, sedangkan *net outflow* pada triwulan III 2025 didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Adapun *net inflow* pada triwulan II 2025 mencerminkan normalisasi likuiditas pasca periode puncak konsumsi. Dengan demikian, perkembangan sepanjang 2025 menunjukkan bahwa fluktuasi *net outflow/inflow* di Jawa Timur sangat dipengaruhi oleh faktor musiman dan tingginya aktivitas ekonomi, dengan wilayah Surabaya sebagai kontributor utama pergerakan uang kartal serta sebagai sentra ekonomi di Jawa Timur.

5.2.1.2. Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

Jumlah pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) di Jawa Timur pada triwulan laporan tercatat menurun, baik secara nominal maupun rasio. Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia melakukan pemusnahan UTLE sebesar Rp2,37 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang mencapai Rp3,73 triliun. Sejalan dengan itu, rasio pemusnahan terhadap total uang yang masuk juga menurun, dari 30,06% menjadi 28,79% (Grafik 5.3). Penurunan ini mengindikasikan bahwa proporsi uang yang dikategorikan tidak layak edar dari total setoran perbankan dan kas titipan kepada Bank Indonesia relatif lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya.

Secara spasial, rasio UTLE menunjukkan variasi antarwilayah kerja. Wilayah Malang, Kediri, dan Jember mencatat peningkatan rasio UTLE masing-masing sebesar 35,37%,

Grafik 5.3. Perkembangan Rasio UTLE terhadap Inflow Jawa Timur



18,44%, dan 39,29%. Peningkatan tersebut mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi berbasis tunai di wilayah tersebut, termasuk pada sektor perdagangan dan UMKM, sehingga intensitas perputaran uang kartal relatif tinggi dan berpotensi meningkatkan tingkat kerusakan fisik uang. Di sisi lain, wilayah Surabaya sebagai pusat ekonomi dan keuangan Jawa Timur justru mencatat penurunan rasio pemusnahan menjadi 27,77%. Hal ini sejalan dengan karakteristik Surabaya yang memiliki tingkat adopsi transaksi nontunai lebih tinggi, sehingga penggunaan uang kartal cenderung lebih rendah.

Penurunan nominal dan rasio pemusnahan UTLE pada triwulan laporan tetap mencerminkan penguatan implementasi kebijakan *Clean Money Policy* Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa upaya edukasi melalui kampanye Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah dapat meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat dalam memperlakukan uang Rupiah secara tepat, termasuk menjaga fisik uang agar tetap layak edar. Selain itu, akselerasi transaksi nontunai di Jawa Timur turut berkontribusi terhadap berkurangnya peredaran uang kartal secara fisik, sehingga tingkat kerusakan uang menjadi relatif lebih terkendali.

Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur melaksanakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) untuk memastikan kecukupan kebutuhan uang di daerah terpencil. ERB diselenggarakan pada 14–20 Oktober 2025 di Pulau Gili Genting, Gili Raja, Pagerungan Besar, Pagerungan Kecil, dan Guwa Guwa bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan uang layak edar di wilayah terluar, disertai edukasi Rupiah serta layanan penukaran uang bagi masyarakat kepulauan. Di sisi lain, penguatan tata kelola dan keberlanjutan diwujudkan melalui kerja sama dengan PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Probolinggo dalam pemanfaatan Limbah Racik Uang Kertas (LRUK) sebagai sumber energi pendamping pembangkit listrik tenaga uap. Pendekatan ini tidak hanya mendukung efisiensi dan aspek lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah dari proses pemusnahan uang tidak layak edar.

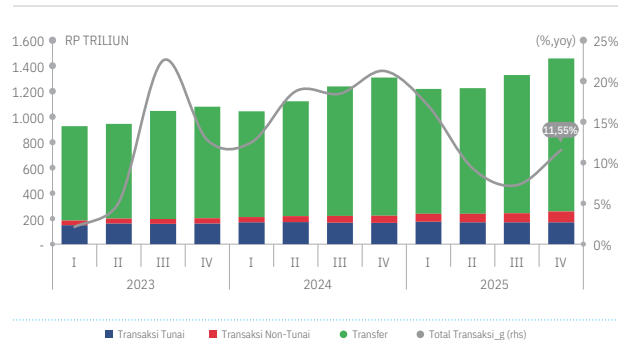
Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Jawa Timur melalui kampanye Cinta, Bangga,

dan Paham (CBP) Rupiah, yang menjangkau Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini diselenggarakan di sekolah-sekolah, De Javasche Bank *Education Centre*, serta melalui kolaborasi dalam berbagai acara dengan sasaran masyarakat umum hingga wisatawan asing. Pada triwulan IV 2025, pelaksanaan CBP Rupiah tercatat sebanyak 36 kali, dengan mayoritas kegiatan berlangsung pada bulan Oktober seiring momentum musim sekolah. Program ini menjangkau peserta mulai dari tingkat TK hingga universitas sebagai upaya menanamkan kebiasaan merawat dan menghargai Rupiah sejak dini serta memperkuat literasi kebanksentralan di masyarakat. Selain itu, dalam rangkaian Amazing Rupiah Festival (ARFest), turut dilaksanakan *Training of Trainers* (ToT) Edukasi CBP Rupiah bagi personel Pasmar 2 Surabaya yang akan ditugaskan ke Ambalat dan pulau terluar pada 14 Juni 2025, guna memperluas jangkauan edukasi hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

5.2.2. Sistem Pembayaran

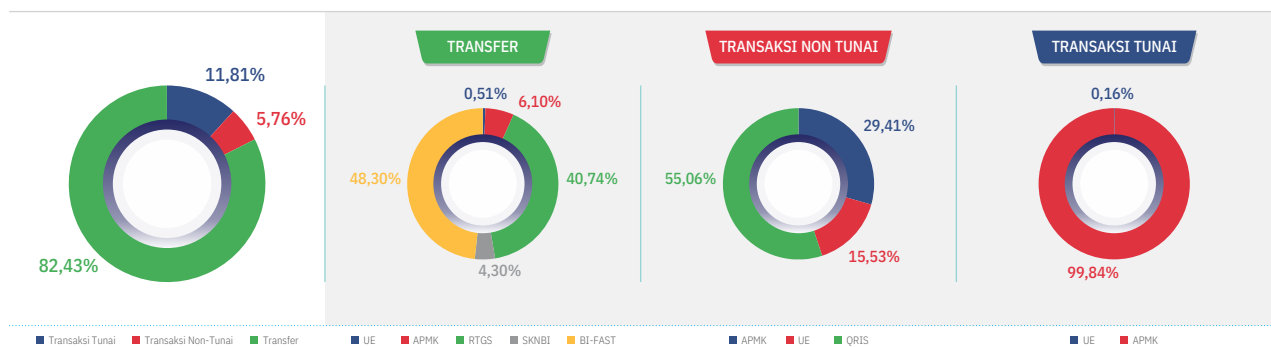
Sistem pembayaran di Jawa Timur pada triwulan IV 2025 mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025. Indikator sistem pembayaran di wilayah Jawa Timur tercatat tumbuh sebesar 11,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 7,24% (yoy). Transaksi pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.457 triliun, terdiri atas transaksi tunai sebesar Rp172,12 triliun yang dilakukan melalui penarikan dan setor tunai menggunakan APMK dan UE. Transaksi nontunai juga tetap tinggi, sebesar Rp84,02 triliun, yang dilakukan melalui kanal pembayaran QRIS,

Grafik 5.4. Total Transaksi Sistem Pembayaran di Jawa Timur



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.5. Komposisi Sistem Pembayaran Jawa Timur Triwulan IV 2025



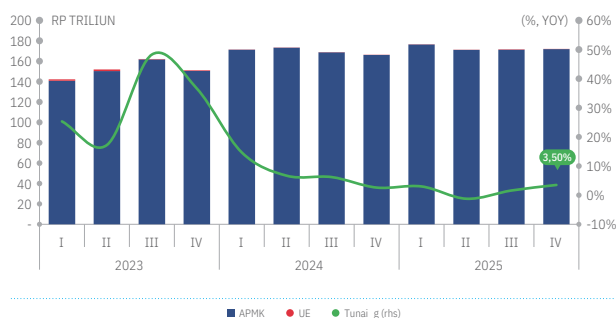
Sumber: Bank Indonesia (diolah)

UE, serta APMK. Sementara itu, nilai transaksi melalui kanal transfer tercatat sebesar Rp1.201 triliun, yang digunakan masyarakat melalui kanal BI-FAST, UE, APMK, BI-RTGS, dan SKNBI. Pertumbuhan indikator sistem pembayaran tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas transaksi masyarakat di Jawa Timur, khususnya dalam menyambut HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Grafik 5.5).

5.2.2.1. Transaksi Sistem Pembayaran Tunai

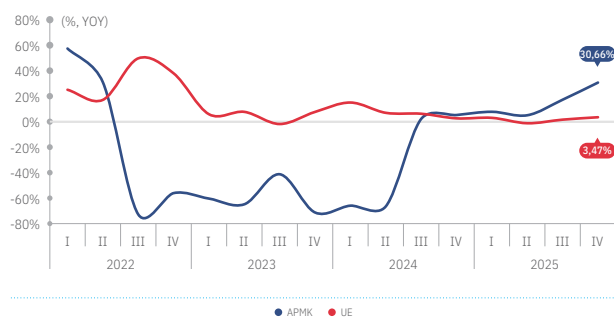
Aktivitas tarik dan setor tunai melalui APMK dan Uang Elektronik (UE) tumbuh positif seiring akselerasi konsumsi rumah tangga. Pada triwulan IV 2025, transaksi tarik dan setor tunai menggunakan APMK dan UE tercatat sebesar Rp172,13 triliun, atau tumbuh 3,50% (yoy) (Grafik 5.6). Indikator sistem pembayaran tunai juga mencatat peningkatan dibandingkan triwulan III 2025, yang tercatat sebesar Rp171,57 triliun (Grafik 5.7). Utilisasi tunai di masyarakat Jawa Timur sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga pada triwulan IV, yang tumbuh 5,15% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 4,91% (yoy).

Grafik 5.6. Transaksi Sistem Pembayaran Jawa Timur Melalui Tarik/Setor Tunai



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.7. Pertumbuhan Transaksi Sistem Pembayaran Tunai melalui APMK dan UE



Sumber : Bank Indonesia

5.2.2.2. Transaksi Sistem Pembayaran Nontunai

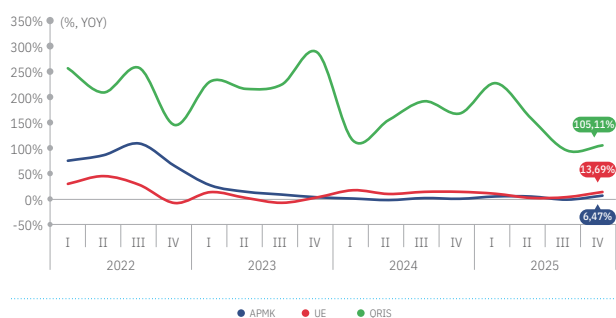
Transaksi sistem pembayaran nontunai pada periode pelaporan tumbuh secara akseleratif. Sistem pembayaran nontunai secara nominal tercatat sebesar Rp84,02 triliun, atau tumbuh 46,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar Rp70,86 triliun (Grafik 5.8).

Grafik 5.8. Nominal Transaksi Sistem Pembayaran Nontunai di Jawa Timur untuk pembelian dan pembayaran



Sumber : Bank Indonesia

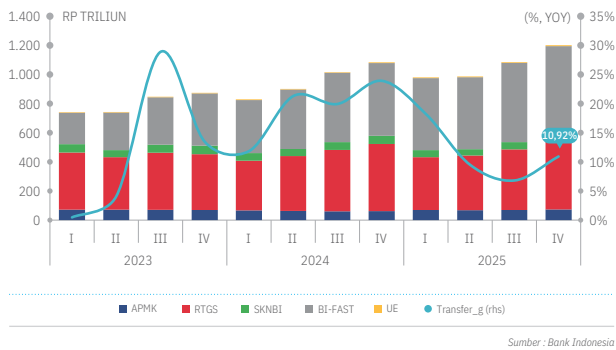
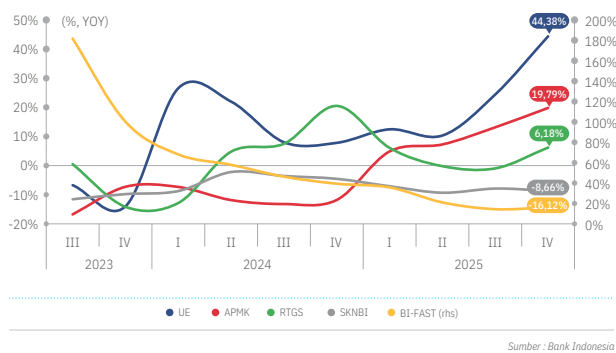
Grafik 5.9. Pertumbuhan Volume Transaksi Sistem Pembayaran Nontunai melalui APMK, UE, dan QRIS



Sumber : Bank Indonesia

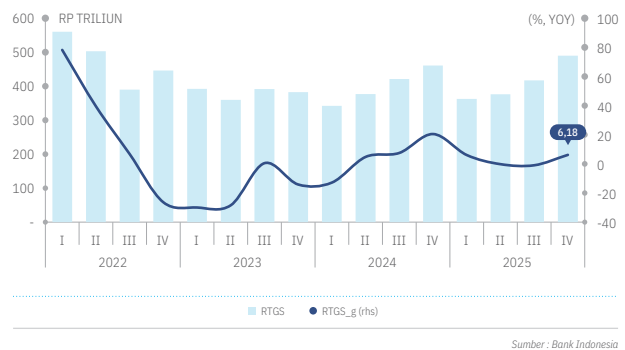
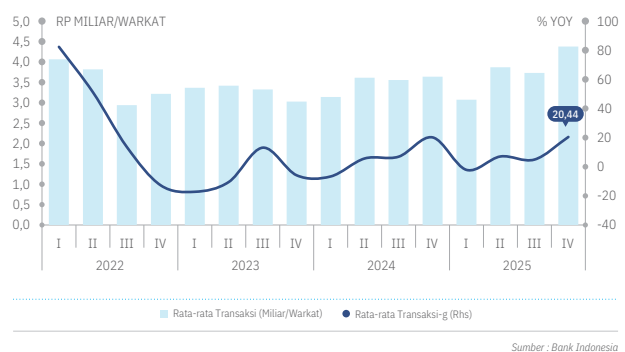
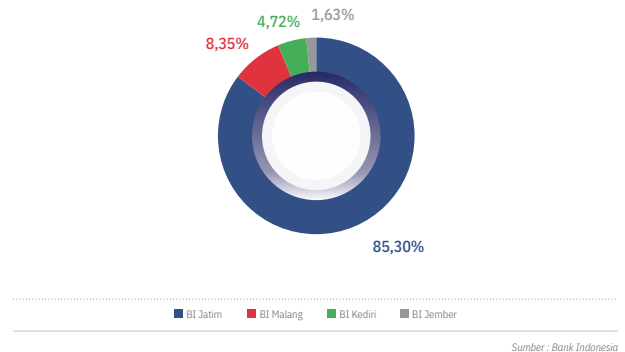
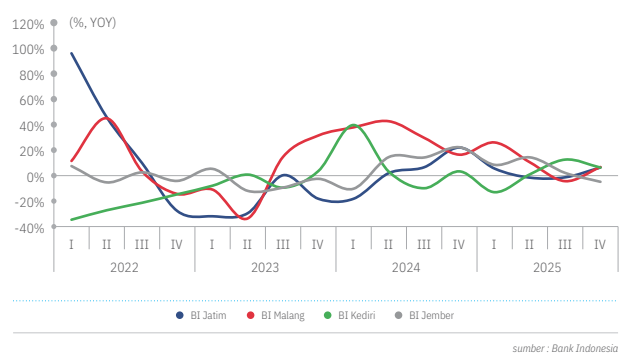
Peningkatan transaksi nontunai terutama dipengaruhi oleh akselerasi kinerja QRIS di Jawa Timur, yang mencatat pertumbuhan sebesar 105,11% (yoy). Selain itu, kanal APMK dan Uang Elektronik (UE) masing-masing tumbuh 6,47% (yoy) dan 13,69% (yoy) (Grafik 5.9). Hal dimaksud menunjukkan bahwa preferensi masyarakat akan transaksi yang Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Handal diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi.

Indikator sistem pembayaran melalui kanal transfer yang diukur berdasarkan nominal dan volume juga tumbuh lebih tinggi pada triwulan laporan. Nominal transaksi transfer meningkat 10,92% (yoy), dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 6,80% (yoy) (Grafik 5.10). Pertumbuhan penggunaan kanal transfer didukung oleh peningkatan pemanfaatan infrastruktur BI-FAST sebesar 16,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat 14,36% (yoy). Preferensi masyarakat terhadap kemudahan dalam melakukan transfer berdampak pada penurunan penggunaan SKNBI, yang mengalami kontraksi sebesar -8,66% (yoy), lebih dalam dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat -7,90% (yoy) (Grafik 5.11).

Grafik 5.10. Nominal Transaksi Sistem Pembayaran melalui Transfer**Grafik 5.11. Pertumbuhan Volume Transaksi Transfer melalui APMK, UE, SKNBI, RTGS, dan BI-FAST**

Transaksi Melalui Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

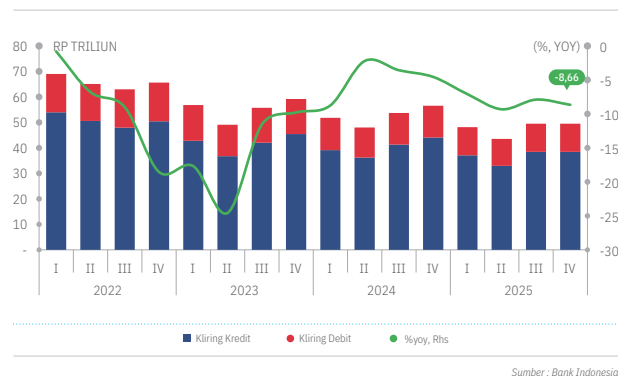
Nominal transaksi BI-RTGS sepanjang triwulan IV 2025 meningkat didorong oleh peningkatan aktivitas industri pengolahan serta aktivitas perdagangan. Nominal transaksi BI-RTGS di Jawa Timur pada triwulan IV 2025 sebesar Rp489,58 triliun, meningkat 6,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang tercatat sebesar Rp417,09 triliun. Pertumbuhan pada periode pelaporan menjadi indikator perbaikan kinerja sistem pembayaran di Jawa Timur, setelah pada triwulan sebelumnya kinerja RTGS mengalami kontraksi sebesar 0,96% (yoy). Pencapaian ini juga merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2025. Perbaikan nominal transaksi sejalan dengan peningkatan rata-rata transaksi pada triwulan IV 2025, yaitu sebesar Rp4,38 miliar per warkat (Grafik 5.13). Namun demikian, volume RTGS pada periode pelaporan mengalami kontraksi yang lebih dalam, tercatat sebesar 111.825 transaksi atau menurun sebesar 11,84% (yoy), setelah pada triwulan III 2025 tercatat menurun sebesar 5,60% (yoy). Secara spasial, kontraksi transaksi RTGS di Jawa Timur didominasi oleh wilayah Surabaya dan Malang yang menyumbang lebih dari 90% total transaksi RTGS di Provinsi Jawa Timur (Grafik 5.14). Wilayah Kediri dan Jember juga mencatatkan pertumbuhan yang positif pada triwulan IV 2025 (Grafik 5.15).

Grafik 5.12. Perkembangan Nominal Transaksi RTGS di Jawa Timur**Grafik 5.13. Perkembangan Rata-rata Transaksi RTGS Jawa Timur****Grafik 5.14. Komposisi Kinerja RTGS Jawa Timur****Grafik 5.15. Pertumbuhan Transaksi BI-RTGS Per Wilayah Kantor Bank Indonesia**

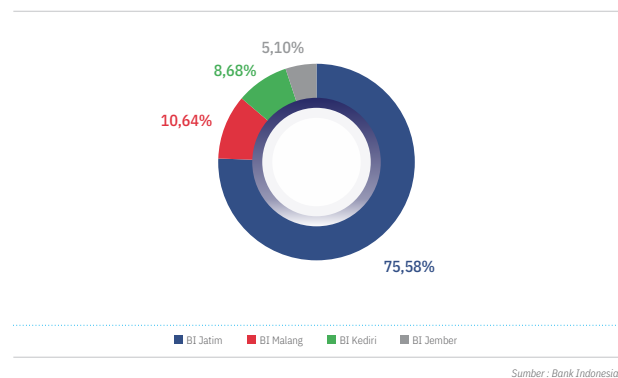
Transaksi Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Transaksi kliring pada triwulan IV kembali mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Pemanfaatan kliring di masyarakat Jawa Timur sepanjang tahun 2025 tercatat melambat. Total nominal kliring pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp51,62 triliun, atau terkontraksi sebesar 8,66% (yoy), lebih dalam dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat -7,90% (yoy) (Grafik 5.16). Namun, secara total, nominal transaksi triwulan IV lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025. Lebih lanjut, volume kliring juga mengalami kontraksi sebesar 7,92% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan III yang terkontraksi sebesar -7,22% (yoy). Berdasarkan jenisnya, aktivitas kliring didominasi oleh kliring kredit, sedangkan kliring debit lebih banyak digunakan untuk memproses transaksi penerimaan. Penurunan transaksi lebih besar terjadi pada kliring debit, yang terkontraksi hingga sebesar 11,53% (yoy). Secara spasial, transaksi kliring di Jawa Timur didominasi oleh KPwBI Provinsi Jawa Timur, dengan pangsa 75,58% dari total kliring di wilayah tersebut. Dominasi ini didorong oleh keberadaan 7 (tujuh) Kantor Pertukaran Warkat Debit (KPWD) dan pusat industri di wilayah kerja KPwBI Jawa Timur. Sementara itu, kontribusi terendah berasal dari KPwBI Jember, dengan pangsa 5,10% dari total transaksi kliring di Jawa Timur.

Grafik 5.16. Perkembangan Kliring Jawa Timur



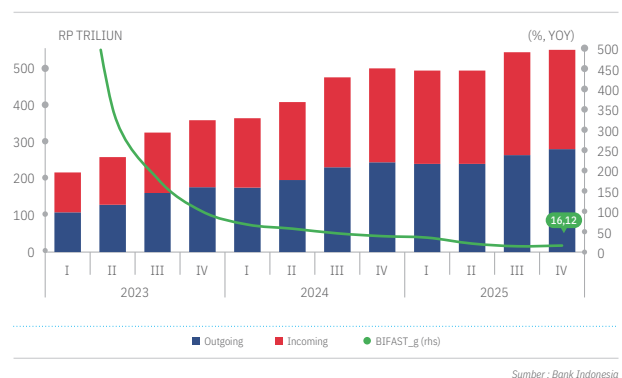
Grafik 5.17. Transaksi Kliring Spasial Jawa Timur



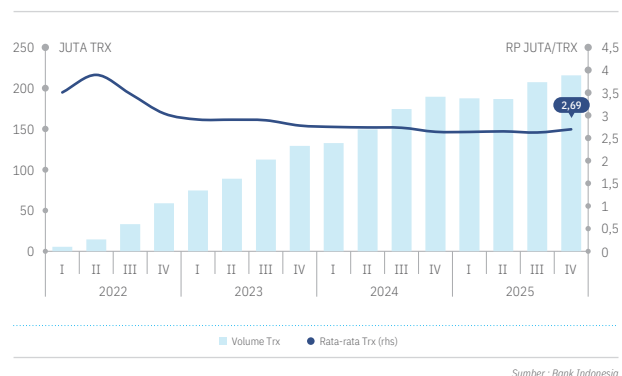
Transaksi Melalui Bank Indonesia - Fast Payment (BI-FAST)

Transaksi BI-FAST di Jawa Timur tumbuh akseleratif sejalan dengan peningkatan konsumsi dan aktivitas perdagangan ritel. Pada triwulan IV 2025, total nominal transaksi BI-FAST tercatat sebesar Rp580,38 triliun, atau tumbuh 16,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp543,79 triliun (Grafik 5.18). Dari sisi volume, frekuensi transaksi tercatat sebesar 215,64 juta transaksi, meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 207,42 juta transaksi, dengan pertumbuhan 13,8% (yoy). Pertumbuhan dari sisi nominal maupun volume BI-FAST didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi di akhir tahun untuk rumah tangga maupun dunia usaha. Lebih lanjut, peningkatan penggunaan infrastruktur *fast payment* ini sebagai bentuk upaya Bank Indonesia dalam menyediakan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal (CEMUMUAH) bagi masyarakat.

Grafik 5.18. Perkembangan Nominal Transaksi BI-FAST di Jawa Timur



Grafik 5.19. Perkembangan Volume Transaksi BI-FAST di Jawa Timur



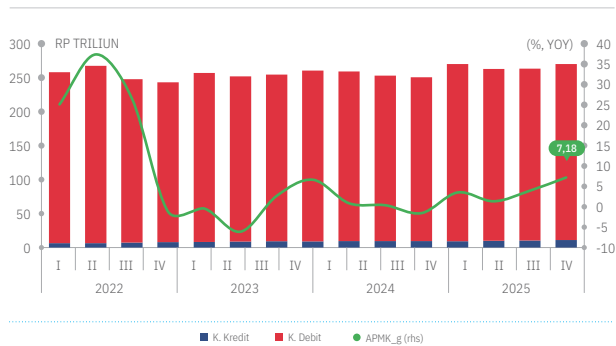
Transaksi Melalui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Transaksi menggunakan APMK pada triwulan IV 2025 meningkat sejalan dengan pola historis dalam menghadapi momen HBKN Nataru. Total nominal transaksi melalui APMK tercatat sebesar Rp269,90 triliun, atau tumbuh 7,73% (yoy), meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp263,29 triliun dengan pertumbuhan 4,11% (yoy) (Grafik 5.20). Penguatan kinerja APMK terutama dipengaruhi oleh kinerja positif instrumen kartu kredit, yang tercatat sebesar

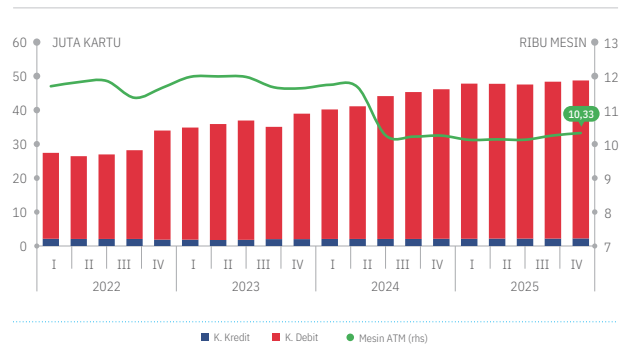
Rp11,01 triliun atau tumbuh 15,07% (yoy). Penggunaan kartu debit di Jawa Timur juga tetap tinggi. Pada triwulan IV 2025, nominal transaksi kartu debit tercatat sebesar Rp258,89 triliun, tumbuh 7,44% (yoy). Selaras dengan aktivitas transaksi kartu debit, komponen tarik dan setor tunai menggunakan kartu debit juga meningkat 3,48% (yoy), tercatat sebesar Rp171,76 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar Rp171,22 triliun dengan pertumbuhan 1,60% (yoy). Jumlah kepemilikan kartu kredit di Jawa Timur pada triwulan IV 2025 meningkat dibandingkan periode sebelumnya, tercatat mencapai 2,23 juta kartu, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang mencapai 2,18 juta kartu. Kepemilikan kartu debit juga meningkat menjadi 46,47 juta kartu,

dibandingkan periode sebelumnya sebesar 46,16 juta kartu. Untuk komponen mesin ATM, jumlah unit tercatat 10.325, lebih banyak dibandingkan triwulan III 2025 yang sebanyak 10.252 unit. Dengan mempertimbangkan luas wilayah Jawa Timur, rasio ketersediaan ATM saat ini mencapai 1:4,68 km². Sejalan dengan kebijakan keringanan pembayaran denda kartu kredit dan meningkatnya permintaan uang tunai, masyarakat Jawa Timur mayoritas menggunakan kartu kredit untuk transaksi belanja pada triwulan IV 2025 dengan pangsa 98% dari total nominal kartu kredit (Grafik 5.23). Sementara itu, penggunaan kartu debit sebagian besar digunakan untuk transaksi tarik tunai sebanyak 45% dan setor tunai sebanyak 20% dari total nominal kartu debit (Grafik 5.22).

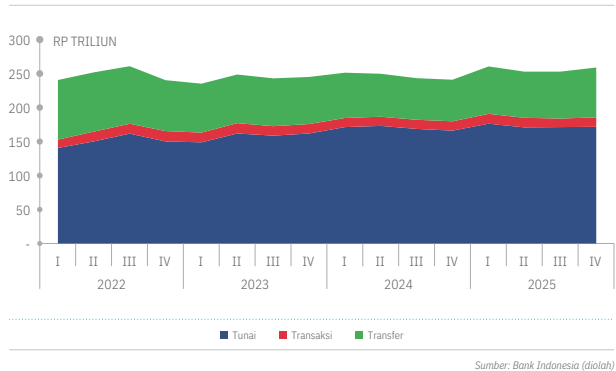
Grafik 5.20. Perkembangan Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)



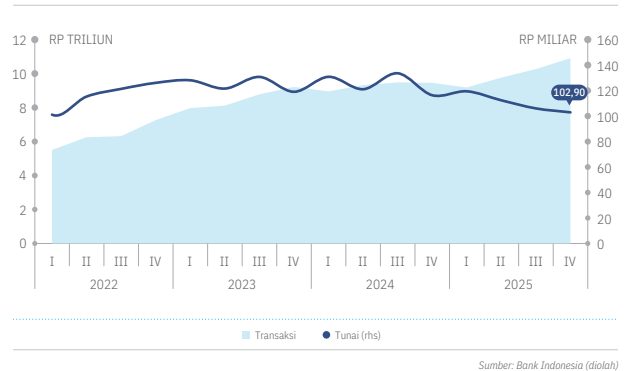
Grafik 5.21. Perkembangan Jumlah Instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)



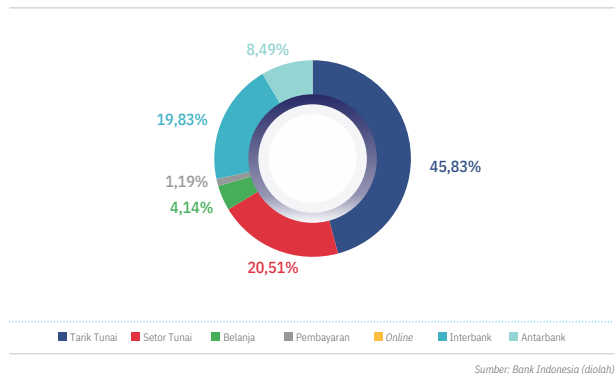
Grafik 5.22. Penggunaan Kartu ATM/Debit



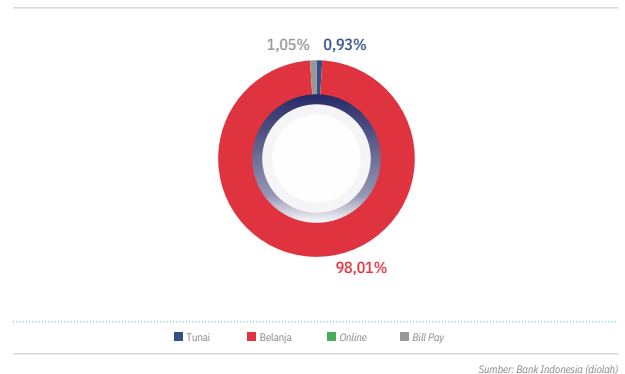
Grafik 5.23. Penggunaan Kartu Kredit



Grafik 5.24. Pangsa Nominal Transaksi Kartu Debit



Grafik 5.25. Pangsa Nominal Transaksi Kartu Kredit

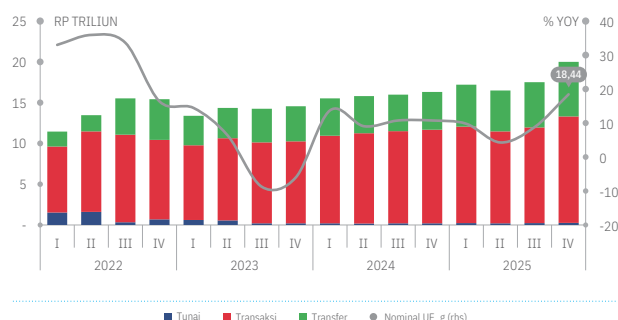


Transaksi Uang Elektronik (UE)

Nominal dan volume transaksi Uang Elektronik (UE) di Jawa Timur meningkat seiring tumbuhnya aktivitas belanja masyarakat. Pada triwulan IV 2025, nominal transaksi UE tercatat sebesar Rp19,99 triliun, atau tumbuh 18,44% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp17,52 triliun dengan pertumbuhan sebesar 8,78% (yoy). Nominal transaksi triwulan IV ini merupakan capaian tertinggi sepanjang tahun 2025 (Grafik 5.26). Sejalan dengan tren nominal, volume transaksi UE tercatat 224,69 juta transaksi, tumbuh sebesar 16,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang mencapai 200,28 juta transaksi dengan pertumbuhan 13,42% (yoy) (Grafik 5.27). Rata-rata nilai per transaksi UE meningkat menjadi Rp89 ribu, dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp86,46 ribu per transaksi.

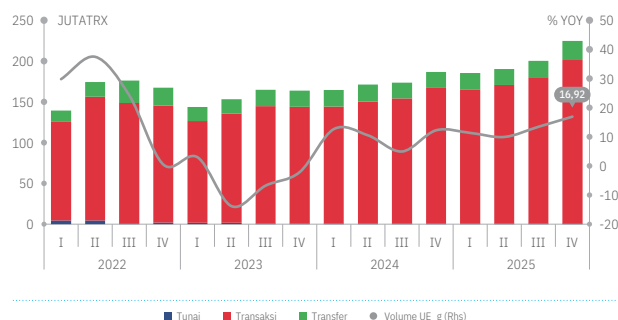
Pertumbuhan transaksi menggunakan Uang Elektronik (UE) relatif masih stabil di tengah semakin beragamnya metode pembayaran yang tersedia. Konsumen kini memiliki lebih banyak pilihan, termasuk pemanfaatan *virtual account single use* dalam transaksi *e-commerce*, yang lebih sesuai untuk nominal transaksi besar sekaligus memberikan tingkat keamanan tinggi. Sementara itu, UE berbasis *chip* tetap unggul untuk transaksi ritel bernominal kecil hingga menengah, yang menuntut kecepatan dan kemudahan untuk belanja dan pembayaran sektortransportasitol.

Grafik 5.26. Perkembangan Transaksi Uang Elektronik



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 5.27. Perkembangan Volume Uang Elektronik



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Transaksi Valuta Asing (Valas)

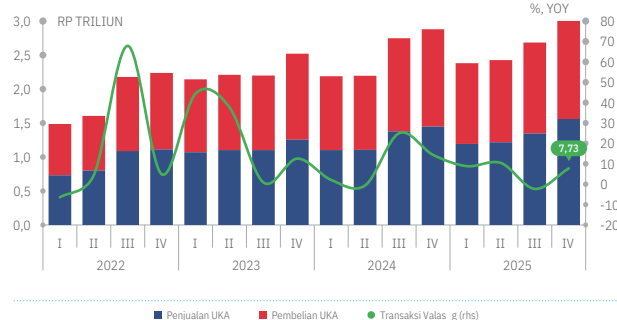
Transaksi Uang Kertas Asing (UKA) di Jawa Timur pada triwulan IV 2025 meningkat seiring dengan bertambahnya arus kunjungan wisman pada libur akhir tahun. Nilai transaksi valas tercatat sebesar Rp3,1 triliun, atau tumbuh 7,73% (yoy) setelah berkontraksi sebesar 2,30% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 5.28). Pola ini sejalan dengan perkembangan jumlah kunjungan wisman yang tercatat 76.182 orang atau tumbuh 11,59% (yoy), setelah pada triwulan lalu berkontraksi 0,23% (yoy). Transaksi valuta asing di Jawa Timur pada triwulan IV 2025 didominasi oleh mata uang USD, SGD, dan JPY. Secara individual, transaksi valas baik penjualan maupun pembelian UKA didominasi oleh USD, diikuti SGD dan JPY, dengan kontribusi masing-masing sebesar 31,8%, 27%, dan 8,4% terhadap total transaksi (Grafik 5.29).

5.3. Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

5.3.1. Penanganan Uang Palsu

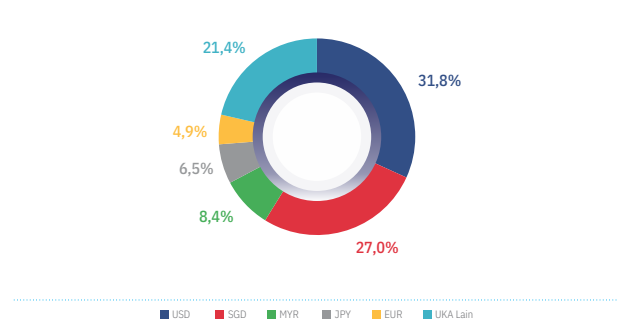
KPwBI Provinsi Jawa Timur terus memperkuat sinergi dengan berbagai instansi dalam upaya penanggulangan peredaran uang palsu melalui pendekatan preventif, preemtif, dan represif. Hingga triwulan IV 2025, langkah preventif dan preemtif dilaksanakan melalui edukasi dan sosialisasi ciri keaslian Rupiah, baik secara tatap muka melalui program Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah kepada seluruh lapisan

Grafik 5.28. Perkembangan UKA di Jawa Timur



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik 5.29. Komposisi Penjualan & Pembelian UKA berdasarkan mata uang triwulan pelaporan



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

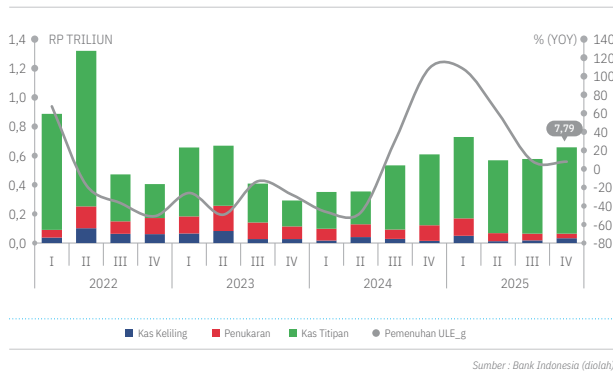
masyarakat maupun melalui publikasi di media massa dan media sosial. Upaya ini bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan literasi masyarakat dalam mengenali keaslian Rupiah.

Di sisi lain, langkah represif dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) untuk penindakan dan pemberantasan peredaran uang palsu. Sinergi ini melibatkan berbagai instansi, antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Badan Intelijen Negara di wilayah Jawa Timur. Secara khusus, kerja sama dengan Polda Jawa Timur sebagai salah satu unsur BOTASUPAL dituangkan dalam kesepakatan terkait penanganan dugaan tindak pidana di sektor sistem pembayaran dan penggunaan Rupiah, guna memperkuat efektivitas penegakan hukum serta menjaga integritas Rupiah di wilayah Jawa Timur.

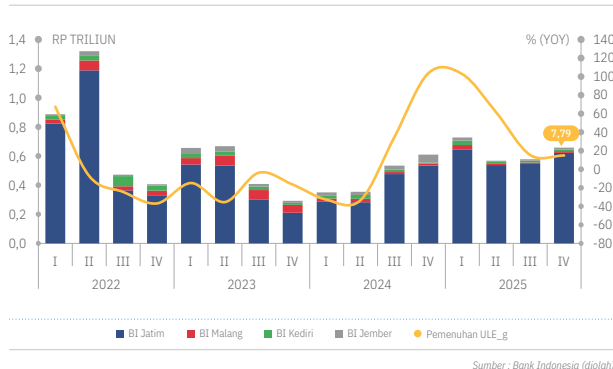
5.3.2. Penyediaan Uang Rupiah

Penyediaan Uang Rupiah pada triwulan IV 2025 tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya. Pemenuhan ULE sepanjang triwulan laporan tercatat sebesar Rp656,62 miliar, tumbuh 7,8% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp577,48 miliar atau tumbuh 8,4% (yoy) (Grafik 5.30). Berdasarkan jenis layanan, pemenuhan ULE didominasi oleh Kas Titipan sebesar 90,23%, mencerminkan peran strategis jaringan perbankan dalam mendistribusikan uang layak edar kepada masyarakat. Layanan Kas Keliling berkontribusi 5,06%, sebagai upaya menjangkau wilayah tertentu dan kelompok masyarakat

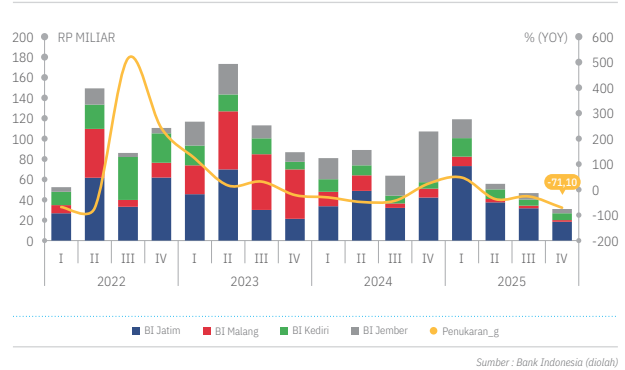
Grafik 5.30. Nominal Pemenuhan ULE Berdasarkan Jenis



Grafik 5.31. Pemenuhan ULE Secara Spasial



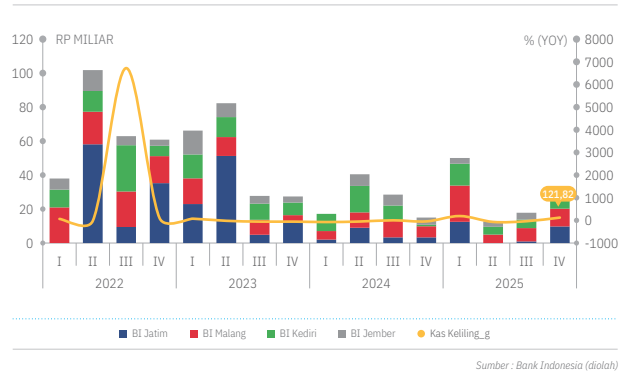
Grafik 5.32. Nominal Transaksi Penukaran



dengan keterbatasan akses perbankan, sedangkan penukaran uang berkontribusi sebesar 4,71%, umumnya meningkat pada periode HBKN. Komposisi ini menunjukkan mekanisme distribusi ULE semakin bertumpu pada optimalisasi jaringan perbankan, dengan dukungan layanan langsung untuk menjaga pemerataan akses.

Secara spasial, sebagian besar ULE diedarkan di wilayah Surabaya dan sekitarnya sebagai pusat keuangan dan aktivitas ekonomi Jawa Timur dengan intensitas transaksi tinggi (Grafik 5.31). 94,53% ULE diedarkan di wilayah Surabaya dan sekitarnya seiring dengan tingginya kepadatan penduduk, dominasi sektor perdagangan dan jasa, serta peran Surabaya sebagai hub distribusi barang dan jasa di kawasan timur Indonesia. Distribusi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan

Grafik 5.33. Aktivitas Kas Keliling Jawa Timur



Grafik 5.34. Nominal Transaksi Kas Titipan



uang layak edar sangat terkonsentrasi di pusat pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan tingginya mobilitas dan aktivitas perdagangan, sekaligus mencerminkan keterkaitan erat antara dinamika ekonomi regional dan kebutuhan likuiditas tunai masyarakat.

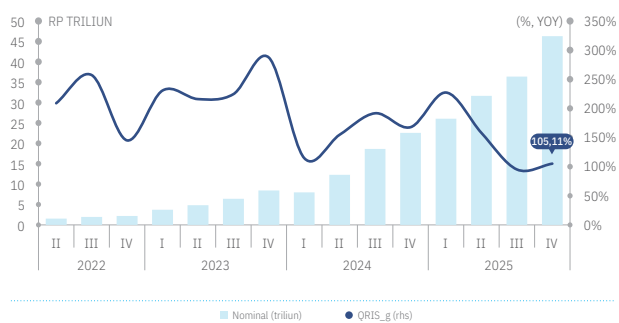
Pemenuhan ULE menurun karena penurunan aktivitas penukaran uang, namun masih ditopang oleh peningkatan kinerja kas keliling dan kas titipan. Aktivitas penukaran uang berkontraksi sebesar 71,1% (yoy) atau sebesar Rp30,94 miliar, lebih dalam dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang berkontraksi sebesar 26,76% (yoy) atau senilai Rp46,63 miliar (Grafik 5.32). Di sisi lain, aktivitas kas keliling tumbuh signifikan pada triwulan IV 2025 sebesar 121,82% (yoy) atau senilai Rp33,23 miliar setelah pada triwulan sebelumnya berkontraksi lebih dalam sebesar 37,47% (yoy) atau senilai Rp17,8 miliar (Grafik 5.34). Sementara itu, pertumbuhan aktivitas kas titipan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 21,62% (yoy) atau senilai Rp592,44 miliar, tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 16,41% (yoy) atau senilai Rp513,05 miliar (Grafik 5.34).

5.3.3. Pengembangan Layanan Keuangan Nontunai

5.3.3.1 Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

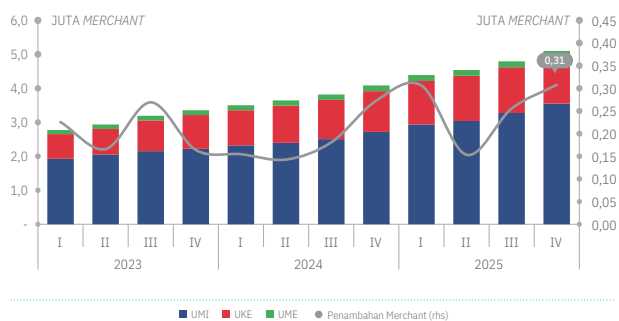
Transaksi QRIS pada triwulan IV 2025 tumbuh positif sejalan dengan peningkatan konsumsi Rumah Tangga menghadapi momen HBKN Natal dan Tahun Baru 2026. Nominal transaksi QRIS pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp46,26 triliun

Grafik 5.35. Perkembangan Nominal Transaksi QRIS



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Grafik 5.37. Perkembangan Merchant QRIS per Skala Usaha

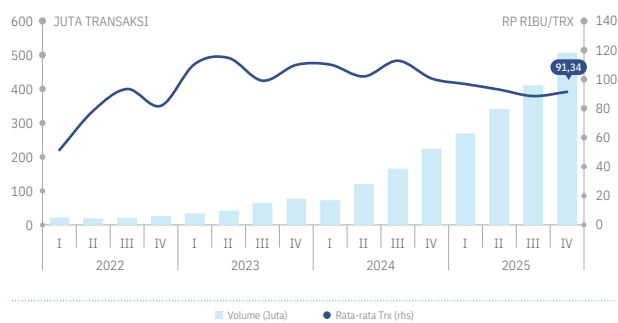


Sumber : Bank Indonesia (diolah)

atau tumbuh 105,11% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang meningkat 95,16% (yoy) (Grafik 5.35). Lebih lanjut, rata-rata nilai per transaksi QRIS juga mengalami peningkatan dari Rp88,45 ribu pada triwulan lalu menjadi Rp91,34 ribu pada triwulan pelaporan (Grafik 5.36). Namun demikian, volume transaksi QRIS pada triwulan pelaporan tumbuh lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. Volume transaksi pada triwulan IV 2025 sebesar 506,44 juta transaksi QRIS atau tumbuh 125,70% (yoy), sementara pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 411,41 juta transaksi QRIS atau tumbuh sebesar 148,70% (yoy).

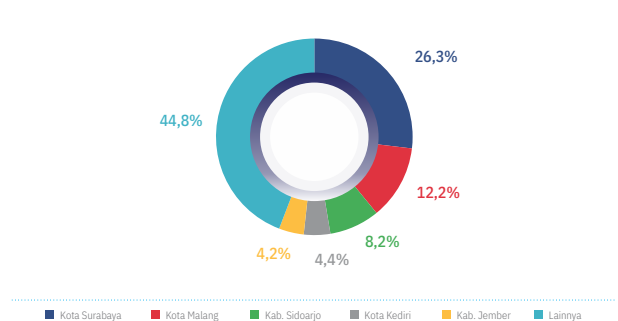
Penambahan merchant QRIS di Jawa Timur masih terus berlanjut dengan Usaha Mikro menjadi unit usaha terbanyak. Hingga akhir tahun 2025, jumlah merchant QRIS di Jawa Timur tercatat sebesar 5,23 juta merchant dengan pertumbuhan positif 24,32% (yoy) (Grafik 5.37). Peningkatan jumlah merchant QRIS ini didorong oleh intensifikasi promosi QRIS serta ekspansi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) untuk mencapai target akuisisi merchant dan peningkatan volume penjualan yang rata-rata ditargetkan tumbuh di atas 20% (yoy). Dengan jumlah tersebut, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah merchant QRIS terbesar ketiga di Indonesia, setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Berdasarkan skala usaha, merchant QRIS di Jawa Timur masih didominasi oleh usaha mikro dengan pangsa 67,92%. Secara spasial, mayoritas merchant QRIS di Jawa Timur masih terkonsentrasi di Kota Surabaya (pangsa 26,3%), diikuti oleh Kota Malang (pangsa 12,2%) dan Kabupaten Sidoarjo (pangsa 8,2%), sejalan dengan tingginya jumlah UMKM yang memanfaatkan QRIS di wilayah tersebut (Grafik 5.38).

Grafik 5.36. Perkembangan Volume Transaksi QRIS



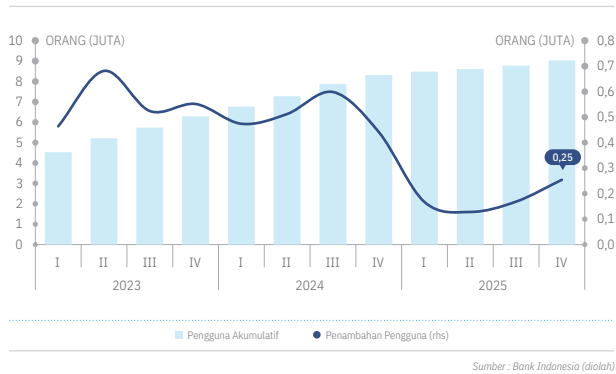
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Grafik 5.38. Merchant QRIS Spasial di Jawa Timur



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Grafik 5.39. Perkembangan Pengguna QRIS

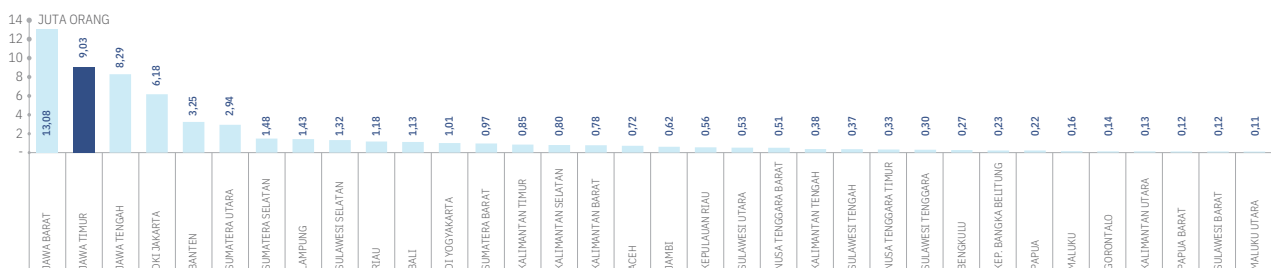


Menguatnya pertumbuhan *merchant* QRIS diikuti dengan pelemahan pertumbuhan nominal dan volume transaksi QRIS dapat menjadi indikasi perlunya penguatan edukasi kemudahan bertransaksi dengan QRIS serta sinergi memberikan insentif kepada masyarakat dalam penggunaan QRIS untuk mencegah status *dormant* terutama pada *merchant* UMKM.

Sejalan dengan tren nominal dan volume transaksi, pengguna QRIS tercatat masih tetap meningkat pada triwulan IV 2025. Hingga triwulan IV 2025, total pengguna QRIS di Jawa Timur mencapai 9,03 juta atau tumbuh sebesar 8,60% (yoy) dan 2,9% (qoq) jika dibandingkan dengan triwulan III 2025. (Grafik 5.39). Lebih lanjut, pengguna QRIS di Jawa Timur hingga triwulan pelaporan menduduki peringkat ke-2 se-Indonesia setelah Jawa Barat (Grafik 5.40).

Intensifikasi perluasan utilisasi QRIS di Jawa Timur terus dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Upaya Bank Indonesia dalam mengakselerasi penggunaan QRIS yang diukur di sisi *demand* dan *supply* tetap dilaksanakan melalui beberapa program kerja sepanjang periode pelaporan, antara lain (i) QRIS Jelajah Indonesia Wilayah Jawa Tahun 2025 menjadi wadah edukasi melalui QRIS *user experience*, (ii) *launching* Pasar Modern SIAP QRIS TAP, di mana pada tahun 2025, fitur QRIS TAP telah diimplementasi untuk mendukung sistem pembayaran non tunai yang lebih cepat dan efisien, (iii) penajakan elektronifikasi moda transportasi menggunakan QRIS bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk memperluas cakupan penggunaan QRIS.

Grafik 5.40. Pengguna QRIS Spasial Jawa Timur



5.3.3.2 Elektronifikasi Bantuan Sosial Nontunai

Bantuan Sosial Nontunai (BSNT) merupakan program Pemerintah yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial, sekaligus mendorong inklusi keuangan melalui pemanfaatan sistem pembayaran nontunai. BSNT mencakup penyaluran Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Penetapan periode penyaluran, penunjukan pihak penyalur, serta pengaturan mekanisme di setiap kabupaten/kota mengikuti kebijakan Kementerian Sosial selaku pemilik program, yang mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Elektronifikasi BSNT diharapkan dapat mempercepat proses distribusi bantuan, mengurangi potensi kebocoran, serta mempermudah pemantauan penyaluran.

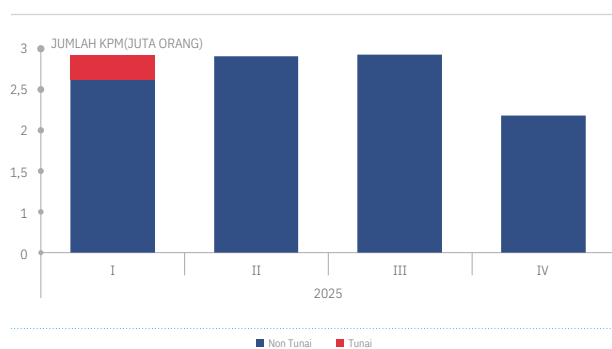
Penyaluran Program Sembako

Penyaluran Program Sembako di Jawa Timur pada triwulan IV 2025 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada periode tersebut, realisasi penyaluran tercatat sebesar Rp1,23 triliun kepada 2,05 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp1,76 triliun untuk 2,94 juta KPM (Grafik 5.41 dan Grafik 5.42). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh pemutakhiran data KPM di tingkat daerah, penyesuaian mekanisme penyaluran nontunai, serta kesiapan bank dan kantor pos penyalur. Pengurangan jumlah KPM terjadi seiring dengan peralihan sistem pencatatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke DTSEN. Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2025 telah disalurkan Rp6,31 triliun bantuan Program Sembako kepada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Secara spasial, Kabupaten Jember merupakan daerah dengan jumlah penerima Program Sembako terbanyak, sedangkan jumlah penerima terendah tercatat di Kota Blitar.

Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH)

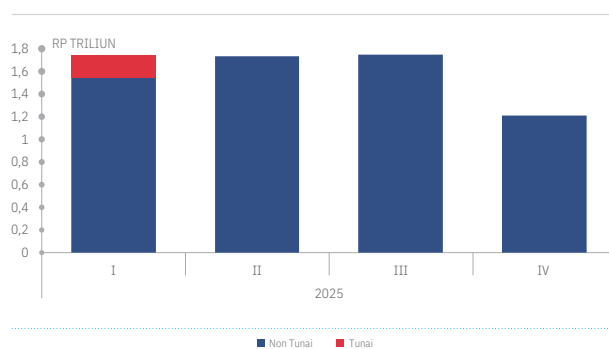
Penyaluran PKH pada triwulan laporan tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2025, jumlah KPM PKH mencapai 1,65 juta dengan total nilai penyaluran sebesar Rp1,26 triliun. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang tercatat sebesar Rp1,20 triliun dengan 1,57 juta KPM (Grafik 5.44 dan Grafik 5.45).

Grafik 5.41. Penerima Program Sembako di Jawa Timur



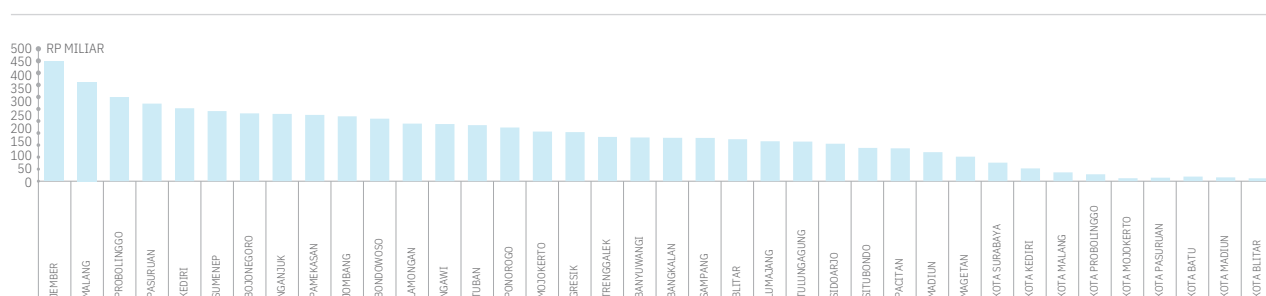
Sumber: Himbara dan Kemenko PM (diolah)

Grafik 5.42. Penyaluran Program Sembako di Jawa Timur



Sumber: Himbara dan Kemenko PM (diolah)

Grafik 5.43. Perkembangan Penyaluran Program Sembako Spasial Jawa Timur

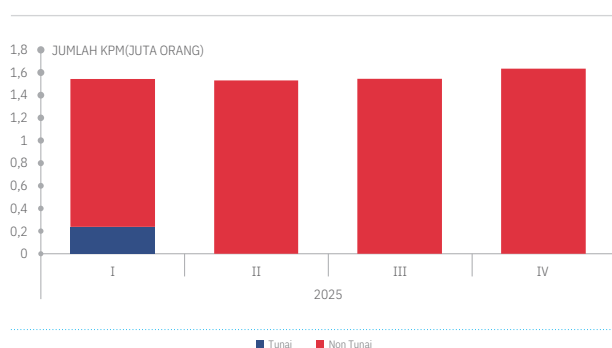


Sumber: Himbara dan Kemenko PM (diolah)

Peningkatan nilai penyaluran dan jumlah penerima PKH sejalan dengan kebijakan penyaluran bantuan sosial yang mengacu pada DTSEN sebagai pengganti DTKS, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Pembaruan DTSEN yang dilakukan setiap triwulan diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Namun demikian, pada triwulan pelaporan masih terdapat tantangan teknis, khususnya terkait proses pembukaan rekening kolektif (burekol) bagi penerima baru. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyaluran membutuhkan waktu lebih lama, karena sebagian bantuan masih disalurkan secara individual melalui agen bank penyalur kepada masing-masing KPM. Secara spasial, realisasi penyaluran PKH tertinggi pada triwulan pelaporan terjadi di Kabupaten Malang, sedangkan yang terendah tercatat di Kota Mojokerto (Grafik 5.46).

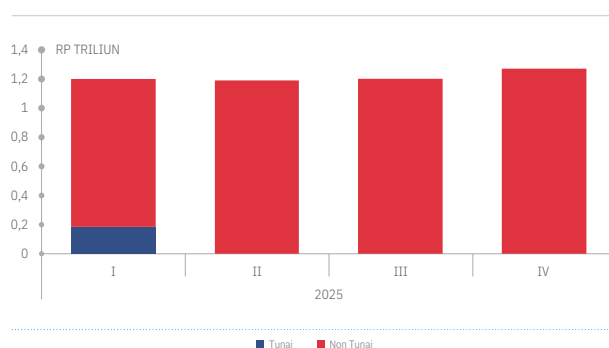
Secara keseluruhan, penyaluran bantuan sosial di Jawa Timur pada triwulan IV 2025 tercatat menurun dibandingkan triwulan sebelumnya akibat penyesuaian jumlah KPM seiring pemutakhiran data. Total penyaluran Program Sembako dan PKH pada triwulan IV 2025 mencapai Rp2,49 triliun, lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya sebesar Rp2,96 triliun. Penurunan tersebut terutama bersumber dari Program Sembako, meskipun penyaluran PKH masih menunjukkan peningkatan. Perkembangan tersebut sejalan dengan membaiknya kondisi kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan Jawa Timur pada September 2025 menurun menjadi 9,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan kemiskinan tersebut juga diikuti oleh perbaikan distribusi pendapatan masyarakat yang tercermin dari menurunnya rasio gini, sehingga mengindikasikan peningkatan

Grafik 5.44. Jumlah Penerima PKH di Jawa Timur

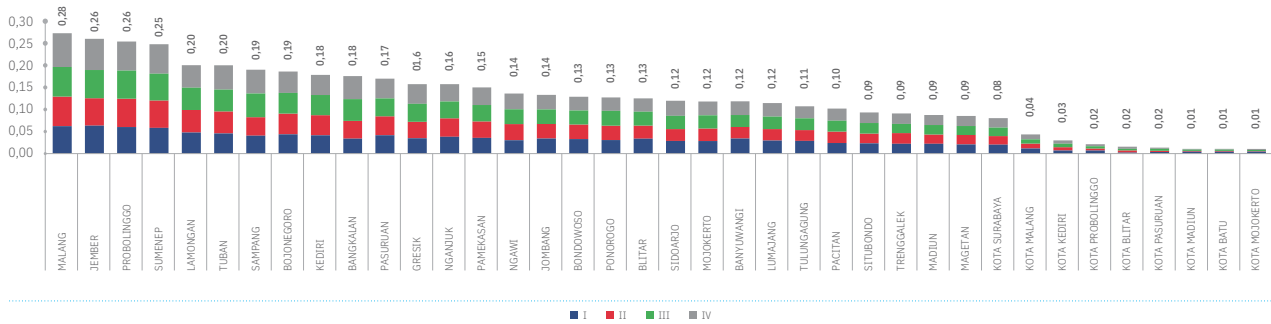


Sumber: Himbara dan Kemenko PM (diolah)

Grafik 5.45. Penyaluran Program PKH di Jawa Timur



Sumber: Himbara dan Kemenko PM (diolah)

Grafik 5.46. Penyaluran Program PKH Spasial di Jawa Timur

Sumber: Himbara dan Kemenko PM (diolah)

kesejahteraan secara umum. Perbaikan tersebut turut didukung oleh membaiknya kondisi ketenagakerjaan pada November 2025 dibandingkan Agustus 2025, yang tecermin dari meningkatnya jumlah tenaga kerja serta menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Di sisi lain, digitalisasi pelaporan penerima bantuan sosial yang diperbarui setiap triwulan turut mendorong penyaluran bansos menjadi semakin tepat sasaran kepada keluarga yang membutuhkan. Dari perspektif Pemerintah Daerah, elektronifikasi bansos juga mencerminkan komitmen dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, serta perluasan inklusi keuangan ke depan.

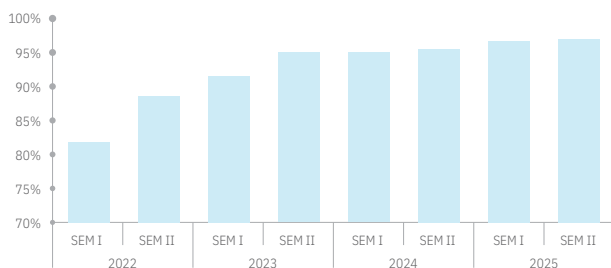
5.3.3.3 Pendampingan Rutin Digitalisasi Kepada Pemerintah Daerah

Bank Indonesia merupakan anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di tingkat pusat maupun daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan inklusivitas digitalisasi Pemerintah. Digitalisasi tidak hanya difokuskan pada transaksi masyarakat skala ritel, tetapi juga mencakup transformasi transaksi Pemerintah Daerah. TP2DD tingkat pusat diketuai oleh Presiden, sedangkan TP2DD tingkat daerah diketuai oleh kepala daerah. Pada tingkat daerah, Bank Indonesia berperan sebagai wakil ketua yang memiliki mandat untuk berkoordinasi dengan seluruh Pemerintah Daerah di wilayah kerja dalam rangka meningkatkan implementasi sistem pembayaran digital pada transaksi pendapatan dan belanja daerah. Upaya tersebut ditempuh melalui penguatan komitmen pimpinan daerah melalui *High Level Meeting* (HLM), pelaksanaan

program literasi kepada masyarakat melalui berbagai media, serta *capacity building* bagi aparatur Pemerintah Daerah guna mendukung operasionalisasi pembayaran digital. Ke depan, penguatan pemanfaatan kanal nontunai serta sistem pencatatan digital yang terpusat diharapkan dapat memperkuat tata kelola kelembagaan, meminimalkan potensi penyimpangan anggaran, serta meningkatkan efisiensi proses bisnis Pemerintah Daerah.

Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan seiring waktu.

Pada semester II 2025, Indeks ETPD tercatat sebesar 97,38%, meningkat dibandingkan semester I 2025 yang sebesar 96,89% (Grafik 5.47). Capaian tersebut mencerminkan semakin kuatnya implementasi digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah yang diukur melalui tiga aspek utama, yaitu implementasi kanal pembayaran nontunai, realisasi pendapatan dan belanja secara nontunai, serta dukungan lingkungan strategis dalam penerapan transaksi digital. Dari sisi implementasi, capaian ETPD di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur relatif merata dan berada pada kategori baik. Namun demikian, aspek lingkungan strategis masih memerlukan penguatan lebih lanjut, khususnya di Kabupaten Sumenep, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Bangkalan. Selain itu, aspek realisasi transaksi yang mencakup kanal konvensional, nondigital, dan digital masih menunjukkan dinamika yang fluktuatif sehingga memerlukan optimalisasi berkelanjutan, terutama melalui peningkatan pemanfaatan kanal nontunai serta penguatan infrastruktur pendukung digitalisasi (Grafik 5.48).

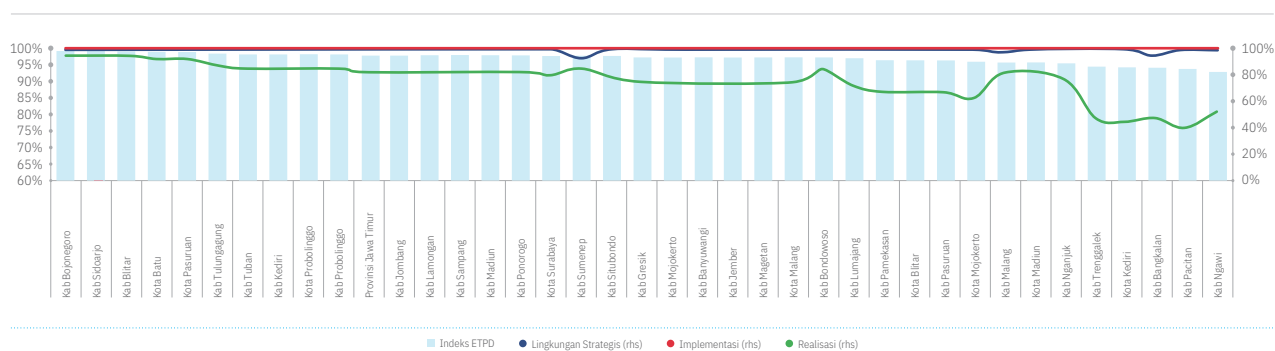
Grafik 5.47. Perkembangan rata-rata Indeks ETPD 39 OPD se-Jawa Timur

Sumber: Kemenko PM (diolah)

Kinerja digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah di Jawa Timur menunjukkan capaian yang positif.

Secara keseluruhan, mayoritas kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami peningkatan Indeks ETPD pada semester II 2025 dibandingkan semester sebelumnya dan ke depan terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang masih perlu lebih ditingkatkan. Kinerja digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah di Jawa Timur pada tahun 2025 memperoleh pengakuan di tingkat nasional. Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2025 yang diserahkan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) November 2025, termasuk

Grafik 5.48. Indeks ETPD spasial Jawa Timur beserta aspek penilaiannya



Sumber: Kemenko PM (diolah)

penghargaan Program Unggulan Terbaik I dalam peningkatan layanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pada tingkat daerah, Kota Madiun mencatatkan capaian Indeks ETPD tertinggi di Jawa Timur sebesar 99,75 persen. Sementara itu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) dinobatkan sebagai BPD Terbaik Nasional 2025 atas dukungannya dalam digitalisasi keuangan daerah.



06.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan



6.1. Gambaran Umum

Kondisi ketenagakerjaan Jawa Timur pada November 2025 secara struktural mengalami peningkatan. Peningkatan kondisi ketenagakerjaan tersebut tecermin dari meningkatnya pekerja penuh waktu. Pada November 2025, kondisi ketenagakerjaan Jawa Timur membaik dibandingkan Agustus 2025, ditandai dengan turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,71% dan naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi 74,39%, seiring meningkatnya penyerapan tenaga kerja di LU Jasa Kemasyarakatan, dan Akomodasi Makan Minum. Jumlah tenaga kerja berpendidikan rendah hingga menengah meningkat seiring dengan kenaikan kebutuhan tenaga kerja sektor jasa. Sebaliknya, tenaga kerja berpendidikan tinggi menurun terindikasi disebabkan oleh peralihan ke status Bukan Angkatan kerja, atau migrasi ke kota lain.

Pada triwulan IV 2025, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur tercatat tetap kuat, terutama pada LU Pertanian, Perdagangan, Akomodasi Makan Minum, dan Jasa. Berdasarkan Survei Kondisi Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia Jawa Timur, peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi pada LU Pertanian, Perdagangan, Akomodasi Makan Minum, dan Konstruksi. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejalan dengan kinerja aktivitas ekonomi pada LU Pertanian, Perdagangan, Akomodasi Makan Minum, dan Jasa yang tumbuh lebih tinggi pada triwulan IV 2025. Peningkatan kualitas pendidikan, serta transisi kualitas tenaga kerja ke sektor formal dan sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi, menjadi tantangan utama dalam upaya peningkatan ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Jawa Timur.

Kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2025 terpantau meningkat dibandingkan Maret 2025 dan September 2024. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tecermin dari penurunan jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur pada September 2025 dibandingkan Maret 2025 dan September 2024, yang diiringi dengan penurunan tingkat kesenjangan ekonomi. Perbaikan tingkat kesejahteraan didukung oleh pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hingga triwulan III 2025 yang tetap positif, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 dibandingkan Agustus 2024, serta konsumsi rumah tangga yang meningkat pada triwulan III 2025. Inflasi IHK Jawa Timur pada triwulan III 2025 terjaga di sasaran inflasi nasional $2,5\% \pm 1\%$, dan peningkatan NTP pada triwulan III 2025 turut menjaga daya beli masyarakat. Lebih lanjut, perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur didukung oleh program peningkatan kesejahteraan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kesejahteraan masyarakat pedesaan mengalami perbaikan seiring dengan kenaikan harga hortikultura sayuran, peningkatan penerimaan petani komoditas hasil ternak dan perikanan, serta meningkatnya permintaan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berimplikasi pada naiknya Nilai Tukar Petani (NTP). NTP meningkat dari 115,05 pada triwulan III 2025 menjadi 118,96 pada triwulan IV 2025.

Hal tersebut didukung oleh peningkatan harga sayuran, seperti selada, tomat, cabai rawit, dan bawang merah, seiring penurunan volume produksi. Lebih lanjut, peningkatan permintaan komoditas hasil ternak, seperti daging dan telur, serta komoditas perikanan sejalan dengan peningkatan produksi dan permintaan pada momen Nataru, dan untuk memenuhi kebutuhan program MBG, memicu peningkatan NTP pada triwulan laporan. Peningkatan NTP yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan NTP pada tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat. Penurunan NTP tanaman pangan terutama terjadi pada penurunan harga gabah dan beras, sementara rendahnya NTP tanaman perkebunan rakyat seiring penurunan harga gula.

6.2. Ketenagakerjaan

6.2.1. Perkembangan Ketenagakerjaan Jawa Timur

Kondisi ketenagakerjaan Jawa Timur pada November 2025 secara struktural mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2025. Hal ini tecermin dari penurunan TPT yang disertai dengan peningkatan TPAK. TPT Jawa Timur pada November 2025 tercatat sebesar 3,71%, lebih rendah dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 3,88% (Tabel 6.1). Penurunan TPT ini didorong oleh meningkatnya jumlah tenaga kerja yang bekerja penuh, baik di sektor formal maupun informal, serta peningkatan tenaga kerja di sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan akomodasi makan minum. Peningkatan tenaga kerja di sektor-sektor tersebut sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi pada triwulan laporan. Sementara itu, TPT Jawa Timur pada November 2025 sebesar 3,71% sedikit lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 yang tercatat 3,61%. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan, seiring normalisasi permintaan tenaga kerja musiman setelah momen Ramadan dan HBKN Idulfitri, serta rangkaian libur nasional selama semester I 2025.

Sementara itu, TPAK Jawa Timur pada November 2025 tercatat 74,39%, lebih tinggi dibandingkan Agustus 2025 sebesar 73,98% dan Februari 2025 yang tercatat 74,25% (Tabel 6.1). Secara umum, peningkatan TPAK menunjukkan kenaikan angkatan kerja terhadap jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas atau penduduk produktif. Peningkatan TPAK ini terutama terlihat pada angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah dan angkatan kerja terampil yang aktif mencari pekerjaan, sejalan dengan pertumbuhan pencari kerja di kelompok pendidikan SD ke bawah hingga SMA. Secara keseluruhan, kenaikan TPAK di Jawa Timur pada November 2025 dibandingkan Agustus 2025 dan Februari 2025 terutama didukung oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja yang bekerja penuh.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) Jawa Timur cenderung meningkat. Pada 2025, *dependency ratio* tercatat sebesar 44,31%, artinya setiap 1.000 penduduk usia kerja (15–64 tahun, dianggap produktif) memiliki tanggungan sekitar

440–443 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi. Angka ini meningkat dibandingkan 2024 yang sebesar 43,87%. Rasio ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum atau tidak produktif meningkat (Tabel 6.1).

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, pada November 2025, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Timur. Pangsa penyerapan tenaga kerja LU Pertanian tercatat 31,96%, lebih rendah dibandingkan Agustus 2025 (32,68%) namun lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 (30,97%). Meski begitu, secara jumlah, tenaga kerja di LU Pertanian meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas produksi pertanian yang didukung kondisi kemarau basah, sehingga optimalnya produksi beberapa komoditas pertanian, seperti padi dan hortikultura (sayuran dan buah). Peningkatan kinerja produksi daging ayam dan perikanan tangkap turut mendukung meningkatnya jumlah tenaga kerja LU Pertanian pada November 2025 dibandingkan Agustus dan Februari 2025.

LU Perdagangan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar kedua di Jawa Timur pada November 2025, dengan pangsa 18,44%, lebih rendah dibandingkan Agustus 2025 (18,87%) dan Februari 2025 (19,66%). Secara jumlah, penyerapan tenaga kerja di LU Perdagangan sejalan dengan pertumbuhan sektor ini pada triwulan IV 2025 yang mencapai 5,01% (yoy), lebih tinggi

dibanding triwulan sebelumnya (3,41% yoy). Penurunan jumlah tenaga kerja dibandingkan Februari 2025 disebabkan normalisasi permintaan tenaga kerja musiman pada momen Ramadan, HBKN Idulfitri, serta rangkaian hari libur nasional pada semester I 2025. Kondisi serupa juga terjadi pada LU Jasa Kemasyarakatan.

LU Industri Pengolahan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar ketiga di Jawa Timur, dengan pangsa 14,90% pada November 2025. Angka ini lebih rendah dibandingkan Agustus 2025 (15,23%), namun lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 (14,08%). Secara jumlah, tenaga kerja di LU Industri Pengolahan meningkat dibanding Agustus dan Februari 2025, terutama didorong kinerja ekspor dan pertumbuhan LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2025, masing-masing sebesar 6,65% (yoy) dan 6,28% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ekspor dalam negeri dan luar negeri untuk komoditas ikan dan hasil laut, produk kimia, kertas, dan tembaga turut berimplikasi pada meningkatnya jumlah tenaga kerja.

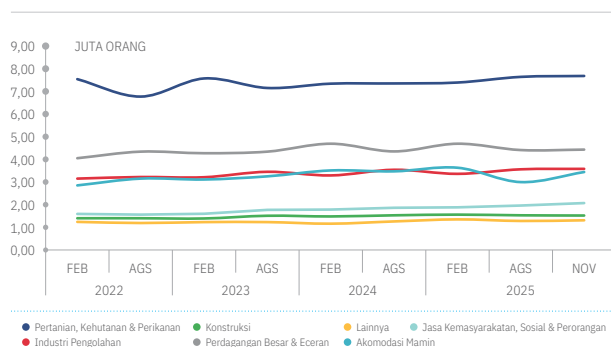
Selain itu, peningkatan penyerapan dan jumlah tenaga kerja juga terjadi pada LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pangsa penyerapan tenaga kerja di sektor ini tercatat 8,61%, lebih tinggi dibanding Agustus 2025 (8,38%) dan Februari 2025 (7,88%). Peningkatan tenaga kerja di LU Akomodasi Makan Minum pada November 2025 didorong oleh pertumbuhan sektor ini pada triwulan IV 2025 yang mencapai 8,96% (yoy). Pertumbuhan tersebut sejalan dengan

Tabel 6.1. Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Timur (juta orang)

Kegiatan	2023		2024		2025		
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Nov
Angkatan Kerja	23,42	23,87	24,14	24,38	24,75	24,76	24,96
Bekerja Penuh	14,54	15,27	14,62	15,50	15,02	15,85	16,55
Bekerja Paruh Waktu	6,44	6,13	7,02	6,21	7,18	6,39	6,18
Bekerja Setengah Pengangguran	1,43	1,30	1,59	1,65	1,66	1,56	1,30
Penganggur	1,01	1,17	0,90	1,02	0,89	0,96	0,93
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,50%	72,56%	73,02%	73,46%	74,25%	73,98%	74,39%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,33%	4,88%	3,74%	4,18%	3,61%	3,88%	3,71%
Rasio Ketergantungan	43,44%		43,87%		44,31%		

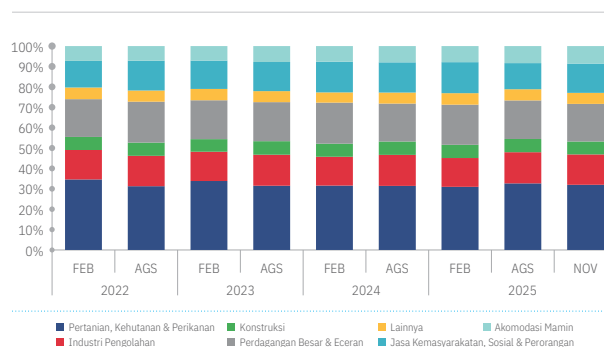
Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)

Grafik 6.1. Jumlah Tenaga Kerja LU Utama

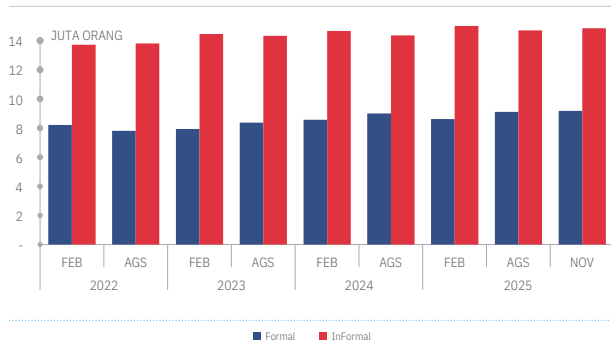


Sumber : BPS Jatim (diolah)

Grafik 6.2. Pangsa Tenaga Kerja Sektoral



Sumber : BPS Jatim (diolah)

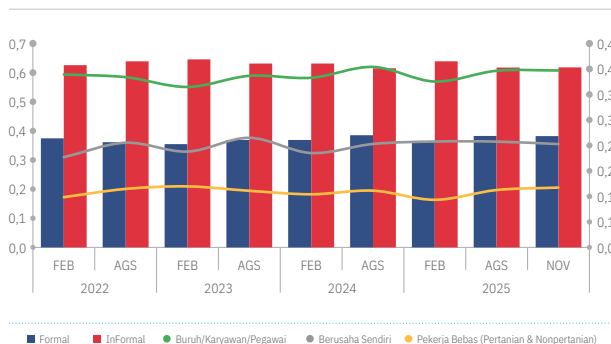
Grafik 6.3. Penyerapan Tenaga Kerja Formal-Informal

Sumber : BPS Jatim (diolah)

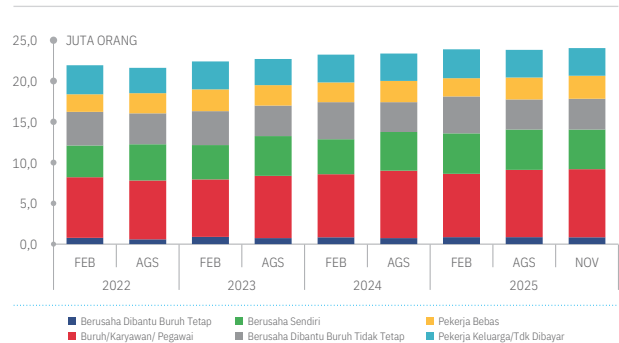
meningkatnya kondisi usaha penyedia makanan dan minuman, dipicu oleh peningkatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang hingga akhir 2025 telah beroperasi di 18.180 unit, serta akselerasi permintaan pada periode HBKN Natal dan Tahun baru.

Kondisi tenaga kerja di Jawa Timur pada November 2025 berdasarkan Status Pekerjaan Utama masih didominasi oleh sektor informal. Pada November 2025, pangsa penduduk yang bekerja di sektor informal terhadap total tenaga kerja tercatat sebesar 61,80%, meningkat dibanding Agustus 2025 (61,74%), namun lebih rendah dibanding Februari 2025 (63,90%). Berdasarkan status pekerjaannya, peningkatan pangsa tenaga kerja sektor informal dibanding Agustus 2025 terutama terjadi pada tenaga kerja pekerja bebas, dari 11,26% menjadi 11,74% pada November 2025 (Grafik 6.5). Secara jumlah, tenaga kerja informal di Jawa Timur pada November 2025 meningkat dibanding Agustus 2025, namun lebih rendah dibanding Februari 2025. Jumlah tenaga kerja informal pada November 2025, Agustus 2025, dan Februari 2025 masing-masing sebesar 14,85 juta, 14,70 juta, dan 15,26 juta (Grafik 6.3). Peningkatan jumlah tenaga kerja informal sejalan dengan meningkatnya tenaga kerja di LU Pertanian dan Perdagangan.

Pangsa tenaga kerja formal terhadap total tenaga kerja di Jawa Timur pada November 2025 mengalami penurunan dibanding Agustus 2025, namun meningkat dibanding Februari 2025. Pada November 2025, pangsa penduduk yang bekerja di sektor

Grafik 6.5. Penyerapan Tenaga Kerja Formal-Informal secara sektor (berdasarkan Persentase)

Sumber : BPS Jatim (diolah)

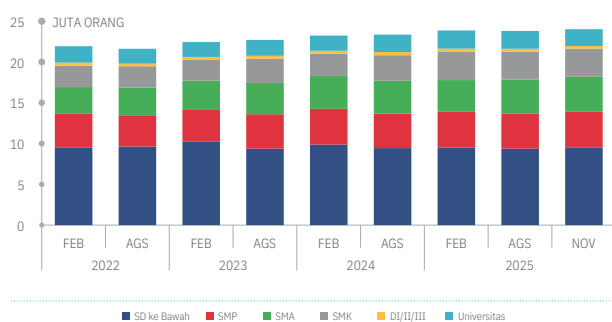
Grafik 6.4. Komposisi Tenaga Kerja Formal-Informal

Sumber : BPS Jatim (diolah)

formal sebesar 38,20%, sedikit lebih rendah dibanding Agustus 2025 (38,26%) dan lebih tinggi dibanding Februari 2025 (36,10%) (Grafik 6.3–6.4). Secara jumlah, tenaga kerja formal pada November 2025 meningkat dibanding Agustus 2025 maupun Februari 2025, masing-masing sebesar 9,18 juta, 9,11 juta, dan 8,62 juta tenaga kerja. Peningkatan ini terutama terjadi pada penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai (Grafik 6.4), yang ditopang oleh kinerja LU Industri Pengolahan yang tumbuh lebih tinggi pada triwulan IV 2025. Selain itu, pengangkatan ASN PPPK tahap 2 tahun 2024 yang mulai bekerja pada 1 Oktober 2025, serta peningkatan SPPG untuk program MBG, turut mendorong kenaikan tenaga kerja formal pada November 2025.

Secara kualitas, kinerja sektor ketenagakerjaan di Jawa Timur tetap terjaga. Jumlah tenaga kerja formal pada November 2025 meningkat dibanding Agustus 2025 dan Februari 2025, sementara jumlah tenaga kerja sektor informal meningkat dibanding Agustus 2025, namun menurun dibanding Februari 2025. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan tenaga kerja sektor formal pada November 2025, terutama dibanding kondisi Februari 2025.

Pada November 2025, jumlah tenaga kerja dengan pendidikan terakhir SD ke bawah, SMP, SMA, dan SMK mengalami peningkatan dibanding Agustus 2025. Jika dibandingkan dengan Februari 2025, peningkatan tenaga kerja terutama terjadi pada kelompok lulusan SMA. Hal ini tecermin dari kenaikan jumlah tenaga kerja lulusan SD ke bawah, SMP, SMA, dan SMK pada November 2025 dibanding Agustus 2025. Secara pangsa, tenaga kerja lulusan SD ke bawah, SMP, SMA, dan SMK pada November 2025 masing-masing sebesar 39,66%; 18,35%; 17,69%; dan 14,36% terhadap total tenaga kerja di Jawa Timur (Grafik 6.6–6.7). Peningkatan ini didorong oleh LU Pertanian dan Perdagangan yang banyak menyerap tenaga kerja berpendidikan lebih rendah, serta LU Akomodasi Makan Minum dan beberapa LU Industri Pengolahan yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan menengah. Namun, meskipun jumlah tenaga kerja meningkat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada lulusan SD ke bawah, SMA, dan SMK justru mengalami kenaikan dibanding Agustus dan Februari 2025. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan kebutuhan

Grafik 6.6. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

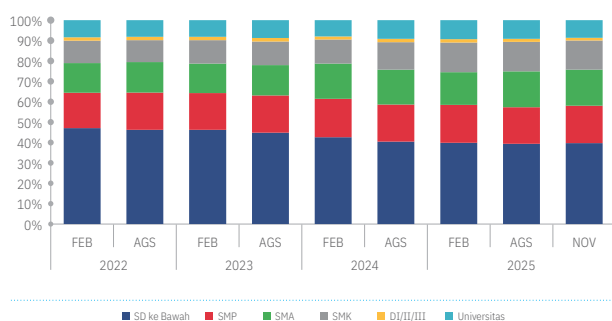
Sumber : BPS Jatim (diolah)

sektor-sektor yang ada. Sektor-sektor tertentu mungkin tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja tersebut, sehingga pengangguran tetap tinggi di kelompok lulusan SD ke bawah, SMA, dan SMK (Grafik 6.8).

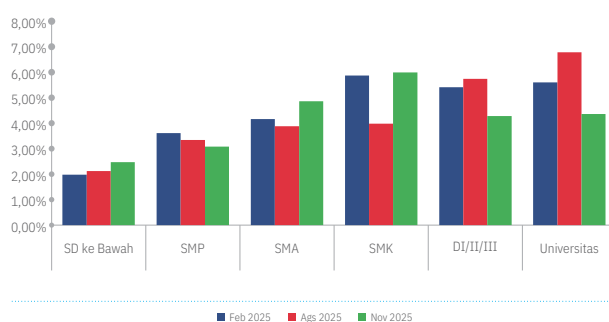
Sementara itu, tenaga kerja dengan pendidikan diploma dan perguruan tinggi mengalami penurunan jumlah, namun tingkat pengangguran di kelompok ini justru menurun. Penurunan pengangguran menunjukkan bahwa tenaga kerja berpendidikan tinggi lebih banyak terserap oleh sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan lebih spesifik dan terampil, meskipun jumlahnya lebih sedikit. Selain itu, periode November 2025 bukan termasuk periode kelulusan diploma atau perguruan tinggi, yang turut memengaruhi penurunan jumlah tenaga kerja dengan pendidikan tinggi sekaligus penurunan tingkat penganggurannya (Grafik 6.7–6.8).

Lebih lanjut, beberapa upaya yang telah diimplementasikan oleh Provinsi Jawa Timur untuk meminimalkan *gap* atau *mismatch* antara pasokan tenaga kerja terdidik dan permintaan industri meliputi:

1. Memetakan kebutuhan tenaga kerja pada sektor industri dan sektor ekonomi produktif, sehingga lulusan lebih siap memasuki dunia kerja.
2. Memberdayakan para ahli di bidang tertentu dengan sertifikasi nasional dan internasional sebagai pendamping tenaga pengajar SMA maupun SMK.

Grafik 6.7. Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber : BPS Jatim (diolah)

Grafik 6.8. Komposisi TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber : BPS Jatim (diolah)

3. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi, khususnya bagi lulusan SMK, agar memiliki kredibilitas dan daya saing dengan tenaga kerja asing, serta mampu memenuhi standar kebutuhan industri.
4. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja melalui penyesuaian kurikulum sesuai kebutuhan industri, peningkatan keterampilan praktis, serta pelaksanaan program pelatihan berbasis kompetensi melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
5. Memperluas kerja sama antara institusi pendidikan dengan industri, perusahaan, atau BUMN melalui program magang dan beasiswa (Program Magang Lulusan Baru).
6. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dengan pelaksanaan rekrutmen secara berkala, terutama untuk lulusan SMA, SMK, Diploma, dan Universitas, seperti rekrutmen BUMN Bersama, CPNS, PPPK, serta *Officer Development Program*.
7. Memberikan insentif dan stimulus ekonomi (8+4+5), sebagai langkah terpadu Pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui sinergi antara insentif fiskal, perlindungan sosial, dan akselerasi investasi.

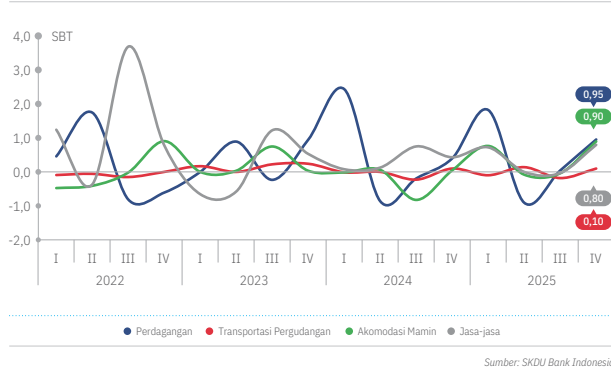
Nilai tambah penyerapan tenaga kerja terhadap PDRB relatif terbatas karena produktivitas terhadap PDRB yang relatif rendah. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya produktivitas LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menjadi penyerap tenaga kerja tertinggi berdampak pada rendahnya pendapatan per pekerja di LU tersebut. Selain itu, rendahnya pendidikan pada LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, LU Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah, serta pada LU Jasa Lainnya menunjukkan kebutuhan tenaga terampil yang relatif rendah. Sebaliknya, LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan, LU Informasi dan Komunikasi, LU Jasa Keuangan, dan LU *Real Estate* yang menyerap 14,90%, 0,62%, 0,67%, 0,96%, dan 0,12% tenaga kerja, berkontribusi 45,36% terhadap PDRB Jawa Timur. Penggunaan teknologi dan kualitas tenaga kerja yang lebih tinggi menjadi salah satu faktor pendorong produktivitas pada LU tersebut (Tabel 6.4).

Tabel 6.2. Perbandingan Kinerja Penyerapan Tenaga Kerja dan Nilai Tambah Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Tenaga Kerja (Nov 2025)		PDRB ADHK (Tahun 2025)		Nilai Tambah (PDRB/Tenaga Kerja)
	Jumlah (Juta)	Pangsa	Nominal (Rp. Triliun)	Pangsa	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,68	31,96%	186,66	9,15%	24,31
Pertambangan dan Penggalian	0,15	0,62%	73,67	3,61%	491,15
Industri Pengolahan	3,58	14,90%	623,80	30,59%	174,25
Pengadaan Listrik	0,05	0,21%	7,06	0,35%	141,22
Pengadaan Air, Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,67%	1,96	0,10%	12,26
Konstruksi	1,52	6,33%	190,30	9,33%	125,20
Perdagangan Besar dan Eceran	4,43	18,44%	383,58	18,81%	86,59
Transportasi dan Pergudangan	0,72	3,00%	70,89	3,48%	98,46
Akomodasi dan Makan Minum	2,07	8,61%	117,60	5,77%	56,81
Informasi dan Komunikasi	0,16	0,67%	145,37	7,13%	908,59
Jasa Keuangan	0,23	0,96%	47,51	2,33%	206,58
Real Estate	0,03	0,12%	34,54	1,69%	1151,27
Jasa Perusahaan	0,46	1,91%	16,73	0,82%	36,37
Administrasi Pemerintahan	0,43	1,79%	38,57	1,89%	89,70
Jasa Pendidikan	1,07	4,45%	54,31	2,66%	50,76
Jasa Kesehatan	0,37	1,54%	15,34	0,75%	41,47
Jasa Lainnya	0,92	3,83%	31,04	1,52%	33,74
TOTAL	24,03	100,00%	2.038,96	100,00%	84,85

Sumber: BPS Jatim (diolah)

Pada triwulan IV 2025, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur tercatat tetap kuat, terutama pada LU Pertanian, Perdagangan, Akomodasi Makan Minum, serta Jasa-jasa. Berdasarkan Survei Kondisi Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia Jawa Timur, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyerapan tenaga kerja pada LU Pertanian, Perdagangan, Akomodasi Makan Minum, dan Jasa-jasa masing-masing tercatat 0,95%; 0,10%; 0,90%; dan 0,80% pada triwulan IV 2025, lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 0,04%; -0,18%; -0,04%; dan -0,03% (SBT) (Grafik 6.9). Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejalan dengan pertumbuhan PDRB pada sektor-sektor tersebut, yang mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi pada triwulan IV 2025.

Grafik 6.9. Kondisi Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha

Sumber: SKDU Bank Indonesia

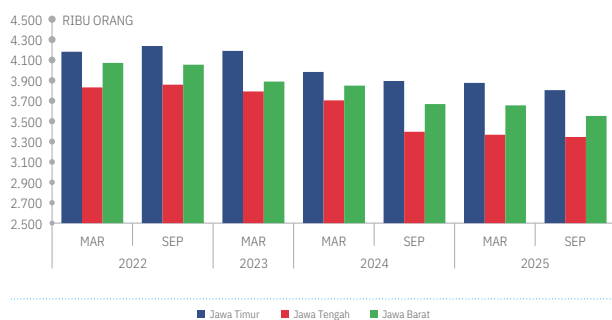
Peningkatan kualitas pendidikan serta transisi tenaga kerja ke sektor formal dan sektor dengan nilai tambah lebih tinggi menjadi tantangan utama dalam upaya peningkatan ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Jawa Timur.

6.3. Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2025 membaik dibandingkan Maret 2025 dan September 2024³⁴. Perbaikan ini tecermin dari penurunan jumlah penduduk pra-sejahtera, dari 3,88 juta jiwa (9,50% dari total penduduk) pada Maret 2025 dan 3,90 juta jiwa (9,56% dari total penduduk) pada September 2024 menjadi 3,80 juta jiwa (9,30% dari total penduduk) pada September 2025 (Grafik 6.10 – 6.11). Perbaikan tingkat kesejahteraan didukung oleh pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan III 2025 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,22% (yoy). Penurunan TPT pada Agustus 2025 dibandingkan Agustus 2024, serta konsumsi rumah tangga yang tumbuh meningkat pada triwulan III 2025 turut menunjang perbaikan kesejahteraan Jawa Timur pada September 2025. Lebih lanjut, inflasi IHK Jawa Timur pada triwulan III 2025 terjaga di sasaran inflasi nasional 2,5%±1% sehingga daya beli masyarakat terjaga³⁵. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) triwulan III 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025. Hal tersebut menyokong perbaikan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

34. Data terkini yang disampaikan oleh BPS Provinsi Jawa Timur pada 5 Februari 2025.

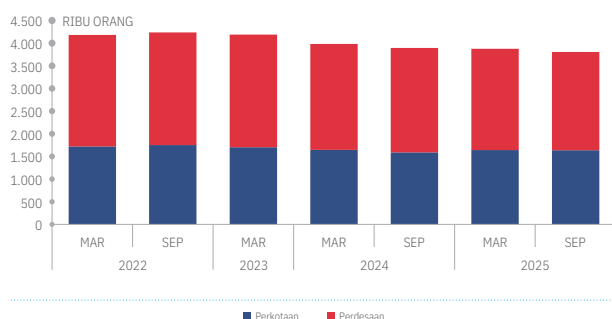
35. Inflasi IHK Jawa Timur pada triwulan I dan II 2025 tercatat 0,77% dan 2,02% (yoy), terjaga pada sasaran inflasi nasional 2,5%±1% (yoy).

Grafik 6.10. Jumlah Penduduk Pra-Sejahtera Provinsi di Wilayah Jawa

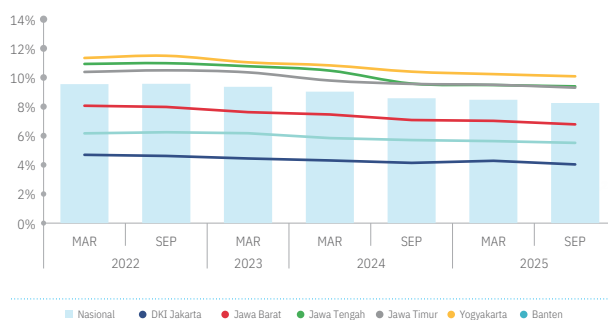
Sumber : BPS Jatim (diolah)

Peningkatan kesejahteraan yang tecermin dari penurunan jumlah penduduk pra-sejahtera juga didukung oleh realisasi program peningkatan kesejahteraan Pemerintah. Program tersebut antara lain: Program Keluarga Harapan (PKH Plus), Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), Keluarga Penerima Manfaat Kewirausahaan Inklusif dan Produktif Jawa Timur Sejahtera (KPM JAWARA), Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera (PUTRI JAWARA), bantuan Kemiskinan Ekstrem (KE), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jawa Timur Sejahtera (PPKS JAWARA), bansos Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), serta bansos Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU). Selain itu, terdapat program untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan ekstrem, seperti rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), jambanisasi, dan elektrifikasi untuk memperbaiki kondisi permukiman.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur di wilayah pedesaan pada September 2025 meningkat dibandingkan periode Maret 2025 dan September 2024, sementara tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perkotaan pada September 2025 hanya meningkat dibandingkan Maret 2025. Pada September 2025, jumlah penduduk pra-sejahtera yang tinggal di perkotaan sebanyak 1,63 juta jiwa (6,93% dari total penduduk di perkotaan), lebih rendah dibandingkan pada Maret 2025 (1,64 juta jiwa atau 7,00% dari total penduduk di perkotaan), namun lebih tinggi dibandingkan September 2024 (1,59 juta jiwa atau 6,83% dari total penduduk di perkotaan).

Grafik 6.12. Jumlah Penduduk Pra-Sejahtera Desa dan Kota

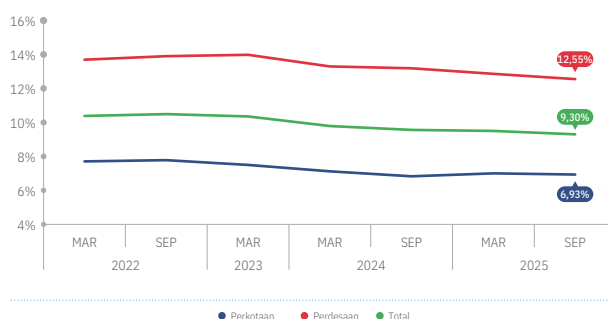
Sumber : BPS Jatim (diolah)

Grafik 6.11. Persentase Penduduk Pra-Sejahtera Provinsi di Wilayah Jawa

Sumber : BPS (diolah)

Perbaikan tingkat kesejahteraan Jawa Timur di wilayah perkotaan dibandingkan kondisi Maret 2025 didorong oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Akomodasi Makan Minum, dan Informasi Komunikasi Jawa Timur pada triwulan III 2025. Sementara itu, jumlah penduduk pra-sejahtera yang tinggal di pedesaan turut menurun dari 2,23 juta jiwa (12,86% dari total penduduk di pedesaan) pada Maret 2025 dan 2,30 juta jiwa (13,19% dari total penduduk di pedesaan) pada September 2024, turun menjadi 2,17 juta jiwa (12,55% dari total penduduk di pedesaan) pada September 2025. Hal tersebut ditunjang oleh LU Pertanian dan Perdagangan yang tumbuh positif pada triwulan III 2025, serta penyaluran bantuan sosial dan realisasi program peningkatan kesejahteraan (pengentasan kemiskinan) di Jawa Timur (Grafik 6.12 – 6.13).

Pada semester I 2026 (Maret 2026), tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur diperkirakan membaik dibandingkan semester II 2025 (September 2025). Potensi peningkatan kesejahteraan terindikasi dari optimisme Indeks Ekspektasi Penghasilan 6 bulan yang akan datang dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja 6 bulan yang akan datang berdasarkan SK Bank Indonesia di Jawa Timur³⁶. Hal tersebut sejalan dengan potensi daya beli masyarakat yang lebih kuat dengan tingkat inflasi yang diperkirakan tetap terjaga. Selain itu, potensi panen raya padi serta momen Ramadan dan HBKN Idulfitri pada triwulan I 2026 turut menunjang perbaikan kesejahteraan masyarakat pada Maret 2026 (semester I 2026).

Grafik 6.13. Persentase Penduduk Pra-Sejahtera Desa dan Kota

Sumber : BPS Jatim (diolah)

36. Indeks Ekspektasi Penghasilan 6 bulan yang akan datang dan indeks Ketersediaan Lapangan Usaha 6 bulan yang akan datang di Jawa Timur optimis melanjutkan perbaikan (prakiraan angka Maret 2025) masing-masing tercatat sebesar 150,76 dan 148,08 (>100).

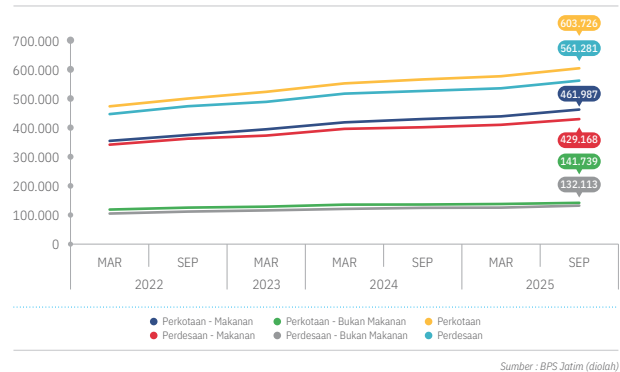
Grafik 6.14. Garis Kemiskinan Makanan dan Non-makanan



Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok pra-sejahtera, serta melalui program Insentif Stimulus Ekonomi (8+4+5) diprakirakan turut menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan kesejahteraan (penganggulangan kemiskinan) di Jawa Timur terus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, baik melalui kebijakan makroekonomi maupun intervensi program. Intervensi program penganggulangan kemiskinan di Jawa Timur diupayakan melalui program Jatim Satya (Jawa Timur Sejahtera dan Mulia). Program-program tersebut antara lain meliputi: (i) Program pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan beban pengeluaran, yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Program Keluarga Harapan (PKH Plus), Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), Keluarga Penerima Manfaat Kewirausahaan Inklusif dan Produktif Jawa Timur Sejahtera (KPM JAWARA), Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera (PUTRI JAWARA), bantuan Kemiskinan Ekstrem (KE), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jawa Timur Sejahtera (PPKS JAWARA), bansos Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), serta bansos Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU), (ii) program peningkatan pendapatan masyarakat, antara lain: Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra), Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk BUMDESA, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), (iii) program untuk mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan, antara lain: rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga, Kodam V Brawijaya, dan Lantamal V, program jambanisasi, serta program elektrifikasi. Lebih lanjut, program Insentif Stimulus Ekonomi (8+4+5) Pemerintah, sebagai langkah terpadu untuk memperkuat daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui sinergi antara insentif fiskal, perlindungan sosial, dan akselerasi investasi, diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

37. Kesejahteraan masyarakat Jawa Timur terindikasi meningkat tecermin dari menurunnya jumlah penduduk pra-sejahtera pada periode September 2025 di tengah peningkatan Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan Jawa Timur meningkat dari Rp547.751 pada September 2024 dan Rp558.029 pada Maret 2025 menjadi Rp585.020 per kapita/bulan pada September 2025 (Grafik 6.14–6.15). Hal ini menunjukkan semakin banyak penduduk di Jawa Timur yang mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, baik makanan maupun bukan makanan, dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Grafik 6.15. Garis Kemiskinan Makanan dan Non-makanan Desa dan Kota



Kesejahteraan masyarakat Jawa Timur terindikasi meningkat tecermin dari menurunnya jumlah penduduk pra-sejahtera pada periode September 2025 di tengah peningkatan Garis Kemiskinan (GK)³⁷. Garis Kemiskinan Jawa Timur meningkat dari Rp547.751 pada September 2024 dan Rp558.029 pada Maret 2025 menjadi Rp585.020 per kapita/bulan pada September 2025 (Grafik 6.14–6.15). Hal ini menunjukkan semakin banyak penduduk di Jawa Timur yang mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, baik makanan maupun bukan makanan, dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Indikator kesenjangan ekonomi pada September 2025 menunjukkan penurunan dibanding Maret 2025 dan September 2024. Hal tersebut tecermin dari penurunan *Rasio Gini* dari 0,369 pada Maret 2025 dan 0,373 pada September 2024 menjadi 0,359 pada September 2025. *Rasio Gini* di perkotaan maupun pedesaan mengalami penurunan dibanding periode Maret 2025 dan September 2024 (Tabel 6.3).

Tabel 6.3. Rasio Gini Jawa Timur

Tahun	Gini Ratio		
	Kota	Desa	Kota+Desa
Maret 2022	0,388	0,323	0,371
Sept 2022	0,381	0,322	0,365
Mar 2023	0,404	0,337	0,387
Mar 2024	0,387	0,325	0,372
Sep 2024	0,388	0,332	0,373
Mar 2025	0,383	0,326	0,369
Sep 2025	0,376	0,319	0,359

Sumber : BPS Jatim (diolah)

6.4. Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan

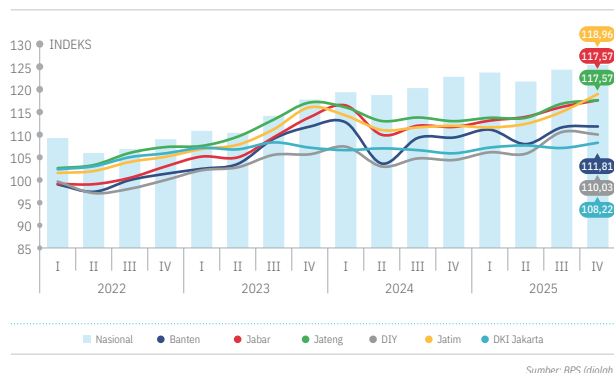
6.4.1. Kesejahteraan Petani

Tingkat kesejahteraan petani di Jawa Timur pada triwulan IV 2025 terjaga dan membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 118,96, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar 115,05. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan harga hortikultura seiring penurunan volume produksi padi pada triwulan III 2025, peningkatan harga

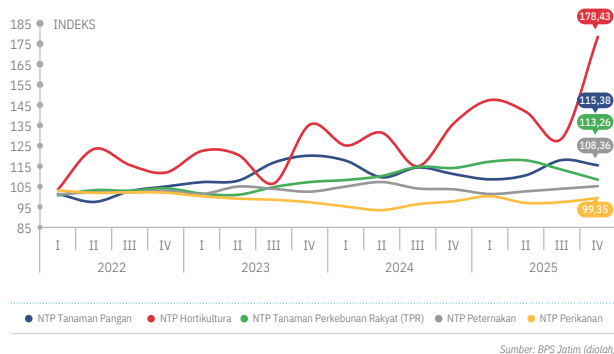
dan penerimaan hasil ternak seperti daging dan telur, serta kenaikan penerimaan ikan tangkap dan budidaya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan riil petani karena kenaikan harga dan permintaan komoditas. NTP Jawa Timur pada triwulan ini berada pada posisi tertinggi di Jawa (Grafik 6.16).

Berdasarkan subsektornya, kenaikan NTP di Jawa Timur terjadi pada subsektor Tanaman Pangan, Peternakan, dan Perikanan (Tabel 6.4). NTP subsektor Tanaman Hortikultura

Grafik 6.16. Perbandingan Nilai Tukar Petani Provinsi di Jawa



Grafik 6.18. NTP Sub Sektor Pertanian Jawa Timur

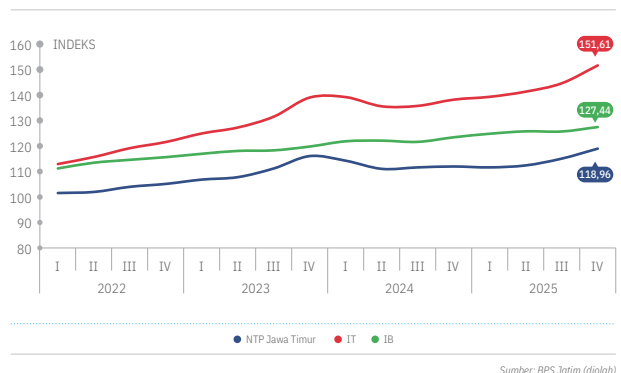


Tabel 6.4. NTP Sub Sektor Pertanian Jawa Timur

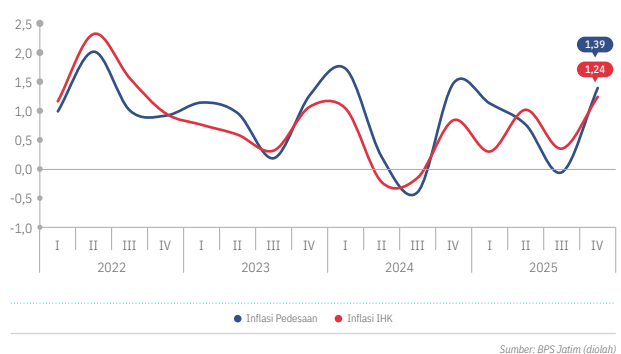
Keterangan	III 2025	IV 2025	Perubahan (%)
Tanaman Pangan			
IT	150,44	149,48	-0,64%
IB	127,48	129,56	1,63%
NTP - P	118,00	115,38	-2,22%
Hortikultura			
IT	161,30	226,15	40,20%
IB	125,42	126,74	1,05%
NTP - H	128,61	178,43	38,74%
Tanaman Perkebunan Rakyat			
IT	140,35	135,60	-3,38%
IB	123,92	125,14	0,98%
NTP - Pr	113,26	108,36	-4,33%

meningkat sebesar 38,74% (qtq), terutama ditopang oleh peningkatan penerimaan petani hortikultura sayuran. Peningkatan penerimaan ini tecermin dari kenaikan harga sayuran, seperti selada, tomat, cabai rawit, dan bawang merah, yang dipengaruhi oleh penurunan volume produksi. NTP subsektor Peternakan meningkat sebesar 1,23% (qtq), terindikasi didukung oleh kenaikan harga komoditas daging sapi, daging dan telur ayam ras, seiring peningkatan permintaan pada momen Nataru dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). NTP

Grafik 6.17. NTP Jawa Timur, Indeks yang Diterima (IT) dan Indeks Harga yang Dibayar (IB)



Grafik 6.19. Inflasi Pedesaan Jawa Timur



Keterangan	III 2025	IV 2025	Perubahan (%)
Peternakan			
IT	127,47	130,54	2,41%
IB	122,69	124,12	1,17%
NTP - Pt	103,90	105,17	1,23%
Perikanan			
IT	118,67	122,41	3,15%
IB	121,85	123,20	1,11%
NTP - Pi	97,38	99,35	2,02%
Gabungan/ Jawa Timur			
IT	144,61	151,61	4,84%
IB	125,69	127,44	1,39%
NTP - JT	115,05	118,96	3,40%

Sumber: BPS Jatim (diolah)

subsektor Perikanan juga naik sebesar 2,02% (qto), sejalan dengan peningkatan penerimaan ikan tangkap maupun ikan budidaya, terutama ikan tangkap laut, di tengah meningkatnya permintaan pada momen Nataru dan program MBG. Sementara itu, penurunan NTP subsektor Tanaman Pangan terjadi seiring dengan menurunnya indeks harga gabah dan beras pada triwulan IV 2025 dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan harga tersebut terjadi meskipun produksi lebih tinggi. Lebih lanjut, NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat menurun terutama karena penurunan harga gula (Grafik 6.18).

Nilai konsumsi petani pada triwulan IV 2025 meningkat (inflasi) dan lebih tinggi dibanding triwulan III 2025. Hal ini tercermin dari inflasi perdesaan pada triwulan IV 2025 yang tercatat 1,39% (qto), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang deflasi sebesar 0,06% (qto). Peningkatan indeks harga yang diterima petani terutama terjadi pada komoditas tanaman hortikultura, peternakan, dan perikanan. Indeks harga yang dibayarkan petani juga meningkat, namun tidak melebihi kenaikan indeks yang diterima (Grafik 6.19).

6.4.2. Kesejahteraan Nelayan

Tingkat kesejahteraan nelayan di Jawa Timur pada triwulan IV 2025 membaik dibanding triwulan sebelumnya. Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada triwulan IV 2025 tercatat 98,93, lebih tinggi dibanding triwulan III 2025 yang sebesar 97,38. Peningkatan kesejahteraan nelayan disebabkan oleh naiknya produksi perikanan, terutama perikanan tangkap, di tengah meningkatnya permintaan pada momen Nataru dan program MBG. Di kawasan Jawa, NTN Jawa Timur berada pada posisi kelima atau terakhir (Grafik 6.20).

Berdasarkan komponennya, peningkatan NTN di Jawa Timur ditunjang oleh kenaikan indeks harga yang diterima nelayan (IT) yang lebih tinggi dibanding indeks harga yang dibayar (IB). Indeks harga yang diterima nelayan (IT) naik sebesar 2,75% (qto) dari triwulan sebelumnya, sejalan dengan meningkatnya harga komoditas ikan tangkap laut. Kenaikan indeks harga terjadi pada ikan bandeng, cumi-cumi, ikan tongkol, ikan kembung, kepiting, ikan tuna, ikan cakalang, ikan belanak, ikan kakap putih, ikan kerisi, ikan ekor kuning, ikan lamuru, ikan selar, dan ikan kuniran. Sementara itu, indeks harga yang dibayar nelayan (IB) naik sebesar 1,41% (qto) (Grafik 6.21), dipengaruhi oleh

kenaikan biaya produksi dan biaya konsumsi rumah tangga nelayan, terutama pada komponen makanan dan minuman.

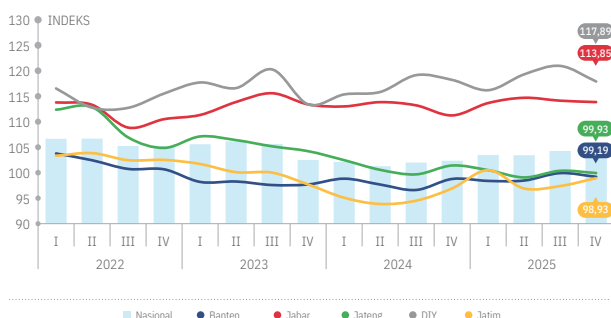
Berdasarkan komponennya, tingginya NT Peternak di Jawa Timur didukung oleh peningkatan indeks harga yang diterima peternak (IT) yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar (IB) peternak. IT peternak tercatat sebesar 130,54, meningkat 2,41% (qto) dari triwulan sebelumnya, seiring dengan kenaikan indeks harga yang diterima hasil ternak, seperti daging sapi, daging, dan telur ayam ras. Peningkatan ini sejalan dengan naiknya produksi yang diiringi peningkatan permintaan pada momen Nataru dan program MBG. Kenaikan indeks harga yang diterima peternak tertahan terutama oleh penurunan indeks ternak kecil. Lebih lanjut, IB peternak juga meningkat dari 122,69 pada triwulan III 2025 menjadi 124,12 pada triwulan IV 2025, atau naik sebesar 1,17% (qto) (Grafik 6.23). Kenaikan IB ini sejalan dengan meningkatnya biaya untuk pengeluaran konsumsi maupun biaya produksi.

6.4.3. Kesejahteraan Peternak

Pada triwulan IV 2025, tingkat kesejahteraan peternak di Jawa Timur meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Nilai Tukar Peternak (NT Peternak) Jawa Timur pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 105,17, lebih tinggi dibanding triwulan III 2025 yang sebesar 103,90. Di kawasan Jawa, NT Peternak Jawa Timur berada pada posisi kedua setelah DIY (105,66) (Grafik 6.22).

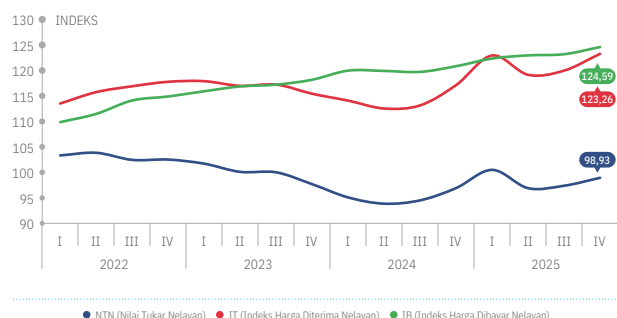
Berdasarkan komponennya, tingginya NT Peternak di Jawa Timur didukung oleh peningkatan indeks harga yang diterima peternak (IT) yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar (IB) peternak. IT peternak tercatat sebesar 130,54, meningkat 2,41% (qto) dari triwulan sebelumnya, seiring dengan kenaikan indeks harga yang diterima hasil ternak, seperti daging sapi, daging, dan telur ayam ras. Peningkatan ini sejalan dengan naiknya produksi yang diiringi peningkatan permintaan pada momen Nataru dan program MBG. Kenaikan indeks harga yang diterima peternak tertahan terutama oleh penurunan indeks ternak kecil. Lebih lanjut, IB peternak juga meningkat dari 122,69 pada triwulan III 2025 menjadi 124,12 pada triwulan IV 2025, atau naik sebesar 1,17% (qto) (Grafik 6.23). Kenaikan IB ini sejalan dengan meningkatnya biaya untuk pengeluaran konsumsi maupun biaya produksi.

Grafik 6.20. Perbandingan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi di Jawa



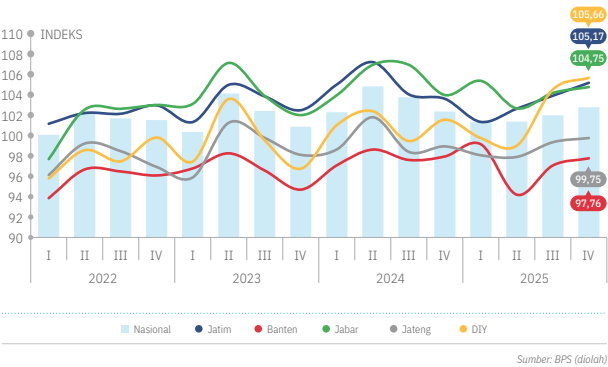
Sumber: BPS (diolah)

Grafik 6.21. NTN, IT dan IB Nelayan Jawa Timur

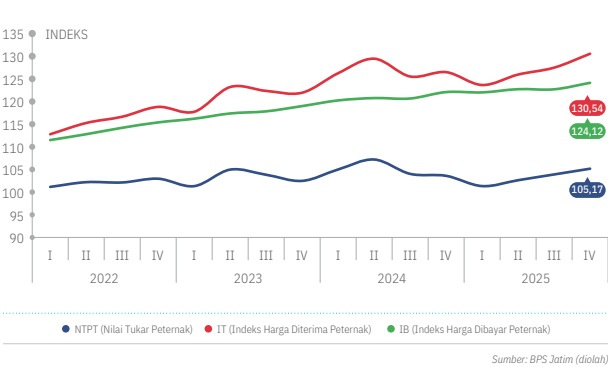


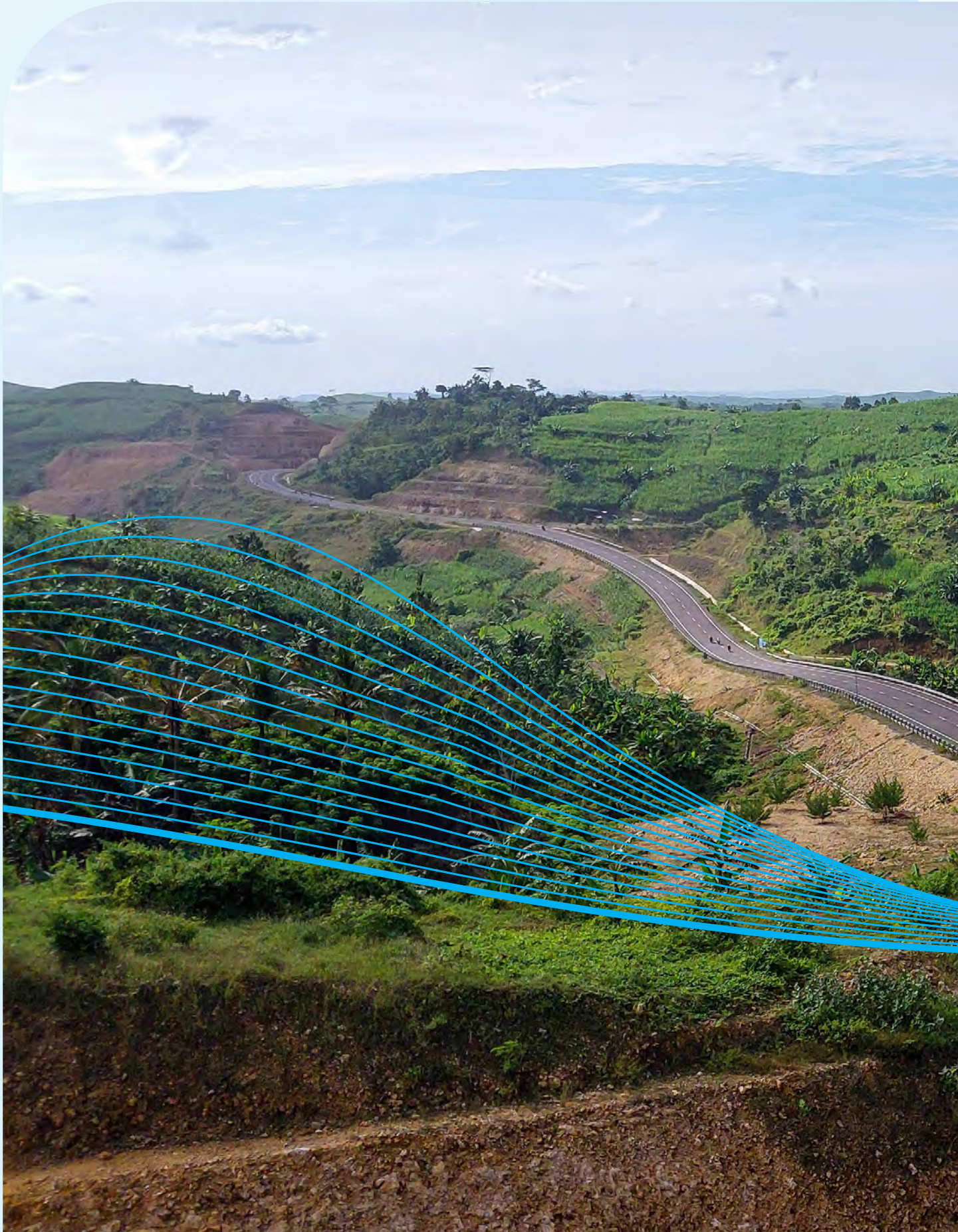
Sumber: BPS Jatim (diolah)

Grafik 6.22. Perbandingan Nilai Tukar Peternak (NTPt) Provinsi di Jawa



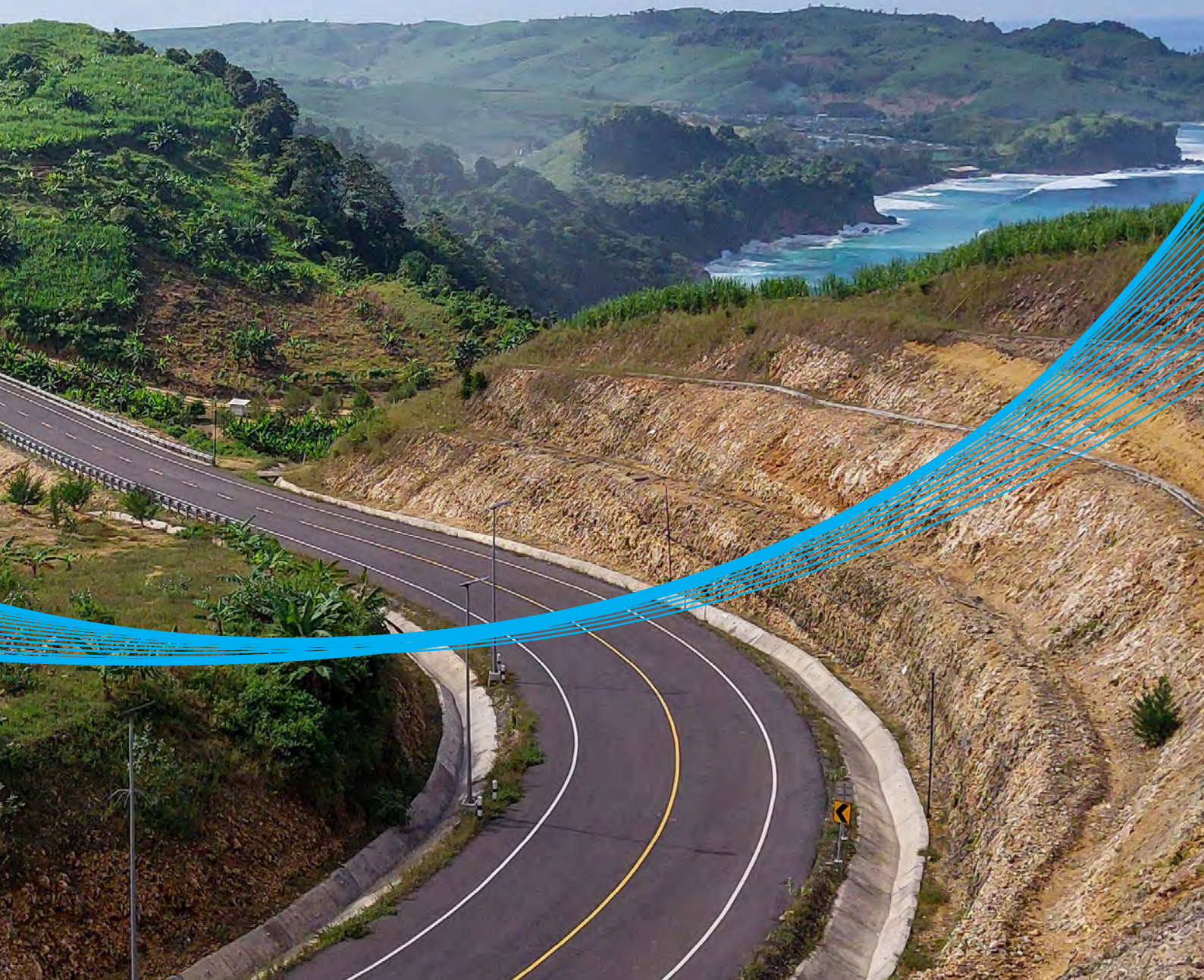
Grafik 6.23. NT Peternak, IT dan IB Peternak Jawa Timur





07.

Prospek Perekonomian Daerah



7.1. Prospek Ekonomi Jawa Timur Tahun 2026

Perekonomian dunia masih dalam tren melambat dengan ketidakpastian yang meningkat akibat ketegangan geopolitik dan hambatan perdagangan internasional yang berkelanjutan. Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO), pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diperkirakan sedikit lebih rendah menjadi sebesar 3,2% (yoy), dibandingkan dengan capaian 2025 sebesar 3,3% (yoy). Pertumbuhan yang lebih rendah tersebut terutama dipengaruhi dampak lanjutan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan kerentanan rantai pasok global, meskipun prospek perekonomian AS membaik didorong investasi sektor teknologi dan stimulus fiskal pengurangan pajak. Pertumbuhan ekonomi Jepang, Tiongkok, dan India pada 2026 diperkirakan melambat akibat pelemahan permintaan domestik dan ekspor di tengah investasi teknologi yang juga meningkat. Di sisi lain, negara-negara *emerging market and developing economies* (EMEs) termasuk kawasan ASEAN-5 pada umumnya masih mencatat pertumbuhan lebih tinggi dibanding negara maju karena ditopang permintaan domestik dan bonus demografi, namun tetap menghadapi tekanan dari pelemahan permintaan eksternal, fluktuasi arus modal, serta risiko nilai tukar. Kinerja ekspor, investasi, dan sektor keuangan domestik negara ASEAN-5 sangat dipengaruhi kondisi dan dinamika global, sehingga bauran kebijakan yang cermat, penguatan permintaan domestik, serta reformasi struktural menjadi kunci untuk menjaga ketahanan dan kesinambungan pertumbuhan di tengah gejolak ekonomi dunia ke depan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diperkirakan tetap berlanjut kuat dan semakin mengarah pada tingkat kapasitas perekonomian yang optimal. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 4,9%–5,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dengan struktur pertumbuhan yang semakin berkualitas. Dari sisi pengeluaran, investasi diperkirakan meningkat, terutama investasi bangunan seiring berlanjutnya proyek strategis

nasional dan program hilirisasi sumber daya alam, sehingga memperkuat kapasitas produksi domestik. Ekspor nonmigas tetap menunjukkan kinerja yang baik meskipun dibayangi perlambatan ekonomi global dan normalisasi harga komoditas, didukung daya saing produk hilir dan diversifikasi pasar. Konsumsi rumah tangga juga diperkirakan tetap terjaga sejalan dengan daya beli yang stabil dan dukungan kebijakan Pemerintah. Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi ditopang oleh LU berorientasi ekspor dan bernilai tambah tinggi, khususnya LU Industri Pengolahan serta Pertambangan dan Penggalan yang mendapat manfaat dari hilirisasi. LU terkait pembangunan dan konektivitas seperti LU Konstruksi serta Transportasi dan Pergudangan turut memberikan kontribusi positif. Di samping itu, LU yang berkaitan dengan konsumsi dan digitalisasi—antara lain LU Perdagangan Besar dan Eceran, Akomodasi dan Makan Minum, serta Informasi dan Komunikasi diperkirakan tetap tumbuh solid, disertai kinerja positif berbagai LU terkait jasa, termasuk LU Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, sehingga secara keseluruhan menopang prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat dan berimbang pada 2026.

Sejalan dengan kinerja ekonomi nasional, perekonomian Jawa Timur pada tahun 2026 diperkirakan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2025, ditopang oleh penguatan permintaan domestik dan eksternal dengan inflasi yang tetap terkendali dalam rentang sasaran. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2026 diperkirakan berada di atas titik tengah kisaran 4,9%–5,7% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2025. Dari sisi pengeluaran, solidnya kinerja ekonomi Jawa Timur diperkirakan didukung oleh perbaikan konsumsi swasta, investasi, serta ekspor. Dari sisi penawaran, sejalan dengan prospek peningkatan konsumsi swasta dan investasi, kinerja LU Perdagangan dan LU Industri Pengolahan di Jawa Timur pada tahun 2026 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi eksternal, prospek ekonomi global yang relatif stabil serta peningkatan perekonomian sejumlah mitra dagang utama Jawa Timur diperkirakan mengakselerasi kinerja ekspor luar negeri (LN) dan investasi nonbangunan pada tahun 2026. Lebih lanjut, kinerja LU Konstruksi pada tahun 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2025, sejalan dengan berlanjutnya realisasi proyek infrastruktur Pemerintah dan swasta, akselerasi pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, serta dampak lanjutan berbagai kebijakan dan program strategis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2025 yang mulai terealisasi secara penuh pada 2026.

7.1.1. Sisi Pengeluaran

Konsumsi Swasta (Konsumsi RT dan Konsumsi LNPRT)

Konsumsi swasta di Jawa Timur pada 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif, didukung oleh terjaganya daya beli sejalan dengan inflasi yang terkendali serta berlanjutnya pemulihan mobilitas masyarakat. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh

Tabel 7.1. Prospek Perekonomian Dunia

Negara	2024	2025*	2025*
Dunia	3,3	3,3	3,2
Negara Maju	1,8	1,7	1,8
Amerika Serikat	2,8	2,1	2,3
Kawasan Eropa	0,9	1,3	1,3
Jepang	0,1	1,1	0,8
Negara Berkembang	4,3	4,3	4,1
Tiongkok	5,0	5,0	4,4
India	6,5	7,4	6,6
ASEAN-5	4,6	4,4	4,3
Amerika Latin	2,4	2,2	2,2
Negara Berkembang Eropa	3,4	2,2	2,4
Timur Tengah & Asia Tengah	2,4	3,5	3,8

Sumber: IMF *World Economic Outlook*. *Proyeksi Bank Indonesia

peningkatan pendapatan pada sektor-sektor berorientasi ekspor seiring prospek perbaikan permintaan eksternal yang mendorong penyerapan tenaga kerja dan kenaikan upah. Dari sisi kebijakan, penguatan konsumsi turut ditopang oleh keberlanjutan program nasional di Indonesia yang diarahkan pada stabilisasi harga pangan dan energi, optimalisasi program perlindungan sosial dan bantuan sosial terarah, serta pemberian insentif fiskal selektif (a.l subsidi/insentif terkait perumahan dan transportasi publik) untuk menjaga daya beli dan mendorong permintaan domestik. Prakiraan perbaikan konsumsi swasta terindikasi dari Indeks Ekspektasi Konsumsi (IEK) – SK Bank Indonesia di Jawa Timur triwulan IV 2025 yang mencerminkan ekspektasi kondisi ekonomi Jawa Timur pada triwulan II 2025, yakni sebesar 141,7 dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) – SK Bank Indonesia Jawa Timur hingga triwulan IV 2025, dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) – SK Bank Indonesia Jawa Timur pada Desember 2025, yakni masing-masing sebesar 115,7 dan 118,03.

Investasi

Investasi Jawa Timur diperkirakan meningkat pada tahun 2026, terutama ditopang oleh peningkatan investasi nonbangunan dan investasi bangunan yang tetap kuat. Potensi peningkatan investasi Jawa Timur tahun 2026 utamanya didorong oleh prospek investasi baru di Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terutama setelah adanya penguatan infrastruktur dan konektivitas di wilayah tersebut. Selain itu, berlanjutnya pembangunan PSN dan proyek Perpres No. 80 Tahun 2019, yang diperkuat berbagai kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah turut mendukung prospek investasi ke depan. Di tingkat nasional, keberlanjutan implementasi Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, pemberian berbagai insentif fiskal termasuk skema *tax holiday/tax allowance* dan fasilitas di KEK, serta paket stimulus kemudahan berusaha dan penguatan PMA yang diluncurkan pada 2025 berpotensi meningkatkan investasi Jawa Timur pada 2026. Dari sisi swasta, prospek investasi Jawa Timur pada 2026 juga ditopang oleh berlanjutnya pembangunan dan ekspansi sejumlah proyek strategis bernilai besar, khususnya di kawasan industri. Di KEK, pengembangan pabrik foil tembaga, pabrik kimia, pengolahan/pemurnian logam (emas dan aluminium), dan pengolahan tembakau diperkirakan masih mendorong peningkatan investasi nonbangunan seiring dengan fase konstruksi lanjutan dan penambahan kapasitas produksi (**lihat Boks 6: Dinamika Komoditas Tembakau sebagai Penggerak Perekonomian Jawa Timur**). Selain itu, potensi aktivitas produksi yang lebih ekspansif, sebagaimana tecermin dari prakiraan PMI Manufaktur Indonesia yang diperkirakan tetap berada pada area ekspansi (di atas level 50), turut mendukung akselerasi investasi di Jawa Timur pada tahun 2026.

Ekspor dan Impor

Kinerja ekspor dan impor Jawa Timur pada tahun 2026 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 disokong oleh peningkatan perdagangan LN dan aktivitas domestik. Berdasarkan *World Economic Outlook* Januari 2026 IMF,

pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama seperti Amerika Serikat (2,3% yoy), Euro Area (1,3% yoy), Tiongkok (4,4% yoy), serta pertumbuhan negara berkembang termasuk ASEAN yang tetap stabil di sekitar 4% akan mendorong permintaan komoditas ekspor unggulan Jawa Timur, khususnya komoditas manufaktur (makanan olahan, kimia, tekstil, dan logam), perikanan (udang, tuna), dan komoditas pertanian. Hal ini berimplikasi positif bagi industri pengolahan berorientasi ekspor, seiring meningkatnya aktivitas produksi yang mendorong tingginya kebutuhan impor bahan baku dan barang antara, serta didukung penguatan hilirisasi, dan investasi PSN maupun swasta. Selain itu, implementasi Perjanjian CEPA Indonesia-Uni Eropa juga berpotensi meningkatkan akses pasar untuk ekspor nonmigas Jawa Timur ke Eropa di tengah adanya tantangan terhadap kepatuhan regulasi deforestasi Uni Eropa. Di sisi kebijakan, sejumlah inisiatif strategis Pemerintah Pusat seperti penguatan fasilitasi kepabeanan dan insentif kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), penyederhanaan tata niaga ekspor/impor khususnya barang ekspor/impor untuk industri pengolahan melalui peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta langkah penataan arus devisa ekspor diperkirakan mendukung kelancaran aliran barang dan pembiayaan perdagangan LN Jawa Timur pada 2026. Lebih lanjut, stimulus ekspor nonmigas yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti bantuan promosi dagang, sertifikasi halal untuk perikanan dan manufaktur, festival ekspor, desa devisa, dan misi dagang Jawa Timur juga diperkirakan mengakselerasi aktivitas ekspor ke depan.

7.1.2. Sisi Lapangan Usaha

LU Industri Pengolahan

Kinerja Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan di Jawa Timur pada 2026 diperkirakan tumbuh solid, ditopang oleh perbaikan permintaan domestik dan eksternal. Kinerja LU Industri Pengolahan Jawa Timur diperkirakan ditopang oleh penguatan hilirisasi dan dukungan kebijakan makro-fiskal yang kondusif di tengah ketidakpastian permintaan global, potensi tekanan biaya produksi domestik, serta dinamika harga komoditas. Dari sisi domestik, peningkatan mobilitas dan daya beli masyarakat, perbaikan keyakinan konsumen, serta inflasi yang terkendali menjadi faktor pendorong utama peningkatan kinerja industri pengolahan, khususnya pada subLU makanan dan minuman, kimia-farmasi, serta logam dasar. Sementara itu, dari sisi produksi, kapasitas produksi diperkirakan meningkat seiring dengan penguatan permintaan eksternal dan akselerasi penyelesaian proyek hilirisasi di kawasan industri strategis. Perkembangan tersebut meningkatkan pemanfaatan kapasitas produksi sekaligus mendorong penambahan kapasitas baru pada sejumlah subsektor industri, sehingga memperkuat kemampuan produksi dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan industri. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor nonmigas yang tetap kuat sepanjang 2025 serta aktivitas manufaktur nasional yang berada dalam fase ekspansi menjadi faktor pendorong positif bagi peningkatan kinerja industri pengolahan Jawa Timur pada 2026.

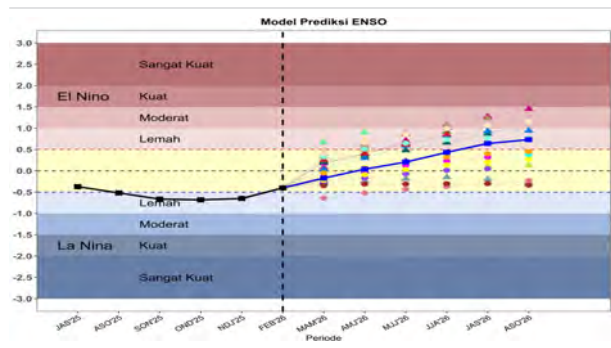
LU Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Pada 2026, kinerja LU Perdagangan Jawa Timur diperkirakan tetap tumbuh resilien, sejalan dengan kuatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional serta terjaganya permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama permintaan domestik diperkirakan tetap baik, didukung oleh mobilitas masyarakat yang terjaga, potensi perbaikan pendapatan riil, serta daya beli yang relatif stabil. Efek lanjutan stimulus ekonomi serta insentif fiskal dan sosial Pemerintah pada tahun sebelumnya, termasuk dukungan bagi UMKM salah satunya melalui KDKMP sebagai pusat perdagangan ekonomi kerakyatan, dan pelaksanaan program padat karya, turut menopang aktivitas perdagangan di Jawa Timur. Di sisi lain, perbaikan kinerja ekspor, khususnya pada LU Industri Pengolahan, berpotensi mendorong peningkatan aktivitas distribusi dan perdagangan antardaerah melalui penguatan permintaan antara dan pendapatan domestik. Dengan tetap mencermati dinamika global, perkembangan harga komoditas, serta dukungan perdagangan luar negeri yang masih kuat, permintaan domestik dan daya beli masyarakat diperkirakan tetap terjaga, sehingga menopang kinerja LU Perdagangan Jawa Timur pada 2026.

LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian di Jawa Timur diperkirakan tetap tumbuh positif pada tahun 2026. Prospek peningkatan tersebut didukung oleh kondisi cuaca yang lebih mendukung produksi tanaman pangan, kendati terdapat potensi La Nina lemah pada awal tahun 2026. Hal tersebut tecermin dari indeks ENSO BMKG Indonesia yang memprediksi kondisi La Nina lemah cenderung ke netral berlanjut dari akhir tahun 2025 hingga Agustus 2026 (Grafik 7.1). Di sisi hulu, keberlanjutan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, termasuk penyelesaian sejumlah bendungan strategis, diharapkan memperluas cakupan layanan air irigasi dan mendorong peningkatan indeks pertanaman. Program intensifikasi tanaman pangan dan hortikultura tetap menjadi prioritas, meliputi pendampingan teknis budidaya, optimalisasi luas tanam padi dan jagung, serta penerapan teknologi pertanian berbasis data untuk efisiensi input produksi.

Grafik 7.1. Prediksi El Nino/La Nina 2025-2026 dengan Model ENSO



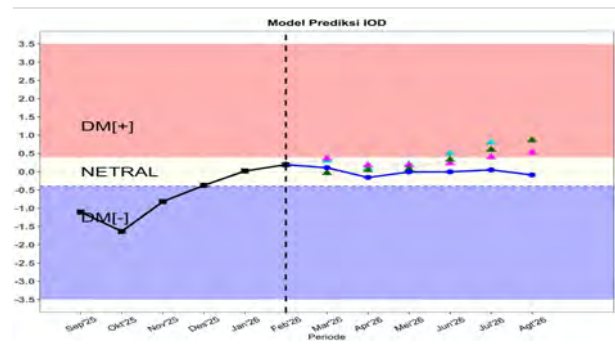
Sumber: BMKG (diolah)

Penguatan sarana produksi dilakukan melalui pemanfaatan pupuk bersubsidi, distribusi benih unggul, dan modernisasi alat mesin pertanian. Selain itu, pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan, termasuk *replanting* perkebunan rakyat (a.l tebu, kakao, kopi, kelapa), penguatan koperasi desa, dan hilirisasi hasil pertanian, diharapkan memperkuat rantai nilai hulu, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas akses pasar bagi petani dan pelaku usaha di sektor kehutanan. Di sisi hilir, penguatan cadangan pangan Pemerintah dan pelaksanaan program stabilisasi harga yang dikoordinasikan Badan Pangan Nasional diperkirakan menjaga keberlanjutan distribusi dan stabilitas harga. Program kesehatan hewan dan peningkatan populasi ternak, termasuk vaksinasi, pemberian pakan, dan program regenerasi peternakan rakyat, diharapkan mempertahankan insentif produksi dan daya saing subsektor peternakan. Hal ini juga memberi prospek pemulihan produksi daging dan susu sapi di Jawa Timur. Selain itu, dukungan terhadap akses pasar, logistik, serta penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM pertanian dan perikanan akan memperkuat rantai hilir, sehingga hasil produksi pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat terserap secara optimal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di sektor primer dan agroindustri. Secara keseluruhan, kombinasi penguatan infrastruktur hulu, intensifikasi produksi, modernisasi sarana, pengembangan agribisnis, dan pengelolaan rantai hilir diperkirakan menjadi faktor yang menjaga stabilitas dan pertumbuhan kinerja LU Pertanian Jawa Timur 2026, sekaligus mendukung ketahanan pangan, pemulihan sektor perikanan, dan penguatan ekonomi berbasis sumber daya alam lokal. Di sisi lain, tekanan biaya pakan dan volatilitas harga tetap menjadi faktor risiko bagi kinerja LU Pertanian di Jawa Timur pada tahun 2026.

LU Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi Jawa Timur pada 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif, didukung oleh keberlanjutan proyek infrastruktur strategis Pemerintah dan investasi swasta. Dari sisi Pemerintah, pertumbuhan LU Konstruksi diperkirakan didorong oleh kelanjutan proyek infrastruktur berskala besar, termasuk jalan tol, jalur kereta api, dan bendungan, yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional serta berada dalam kerangka

Grafik 7.2. Prediksi El Nino/La Nina 2025-2026 dengan Model IOD



Sumber: BMKG (diolah)

percepatan pembangunan kawasan sesuai Perpres 80/2019, Permenko Perekonomian No. 2 Tahun 2025, dan Permenko Perekonomian No. 16 Tahun 2025 beserta regulasi pelaksanaannya. Proyek-proyek ini meningkatkan permintaan konstruksi sipil dan utilitas secara langsung, sekaligus memperkuat konektivitas dan kapasitas infrastruktur publik di Jawa Timur. Dari sisi swasta, pertumbuhan konstruksi diperkirakan didorong oleh kelanjutan pembangunan KI dan KEK beserta fasilitas pendukungnya, serta pembangunan dan perluasan infrastruktur logistik dan pelabuhan. Aktivitas ini secara langsung memperkuat permintaan pekerjaan konstruksi nonresidential dan utilitas, sekaligus meningkatkan nilai proyek swasta di sektor industri dan logistik. Di sisi lain, pertumbuhan LU Konstruksi diperkirakan sedikit tertahan oleh terbatasnya ruang fiskal Pemerintah Daerah pada tahun 2026, sehingga kapasitas pembiayaan proyek infrastruktur yang bersumber dari APBN dan APBD di tingkat daerah menjadi lebih terbatas.

LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif. Prakiraan inflasi yang semakin terkendali, potensi perbaikan pendapatan masyarakat yang bergerak di industri berorientasi ekspor, serta paket stimulus ekonomi 8+4+5 (2025) yang berlanjut ke tahun 2026 (insentif permintaan, program padat karya, dukungan UMKM dan pariwisata) diperkirakan dapat menopang konsumsi domestik, meningkatnya keyakinan konsumen, serta mendorong peningkatan mobilitas dan daya beli masyarakat untuk kegiatan pariwisata/akomodasi di Jawa Timur (**lihat Boks 7: Penguatan Konektivitas Pariwisata Menambah Daya Ungkit Ekonomi Jawa Timur**). Lebih lanjut, perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok prioritas di Jawa Timur juga berpotensi menopang konsumsi domestik pada sektor jasa makanan dan minuman. Namun demikian, kebijakan Pemerintah Pusat untuk memperkuat konsolidasi fiskal melalui pembatasan belanja nonprioritas dalam APBN 2026 yang diikuti dengan pengetatan belanja serupa dalam APBD 2026 di Provinsi Jawa Timur berpotensi menahan kegiatan MICE yang bersumber dari belanja Pemerintah, khususnya rapat, perjalanan dinas, dan *event* seremonial berskala besar. Kondisi tersebut dapat membatasi akselerasi kinerja segmen MICE di Jawa Timur, terutama bagi pelaku usaha akomodasi dan makan minum di Jatim.

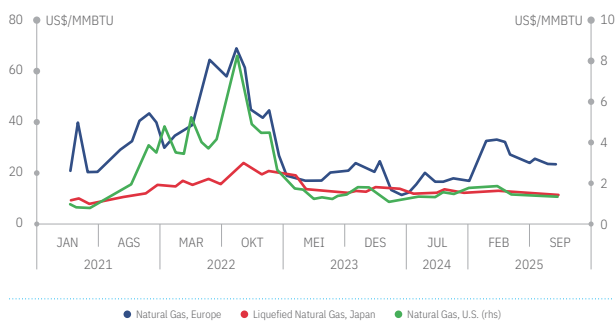
7.2. Prospek Inflasi Jawa Timur Tahun 2026

Inflasi Jawa Timur pada tahun 2026 diperkirakan berada di sekitar titik tengah rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5%±1% (yoy) dan mendukung kinerja perekonomian secara optimal. Proyeksi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor fundamental pendorong inflasi baik dari sisi penawaran maupun permintaan, antara lain (i) *imported inflation* seiring potensi kenaikan harga komoditas gas alam dan beberapa komoditas nonenergi di tengah fenomena iklim global; serta (ii) peningkatan permintaan seiring kenaikan upah di wilayah Jawa Timur serta momen hari raya dan libur. Namun demikian, risiko kenaikan lebih lanjut diperkirakan dapat teredam oleh beberapa faktor,

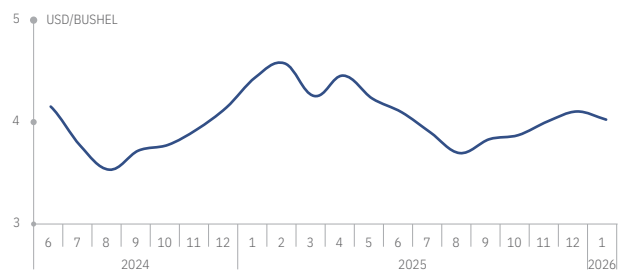
meliputi: (i) produktivitas pangan yang terjaga didukung kondisi cuaca yang tidak menunjukkan anomali signifikan; (ii) dukungan berbagai program prioritas Pemerintah yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan nasional dan kebijakan stimulus/insentif untuk mendukung kesejahteraan produsen dan masyarakat; (iii) stabilitas harga komoditas yang diatur Pemerintah di tengah moderasi harga komoditas minyak dunia dan batu bara; serta (iv) penguatan serta akselerasi kebijakan dan pelaksanaan program pengendalian inflasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur, termasuk implementasi program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Dari sisi penawaran, potensi risiko *imported inflation* perlu tetap diantisipasi pada beberapa komoditas energi dan nonenergi. Rerata harga komoditas global gas alam diperkirakan meningkat pada tahun 2026 dibandingkan tahun 2025 (Gambar 7.1) seiring dengan peningkatan permintaan di tengah ketegangan geopolitik dan cuaca yang mempengaruhi produksi di negara produsen. Kondisi tersebut secara umum terjadi seiring hadirnya fenomena La Nina yang menyebabkan kondisi suhu musim dingin yang lebih rendah di belahan bumi bagian utara dan kondisi suhu yang lebih panas di wilayah seperti Amerika Selatan. Hal tersebut meningkatkan permintaan untuk konsumsi pemanas dan pendingin maupun penurunan pasokan akibat pembekuan wilayah produksi gas alam yang berada di belahan bumi bagian utara. Selanjutnya, fenomena La Nina diperkirakan turut menyebabkan peningkatan harga komoditas pangan global seperti jagung, gandum, dan kedelai seiring tekanan terhadap produksi akibat cuaca yang lebih panas dan lebih kering di wilayah sentra produksi pertanian utama dunia, termasuk Argentina, Brazil bagian selatan, dan wilayah Pantai Teluk Amerika Serikat. Adapun komoditas minyak kelapa sawit turut diperkirakan meningkat seiring kuatnya permintaan di tengah moderasi pertumbuhan produksi di negara utama produsen.

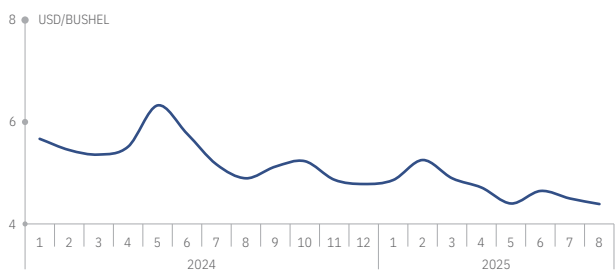
Dari sisi permintaan, terdapat beberapa faktor yang berpotensi meningkatkan inflasi. Pertama, kenaikan gaji Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan rerata sebesar 6% berpotensi meningkatkan permintaan masyarakat (*demand pull inflation*) di tengah suku bunga BI Rate yang lebih rendah. Kedua, prakiraan kenaikan harga komoditas global nonenergi (khususnya emas) di tengah konflik geopolitik yang kembali meningkat khususnya di Timur Tengah, turut berpotensi mendorong ekspektasi bagi konsumen yang pada akhirnya dapat meningkatkan permintaan sebagaimana tren yang terjadi sejak tahun 2024. Ketiga, peningkatan mobilitas dan permintaan pada momen hari raya dan libur sekolah serta libur panjang. Keempat, potensi peningkatan permintaan seiring intensifikasi dan ekstensifikasi penerapan program Makan Bergizi Gratis khususnya pada komoditas pangan, meski berdasarkan prognosa, pasokan komoditas pangan strategis tetap mencukupi untuk Jawa Timur didukung implementasi program prioritas Pemerintah yang mendorong produktivitas pangan.

Grafik 7.3. Harga Gas Alam Dunia

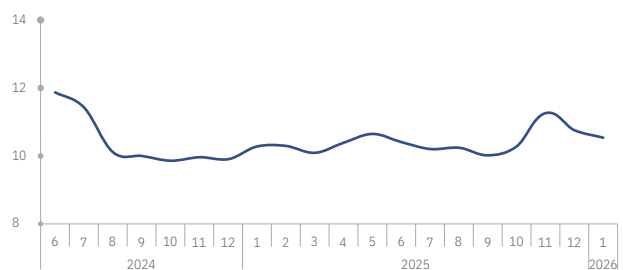
Sumber: Worldbank, 2025 (diolah)

Grafik 7.4. Harga Jagung Dunia

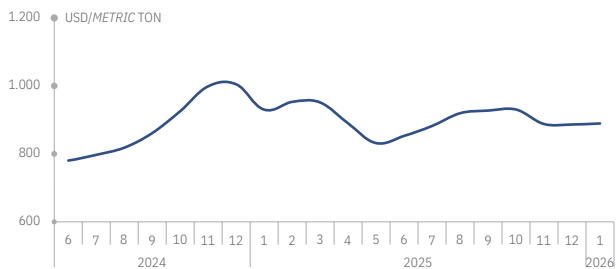
Sumber: Bloomberg, 2026 (diolah)

Grafik 7.5. Harga Gandum Dunia

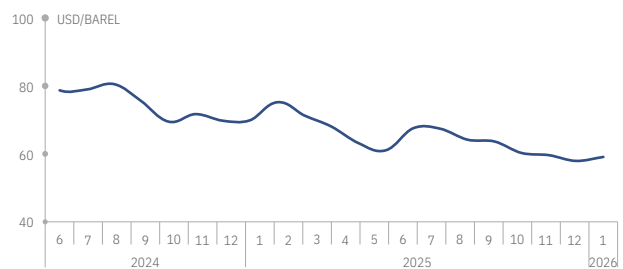
Sumber: Bloomberg, 2026 (diolah)

Grafik 7.6. Harga Kedelai Dunia

Sumber: Bloomberg, 2026 (diolah)

Grafik 7.7. Harga Minyak Kelapa Sawit Dunia

Sumber: Bloomberg, 2026 (diolah)

Grafik 7.8. Harga Minyak Dunia

Sumber: Bloomberg, 2026 (diolah)

Adapun beberapa faktor yang diperkirakan menjadi faktor penahan inflasi, di antaranya yaitu prakiraan produksi komoditas pertanian yang tetap kuat. Berdasarkan prakiraan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, produksi komoditas pangan seperti padi dan jagung pada tahun 2026 meningkat dibandingkan tahun 2025 didukung iklim yang cenderung basah seiring fenomena La Nina lemah yang terjadi sejak akhir tahun 2025 hingga bulan Februari 2026. Namun demikian, kondisi tersebut diperkirakan menekan kinerja produksi komoditas hortikultura seiring produktivitas yang menurun serta masa simpan produk yang cenderung lebih singkat akibat curah hujan yang tinggi. Penurunan produksi komoditas hortikultura tersebut perlu diwaspadai khususnya pada momen Ramadan dan HBKN Idulfitri serta HBKN Natal dan Tahun Baru saat terjadi peningkatan permintaan secara

signifikan serta mempertimbangkan pola historis komoditas hortikultura sebagai penyumbang inflasi pada momen-momen tersebut.

Berdasarkan prakiraan iklim berbagai lembaga pusat iklim dunia terkini, kecenderungan kondisi iklim basah yang terjadi sejak bulan Agustus 2025 berakhir pada bulan Februari 2026. Indeks *El Niño–Southern Oscillation* (ENSO) dan *Indian Ocean Dipole* (IOD) menunjukkan bahwa La Nina lemah berangsur menuju kondisi normal pada bulan Maret 2026 dan beralih ke El Nino lemah pada bulan Juni 2026 (Gambar 7.1). Lebih lanjut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sifat hujan di mayoritas wilayah Indonesia pada level normal di bulan Februari 2026 dan mulai beralih menjadi di bawah normal pada bulan Maret 2026 (Gambar 7.2) sejalan

dengan prakiraan iklim. Adapun mayoritas wilayah Jawa Timur diperkirakan mengalami sifat hujan normal hingga bulan April 2026 dan selanjutnya mayoritas beralih ke sifat hujan di bawah normal pada bulan Mei 2026. Kondisi iklim dan cuaca tersebut diperkirakan mendukung peningkatan produktivitas komoditas pangan pada musim panen raya yang diperkirakan terjadi pada akhir bulan Maret/awal bulan April 2026 serta produksi komoditas hortikultura pada periode triwulan II dan triwulan III 2026. Hal tersebut dapat mendukung stabilitas harga khususnya pada kelompok makanan, minuman dan tembakau serta penyediaan makanan dan minuman/restoran. Adapun selama periode bulan Februari–Maret 2026, mayoritas wilayah Jawa Timur diperkirakan relatif aman dari potensi banjir, sebagaimana prakiraan BMKG Jawa Timur (Gambar 7.4).

Sehubungan dengan prakiraan iklim dan cuaca tersebut serta menimbang berbagai dukungan kebijakan dan program prioritas Pemerintah, komoditas pangan dan hortikultura secara umum diperkirakan tetap surplus untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur pada tahun 2026. Berdasarkan prakiraan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, produksi komoditas pangan meningkat meski komoditas hortikultura cenderung termoderasi pada tahun 2026 (tetap surplus) didukung berbagai program prioritas Pemerintah yang berfokus pada peningkatan produktivitas sektor pertanian. Adapun untuk komoditas jagung, peningkatan kebutuhan pakan ternak seiring akselerasi produksi komoditas peternakan (termasuk produk turunannya) perlu direspons dengan penguatan pasokan melalui sinergi dengan wilayah di luar Jawa Timur dalam rangka mendukung stabilitas harga. Beberapa program penguatan produktivitas yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan) Provinsi Jawa Timur a.l. (i) intensifikasi pelatihan produsen dan perluasan program *Good Handling Practices* (GHP); (ii) kampanye konsumsi komoditas pertanian Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman (B2SA); (iii) Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP); (iv) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT); (v) pengembangan kawasan agropolitan komoditas hortikultura; (vi) distribusi alsintan modern dan saprodi melalui gapoktan; serta (vii) penajaman cakupan dan akurasi data neraca pangan sebagai fondasi untuk mendukung perumusan kebijakan dan pelaksanaan program.

Pada komoditas pangan peternakan, prognosa produksi daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras diperkirakan meningkat pada tahun 2026, mendukung kebutuhan Jawa Timur dan nasional (termasuk pemenuhan pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)). Beberapa program prioritas Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi Jawa Timur yang dilakukan untuk memperkuat produktivitas peternakan antara lain (i) peningkatan populasi sapi antara lain melalui peningkatan kelahiran, akseptor, mutu genetik, dan pedet jantan/betina; (ii) optimalisasi perbibitan pakan dan produksi peternakan; (iii) penjaminan kesehatan hewan melalui pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular; (iv) peningkatan kualitas produk hewan melalui intervensi sertifikasi dan standarisasi; (v) pengolahan dan pemasaran hasil peternakan melalui intervensi teknologi pengolahan dan pemasaran serta fasilitasi

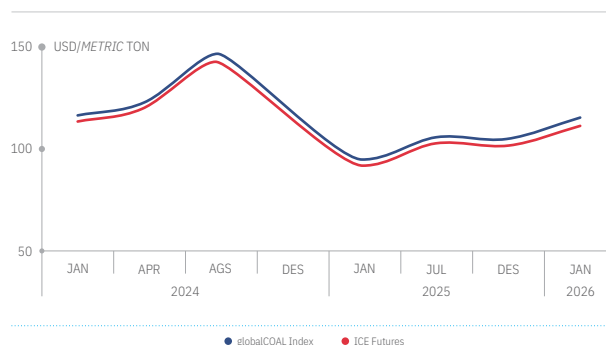
akses permodalan; (vi) peningkatan agribisnis persusuan melalui intervensi pakan, perbaikan kandang, dan peningkatan populasi; serta (vii) program *Youth Agriculture Hub* untuk membangun regenerasi peternak sekaligus meningkatkan produktivitas melalui sosialisasi *good farming practices*.

Berlanjutnya program prioritas Pemerintah Pusat yang konsisten berfokus pada ketahanan pangan dan kesejahteraan produsen diperkirakan turut mendukung terjaganya inflasi. Berbagai program prioritas yang telah dilakukan sejak tahun 2025 terkait ketahanan pangan dan kesejahteraan produsen terus berlanjut, antara lain (i) penguatan dan perluasan jaringan irigasi dan pompanisasi; (ii) modernisasi sarana prasarana pertanian/peternakan; (iii) penyerapan hasil produksi pertanian oleh BULOG; serta (iv) kebijakan peningkatan harga acuan pembelian gabah dan jagung serta penurunan harga pupuk subsidi. Program-program tersebut mampu mendorong penguatan produktivitas pertanian dan peternakan yang pada gilirannya mendukung stabilitas harga, khususnya pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sekaligus kesejahteraan produsen.

Secara umum, prognosa produksi komoditas pertanian (pangan dan hortikultura) serta komoditas peternakan Jawa Timur pada tahun 2026 mampu mendukung kebutuhan program prioritas Pemerintah khususnya program MBG. Intensitas dan skala program prioritas Pemerintah yang berfokus pada peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan menjadi salah satu faktor kunci kuatnya produksi Jawa Timur pada tahun 2026. Namun demikian, keselarasan momen antara permintaan komoditas dalam program MBG dan produksi komoditas tetap perlu menjadi perhatian guna menjaga stabilitas harga yang konsisten sepanjang tahun 2026.

Pada tahun 2026, harga komoditas energi global, khususnya minyak dunia dan batu bara juga diperkirakan melanjutkan tren moderasi harga yang telah terjadi sejak tahun 2025 (Grafik 7.8 dan Grafik 7.9). Hal ini didukung produksi kedua komoditas tersebut yang solid di tengah permintaan dunia yang masih cenderung moderat seiring masih berlangsungnya penerapan berbagai hambatan perdagangan dunia, termasuk penerapan kebijakan tarif resiprokal AS. Kondisi dinamika harga

Grafik 7.9. Harga Batu Bara Dunia

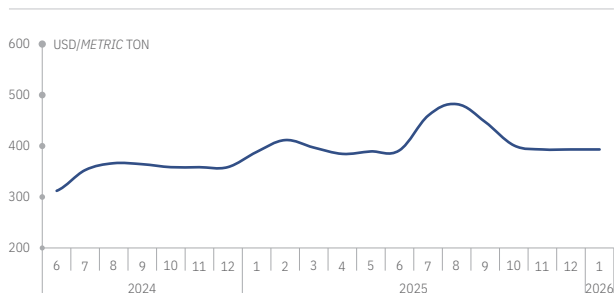


Sumber: Newcastle Coal (ICE Futures dan globalCOAL Index (dialah

komoditas energi dunia tersebut turut tecermin dari harga komoditas energi domestik yang relatif stabil sejak tahun 2025. Kondisi tersebut diperkirakan turut mendukung terkendalinya inflasi, khususnya pada kelompok Transportasi serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar pada tahun 2026. Namun demikian, kondisi terkini terkait dengan eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Iran – Amerika Serikat, yang turut berdampak pada ditutupnya Selat Hormuz berpotensi meningkatkan harga minyak dunia pada tahun 2026. Selain itu harga komoditas pupuk global juga diperkirakan turut mengalami penurunan pada tahun 2026 setelah mencatatkan kenaikan sejak tahun 2024, meski berlanjutnya beberapa hambatan perdagangan tetap perlu diwaspadai.

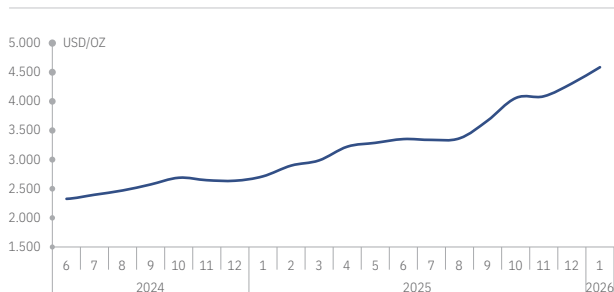
Prakiraan terjaganya harga komoditas global minyak dunia dan batu bara turut mendukung stabilitas harga komoditas yang diatur Pemerintah baik di level nasional maupun domestik pada tahun 2026. Berdasarkan perkembangan terkini, belum terdapat rencana penyesuaian harga komoditas di level nasional seperti tarif listrik, cukai rokok, dan harga acuan pembelian beras dan jagung, serta tarif air minum dan gas LPG 3 Kg di level daerah pada tahun 2026 yang diperkirakan turut mendukung stabilitas harga di tahun 2026 baik di level nasional maupun Jawa Timur. Adapun harga sewa/kontrak rumah dan biaya pendidikan diperkirakan turut mendorong inflasi sebagaimana pola historis tahunan, khususnya pada periode awal dan tengah tahun.

Grafik 7.10. Harga Pupuk Dunia



Sumber: Bloomberg, 2026 (diolah)

Grafik 7.11. Harga Emas Dunia



Sumber: Bloomberg, 2026 (diolah)

Di tengah berbagai tantangan, Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama seluruh 38 TPID Kabupaten/Kota se-Jawa Timur secara konsisten melakukan berbagai program pengendalian inflasi dan terus memperkuat koordinasi kebijakan baik dengan pusat maupun daerah. Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilakukan oleh TPIP dan TPID disertai upaya ekstra sinergi pengendalian inflasi pangan termasuk Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Sinergi dilakukan melalui penguatan implementasi program utama dalam kerangka kerja pengendalian inflasi Jawa Timur, yang dikategorikan dalam pilar 4K yaitu:

1. Keterjangkauan harga: (i) Intensifikasi Operasi Pasar dan (ii) Optimalisasi dan Perluasan Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK).
2. Ketersediaan pasokan: Peningkatan produktivitas (*on-farm/off-farm*) antara lain melalui (i) bantuan sarana dan prasarana, (ii) bimbingan teknis terkait pemanfaatan saprodi unggul, alsintan modern, serta *good agricultural/farming/handling practice*, (iii) penguatan kelembagaan antara lain melalui pengembangan korporasi petani didukung ekosistem *end-to-end* yang terintegrasi dan sinergi pentahelix, serta (iv) penguatan peran BUMD Pangan dalam mendukung konsistensi pasokan dan distribusi.
3. Kelancaran distribusi: (i) penguatan dan perluasan kerjasama intraprovinci dan antardaerah, (ii) fasilitasi distribusi komoditas, (iii) subsidi ongkos angkut, (iv) penguatan konektivitas transportasi publik Jawa Timur, dan (v) percepatan revitalisasi maupun pembangunan jalur transportasi.
4. Komunikasi efektif: (i) koordinasi pusat-daerah, (ii) peningkatan kualitas digitalisasi data, serta (iii) pengendalian ekspektasi inflasi.

Pada tahun 2026, beberapa inovasi langkah pengendalian inflasi akan dilakukan sebagai penguatan atas program pengendalian inflasi daerah eksisting, antara lain pelaksanaan program utama setiap pilar 4K yang terintegrasi dalam program EPIK Mobile dan integrasi *dashboard* TPID Jawa Timur dengan *platform* pusat data Jawa Timur. Program EPIK *Mobile* merupakan wujud integrasi dari pelaksanaan program 4K pengendalian inflasi yang terdiri dari (i) K1: wadah penjualan komoditas pangan dengan harga yang murah secara *mobile* atau keliling; (ii) K2: dukungan penguatan kelembagaan produsen dengan menghadirkan pasar bagi hilirisasi produk dari korporasi petani beras binaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan *brand* beras Jatim Cettar; (iii) K3: pasokan korporasi petani yang dijual menjadi wujud hasil kerjasama intradaerah dari wilayah surplus ke wilayah defisit didukung oleh fasilitasi distribusi oleh *offtaker* BUMD Provinsi Jawa Timur; serta (iv) K4: berupa pemanfaatan *platform monitoring* harga untuk penentuan waktu dan lokasi EPIK *Mobile* serta komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat bahwa harga komoditas pangan tetap terjaga di berbagai lokasi di Jawa Timur.

Adapun integrasi *dashboard* TPID Jawa Timur (<https://tpidjatim.com>) dengan *platform* pusat data di Jawa Timur yaitu MAJADIGI dan *Open Data* Jawa Timur, diharapkan dapat memperkuat perumusan kebijakan TPID Jawa Timur serta penguatan komunikasi kebijakan bagi masyarakat terkait program-program pengendalian inflasi yang telah dilakukan guna menjaga ekspektasi tingkat inflasi yang terkendali. Selain itu, penguatan fitur visualisasi data dalam *dashboard* TPID Jawa Timur akan turut dilakukan sebagai bentuk *feedback* bagi TPID dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program yang tepat waktu dan tepat sasaran.

Koordinasi kebijakan antara pusat dan daerah akan terus diperkuat, khususnya dalam rangka mitigasi risiko inflasi yang bersifat *volatile* dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau akibat ketergantungan produksi terhadap faktor cuaca dan distribusi pasokan yang kurang merata khususnya intra provinsi Jawa Timur. Selain itu, penguatan koordinasi akan terus dilanjutkan dalam rangka internalisasi Kerangka Kerja Pengendalian Inflasi Jawa Timur dan pelaksanaan peta jalan TPID se-Jawa Timur tahun 2025-2027.

Berbagai penguatan sinergi pengendalian inflasi TPID Jawa Timur dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, serta dukungan faktor fundamental seperti cuaca dan komoditas global yang cukup kondusif, inflasi Jawa Timur pada tahun 2026 diperkirakan terjaga dalam rentang sasaran $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Namun demikian, berbagai faktor risiko khususnya yang bersumber dari global tetap perlu dicermati untuk memastikan tercapainya target inflasi yang telah ditetapkan.

Tabel 7.2. Faktor Pendorong dan Penahan Inflasi Jawa Timur 2026

Faktor Pendorong Inflasi Tahun 2025
<i>Imported inflation</i> pada komoditas energi dan non-energi seiring di tengah fenomena iklim global dan eskalasi konflik geopolitik terkini, khususnya Iran dengan Amerika Serikat.
Peningkatan permintaan khususnya pada momen HBKN Natal dan Tahun Baru.
Faktor Penahan Inflasi Tahun 2026
Produktivitas pangan yang terjaga didukung kondisi cuaca yang tidak menunjukkan anomali signifikan.
Dukungan berbagai program prioritas Pemerintah yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan nasional dan kebijakan stimulus/insentif untuk mendukung kesejahteraan produsen dan masyarakat.
Stabilitas harga komoditas yang diatur Pemerintah di tengah moderasi harga komoditas energi utama di tingkat global.
Penguatan serta akselerasi kebijakan dan pelaksanaan program pengendalian inflasi oleh TPID Jawa Timur, termasuk implementasi program GPIPS yang dirangkai dalam Kerangka Kerja Pengendalian Inflasi Jawa Timur secara konsisten, antisipatif, akurat, dan efektif.

BOKS 6

Dinamika Komoditas Tembakau sebagai Penggerak Perekonomian Jawa Timur

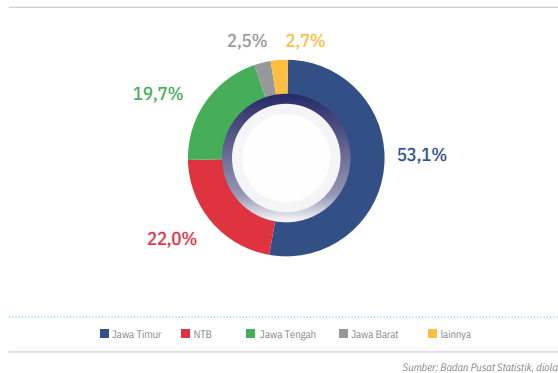
Indonesia tercatat sebagai produsen tembakau terbesar keempat di dunia pada tahun 2022, setelah Tiongkok Daratan, India, dan Brasil, dengan volume produksi mencapai 225,58 ribu ton atau sekitar 3,99% dari total produksi tembakau global (FAO, 2022). Dalam konteks nasional, Jawa Timur merupakan pusat produksi tembakau Indonesia. Pada tahun 2024, provinsi ini berkontribusi sebesar 53,1% terhadap total produksi nasional, yakni sekitar 185,6 ribu ton dari total 351,3 ribu ton, diikuti oleh Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Grafik 1). Secara rata-rata selama periode 2020–2024, kontribusi Jawa Timur mencapai sekitar 48,6% per tahun. Hal ini menegaskan bahwa peran Jawa Timur sebagai basis utama produksi tembakau bersifat struktural dan berkelanjutan.

Produksi tembakau di Jawa Timur relatif terkonsentrasi di wilayah Madura dan kawasan timur (Grafik 2). Dari sepuluh kabupaten penyumbang terbesar, Kabupaten Pamekasan tercatat sebagai kontributor utama dengan

pangsa sekitar 15,3% dari total produksi tembakau Jawa Timur, diikuti Kabupaten Jember (13,8%) dan Kabupaten Bojonegoro (11,9%). Kontributor utama lainnya meliputi Kabupaten Situbondo (8,9%), Kabupaten Probolinggo (8,3%), Kabupaten Lamongan (7,9%), Kabupaten Jombang (7,0%), Kabupaten Bondowoso (5,8%), Kabupaten Sumenep (5,6%), serta Kabupaten Sampang (4,1%).

Sebagai komoditas perkebunan terbesar kedua di Jawa Timur, usaha tani tembakau diperkirakan melibatkan lebih dari 370 ribu petani, dengan sekitar 99,71% dikelola oleh petani rakyat, bukan korporasi. Kondisi ini menegaskan peran strategis subsektor tembakau sebagai sumber penghidupan masyarakat sekaligus kontributor penting bagi perekonomian daerah dan nasional. Tren peningkatan harga tembakau, baik di pasar global maupun domestik, berpotensi mendorong meningkatnya minat petani untuk melakukan alih usaha atau ekspansi ke komoditas tembakau (Grafik 3).

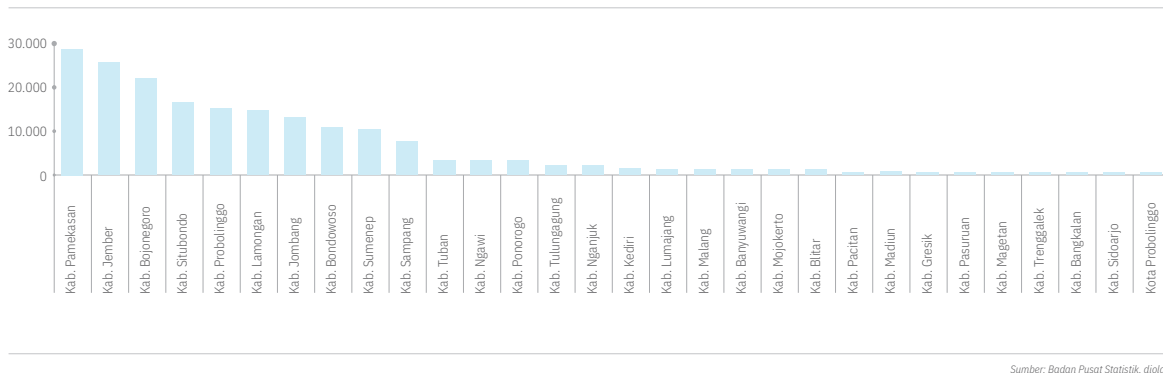
Grafik 1. Produksi Tembakau di Indonesia Tahun 2024



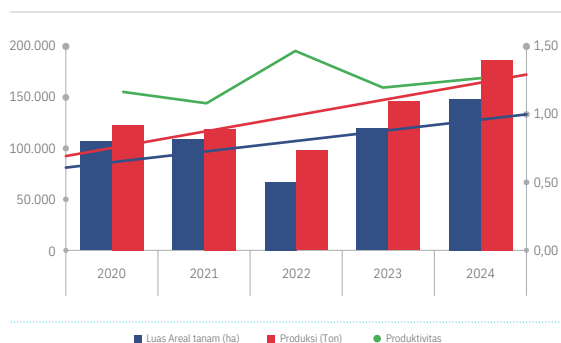
Grafik 3. Harga Tembakau Dunia dan Harga Tembakau Jawa Timur



Grafik 2. Produksi Tembakau per Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2024



BOKS 6

Grafik 4. Produksi, Luas Areal Tanam, dan Produktivitas Tembakau Jawa Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

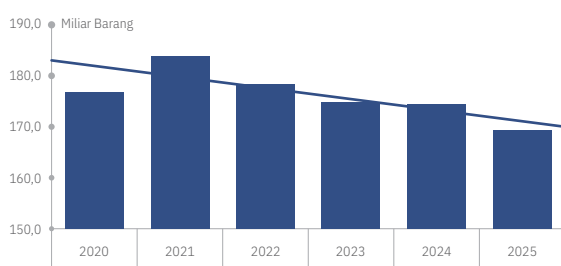
Dari sisi hulu, luas areal tanam tembakau di Jawa Timur meningkat sebesar 23,2% pada tahun 2024, dari 119,6 ribu hektare menjadi 147,3 ribu hektare. Sejalan dengan ekspansi tersebut, produksi tembakau Jawa Timur juga meningkat 27,8% pada 2024 (Grafik 4), dari 145,2 ribu ton pada 2023 menjadi 185,6 ribu ton pada 2024. Peningkatan produktivitas dari 1,21 ton per hektare menjadi 1,26 ton per hektare turut memperkuat pertumbuhan output pada tahun yang sama. Secara keseluruhan, sepanjang periode 2020–2024, indikator produksi, luas areal tanam, dan produktivitas tembakau di Jawa Timur menunjukkan tren meningkat.

Pada sisi hilir, Industri Hasil Tembakau (IHT) memiliki peran penting sebagai salah satu penggerak perekonomian Jawa Timur. Hal ini tecermin dari pangsa industri pengolahan tembakau pada tahun 2023 yang mencapai 22,78% terhadap total Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan, atau setara dengan 6,96% terhadap

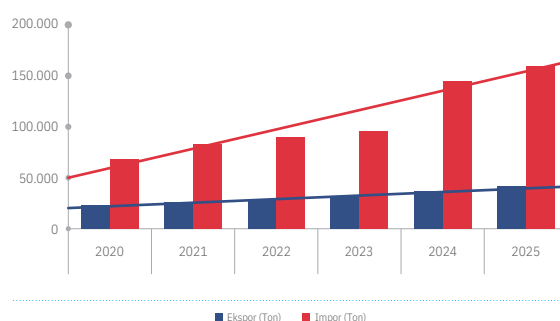
total PDRB Jawa Timur. Capaian tersebut menempatkan industri pengolahan tembakau sebagai kontributor terbesar kedua pada sub-LU Industri Pengolahan setelah Industri Makanan dan Minuman. Pada tahun 2024, terdapat sekitar 1.728 unit IHT di Jawa Timur yang menyerap kurang lebih 287.180 tenaga kerja. Namun demikian, produksi rokok justru mengalami penurunan di tengah peningkatan produksi tembakau domestik. Pada tahun 2025, estimasi produksi rokok tercatat sekitar 169,3 miliar batang, menurun sekitar 3% dibandingkan periode sebelumnya (Grafik 5). Penurunan tersebut merupakan capaian terendah kedua dalam lima tahun terakhir.

Dari sisi perdagangan luar negeri, volume impor dan ekspor tembakau meningkat pada 2025. Volume impor tembakau meningkat sebesar 10,6% pada tahun 2025 (Grafik 6). Kinerja ekspor juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 18,9% pada periode yang sama. Meski demikian, jika ditinjau berdasarkan rerata periode 2020–2025, laju peningkatan impor (19,5%) tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor (12,3%). Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh pertimbangan efisiensi biaya produksi, sehingga industri rokok cenderung meningkatkan penggunaan tembakau impor. Sementara itu, tembakau domestik dengan kelas mutu lebih tinggi memiliki harga relatif lebih mahal dan umumnya digunakan untuk kebutuhan cerutu.

Surplus pasokan tembakau menunjukkan tren meningkat, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2024 (Grafik 7). Pada tahun tersebut, estimasi selisih atau tembakau yang tidak terserap mencapai sekitar 172,6 ribu ton, meningkat 91,4% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 90,1 ribu ton. Selama periode 2020–2024,

Grafik 5. Produksi Rokok Jawa Timur

Sumber: Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 6. Ekspor-Impor Tembakau Jawa Timur

Sumber: Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, diolah

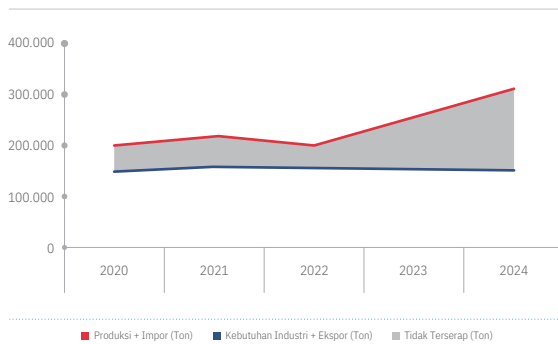
BOKS 6

produksi dan impor tembakau cenderung meningkat, sementara kebutuhan industri dan kinerja ekspor relatif lebih stabil.

Peningkatan pasokan dari produksi domestik dan impor berpotensi menimbulkan kondisi *overstock* apabila tidak diimbangi oleh penguatan penyerapan di sisi hilir maupun perluasan pasar ekspor. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan pasokan dan dinamika permintaan dapat mendorong akumulasi stok pada pelaku usaha, menekan harga di tingkat produsen, serta meningkatkan beban biaya penyimpanan dan risiko penurunan mutu bahan baku. Dalam jangka menengah, kondisi tersebut juga berpotensi melemahkan insentif budidaya bagi petani dan meningkatkan volatilitas harga.

Tekanan penurunan harga akibat penumpukan pasokan dan pelemahan permintaan, seiring penguatan kebijakan pengendalian tembakau di tingkat global, menempatkan petani pada posisi yang semakin rentan. Di sisi domestik, kenaikan harga jual eceran rokok yang rata-rata mencapai 10,5% berpotensi menekan daya beli dan mendorong penyesuaian konsumsi. Pada saat yang sama, permintaan global cenderung melemah seiring perubahan preferensi sebagian konsumen ke rokok elektrik serta meningkatnya kesadaran terhadap isu kesehatan, sehingga menahan pertumbuhan permintaan produk tembakau konvensional. Di tingkat global, agenda *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) di bawah WHO turut memperkuat arah kebijakan pengendalian tembakau melalui berbagai instrumen, antara lain pembatasan pemasaran, pengaturan kemasan dan pelabelan, pembatasan konsumsi di ruang publik, serta kebijakan fiskal berupa peningkatan cukai.

Grafik 7. Proxy Total Ketersediaan dan Total Kebutuhan Tembakau Jawa Timur



Sumber: Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik, diolah

Dinamika tersebut berpotensi memperketat kondisi pasar dan meningkatkan biaya kepatuhan, sehingga ruang ekspansi industri tembakau, baik di pasar domestik maupun ekspor, cenderung semakin terbatas.

Beberapa langkah mitigasi diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kontribusi tembakau sebagai salah satu penggerak perekonomian Jawa Timur. Upaya tersebut perlu diarahkan untuk menyeimbangkan dinamika hulu-hilir, menjaga stabilitas pendapatan pelaku usaha, serta menurunkan risiko penumpukan pasokan di tengah tekanan permintaan. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa langkah yang perlu ditempuh antara lain:

1. Perencanaan tanam dan peningkatan kualitas. Luas tanam, varietas, dan kalender produksi perlu diselaraskan dengan proyeksi serapan pasar dan kebutuhan industri agar volume serta mutu lebih sesuai dengan permintaan. Peningkatan kualitas budidaya (benih unggul, penerapan *good agricultural practices*, pengendalian residu, dan *traceability*) akan memperkuat daya saing serta mengurangi risiko tembakau tidak terserap.
2. Standardisasi pascapanen untuk konsistensi mutu. Proses pascapanen—*curing*, sortasi atau *grading*, pengeringan, dan penyimpanan—perlu distandardisasi agar kualitas lebih seragam, kehilangan hasil menurun, dan atribut mutu lebih stabil. Penguatan sistem penjaminan mutu (QA/QC) dan sertifikasi yang relevan akan meningkatkan kredibilitas produk serta menekan risiko penolakan akibat ketidaksesuaian mutu.
3. Penguatan kemitraan petani dengan *offtaker*. Skema kemitraan berbasis kontrak kualitas, pendampingan teknis, serta dukungan pembiayaan input dapat memperkuat kepastian serapan dan memperbaiki mekanisme pembentukan harga. Integrasi rantai pasok juga memudahkan konsolidasi volume, peningkatan mutu, serta penelusuran asal produk, sehingga akses ke pasar bernilai tambah semakin terbuka.

Lebih lanjut, dukungan kebijakan yang berorientasi pada penguatan akses pasar ekspor diperlukan agar pengendalian konsumsi domestik dapat diimplementasikan secara efektif tanpa mengganggu keberlanjutan rantai nilai tembakau di Jawa Timur. Dengan demikian, penyesuaian permintaan domestik dapat diimbangi melalui perluasan pasar dan diversifikasi produk, sehingga kontribusi ekonomi tembakau beserta produk turunannya tetap terjaga secara berkelanjutan.

Penguatan Konektivitas Pariwisata Menambah Daya Ungkit Ekonomi Jawa Timur

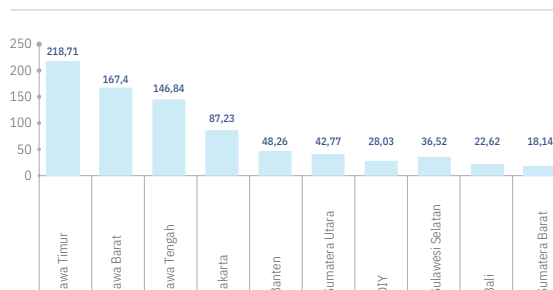
BOKS 7

Pariwisata merupakan salah satu pengungkit strategis perekonomian Jawa Timur. Pariwisata mampu mendorong permintaan domestik sekaligus memperluas *multiplier effect* ke sektor terkait, seperti transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta perdagangan. Dalam fase normalisasi mobilitas, pariwisata juga relevan dalam memperkuat pertumbuhan yang lebih inklusif, mengingat manfaatnya mengalir ke berbagai pelaku lokal, mulai dari UMKM kuliner dan oleh-oleh, jasa perjalanan, hingga layanan transportasi setempat.

Kinerja sektor pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penguatan yang semakin solid. Pada tahun 2024, Jawa Timur menerima 218,71 juta perjalanan wisatawan nusantara, tertinggi secara nasional (Grafik 1). Selain menjadi penggerak permintaan, pariwisata juga berperan signifikan dalam penciptaan lapangan kerja. Sektor ini tercatat sebagai penyerap tenaga kerja terbesar keempat di Jawa Timur dengan pangsa sekitar 9% (Grafik 2). Selaras dengan perkembangan tersebut, dibandingkan Agustus 2024, peningkatan tenaga kerja terbesar pada Agustus 2025 tercatat pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, yang bertambah sekitar 103,59 ribu orang (Grafik 3). Hal ini mengindikasikan penguatan aktivitas jasa pariwisata yang semakin nyata.

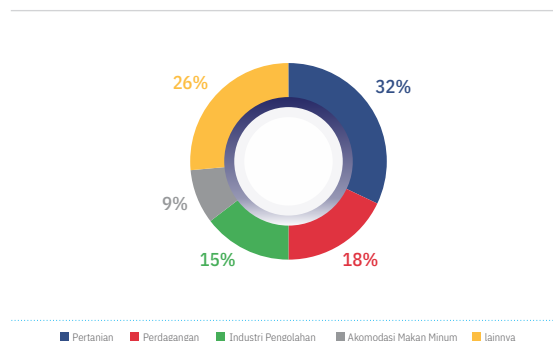
Normalisasi aktivitas juga tecermin pada indikator kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan kinerja perhotelan. Pada Juli 2025, kunjungan wisman melalui Bandara Juanda mencapai 34.421 kunjungan (Grafik 4). Kinerja hotel berbintang relatif terjaga, tecermin dari rata-rata lama menginap tamu (RLMT) sebesar 1,73 hari dan tingkat penghunian kamar (TPK) sebesar 52,65% (Grafik 5). Dari sisi pembiayaan, kredit sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel (PRH) di Jawa Timur tercatat sebesar Rp12,269 triliun pada Desember 2025, tumbuh 10,16% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 6). Secara sektoral, PRH juga termasuk salah satu sektor dengan penyaluran kredit terbesar, dengan pangsa sekitar 20,17% terhadap total kredit nasional, yang menunjukkan dukungan intermediasi perbankan yang semakin kuat terhadap aktivitas ekonomi terkait pariwisata.

Grafik 1. Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Tujuan Tertinggi di Indonesia Tahun 2024 (juta jiwa)



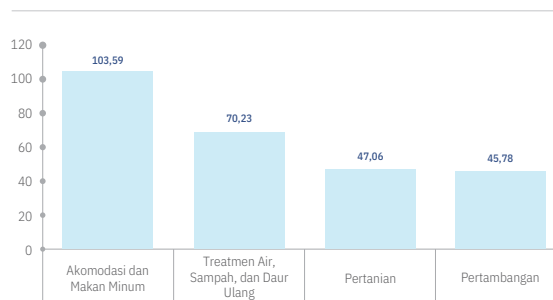
Sumber: Kementerian Pariwisata (diolah)

Grafik 2. Jumlah Tenaga Kerja Lapangan Usaha Jawa Timur



Sumber: BPS, Diolah

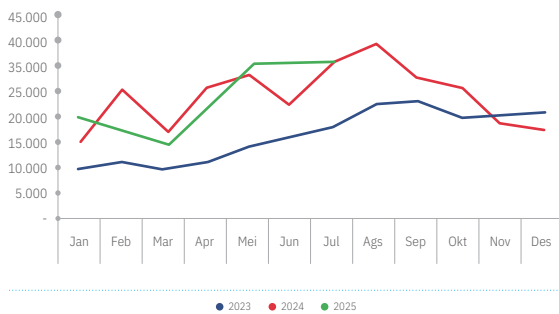
Grafik 3. Jumlah Peningkatan Penyerapan Lapangan Usaha Agustus - November 2025 (ribu orang)



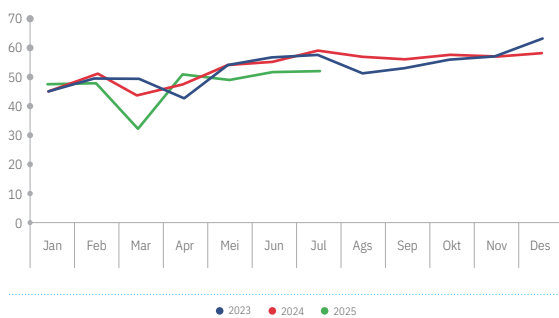
Sumber: BPS, Diolah

BOKS 7

Grafik 4. Jumlah Kunjungan Wisman ke Jawa Timur

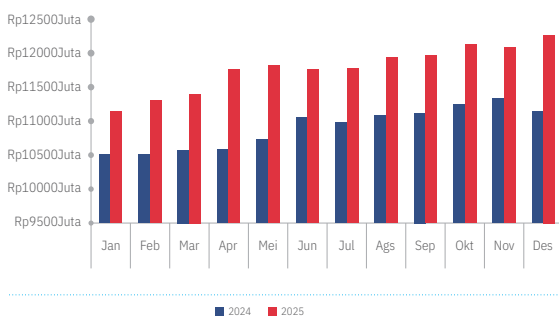


Sumber: BPS, Diolah

Grafik 5. Perkembangan TPK Hotel Bintang di Jawa Timur
Jan 2023 - Jul 2025

Sumber: BPS, Diolah

Grafik 6. Penyaluran Pembiayaan Sektor Pariwisata di Jawa Timur



Sumber: OJK, diolah

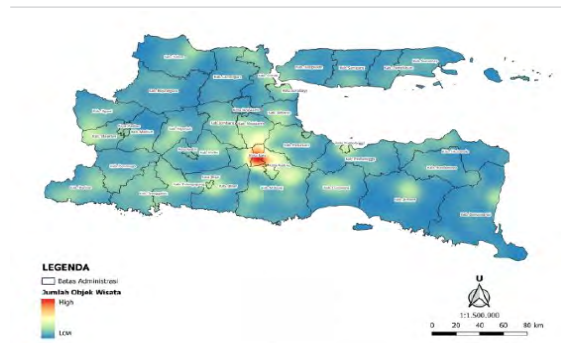
Dari sebaran destinasi, jumlah objek wisata di Jawa Timur masih terkonsentrasi di area Malang raya, sementara di kabupaten/kota lainnya tergolong terbatas dan tersebar. Kondisi ini menegaskan bahwa hampir seluruh wilayah memiliki potensi pariwisata, baik berbasis alam, budaya, maupun buatan. Secara spasial, sebaran objek wisata membentang dari wilayah tengah hingga kawasan pesisir dan perbatasan perairan, sehingga potensi wisata pesisir Jawa Timur sesungguhnya cukup kuat. Namun demikian, dari sisi jumlah kunjungan, wilayah pesisir belum sepenuhnya mampu menarik wisatawan secara merata (Grafik 7). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tantangan utama Jawa Timur bukan semata pada ketersediaan destinasi, melainkan pada kemampuan mengonversi potensi yang tersebar menjadi arus perjalanan yang nyata dan merata. Ketika destinasi belum terhubung secara optimal dalam aksesibilitas, paket perjalanan, dan layanan pendukung, wisatawan cenderung terkonsentrasi pada pusat-pusat yang telah mapan. Akibatnya, daerah lain termasuk kawasan pesisir masih berada pada kategori potensial, namun belum optimal dari sisi kunjungan dan transaksi lokal.

Ke depan, tantangan pengembangan pariwisata tidak hanya terletak pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga pada konversi kunjungan menjadi nilai tambah ekonomi. Hal ini mencakup peningkatan belanja wisatawan (*spending*), perpanjangan lama tinggal (*length of stay*), serta penguatan *multiplier effect* yang lebih merata hingga pelaku lokal. Dalam konteks tersebut, konektivitas menjadi variabel kunci karena menentukan kemudahan wisatawan melakukan perjalanan multi-destinasi sekaligus memengaruhi kemampuan ekosistem usaha lokal dalam menangkap dan mendistribusikan belanja wisatawan agar tetap berputar di daerah.

Dari sisi pergerakan antardaerah, interaksi pariwisata cenderung lebih kuat pada wilayah yang berdekatan dan saling melengkapi, khususnya pada pasangan kota-kabupaten bertetangga. Pada level provinsi, masih terdapat simpul perjalanan yang dominan sehingga arus wisata relatif terkonsentrasi. Oleh karena itu, penguatan konektivitas antarklaster dan koridor perjalanan menjadi penting agar distribusi arus wisata semakin merata, termasuk ke wilayah pesisir yang potensinya besar namun tingkat kunjungannya belum optimal.

BOKS 7

Grafik 7. Sebaran Objek Wisata Kab/Kota di Jawa Timur

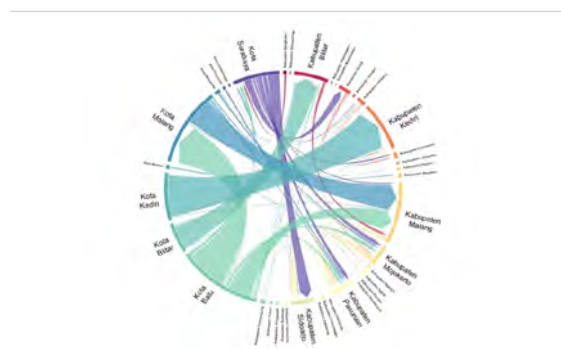


Sumber: EJAVEC 2025

Perencanaan jaringan jalan dalam RTRW 2023–2043 menunjukkan bahwa penguatan koridor akses dan keterhubungan antar kawasan berpotensi meningkatkan peluang perjalanan multi-destinasi. Dengan lebih banyak pilihan rute dan akses menuju klaster-klaster destinasi yang sebelumnya kurang terhubung, arus wisata diperkirakan menjadi lebih tersebar. Implikasinya, destinasi dengan potensi kuat namun kunjungan relatif rendah termasuk sebagian kawasan pesisir memiliki peluang akselerasi yang lebih besar. Dalam hal ini, RTRW 2043 dapat diposisikan sebagai *policy anchor* penguatan konektivitas pariwisata, sepanjang penguatan akses tersebut dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan destinasi serta integrasi paket lintas daerah.

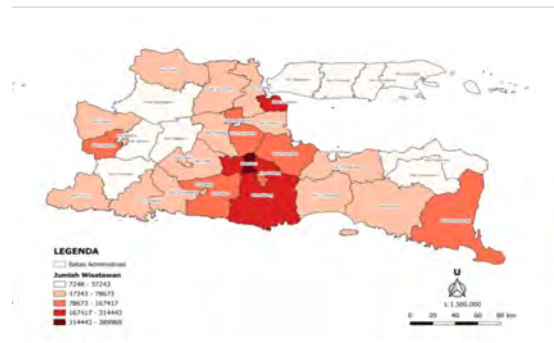
Tiga analisis tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa penguatan jaringan jalan dalam RTRW 2043 berpotensi memperkuat “mesin konektivitas” pariwisata

Grafik 9. Ilustrasi Jaringan Pariwisata Jawa Timur: Hub, Klaster Berdekatan, dan Koridor Penghubung



Sumber: EJAVEC 2025

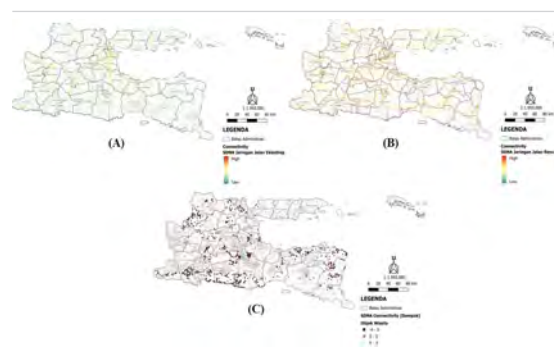
Grafik 8. Jumlah Wisatawan Kab/Kota di Jawa Timur



Sumber: EJAVEC 2025

Jawa Timur. Konektivitas jaringan meningkat paling signifikan pada koridor Pantura, Pansela, dan akses tengah Jawa Timur sehingga destinasi di sepanjang jalur ini diperkirakan paling diuntungkan karena hubungan antardaerah makin tersambung dan arus wisata antardestinasiberpotensi meningkat. Dari sisi aksesibilitas, kemudahan menjangkau destinasi di wilayah Pulau Jawa terutama sekitar Gerbangkertosusila Plus diproyeksikan membaik secara luas, namun peningkatan serupa tidak terlihat di Pulau Madura sehingga destinasi di Madura berisiko tetap kurang terhubung dengan jaringan utama. Sementara itu, bertambahnya pilihan jalur utama diperkirakan membuat beban lalu lintas lebih merata dan mengurangi ketergantungan pada rute tertentu, yang pada akhirnya memperlancar pergerakan wisatawan dan membuka peluang pemerataan manfaat pariwisata ke lebih banyak wilayah.

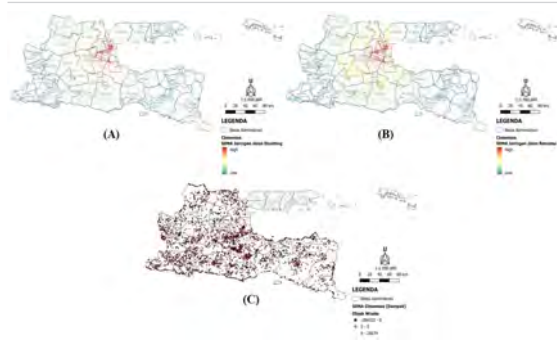
Grafik 10. Ilustrasi Jaringan Pariwisata Jawa Timur menggunakan Degree of Centrality (Connectivity). Jaringan Jalan Eksisting; (B) Jaringan Jalan Rencana; (C) Objek Wisata Terdampak oleh Selisih Connectivity



Sumber: EJAVEC 2025

BOKS 7

Grafik 11. Ilustrasi Jaringan Pariwisata Jawa Timur menggunakan *Closeness Centrality (Accessibility), (Choice)*.
(A) Jaringan Jalan Eksisting; (B) Jaringan Jalan Rencana;
(C) Objek Wisata Terdampak oleh Selisih *Connectivity*

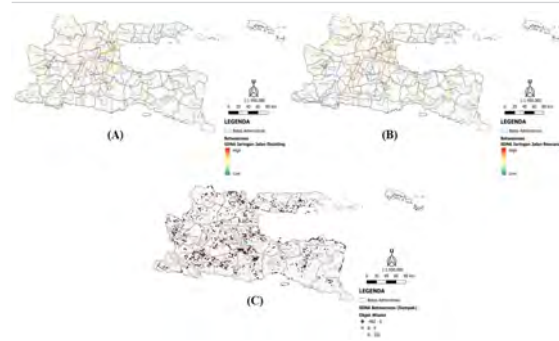


Sumber: EJAVEC 2025

Untuk memastikan strategi konektivitas tepat sasaran, diperlukan pembacaan kondisi di level pelaku. Kajian dan survei pada klaster destinasi di Jawa Timur bagian tengah dan beberapa wilayah Pansela memberikan sinyal yang relevan: terdapat perbedaan persepsi antara pengelola destinasi dan pelaku pendukung (kuliner, oleh-oleh, biro perjalanan). Pengelola cenderung menilai atraksi sudah kuat, sementara pelaku pendukung sering menilai manfaat ekonomi yang dirasakan masih terbatas. Pola ini menunjukkan bahwa ramai kunjungan belum otomatis menjadi ramai transaksi yang merata di rantai nilai, sehingga perbaikan perlu diarahkan pada pengemasan paket, penguatan titik belanja lokal, dan jejaring pelaku usaha agar kunjungan lebih mudah terkonversi.

Sebagai salah satu koridor strategis di Jawa Timur, Jawa Timur bagian tengah dan Pansela memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata unggulan yang

Grafik 12. Ilustrasi Jaringan Pariwisata Jawa Timur menggunakan *Betweenness Centrality (Choice)*.
(A) Jaringan Jalan Eksisting; (B) Jaringan Jalan Rencana;
(C) Objek Wisata Terdampak oleh Selisih *Connectivity*



Sumber: EJAVEC 2025

mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat nilai budaya lokal. Ke depan, penguatan akses, kualitas layanan, dan keterpaduan antardestinasi lintas kabupaten/kota perlu dipercepat agar potensi tersebut tidak hanya meningkatkan kunjungan, tetapi juga menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi, memberdayakan masyarakat, dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.

Sinergi kebijakan lintas pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar peningkatan kunjungan benar-benar terkonversi menjadi *spending, length of stay*, dan *multiplier effect* ke UMKM, akomodasi, transportasi, serta ekonomi kreatif. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Penguatan tata kelola kawasan melalui pembentukan *Destination Management Organization (DMO)*, dengan payung hukum yang jelas untuk mengoordinasikan strategi lintas kabupaten/kota, mengintegrasikan

Tabel 1. Klaster Spasial dan Peran Destinasi (7 wilayah terpilih)

Wilayah	Keunggulan Dominan	Peran dalam sistem destinasi kawasan
Kab. Pacitan	Bahari, karst, geowisata	Magnet kunjungan alam; peluang <i>high value</i> bila terhubung kuliner/ekraf
Kab. Blitar	Bahari + <i>heritage</i> /religi	Penguat paket lintas tema; basis wisata edukasi- <i>heritage</i>
Kab. Magetan	Danau/pegunungan, agrowisata	Destinasi keluarga/ekowisata; memperpanjang lama tinggal
Kab. Ponorogo	Budaya (Reog) + alam	<i>Anchor event</i> budaya; pendorong kunjungan musiman
Kab. Kediri	Religi-alam- <i>landmark</i> modern	Penghubung rute; butuh penguatan akses & paket terintegrasi
Kota Kediri	<i>Urban tourism</i> , kuliner, ruang publik	<i>Gateway</i> layanan/amenitas; pengikat rute lintas wilayah
Kota Blitar	<i>Urban-sejarah</i> -kuliner	Penguat narasi sejarah; sinergi dengan Kab. Blitar

Sumber: Bank Indonesia, diolah

BOKS 7

promosi dan kalender *event*, melakukan standarisasi layanan destinasi, serta mengelola *tourism intelligence center* berbasis data (kunjungan, preferensi wisatawan, dan kinerja UMKM) bersama BPS dan perguruan tinggi;

2. **Percepatan infrastruktur dan aksesibilitas destinasi prioritas**, melalui perbaikan koridor penghubung strategis (misalnya Pacitan–Ponorogo, Kediri–Blitar,

Magetan–Ngawi), penyediaan transportasi publik wisata seperti *shuttle* lintas kabupaten berbasis reservasi digital, pembangunan *rest area* pariwisata standar (toilet bersih, parkir, fasilitas ramah disabilitas, WiFi, pusat oleh-oleh UMKM), serta pemasangan *smart signage* berbasis QR di destinasi utama;

Tabel 2. Ringkasan Tantangan Utama Pengembangan Pariwisata Unggulan

Wilayah	Atraksi (Internal)	Akses (Eksternal)	Amenitas (Internal)	Promosi (Eksternal)	Pelaku (Internal)
Kab. Kediri	Kegiatan wisata terbatas, fasilitas usang, kebersihan masih kurang	Jalan rusak, transportasi umum minim, penerangan lemah, akses disabilitas terbatas	Toilet, <i>rest area</i> , toko oleh-oleh, fasilitas modern (WiFi, <i>shuttle</i> , CCTV) kurang	Minim promosi digital & <i>event</i> , kolaborasi lemah	SDM muda/profesional minim, keterampilan sosial kurang
Kota Kediri	Fasilitas atraksi kurang variatif, pedagang perlu penataan	Parkir tidak tertata, transportasi umum kurang, keamanan akses lemah	<i>Rest area</i> & toilet terbatas, spot foto minim, fasilitas publik tidak terlewati	Promosi digital sangat lemah, <i>branding</i> tidak kreatif	SDM muda minim, lemahnya pelayanan & koordinasi
Kab. Pacitan	Atraksi bahari dominan, variasi aktivitas terbatas, kebersihan belum optimal	Jalan rusak, rambu kurang, penerangan lemah, akses jalan sempit	<i>Rest area</i> /parkir minim, fasilitas modern tidak tersedia	Promosi digital lemah, <i>event</i> minim	Tata kelola SDM lemah, ketertiban masih kurang koordinasi pemerintah minim
Kab. Blitar	Kegiatan wisata terbatas, promosi kegiatan lemah, fasilitas atraksi usang	Jalan rusak parah, kendaraan umum terbatas	<i>Rest area</i> & fasilitas penunjang modern kurang	Promosi digital lemah, kolaborasi <i>influencer</i> /pemerintah masih kurang	SDM profesional minim, pelibatan usaha kecil terbatas
Kota Blitar	Atraksi tidak variatif, kegiatan minim, promosi kegiatan kurang	Fasilitas tambahan minim, jalan sempit, kendaraan umum terbatas	<i>Rest area</i> , toilet, toko oleh-oleh & kuliner terbatas, penataan pedagang lemah	Promosi digital masih kurang, kerjasama lintas aktor lemah	SDM profesional & interpersonal rendah
Kab. Magetan	Fasilitas kurang variatif, tiket masuk mahal, atraksi baru terbatas	Jalan sempit, macet, transportasi umum minim, pedagang tidak tertata	Fasilitas modern (WiFi, <i>shuttle</i> , CCTV) kurang, <i>rest area</i> minim	Promosi digital lemah, kolaborasi <i>influencer</i> minim	SDM profesional minim, ketertiban usaha lemah
Kab. Ponorogo	Atraksi monoton, fasilitas atraksi usang, kebersihan lemah	Jalan rusak, pengelolaan sampah lemah, parkir terbatas	<i>Rest area</i> , toilet, hiburan & fasilitas seni minim, WiFi/CCTV belum tersedia	Promosi digital minim, <i>event</i> & kolaborasi lemah	SDM profesional sangat terbatas, biro perjalanan pasif

Sumber: Survey Bank Indonesia, diolah

- 

NATURE & HIGHLAND ESCAPE

Kesejukan pegunungan dan keindahan danau alami Mataraman



Mogetan Highland

- 08.00 Start dari solo Medium (Rp30.000.000) sebagai (sagar, esakasi & foto)
 - 08.00-12.30: Belajar plot tanah milik dan sekitarnya
 - 13.00-17.00: Telesa Sarangan, Dinding batu cadas kerdas
 - 17.00-17.30: Singgah di kafe kate Belur & makan
 - 18.00: Check-in hotel
 - 19.00: Restorasi



Tea Journey

- 08.00: Check-out menuju (Rp30.000.000) (sagar, esakasi & foto)
 - 08.30: 12.30: Perjalanan Tea, Sarung Kerdas
 - 12.30-13.00: Belajar dari petanik & esakasi sarung
 - 13.00-15.00: Lunch & esakasi Sarangan, Trip Kamondanu
 - 15.00-17.30: Check-in karangon batu esakasi
 - 18.00: Return home



COASTAL ADVENTURE

Explorasi pantai selatan yang eksotis dan heritage pesisir



Pacitan Coastal

07:00 Start dari Yogyakarta/Solo

- 10:00-12:00 Museum Songkoro (edukasi pesisir/ekologi)
- 12:00-12:30 Belajar media alternatif & buku sejarah Pantai Sogo
- 13:00-14:00 Lunch seafood Pantai Sogo
- 14:30-17:00 Explore Pantai Sogo & sekitar
- 17:30-19:00 Makan malam & istirahat & persiapan tidur
- 19:30 Check-in hotel Pacitan



Tea Journey

- 08:00 Explore morning market (belanja batik Pacitan)
- 09:30-10:30 Pantai Klayor (optional: pantai lainnya)
- 12:00 Return journey dengan lunch box seafood

[illegible]

136



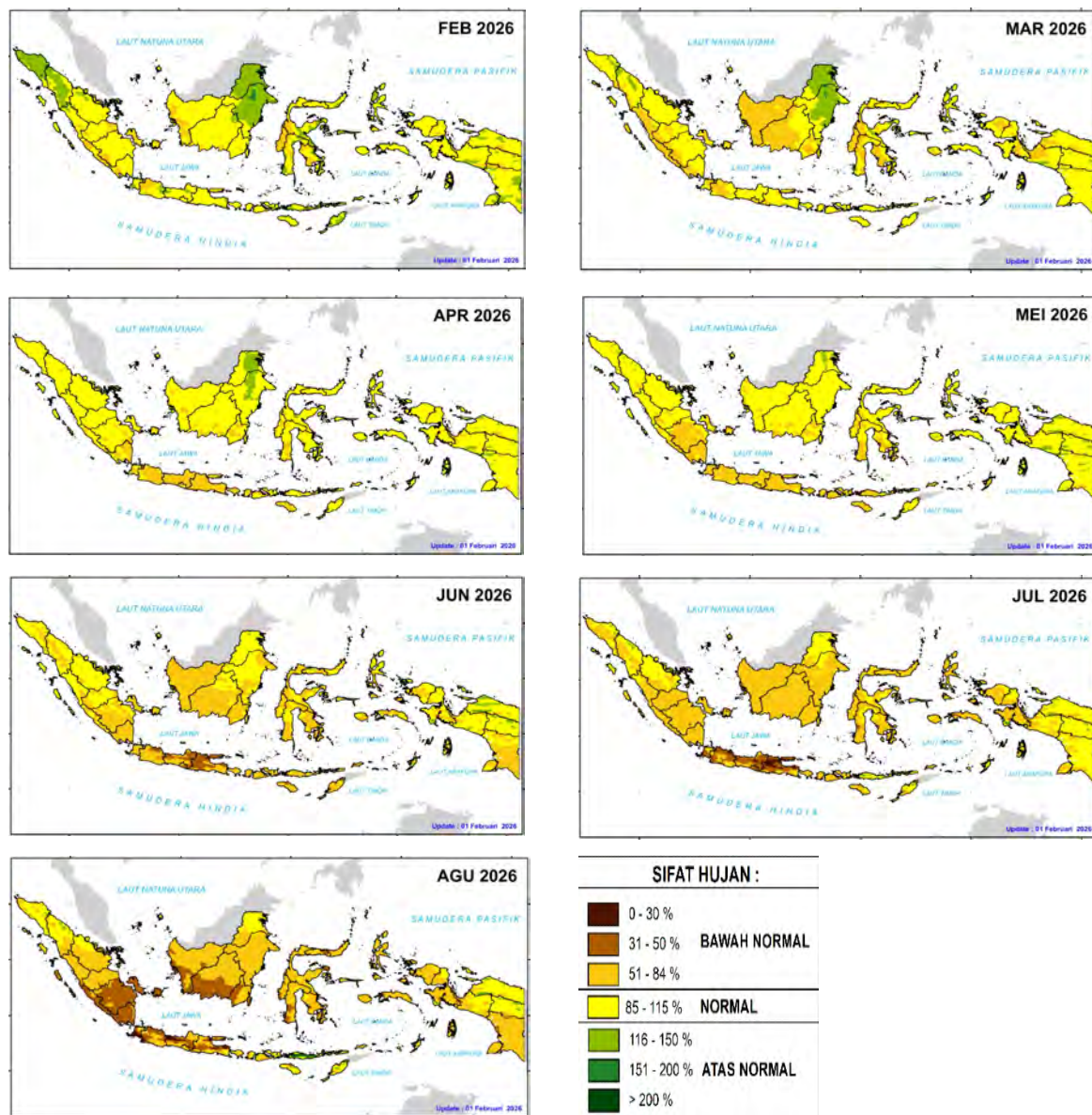
Lampiran

Lampiran 1. Wilayah Kerja Bank Indonesia di Jawa Timur

Wilayah Kerja	Area
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur*)	Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang	Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri	Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember	Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi.

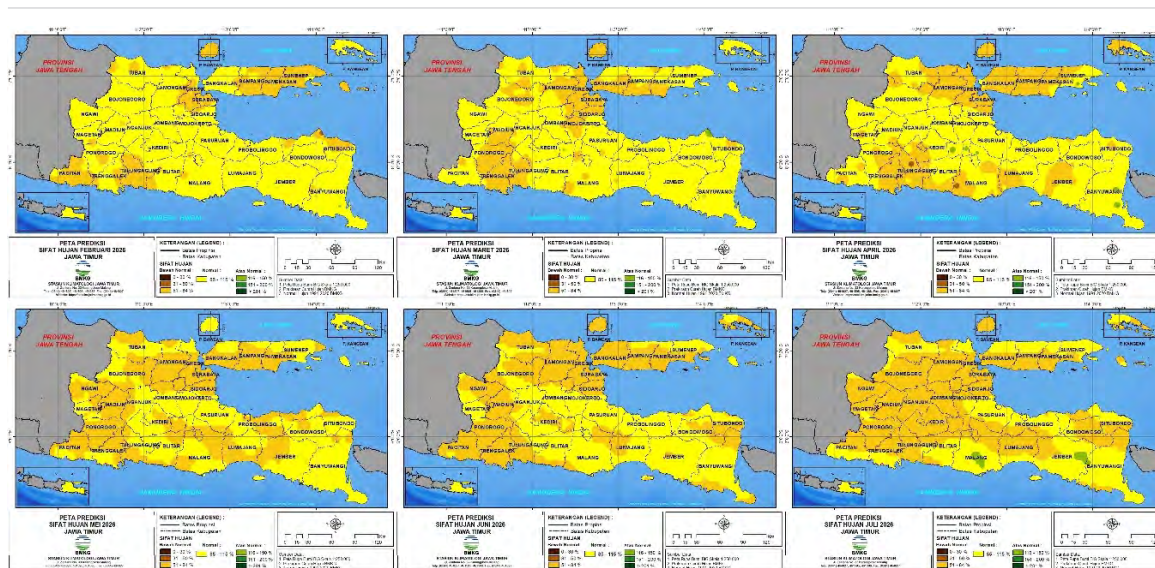
* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur pada prinsipnya mewilayahi seluruh Jawa Timur dan melaksanakan fungsi koordinasi terhadap Kantor Perwakilan BI Malang, BI Kediri dan BI Jember.

Gambar 8.1. Prediksi Sifat Hujan Bulanan Deterministik Indonesia Februari 2026 – Agustus 2026



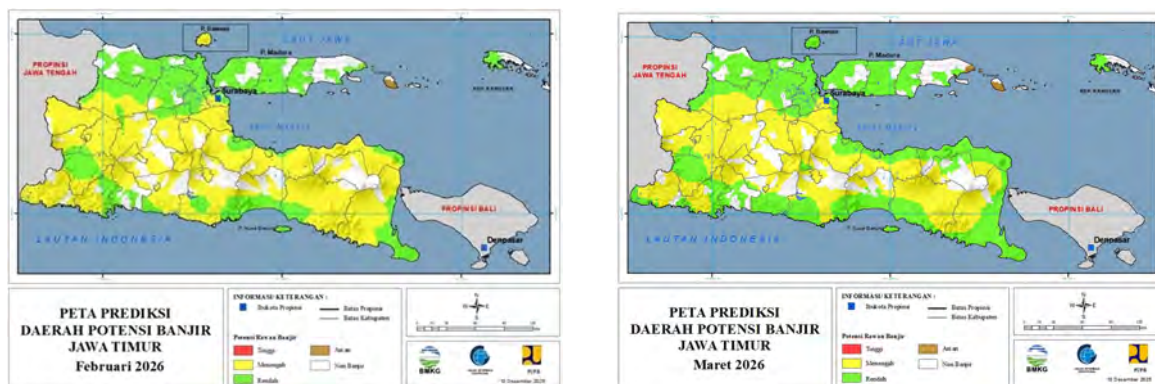
Sumber: BMKG, Februari 2026

Gambar 8.2. Prediksi Sifat Hujan Jawa Timur Bulan Februari – Juli 2026



Sumber: BMKG, Februari 2026

Gambar 8.3. Prediksi Daerah Potensi Banjir Indonesia Bulan Februari – Maret 2026



Sumber: BMKG, Februari 2026

Daftar Istilah

Administered price

Harga barang yang diatur oleh pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan setujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BI 7 Days Reverse Repo Rate

Suku bunga referensi kebijakan moneter dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur setiap bulannya.

BI-RTGS

Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, yang merupakan suatu penyelesaian kewajiban bayar-membayar (*settlement*) yang dilakukan secara *on-line* atau seketika untuk setiap instruksi transfer dana.

Bobot Inflasi

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka (deposito).

Ekspor dan Impor

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi.

Financing to Deposit Ratio (FDR) atau Loan to Deposit Ratio (LDR)

Rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, baik dalam Rupiah dan valas. Terminologi FDR untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.

Imported inflation

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh perkembangan harga di luar negeri (eksternal).

Indeks Ekspektasi Konsumen

Salah satu pembentuk IKK, indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang dengan skala 1 – 100.

Indeks Kondisi Ekonomi

Salah satu pembentuk IKK, indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dengan skala 1 – 100.

Indeks Keyakinan Konsumen (*Consumer Confidence*)

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang dengan skala 1 – 100.

Inflasi IHK

Kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode yang diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Inflasi Inti

Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen *volatile foods* dan *administered prices*.

Inflow

Uang yang diedarkan aliran masuk uang kartal ke Bank Indonesia.

Investasi

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi.

Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang sejenis, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement* (NPA)
- Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

Investasi

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi.

Loan to Deposit Ratio (LDR) atau Financing to Deposit Ratio (FDR)

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Terminologi FDR untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.

Loan to Funding Ratio (LFR)

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga dan surat berharga yang diterbitkan bank.

Liaison

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

mtm

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Net Inflow

Uang yang diedarkan *inflow* lebih besar dari *outflow*.

Non Performing Financing (NPF) atau Non Performing Loan (NPL)

Rasio pembiayaan atau kredit macet terhadap total penyaluran pembiayaan atau kredit oleh bank, baik dalam rupiah dan valas, Terminologi NPF dan pembiayaan untuk bank syariah, sedangkan NPL dan kredit untuk bank konvensional. Kriteria NPF atau NPL adalah (1) kurang lancar, (2) diragukan dan (3) macet.

Omzet

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

Outflow

Aliran keluar uang kartal dari Bank Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

qtq

Quarter to quarter. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Real Time Gross Settlement (RTGS)

Sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Sistem pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Volatile Food

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu khususnya komoditas bahan makanan.

yoy

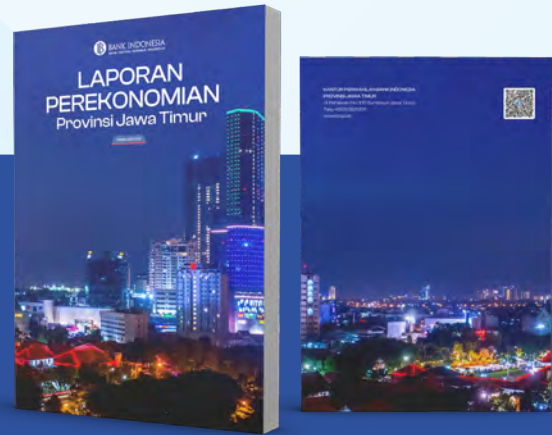
Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

Daftar Singkatan

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	PLN	Perusahaan Listrik Negara
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	PMA	Penanaman Modal Asing
BBM	Bahan Bakar Minyak	PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	PMTB	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal	PBBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah	qtq	<i>Quarter to quarter</i>
BPS	Badan Pusat Statistik	RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
BUKU	Bank Umum Kelompok Usaha	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
CIF	<i>Cost, Insurance and Freight</i>	RTGS	<i>Real Time Gross Settlement</i>
DAU	Dana Alokasi Umum	SBT	Saldo Bersih Tertimbang
DAK	Dana Alokasi Khusus	SISKAPERBAPO	Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok
DER	<i>Debt Equity Ratio</i>	SITC	<i>Standard International Trade Classification</i>
DOF	Derajat Otonomi Fiskal	SKDU	Survei Kegiatan Dunia Usaha
DPK	Dana Pihak Ketiga	SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
DSR	<i>Debt Service Ratio</i>	SPE	Survei Penjualan Eceran
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>	TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
FOB	<i>Free on Board</i>	TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
FTV	<i>Financing to Value</i>	TPK	Tingkat Penghunian Kamar
IHK	Indeks Harga Konsumen	TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
IKK	Indeks Keyakinan Konsumen	TTL	Tarif Tenaga Listrik
IPR	Indeks Penjualan Riil	UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
JISDOR	<i>Jakarta Interbank Spot Dollar Rate</i>	UTLE	Uang Tidak Layak Edar
KI	Kredit Investasi	yoy	<i>Year on year</i>
KK	Kredit Konsumsi		
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor		
KMK	Kredit Modal Kerja		
KPA	Kredit Pemilikan Apartemen		
KPR	Kredit Pemilikan Rumah		
LDR	<i>Loan to Deposit Ratio</i>		
LFR	<i>Loan to Funding Ratio</i>		
LNPRRT	Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga		
LTV	<i>Loan to Value</i>		
mtm	<i>Month to month</i>		
NPF	<i>Non Performing Financing</i>		
NPL	<i>Non Performing Loan</i>		
NTN	Nilai Tukar Nelayan		
NTP	Nilai Tukar Petani		
PAD	Pendapatan Asli Daerah		
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto		



Tim Penyusun



Pengarah	:	Ibrahim
Penanggung Jawab	:	Rifki Ismal
Koordinator Penyusun	:	Agung Budilaksono
Editor	:	Petrus Endria Effendhi
Tim Penulis	:	Imam Noegroho, Muhammad Hanif Rahmadyasa, Nur Qomariyah, Teuku Aldefa Angkasa Wangsa Banowo, Aisha Keyla Mazzetti, Shafa Salsabila, Mohammad Naufal Abdullah, Wahidatul Wardah Al Maulidiyah, Cahya Wulaningtyas, Alfrida Ista Anindya, Ayra Kandarsyah (Bank Indonesia Malang), Handoko (Bank Indonesia Kediri), Guntur Syafiqi (Bank Indonesia Jember)

Kontributor

Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah

Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Manajemen Intern



Link Survei LPP Jawa Timur
<https://tinyurl.com/Survei-LPP-Jatim>

**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Pahlawan No.105 Surabaya Jawa Timur

Telp. +62313520011

www.bi.go.id

